



ISBN 978-623-97802-1-0



DISKOMINFO
KALTIM

PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021



DISKOMINFO
KALTIM

PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2021**



DISKOMINFO
KALTIM

PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020





PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

ISBN : 978-623-97802-1-0

Ukuran Buku : 18 x 26 cm

Jumlah Halaman : xx + 265 halaman

Naskah:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Desain Cover dan Layout:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Ilustrator:

<https://www.freepik.com>

Diterbitkan dan Dicetak oleh:

© Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.



Tim Penyusun



Pengarah

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur



Penanggung jawab

Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur



Penulis dan Penyunting

M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si
Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom
Nazarruddin, S.Kom
Nadia Paramitha N, S.T



Pengolah Data

Untung Maryono, S.T., M.M
Ika Wahyuni, S.E
Hari Adam Suharto



Desain Sampul dan Tata Letak

Febri Irawan, S.E
Eka Indah Justisiani, S.I.Kom
Rizmalani Syawitri, S.Sos
Vebi Regina



Penerbit

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Redaksi

Bidang Statistik

Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Kelurahan Sungai Pinang Luar,
Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121.

Website : <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>

Email : diskominfo@kaltimprov.go.id

Telp/Fax: 0541-731963



Lambang dan Arti



Warna Hijau	: Kemakmuran, kesuburan
Warna Kuning Emas	: Keluhuran, keagungan
Warna Kuning	: Kejayaan
Warna Merah	: Keberanian
Warna Putih	: Kesucian
Warna Hitam	: Kesungguhan

Lambang perisai bersudut lima adalah alat pelindung dalam mencapai cita-cita revolusi 17 Agustus 1945. Bintang bersudut lima adalah Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulisan Kalimantan Timur adalah Provinsi Kalimantan Timur. Telabang, mandau dan sumpitan adalah kesiapsiagaan dan kemampuan. Lingkaran dengan untaian minyak dan damar adalah kekayaan alam. Lilitan rotan yang tak terputus-putus sebanyak 24 lilitan adalah kesatuan dan kesatuan serta saat terbentuknya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Januari 1957 (1+1+1+9+5+7). Jumlah delapan untaian minyak, delapan untaian damar, dan satu tetesan akhir adalah tanggal proklamasi kemerdekaan. (8+8+1=17). Untaian minyak dan damar masing-masing delapan tetesan adalah bulan proklamasi kemerdekaan. Empat titik terukir di ujung mandau dan lima lilitan pada ujung sumpitan adalah tahun proklamasi kemerdekaan (1945). Tulisan "ruhui rahayu" di atas guci berarti cita-cita dan tujuan rakyat Kalimantan Timur dalam mencapai masyarakat bahagia, adil dan makmur, aman tentram yang di ridhoi oleh Allah SWT.



**Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur**



Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

**Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur**



H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur**



H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si

Kata Pengantar

Buku Profil Data Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 merupakan salah satu media diseminasi data statistik sektoral Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Data dan Informasi yang dimuat dalam buku ini merupakan hasil kompilasi data statistik sektoral dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan instansi lain sampai dengan tahun 2020.

Buku ini berisi data statistik sektoral yang mencakup data dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Penataan Ruang dan Perum Rakyat, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan

UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data statistik sektoral yang disajikan. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan Buku Profil Data Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, dan dapat memberikan manfaat.

Samarinda, Juli 2021,

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan Timur

H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.



Daftar Isi

Tim Penyusun.....	iv
Lambang dan Arti.....	v
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar.....	xviii
WILAYAH DAN IKLIM KALIMANTAN TIMUR.....	1
Wilayah.....	2
Iklim	5
INSPEKTORAT.....	6
Profil Perangkat Daerah.....	7
Zona Integritas Provinsi Kaltim Tahun 2016 - 2020.....	10
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.....	18
Profil Perangkat Daerah.....	19
Aparatur Sipil Negara Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	20
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	28
Profil Perangkat Daerah.....	29
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	30
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32
Profil Perangkat Daerah.....	33
Bencana Alam Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	35
BADAN PENDAPATAN DAERAH	40
Profil Perangkat Daerah.....	41
Pajak Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	42
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	45



Profil Perangkat Daerah.....	46
Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	48
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	56
Profil Perangkat Daerah.....	57
Luas Wilayah dan Topografi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	60
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.....	63
Profil Perangkat Daerah.....	64
Produk Hukum Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	66
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.....	68
Profil Perangkat Daerah.....	69
Organisasi Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	69
BIRO PEMERINTAHAN, PERBATASAN, DAN OTONOMI DAERAH.....	72
Profil Perangkat Daerah.....	73
Perjanjian Kerjasama Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	73
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH.....	76
Profil Perangkat Daerah.....	77
Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	77
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.....	80
Profil Perangkat Daerah.....	81
Pertambangan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	82
DINAS KEHUTANAN.....	90
Profil Perangkat Daerah.....	91
Pelestarian Lingkungan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	92
DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	96
Profil Perangkat Daerah.....	97
Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	98
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	103
Profil Perangkat Daerah.....	104
Data Pos dan Telekomunikasi, Penyiaran Media Elektronik serta Surat Kabar.....	106

DINAS KESEHATAN.....	108
Profil Perangkat Daerah.....	109
Kesehatan Masyarakat, Derajat Kesehatan dan Angka Kesakitan serta Sarana dan Tenaga Kesehatan Pada Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	110
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	118
Profil Perangkat Daerah.....	119
Target Daerah Produksi Ikan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020n	120
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	126
Profil Perangkat Daerah.....	127
Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	128
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	133
Profil Perangkat Daerah.....	134
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	138
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	144
Profil Perangkat Daerah.....	145
Ketersediaan Pangan Per Kapita Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	147
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ...	154
Profil Perangkat Daerah.....	155
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PKK Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	157
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	161
Profil Perangkat Daerah.....	162
Penanaman Modal Asing Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	165
DINAS PERHUBUNGAN.....	171
Profil Perangkat Daerah.....	172
Transportasi Darat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	174
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	181
Profil Perangkat Daerah.....	182
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	185
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	188

Profil Perangkat Daerah.....	189
Jumlah Siswa Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	190
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	197
Profil Perangkat Daerah.....	198
Pernakan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	200
DINAS PERKEBUNAN.....	211
Profil Perangkat Daerah.....	212
Produk Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	213
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	220
Profil Perangkat Daerah.....	221
Koperasi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	222
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH.....	227
Profil Perangkat Daerah.....	228
Perpustakaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	230
DINAS SOSIAL.....	235
Profil Perangkat Daerah.....	236
Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	239
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.....	245
Profil Perangkat Daerah.....	246
Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	248
DINAS PARIWISATA	254
Profil Perangkat Daerah.....	255
Jumlah Wisatawan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	258
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	262
Profil Perangkat Daerah.....	263
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah	265
DAFTAR REFERENSI.....	268

Daftar Tabel

Tabel 1.	Data Zona Integritas Provinsi Kaltim Tahun 2016 - 2020.....	10
Tabel 2.	Data Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	12
Tabel 3.	Data Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	13
Tabel 4.	Data Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	21
Tabel 5.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan OPD Menurut Tingkat Pendidikan, Golongan, Struktural, Fungsional dan Pensiunan Pada Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	22
Tabel 6.	Data Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pada Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	30
Tabel 7.	Data Bencana Alam Yang Terjadi di Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	35
Tabel 8.	Data Frekuensi dan Kerusakan Kawasan Akibat Terjadi Bencana di Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	37
Tabel 9.	Data Pajak Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	42
Tabel 10.	Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	49
Tabel 11.	Data Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	52
Tabel 12.	Data Luas Wilayah dan Topografi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	60
Tabel 13.	Data Jumlah Produk Hukum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020.....	66
Tabel 14.	Data Organisasi Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	70

Tabel 15.	Data Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Daerah lain yang masih berlaku Pada Pemerintah Prov. Kaltim Tahun 2016-2020.....	74
Tabel 16.	Data Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	78
Tabel 17.	Data Luas Lahan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020.....	82
Tabel 18.	Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	82
Tabel 20.	Data Energi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020.....	83
Tabel 20.	Data Pelestarian Lingkungan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	92
Tabel 21.	Data Luas Lahan Dan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	93
Tabel 22.	Data Kawasan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	93
Tabel 23.	Data Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020.....	98
Tabel 25.	Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020.....	100
Tabel 26.	Data Jumlah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	100
Tabel 27.	Data Pos dan Telekomunikasi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	106
Tabel 27.	Data Kesehatan Masyarakat, Derajat Kesehatan dan Angka Kesakitan di Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	110
Tabel 28.	Data Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	112
Tabel 29.	Data Target Daerah Produksi Ikan, Perikanan Darat, Perikanan Laut dan Tingkat Ketersediaan Ikan Tahun 2016-2020	120
Tabel 30.	Data Lingkungan Hidup, Kasus Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, serta Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020.	128
Tabel 31.	Data Pelestarian Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Tahun 2016-2020	129
Tabel 32.	Data Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	138

Tabel 33.	Data Ketersediaan Pangan Per Kapita Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	147
Tabel 34.	Data Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat serta Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PKK Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	157
Tabel 35.	Data Jumlah Desa/Kelurahan, Profil Desa/kelurahan, Usaha Ekonomo Masyarakat dan Posyantek Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	158
Tabel 36.	Data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	165
Tabel 37.	Data Transportasi Darat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	174
Tabel 38.	Data Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020 ...	185
Tabel 39.	Data Jumlah Siswa, Rasio Guru dan Murid serta Angka Kelulusan Tahun 2016-2020	190
Tabel 40.	Data Peternakan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	200
Tabel 41.	Data Produk Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	213
Tabel 42.	Data Koperasi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	222
Tabel 43.	Data Jumlah Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	230
Tabel 44.	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	239
Tabel 45.	Data Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	248
Tabel 46.	Data Jumlah Kegiatan Pariwisata Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020	258
Tabel 48.	Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020.....	265

Daftar Gambar

Gambar 1.	Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Timur	3
Gambar 2.	Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur	4
Gambar 3.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Mengawal	9
Gambar 4.	Grafik Presentase Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP, Tahun 2016-2020	13
Gambar 5.	Grafik Persentase Capaian Kinerja SKPD Sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya, Tahun 2016-2020	14
Gambar 6.	Grafik Skor Rata-Rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD, Tahun 2016-2020	14
Gambar 7.	Grafik Skor Rata-Rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/ Kota, Tahun 2016-2020	15
Gambar 8.	Grafik Persentase LPPD Kabupaten atau Kota Yang Mendapatkan Nilai Sangat Tinggi, Tahun 2016-2020	15
Gambar 9.	Grafik Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai, Tahun 2016-2020	16
Gambar 10.	Grafik Persentase Kegiatan dan Laporan Hasil Pengawasan, Tahun 2016-2020	16
Gambar 11.	Grafik Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP, Tahun 2016-2020	17
Gambar 12.	Grafik Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP, Tahun 2016-2020	17
Gambar 13.	Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender), Tahun 2016-2020.	24
Gambar 14.	Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Golongan Pegawai, Tahun 2016-2020	25
Gambar 15.	Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Eselon Pegawai, Tahun 2016-2020	25
Gambar 16.	Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal, Tahun 2016-2020	26

Gambar 17. Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Tingkatan Diklatpim, Tahun 2016-2020.....	26
Gambar 18. Grafik Jumlah Pembinaan ASN/PNS Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Tahun 2016-2020.....	27
Gambar 19. Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Penempatan Pada Perangkat Daerah, Tahun 2016-2020	27
Gambar 20. Grafik Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan Indeks Demokrasi, Tahun 2016-2020	30
Gambar 21. Grafik Pembinaan Politik Daerah Berdasarkan Gender, Tahun 2016-2020	31
Gambar 22. Grafik Jumlah Ormas Berdasarkan Profesi dan Agama, Tahun 2016-2020	31
Gambar 23. Grafik Jumlah Kerusakan Kawasan Akibat Bencana, Tahun 2016-2020	38
Gambar 24. Grafik Jumlah Korban Akibat Bencana Alam, Tahun 2016-2020	39
Gambar 25. Grafik Jumlah Frekuensi Terjadinya Bencana, Tahun 2016-2020	39
Gambar 26. Grafik Perkembangan Jumlah Pajak Daerah, Tahun 2016-2020 (satuan Rp milyar)	43
Gambar 27. Grafik Perkembangan Retribusi Daerah, Tahun 2016-2020 (satuan Rp milyar).....	43
Gambar 28. Grafik Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Sumber Pajak, Tahun 2016-2020 (satuan Rp milyar).....	44
Gambar 29. Grafik Jumlah Retribusi Berdasarkan Jenis Retribusi, Tahun 2016-2020 (satuan Rp milyar)	44
Gambar 30. Grafik Jumlah Belanja Hibah, Tahun 2016-2019 (satuan Rp Juta)	53
Gambar 31. Grafik Jumlah Belanja Bantuan Sosial, Tahun 2016-2019 (satuan Rp Juta).....	53
Gambar 32. Grafik Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Tahun 2016-2020 (satuan Rp Juta)	54
Gambar 33. Grafik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa, Tahun 2016-2020 (satuan Rp Juta)	54

Gambar 34. Grafik Jumlah Belanja Tidak Terduga, Tahun 2016-2019 (satuan Rp Juta).....	55
Gambar 35. Grafik Jumlah Aset Sarana Prasarana Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020 (satuan unit)	55
Gambar 36. Grafik Luas Wilaya Dan Luas Pengelolaan Laut, Tahun 2016-2020 (satuan hektar/Ha)	61
Gambar 37. Grafik Luas Daratan dan Luas Perairan Darat, Tahun 2016-2020 (satuan hektar/Ha)	62
Gambar 38. Grafik Luas Ketinggian Daratan Atas Permukaan Laut, Tahun 2016-2020 (satuan hektar/Ha)	62
Gambar 39. Grafik Jumlah Produk Hukum Yang Terbit, Tahun 2016-2020 ...	66
Gambar 40. Grafik Perkembangan Jumlah Produk Hukum Yang Terbit Berdasarkan Jenis, Tahun 2016-2020	67
Gambar 41. Grafik Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan, Tahun 2016-2020	67
Gambar 42. Grafik Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, Tahun 2016-2020	71
Gambar 43. Grafik Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri, Tahun 2016-2019	74
Gambar 44. Grafik Jumlah Perjanjian Kerjasama Luar Negeri, Tahun 2016-2019	75
Gambar 45. Grafik Perkembangan Jumlah Asset Pada BUMD, Tahun 2016-2020 (satuan Rp Triliun)	79
Gambar 46. Grafik Perkembangan Jumlah Modal Pada BUMD, Tahun 2016-2020 (satuan Rp Triliun)	79
Gambar 47. Grafik Luas Lahan Pertambangan dan Penggalian (Ha).....	85
Gambar 48. Grafik Luas Lahan Energi dan Sumber Daya Mineral (Ha)	85
Gambar 49. Grafik Jumlah Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam	86
Gambar 50. Grafik Jumlah Produksi Batu Bara (ton).....	86
Gambar 51. Grafik Persentase Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu (%)	87
Gambar 52. Grafik Luas Lahan Reklamasi Batu Bara (Ha)	87
Gambar 53. Grafik Luas Lahan Penambangan Liar (Ha)	88
Gambar 54. Grafik Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pengguna Listrik dan Tidak Menggunakan Listrik	88



Gambar 55. Grafik Jangkauan Pelayanan Eneergi Listrik (%)	89
Gambar 56. Grafik Ketersediaan Sarana Penyedia Bahan Bakar (Unit)	89
Gambar 57. Grafik Luas Lahan dan Hutan Rehabilitasi, Kritis, Hutan Rakyat dan Hutan Kota (Ha).....	94
Gambar 58. Grafik Luas Lahan/Hutan Berdasarkan Peruntukan (Ha)	94
Gambar 59. Grafik Luas Lahan/Hutan Berdasarkan Penggunaan (Ha)	95
Gambar 60. Grafik Luas dan Jumlah Lokasi Kebakaran Hutan	95
Gambar 61. Grafik Jumlah Penduduk Laki dan Perempuan di Prov. Kaltim	101
Gambar 62. Grafik Jumlah Penduduk Kaltim Berdasarkan Tingkat Pendidikan	102
Gambar 63. Grafik Jumlah Korban dan Kasus Kekerasan Kepada Perempuan dan Anak.....	102
Gambar 64. Grafik Ibukota Kecamatan yang terlayani Jaringan Telekomunikasi	107
Gambar 65. Grafik Jumlah Stasiun TV, Radio dan Surat Kabar Lokal dan Nasional	107
Gambar 66. Grafik Jumlah Penderita Gangguan Jiwa dan Gizi Buruk	113
Gambar 67. Grafik Jumlah Balita dan Balita Gizi Buruk	114
Gambar 68. Grafik Jumlah Puskesmas	114
Gambar 69. Grafik Jumlah RSUD sesuai Tipe	115
Gambar 70. Grafik Jumlah Rumah Sakit sesuai Type	115
Gambar 71. Grafik Jumlah Dokter Umum, Gigi dan Spesialis.....	116
Gambar 72. Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan	116
Gambar 73. Grafik Jumlah Kasus Penyakit Menular dan Pnemonia.....	117
Gambar 74. Grafik Jumlah Tingkat Kesembuhan, Pengobatan dan Persentase Diare ditemukan dan ditangani.....	117
Gambar 75. Grafik Jumlah Target Daerah Produksi Ikan (Ton)	122
Gambar 76. Grafik Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTTP).....	123
Gambar 77. Grafik Jumlah Produksi Perikanan Data (Ton).....	123
Gambar 78. Grafik Jumlah Produksi Perikanan Dara (Rp Ribu).....	124
Gambar 79. Grafik Jumlah Nelayan Berdasarkan Rutinitas (Orang)	124
Gambar 80. Grafik Jumlah Armada/Kapan (Unit).....	125
Gambar 81. Grafik Tingkat Ketersediaan Ikan (Ton).....	125
Gambar 82. Grafik Jumlah Kawasan Lindung (Unit).....	130
Gambar 83. Grafik Jumlah Plasma Nutfah Yang Dilindungi (Jenis).....	130

Gambar 84.	Grafik Jumlah Kasus Terkait Lingkungan	131
Gambar 85.	Grafik Jumlah Pelestarian Lingkungan Hidup	131
Gambar 86.	Grafik Perkembangan Pengelolaan Sampah	132
Gambar 87.	Grafik Jumlah Prasaranan Pengolahan Air Limba (Unit)	132
Gambar 88.	Grafik Panjang Jalan Berdasarkan Kelas	140
Gambar 89.	Grafik	140
Gambar 90.	Grafik Panjang Jalan Negara/Provinsi/Kab/Kota Berdasarkan Kondisi	141
Gambar 91.	Grafik Panjang Jalan Nasional	141
Gambar 92.	Grafik Panjang Jalan Provinsi	142
Gambar 93.	Grafik Panjang Jalan Kabupaten/Kota	142
Gambar 94.	Grafik Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi	143
Gambar 95.	Grafik Panjang jalan yang memiliki fasilitas	143
Gambar 96.	Grafik Ketersediaan Pangan per Kapita	151
Gambar 97.	Grafik Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Petani	152
Gambar 98.	Grafik Jumlah Produksi Hortikultura	152
Gambar 99.	Grafik Jumlah Produksi Hortikultura	153
Gambar 100.	Grafik Jumlah Produksi Hortikultura	153
Gambar 101.	Grafik Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	159
Gambar 102.	Grafik Klasifikasi Status Desa	159
Gambar 103.	Grafik Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat (Unit)	160
Gambar 104.	Grafik Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) (unit)	160
Gambar 105.	Grafik Realisasi Jumlah Proyek PMA	167
Gambar 106.	Grafik Realisasi Nilai investasi PMA (US\$)	168
Gambar 107.	Grafik Realisasi Investasi PMA per Sektor (US\$)	168
Gambar 108.	Grafik	169
Gambar 109.	Grafik Realisasi Jumlah Proyek PMDN	169
Gambar 110.	Grafik Realisasi Investasi PMDN per Sektor (Rp juta)	170
Gambar 111.	Grafik Jumlah Penumpang Bus Tiba/Berangkat	177
Gambar 112.	Grafik Jumlah Terminal Berdasarkan Kelas	177
Gambar 113.	Grafik Jumlah Pemasangan Rambu	178
Gambar 114.	Grafik Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tiba/Berangkat	178
Gambar 115.	Grafik Jumlah Barang Yang Dibongkar/Dimuat Pelabuhan Laut	



Gambar 116.	Grafik Jumlah Penumpang dan Barang Transportasi Udara	179
Gambar 117.	Grafik Jumlah Pengguna Angkutan Umum.....	180
Gambar 118.	Grafik Jumlah Kegiatan Pemuda/Remaja, Jumlah Organisasi Olahraga, Fasilitas dan Klub Olahraga.....	186
Gambar 119.	Grafik Rasio Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga	187
Gambar 120.	Grafik Jumlah Atlet Berdasarkan Cabang Olahraga	187
Gambar 121.	Grafik Jumlah Siswa (PAUD,TK, SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK) Negeri dan Swasta	194
Gambar 122.	Grafik Jumlah Siswa SD Berdasarkan Status Kepemilikan	194
Gambar 123.	Grafik Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Status Kepemilikan ..	195
Gambar 124.	Grafik Jumlah Siswa SMA/SMK Berdasarkan Status Kepemilikan.....	195
Gambar 125.	Grafik Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang (Negeri dan Swasta) 196	
Gambar 126.	Grafik Ratio Jumlah Murid per Guru Berdasarkan Jenjang (Negeri dan Swasta).....	196
Gambar 127.	Grafik Jumlah Populasi Hewan Ternak.....	208
Gambar 128.	Grafik Jumlah Populasi Ternak Unggas	208
Gambar 129.	Grafik Jumlah Sumber Daya Sosial Peternakan	209
Gambar 130.	Grafik Jumlah Produksi Daging Unggas	209
Gambar 131.	Grafik Jumlah Produksi Telur Unggas	210
Gambar 132.	Grafik Jumlah Konsumsi Daging Unggas	210
Gambar 133.	Grafik Luas Area Tanam Komoditi Perkebunan (Ha).....	217
Gambar 134.	Grafik Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton).....	217
Gambar 135.	Grafik Jumlah Produktivitas Perkebunan (Kw/Ha).....	218
Gambar 136.	Grafik Jumlah Produksi CPO (ton).....	218
Gambar 137.	Grafik Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	219
Gambar 138.	Grafik Jumlah Penerbitan Izin Hak Pengusahaan Perkebunan.	219
Gambar 139.	Grafik Jumlah Koperasi dengan Status Aktif/Pasif (Unit)	223
Gambar 140.	Grafik Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin	224
Gambar 141.	Grafik Jumlah RAT, KUD dan Non KUD (unit)	224
Gambar 142.	Grafik Persentase Koperasi dengan Status Aktif.....	225
Gambar 143.	Grafik Jumlah Koperasi Berdasarkan Bentuk Keanggotaan (unit)	



Gambar 144. Grafik Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha (unit).....	226
Gambar 145. Grafik Jumlah Koperasi Berdasarkan Prinsip Keuangan (unit)	226
Gambar 146. Grafik Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Lokasi.....	232
Gambar 147. Grafik Jumlah Peminjam dan Buku Yang Dipinjam.....	233
Gambar 148. Grafik Jumlah Koleksi Judul Buku dan Ketersediaan Buku	233
Gambar 149. Grafik Persentase Pengelolaan Secara Baku dan Jumlah SDM Arsiparis	234
Gambar 150. Grafik Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberian Bantuan	242
Gambar 151. Grafik Jumlah Panti Sosial Berdasarkan Peruntukannya	242
Gambar 152. Grafik Jumlah Anak Yang di Asuh berdasarkan Status Lembaga	243
Gambar 153. Grafik Jumlah Orang Penerima bantuan Sosial Berdasarkan Status Fisik/Usia.....	243
Gambar 154. Grafik Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.....	244
Gambar 155. Grafik Jumlah Pencari Kerja, Penempatan dan Belum Penempatan	250
Gambar 156. Grafik Persentase Pencari Kerja Ditempatkan	250
Gambar 157. Grafik Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Gender.....	251
Gambar 158. Grafik Jumlah Kasus dan Orang yang di PHK.....	251
Gambar 159. Grafik Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar di BPJS	252
Gambar 160. Grafik Jumlah Peserta Pelatihan BLK dan Jumlah Peserta Yang di Tempatkan.....	252
Gambar 161. Grafik Jumlah Perselisihan Buruh dengan Pengusaha dan Jumlah Penyelesaian Perselisihan.....	253
Gambar 162. Grafik Jumlah Wisatawan	259
Gambar 163. Grafik Jumlah Hotel Berdasarkan Bintang/Non Bintang.....	260
Gambar 164. Grafik Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan	260
Gambar 165. Grafik Jumlah Perusahaan/Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata 261	
Gambar 166. Grafik Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbindang dan Berdasarkan Gender	261
Gambar 167. Grafik Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja.....	266
Gambar 168. Grafik Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat.....	266

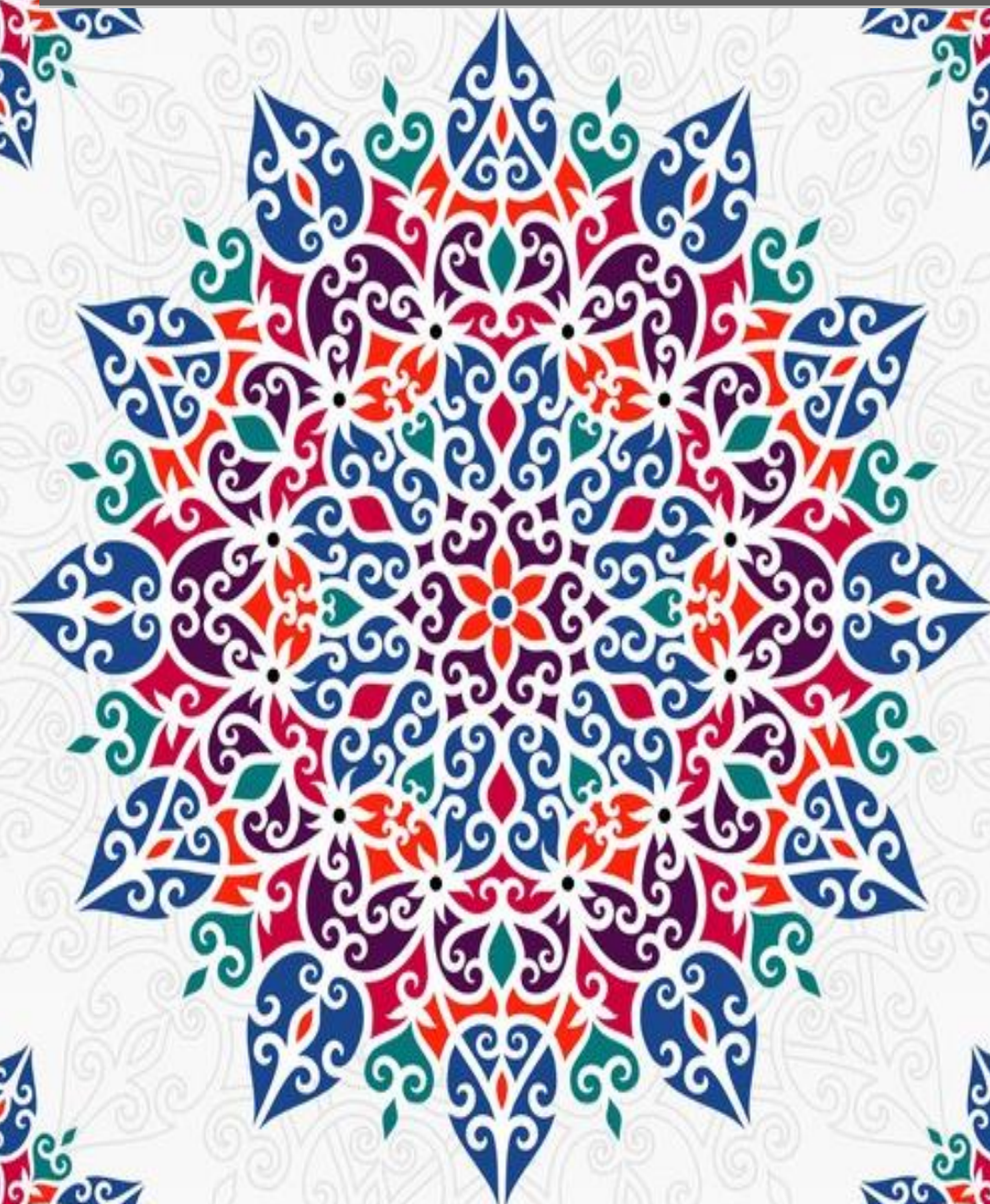
Gambar 169. Grafik Jumlah Kegiatan Patroli Satpo PP dan Jumlah Pos Siskamling 267

Gambar 170. Grafik Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)..... 267



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

WILAYAH DAN IKLIM KALIMANTAN TIMUR



BORNEO
KALIMANTAN ORNAMENT



Wilayah

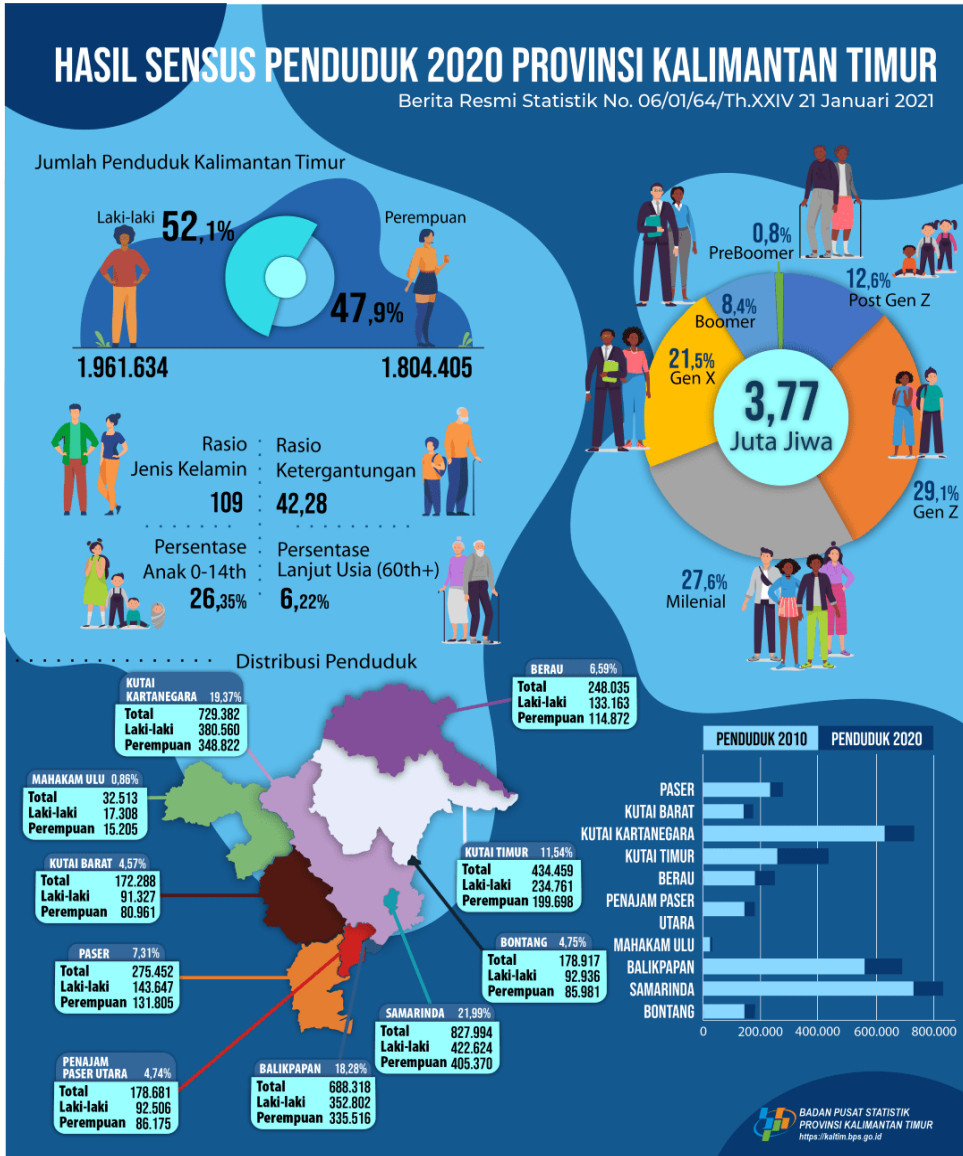
Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas kedua setelah Papua, memiliki potensi sumber daya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor keluar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya.

Secara administratif Provinsi ini memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah Timur berbatasan dengan sebagian (12 Mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan.

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi. Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk dalam kemiringan diatas 40 persen persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dimana sungai menjadi salah satu sarana angkutan utama di



Sumber: BPS Kaltim

Gambar 2. Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya berdasarkan hasil Sensus Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 terjadi penambahan penduduk dimana jumlah laki-laki sebanyak 1.961.634 jiwa (52,1 persen) dan jumlah perempuan menjadi 1.804.405 jiwa (47,9 persen) sehingga total penduduk di tahun 2020 menjadi 3.766.039 jiwa.



Iklim

Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah beriklim tropis yang mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April.

Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang.

Suhu udara tertinggi di wilayah Stasiun Samarinda sebesar 35,8°C pada bulan Maret dan Desember sedangkan suhu terendah 23,2°C pada bulan Januari. Kelembaban udara tertinggi di bulan Juni dan September sebesar 97,0% dan terendahnya 39,0% pada bulan Maret dan September. Kecepatan angin terbesar terjadi di bulan April sebesar 12,86 m/detik. Curah hujan terbanyak selama tahun 2020 adalah 282,50 mm dengan 26 hari hujan, dimana intensitas terbesar terjadi di bulan September. Sedangkan curah hujan terendah di bulan Februari yang mencapai 91,8 mm. Suhu udara tertinggi di wilayah Stasiun Balikpapan sebesar 34°C pada bulan Maret dan terendahnya 22,10°C pada bulan Agustus.

Kelembaban udara tertinggi 100,0% pada semua bulan dan terendahnya 39,0% pada bulan Juli. Kecepatan angin maximum sebesar 11,32 m/detik di bulan Desember. Curah hujan maksimum sebesar 533,70 mm dengan rata-rata 29 hari hujan. Intensitas terendah terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan mencapai 158,10 mm. Suhu udara tertinggi di wilayah Stasiun Tanjung Redeb sebesar 35,80°C pada bulan Agustus dan September dan terendahnya 21,6°C pada bulan Januari dan Maret.

Rata-rata kelembaban udara tertinggi 100,0% pada semua bulan dan terendahnya 42,0% pada bulan November. Maximum kecepatan angin 12,86 di bulan Juni. Curah hujan terbanyak selama 2020 selama sebesar 491,9 mm dengan rata-rata 22 hari hujan, sedangkan intensitas curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan curah hujan mencapai 91,0 mm.



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

INSPEKTORAT





Profil Perangkat Daerah

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan institusi unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional”, memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun Aparat Pengawasan Eksternal.
3. Meningkatkan pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga pengawasan, maka tujuan yang akan ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi adalah

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan.
3. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah.

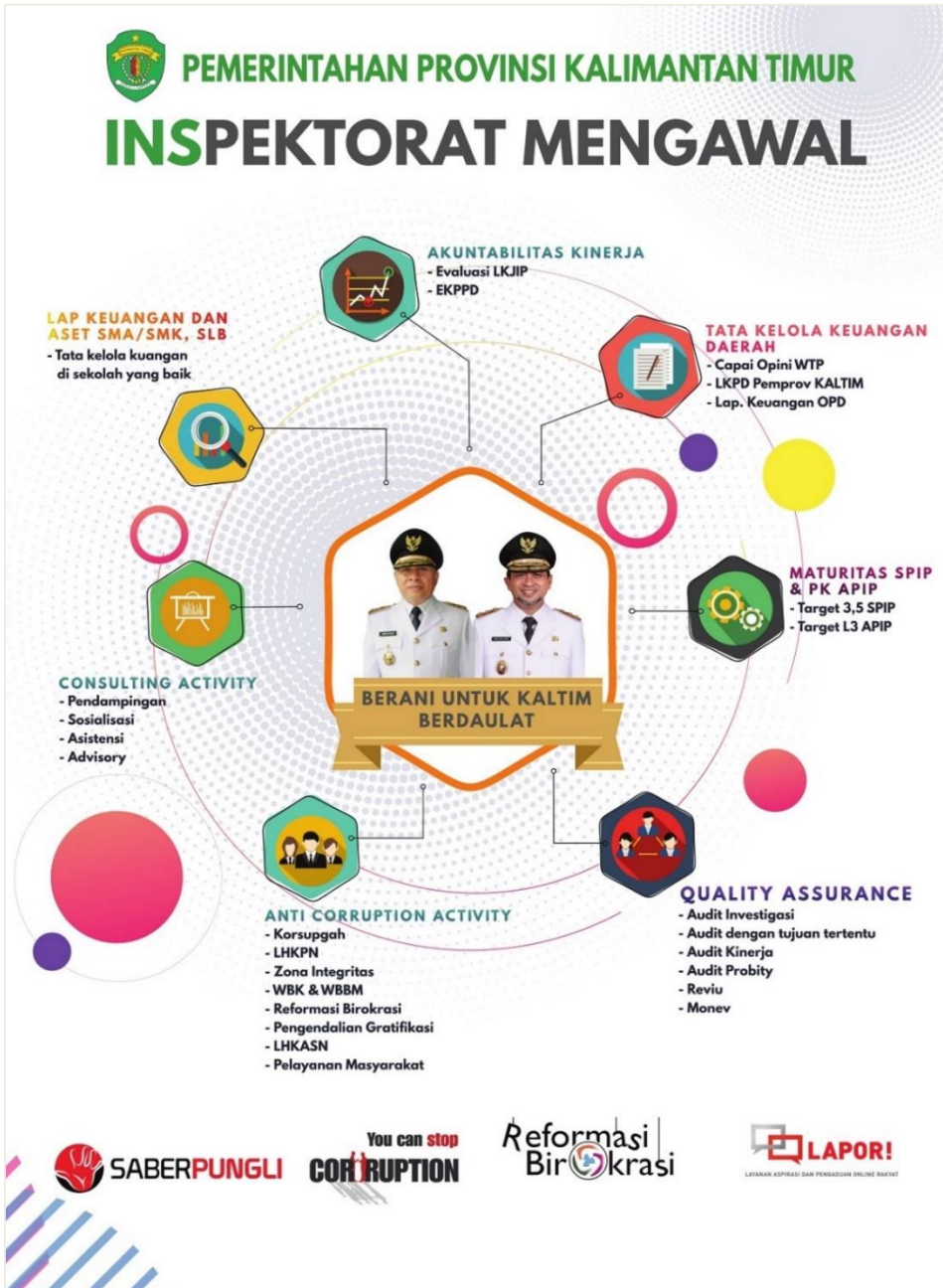
Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional, Kompeten dan Berintegritas.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
5. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
6. Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.
7. Terlaksananya Penarapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengawasan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten serta Kota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Gambar 3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Mengawal



Zona Integritas Provinsi Kaltim Tahun 2016 - 2020

Penjelasan tabel 1 adalah bahwa jumlah SKPD atau OPD/PD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim, Presentase Kab/Kota yang memperoleh opini WTP, Aparatur Pengawasan yang bersertifikat, Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya, Skor Rata-rata Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, Skor Rata-rata hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota di Kaltim, Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi, Cakupan Pengawasan yang akan dicapai, Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan, Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD, Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang terbit tepat waktu, Indeks Persepsi Korupsi, dan Kasus KKN. Kemudian pada tabel 2 menjelaskan data terkait jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh BPKP dan APIP pada SKPD/OPD/PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020, selanjutnya pada tabel 3 menjelaskan data terkait jumlah rekomendasi dari tindakan lanjut hasil pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Data Zona Integritas Provinsi Kaltim Tahun 2016 - 2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan	Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	6
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	2	1	2	1	1	SKPD	1 OPD yaitu RSUD Kanujoso sebagai WBK, untuk tahun 2021 ini masih dalam proses Evaluasi oleh Tim Intenal (Inspektorat Daerah)
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	4	4	4	4	4	Opini	Capaian Opini atas LKPD Pemprov Kaltim WTP
Presentase Kab/Kota yang memperoleh opini WTP	80	80	80	90	100	%	9 Pemda Kab/Kota telah mendapat WTP dan 1 Kab mendapat Opini WDP



Deskripsi Data	Tahun					Satuan	Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	6
Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	34	33	33	33	47	orang	Auditor ada 55 orang
Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	85	95	96,82	98,09	70,40	%	Posisi ini masih per 31 Mei 2021
Skor Rata-rata Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	66	61,89	62,96	62,69	66,32	%	Nilai rata-rata capaian LKjIP/SAKIP OPD adalah 68,32 dengan Katagori B.
Skor Rata-rata hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota	60	51,82	51	63,85	63,85	%	Nilai ini masih sementara, karena menunggu hasil validasi dari Kementerian PAN-RB
Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi	100	55,56	55,56	80	60	%	Evaluasi akan dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Juli 2021 dan angka capaian ini Dari hasil laporan evaluasi terhadap 10 Kab/Kota, terdapat 6 Kab/Kota dengan nilai Sangat Tinggi dan 4 Kab/Kota dengan nilai Tinggi. Kab/Kota yang Sangat Tinggi: Samarinda, Bontang, Berau, Balikpapan, PPU dan Kukar. Sedangkan yang Tinggi: Kutim,



Deskripsi Data	Tahun					Satuan	Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	6
							Kubar, Paser dan Mahulu
Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	95	95	75	90	99	%	Cakupan pada tahun 2021, posisi pada bulan Mei 2021
Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	100	100	75	90	100	%	Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sudah sesuai PKPT 2021 per 31 Mei 2021
Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD	2	2	2	2	3	Level	Tahun 2021 sudah dicapai pada Level 3
Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang terbit tepat waktu	95	82	100	75	90	%	Posisi per 31 Mei 2021
Indeks Persepsi Korupsi	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	Skor	Angka ini masih sama tahun lalu, karena masih menunggu hasil survey.
Kasus KKN	0	0	0	0	0	Kasus	Sampai dengan per 31 Mei 2021 belum ada kasus KKN

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

Tabel 2. Data Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Temuan hasil pemeriksaan BPK	41	31	11	16	16	temuan
Temuan hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	211	282	420	164	164	temuan
Jumlah	252	313	431	65	180	temuan

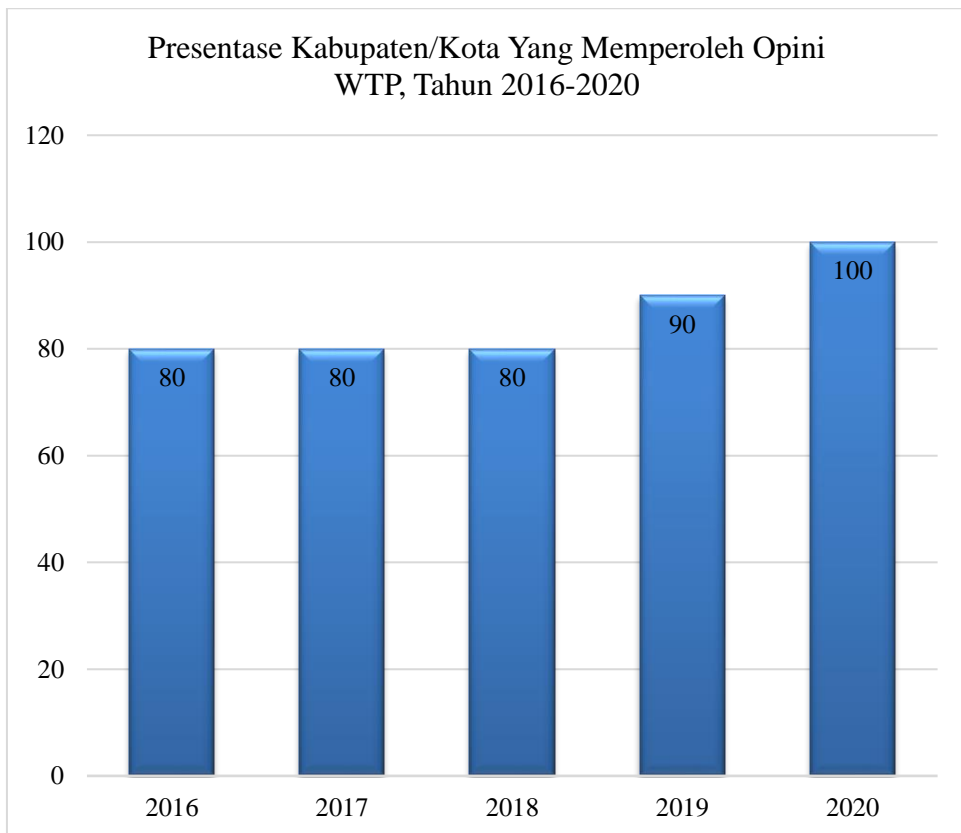
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



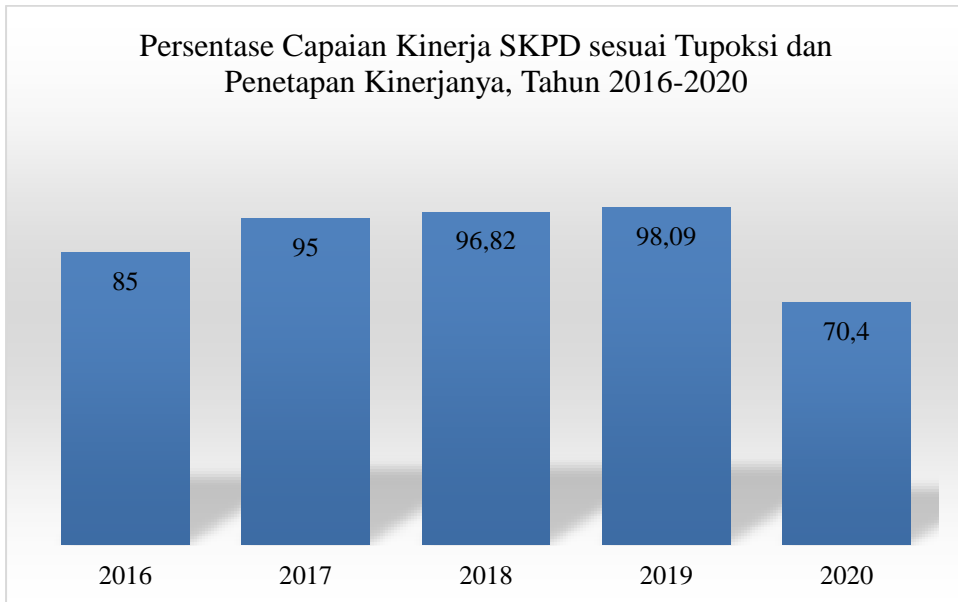
Tabel 3. Data Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Tindakan lanjut hasil pemeriksaan BPK	60	26	8	31	13	rekomendasi
Tindakan lanjut hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	330	226	483	78	170	rekomendasi
Jumlah	390	252	492	109	183	rekomendasi

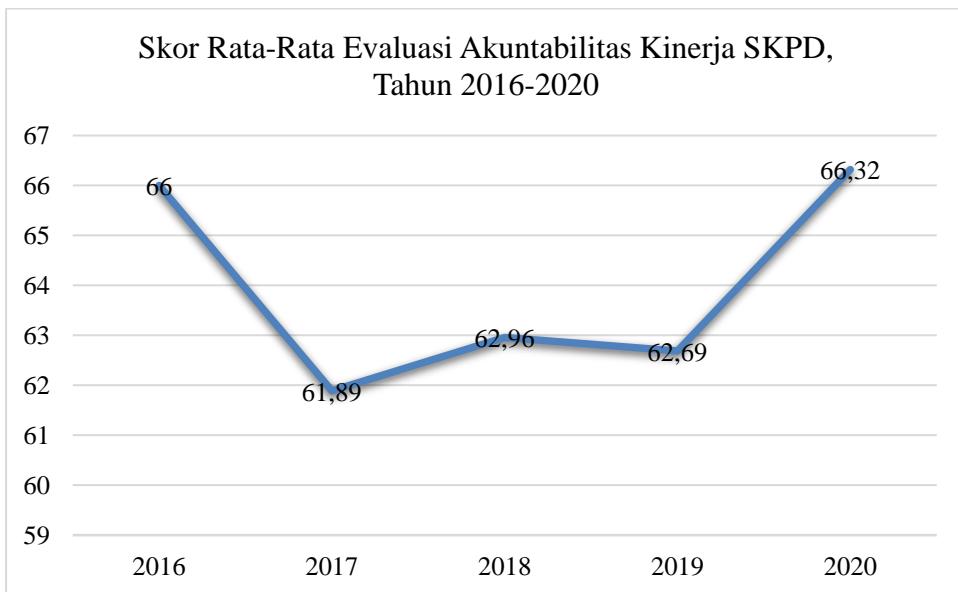
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



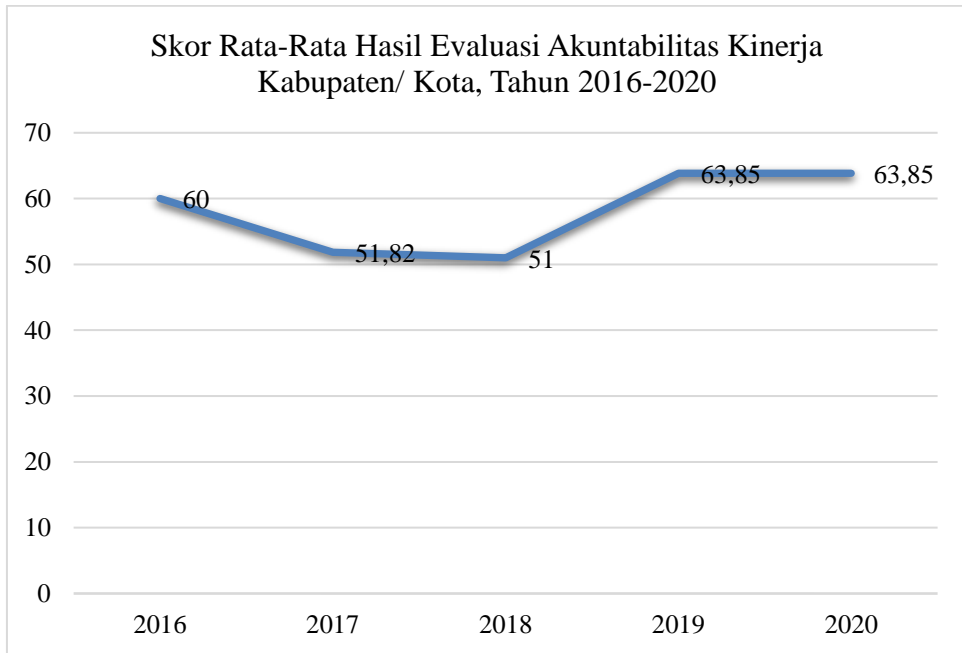
Gambar 4. Grafik Presentase Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP, Tahun 2016-2020



Gambar 5. Grafik Persentase Capaian Kinerja SKPD Sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya, Tahun 2016-2020



Gambar 6. Grafik Skor Rata-Rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD, Tahun 2016-2020



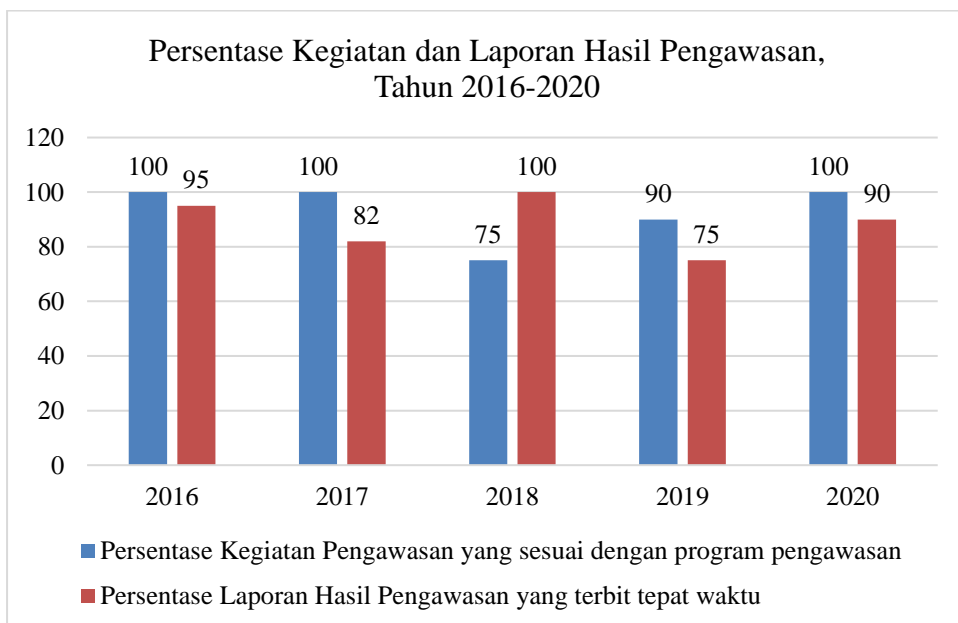
Gambar 7. Grafik Skor Rata-Rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/ Kota, Tahun 2016-2020



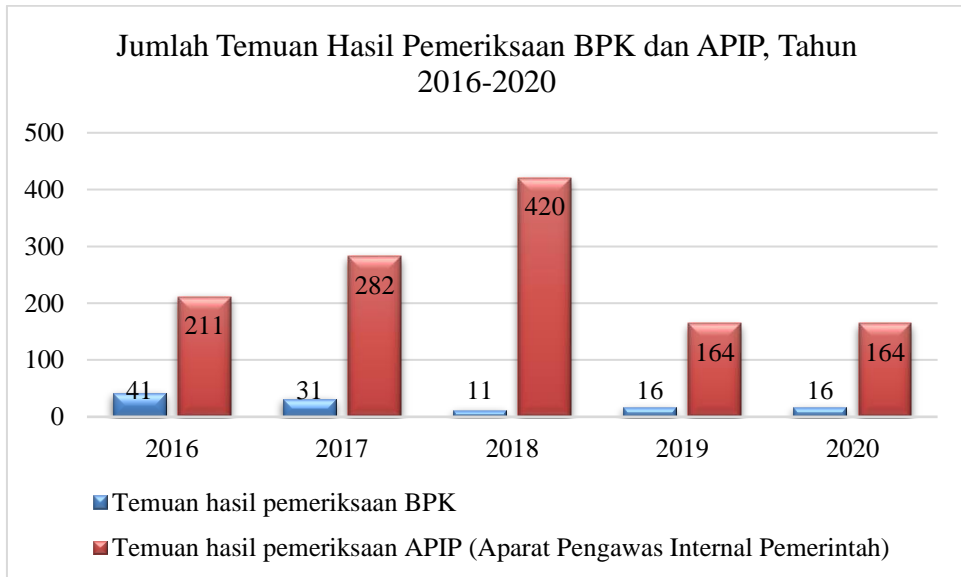
Gambar 8. Grafik Persentase LPPD Kabupaten atau Kota Yang Mendapatkan Nilai Sangat Tinggi, Tahun 2016-2020



Gambar 9. Grafik Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai, Tahun 2016-2020



Gambar 10. Grafik Persentase Kegiatan dan Laporan Hasil Pengawasan, Tahun 2016-2020



Gambar 11. Grafik Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP, Tahun 2016-2020



Gambar 12. Grafik Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP, Tahun 2016-2020



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH





Profil Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negeri (ASN) dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dasar Hukum Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Visi yakni Terwujudnya sumber daya aparatur daerah yang profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan Misi yaitu:

1. Mewujudkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah di Kalimantan Timur;
3. Menata kuantitas sumber daya aparatur daerah di Kalimantan Timur secara efektif dan efisien.

Aparatur Sipil Negara Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Uraian dari data Aparatur Sipil Negara, Jumlah PNS Berdasarkan jenis kelamin laki-laki, jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin perempuan, jumlah PNS berdasarkan golongan I, jumlah PNS berdasarkan golongan II, jumlah PNS berdasarkan golongan III, jumlah PNS berdasarkan golongan IV, jumlah PNS berdasarkan jumlah pejabat struktural Eselon I, jumlah PNS berdasarkan jumlah pejabat struktural eselon II, jumlah PNS berdasarkan jumlah pejabat struktural eselon III, jumlah PNS berdasarkan jumlah pejabat struktural eselon IV, jumlah PNS berdasarkan jumlah staf berdasarkan golongan I, jumlah PNS berdasarkan jumlah staf berdasarkan golongan II, jumlah PNS berdasarkan jumlah staf berdasarkan golongan III, jumlah PNS berdasarkan jumlah staf berdasarkan golongan IV.

Berikut pada tabel 4 menginformasikan berupa data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tabel 5 menginformasikan berupa data jumlah ASN berdasarkan OPD menurut tingkat pendidikan, golongan, struktural, fungsional dan pensiunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut:



Tabel 4. Data Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kaltim
Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	6525	11566	11166	11076	10621	Orang
1). Laki - Laki	3956	6378	6088	5974	5673	Orang
2). Perempuan	2569	5188	5078	5102	4948	Orang
2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	6525	11566	11166	11076	10621	Orang
1). Golongan I	246	236	176	162	153	Orang
2). Golongan II	1744	2005	1905	1802	1695	Orang
3). Golongan III	3718	6691	1905	6549	6231	Orang
4). Golongan IV	817	2634	2586	2563	2542	Orang
3. Jumlah Pejabat Struktural	1007	1006	966	947	983	Orang
1). Eselon I	1	1	0	0	1	Orang
2). Eselon II	55	54	48	42	47	Orang
3). Eselon III	260	239	240	252	248	Orang
4). Eselon IV	691	712	678	653	687	Orang
4. Jumlah Staf Berdasarkan Golongan	5518	5575	10200	10129	9638	Orang
1). Golongan I	246	236	176	162	153	Orang
2). Golongan II	1744	1826	1905	1802	1695	Orang
3). Golongan III	3249	3094	6073	6142	5784	Orang
4). Golongan IV	279	419	2046	2023	2006	Orang
5. Jumlah Pegawai Provinsi berdasarkan Tingkat Pendidikan	6525	11566	11166	11076	10621	Orang
1). Tamat SD atau sederajat	156	170	166	132	111	Orang
2). SMP dan sederajat	221	257	236	176	175	Orang
3). SMA dan sederajat	2086	2480	2356	2198	2001	Orang
4). Diploma	1068	1517	1366	1315	1262	Orang
5). Strata 1	2130	6008	5742	6078	5911	Orang
6). Strata 2	850	1120	1286	1170	1150	Orang
7). Strata 3	14	14	14	7	11	Orang
6. Jumlah Pembinaan ASN	46	40	45	692	241	Orang
1). Diklatpim Tingkat IV	19	0	0	30	0	Orang
2). Diklatpim Tingkat III	0	16	7	1	83	Orang
3). Diklatpim Tingkat II	4	0	7	10	18	Orang
4). Diklatpim Tingkat I	0	0	0	1	9	Orang



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5). Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas sumber daya Aparatur	23	24	31	650	131	Orang

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan OPD Menurut Tingkat Pendidikan, Golongan, Struktural, Fungsional dan Pensiunan Pada Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Biro	520	390	366	389	372	Orang
1). Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	520	390	366	389	372	Orang
1. Tamat SD atau sederajat	19	18	17	15	99	Orang
2. SMP dan Sederajat	19	12	13	10	1	Orang
3. SMA dan Sederajat	155	114	108	111	109	Orang
4. Diploma	36	20	24	22	24	Orang
5. Strata 1	205	152	135	156	145	Orang
6. Strata 2	82	71	68	75	75	Orang
7. Strata 3	4	3	1	0	0	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	520	390	366	389	372	Orang
1. Golongan I	18	14	12	12	11	Orang
2. Golongan II	125	101	96	88	82	Orang
3. Golongan III	290	200	190	221	213	Orang
4. Golongan IV	87	75	68	68	66	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural	138	118	116	116	113	Orang
1. Eselon I	1	1	0	0	1	Orang
2. Eselon II	16	16	14	14	14	Orang
3. Eselon III	33	22	24	24	23	Orang
4. Eselon IV	88	79	78	78	75	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	0	5	17	7	21	Orang
5). Jumlah Pensiunan	n/a	17	17	12	19	Orang
2. Badan	1183	848	800	724	659	Orang
1). Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	1183	848	800	724	659	Orang
1. Tamat SD atau sederajat	26	31	15	15	17	Orang
2. SMP dan sederajat	28	22	16	11	17	Orang
3. SMA dan sederajat	349	246	245	236	205	Orang
4. Diploma	80	43	52	57	59	Orang
5. Strata 1	482	354	319	269	234	Orang

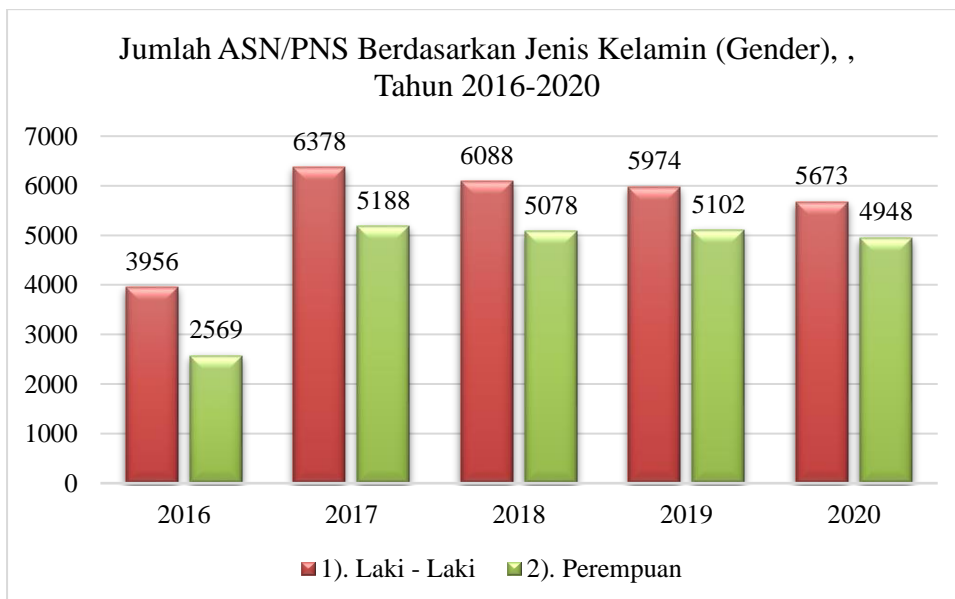


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6. Strata 2	213	148	147	133	124	Orang
7. Strata 3	5	4	6	3	3	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	1183	848	800	724	659	Orang
1. Golongan I	36	29	21	19	17	Orang
2. Golongan II	291	197	180	173	163	Orang
3. Golongan III	666	493	463	412	371	Orang
4. Golongan IV	190	129	136	120	108	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural	269	190	186	175	166	Orang
1. Eselon I	0	0	0	0	0	Orang
2. Eselon II	18	9	9	6	7	Orang
3. Eselon III	77	51	48	49	43	Orang
4. Eselon IV	174	130	129	120	116	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	30	56	93	45	46	Orang
5). Jumlah Pensiunan	n/a	40	32	26	60	Orang
3. Dinas	3131	8455	8172	8152	7839	Orang
1). Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3131	8455	8172	8152	7839	Orang
1. Tamat SD atau sederajat	87	94	102	76	65	Orang
2. SMP dan sederajat	123	158	146	104	106	Orang
3. SMA dan sederajat	1215	1650	1570	1485	1355	Orang
4. Diploma	190	463	548	485	438	Orang
5. Strata I	1127	5372	4915	5236	5118	Orang
6. Strata 2	284	711	886	763	750	Orang
7. Strata 3	5	7	5	3	7	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	3131	8455	8172	8292	7839	Orang
1. Golongan I	146	147	107	99	95	Orang
2. Golongan II	786	1143	1108	1094	1045	Orang
3. Golongan III	1844	4940	4784	4799	4566	Orang
4. Golongan IV	360	2225	2173	2160	2133	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural	530	592	555	563	614	Orang
1. Eselon I	0	0	0	0	0	Orang
2. Eselon II	16	21	18	17	20	Orang
3. Eselon III	128	134	132	144	151	Orang
4. Eselon IV	386	437	405	402	443	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	n/a	4072	4805	3802	3495	Orang
5). Jumlah Pensiunan	n/a	270	238	221	306	Orang
4. Rumah Sakit/Lembaga	1691	1714	1828	1811	1751	Orang
1). Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	1691	1714	1828	1811	1751	Orang
1. Tamat SD atau sederajat	23	22	32	26	20	Orang
2. SMP dan sederajat	52	57	61	51	42	Orang

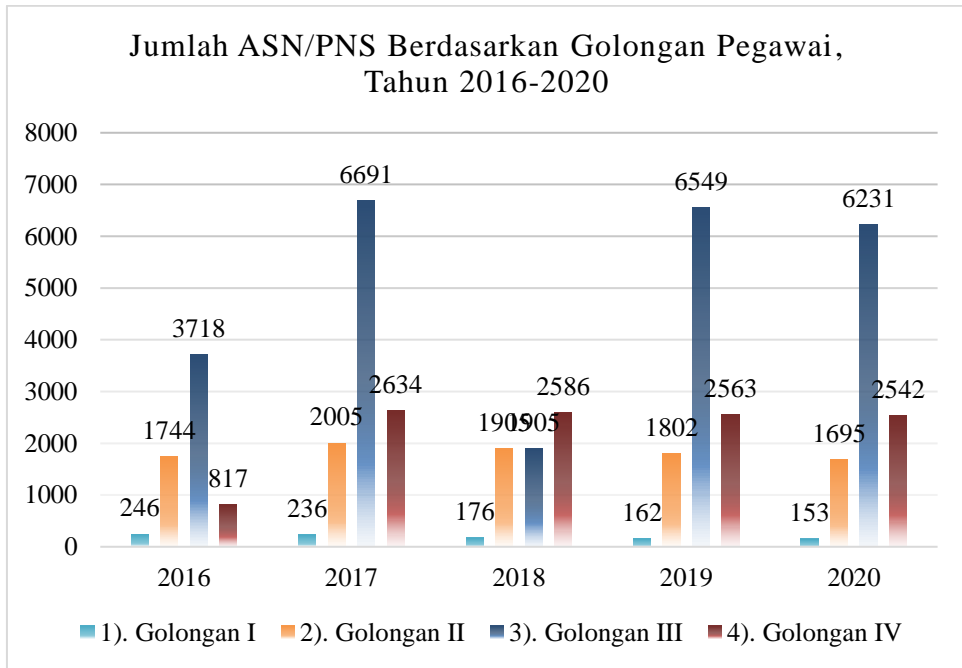


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3. SMA dan sederajat	367	430	433	366	332	Orang
4. Diploma	762	585	742	751	741	Orang
5. Strata 1	316	440	234	417	413	Orang
6. Strata 2	171	180	77	199	202	Orang
7. Strata 3	0	0	1	1	1	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	1691	1714	1828	1811	1751	Orang
1. Golongan I	46	41	36	32	30	Orang
2. Golongan II	547	530	521	447	404	Orang
3. Golongan III	918	952	1062	1117	1082	Orang
4. Golongan IV	180	191	209	215	235	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural	70	92	109	93	88	Orang
1. Eselon I	0	0	0	0	0	Orang
2. Eselon II	5	7	7	5	6	Orang
3. Eselon III	22	27	36	35	30	Orang
4. Eselon IV	43	58	66	53	52	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	n/a	786	1151	1042	1104	Orang
5). Jumlah Pensiunan	n/a	39	32	22	40	Orang

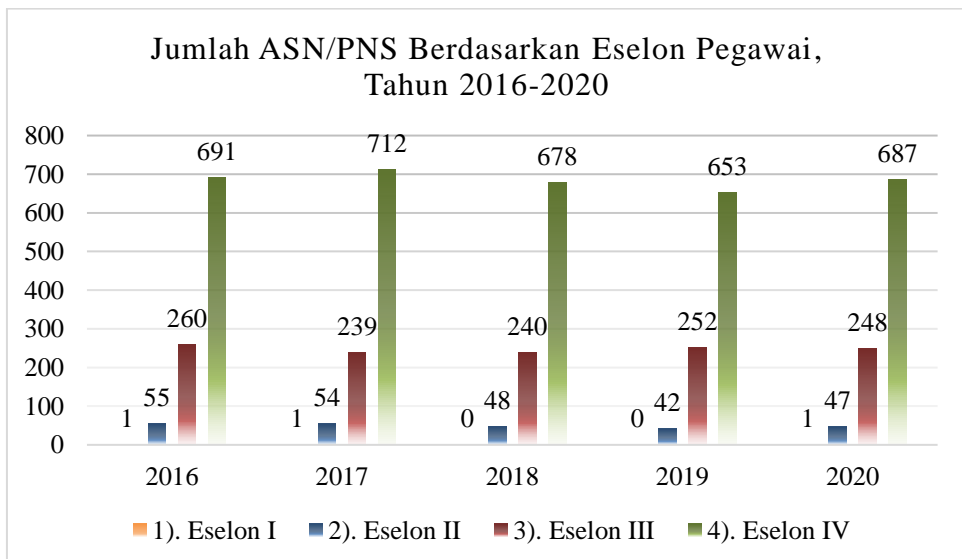
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



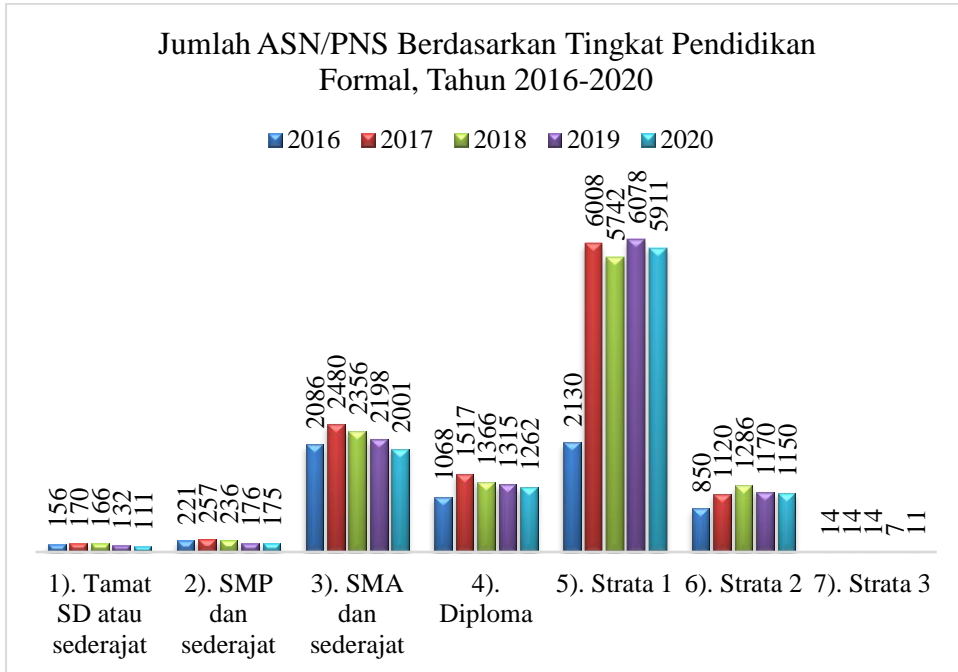
Gambar 13. Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender), Tahun 2016-2020.



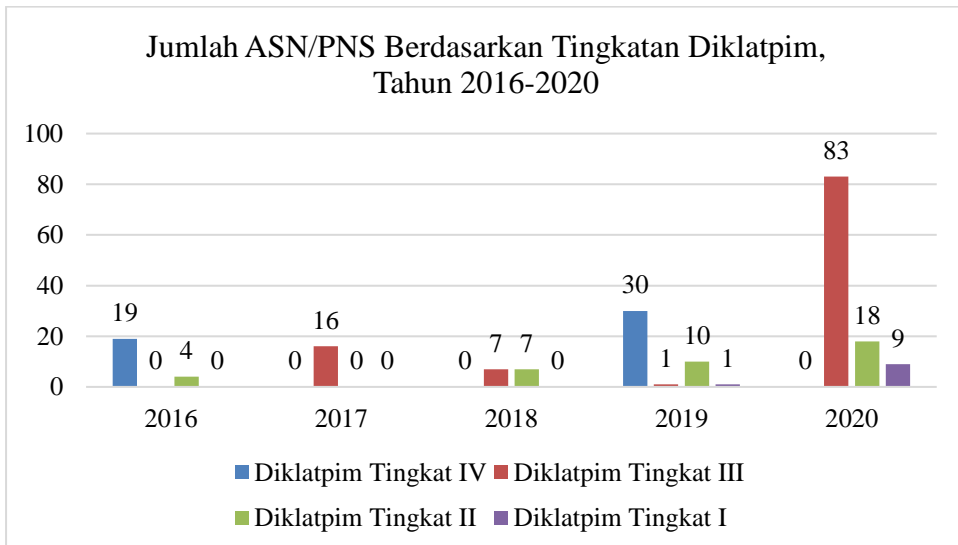
Gambar 14. Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Golongan Pegawai, Tahun 2016-2020



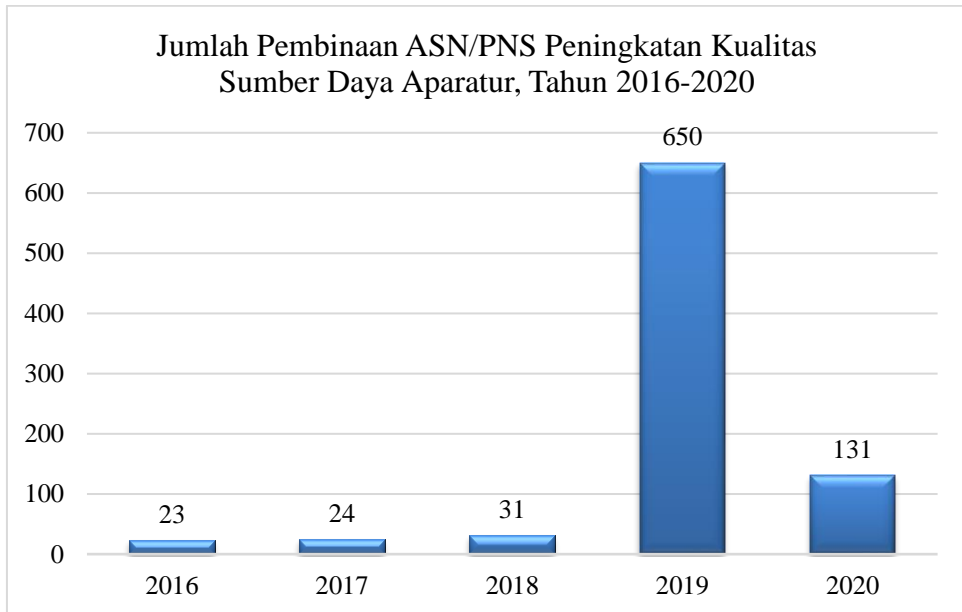
Gambar 15. Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Eselon Pegawai, Tahun 2016-2020



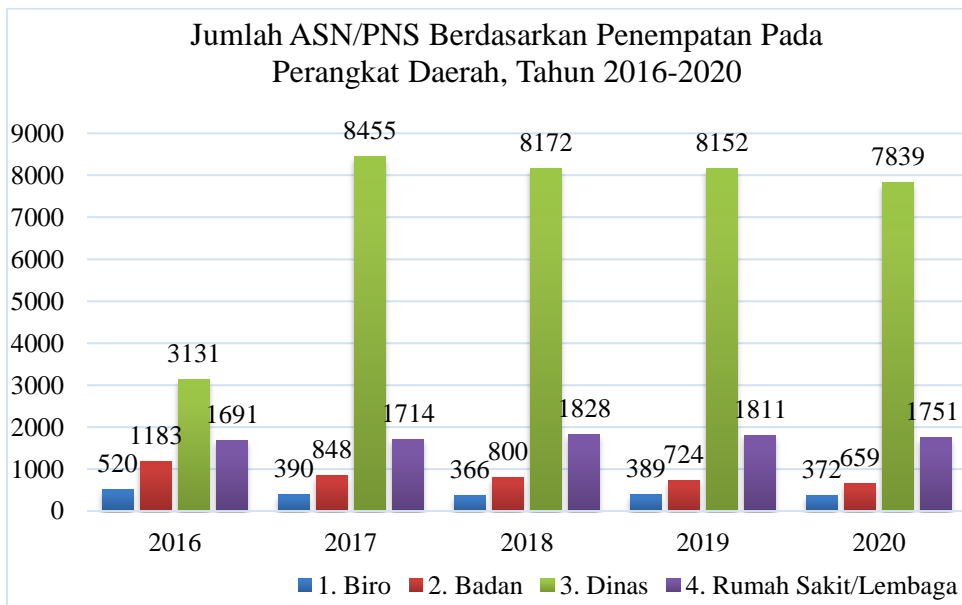
Gambar 16. Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal, Tahun 2016-2020



Gambar 17. Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Tingkatan Diklatpim, Tahun 2016-2020



Gambar 18. Grafik Jumlah Pembinaan ASN/PNS Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Tahun 2016-2020



Gambar 19. Grafik Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Penempatan Pada Perangkat Daerah, Tahun 2016-2020



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





Profil Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas yakni dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program badan;
2. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
5. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

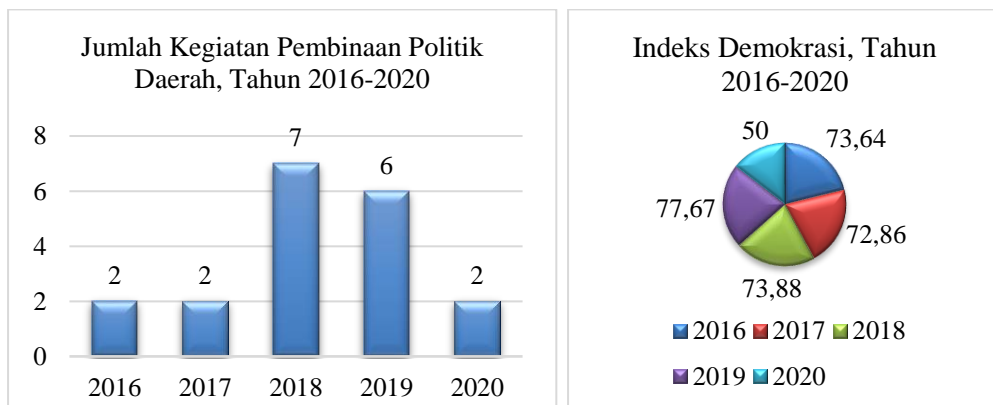
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini tabel 6 merupakan data jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dan jumlah perangkat organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

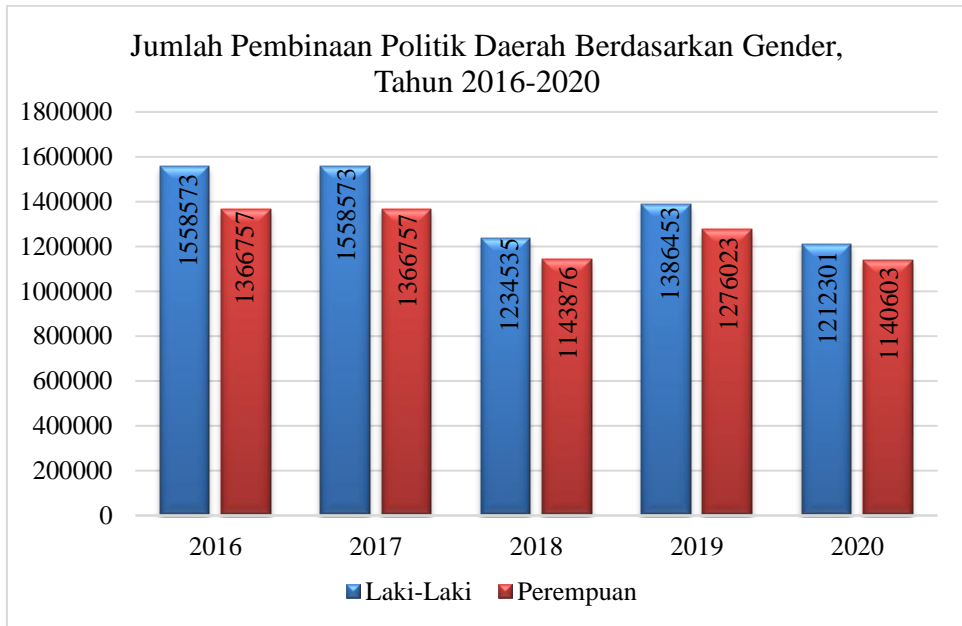
Tabel 6. Data Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pada Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah						
1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	2	2	7	6	2	Kegiatan
2. Indeks Demokrasi	73,64	72,86	73,88	77,67	50	Persen
3. Jumlah Pemilih	2925330	2925330	2378411	2662476	2352904	Orang
1). Laki-Laki	1558573	1558573	1234535	1386453	1212301	Orang
2). Perempuan	1366757	1366757	1143876	1276023	1140603	Orang
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan						
1. Jumlah Ormas Berdasarkan Profesi	0	5	7	4	3	Ormas
2. Jumlah Ormas Berdasarkan Agama	3	5	3	6	2	Ormas
3. Jumlah Ormas	36	36	19	19	22	Ormas

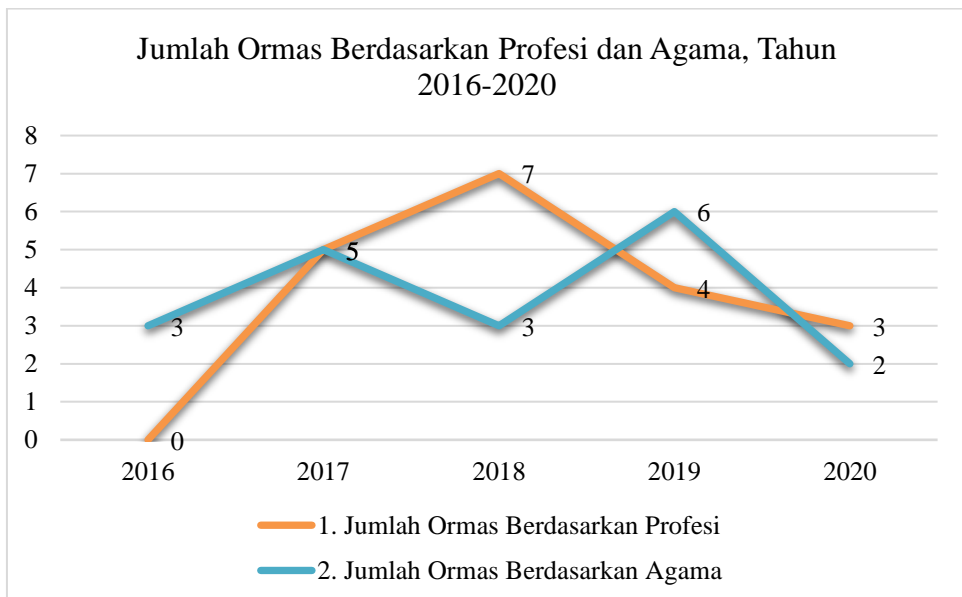
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 20. Grafik Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan Indeks Demokrasi, Tahun 2016-2020



Gambar 21. Grafik Pembinaan Politik Daerah Berdasarkan Gender, Tahun 2016-2020



Gambar 22. Grafik Jumlah Ormas Berdasarkan Profesi dan Agama, Tahun 2016-2020



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





Profil Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya melindungi rakyat dari bencana, mempunyai Satu Tekad, Satu Niat, Satu Hati untuk Kemanusiaan bersama semangat dan jiwa juang yang tinggi melalui pelayanan “Cepat, Tepat, Menyentuh Rakyat” dengan Motto: “Selalu Hadir di Tengah Rakyat”.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur harus mampu mengoptimalkan perannya dalam koordinasi penanggulangan bencana dan akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat bencana serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pemulihan pasca bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk terwujudnya pelayanan tersebut perlu ditetapkan Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 adalah “KALIMANTAN TIMUR PRO-DISASTER RISK REDUCTION 2018”. Pro-Disaster Risk Reduction merupakan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang tidak lagi sekedar fokus pada tanggap darurat, tapi pada pengurangan risiko bencana atau langkah preventif sebelum terjadinya bencana. Dalam mewujudkan Visi BPBD Provinsi Kalimantan Timur tersebut secara sistematis dan bertahap menuntut adanya kesiapan serta kemampuan dalam penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan

mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Misi BPBD Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi faktor-faktor bencana yang mendasar.
- 2) Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal yang terintegrasi dengan budaya keselamatan dan ketahanan di semua level masyarakat melalui penerapan inovasi.
- 3) Melakukan identifikasi, kajian dan monitoring resiko bencana yang terintegrasi dalam sistem peringatan dini (early warning system).
- 4) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian Misi pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BPBD Provinsi Kalimantan Timur agar dapat sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

- 1) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- 3) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;



- 4) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- 5) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bencana Alam Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini merupakan data jumlah bencana alam yang terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 7, dan juga data terkait jumlah frekuensi kejadian dan kerusakan kawasan akibat terjadi bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 7. Data Bencana Alam Yang Terjadi di Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana	n/a	n/a	n/a	0	46420	Orang
1). Banjir	653	849	7	0	46420	Orang
2). Longsor	37	136	12	0	0	Orang
3). Gempa	n/a	0	0	0	0	Orang
4). Tsunami	n/a	0	0	0	0	Orang



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5). Konflik	n/a	0	0	0	0	Orang
2. Jumlah Kabupaten Lokasi	n/a	6	12	7	7	Lokasi
3. Jumlah Kota Lokasi	n/a	3	6	3	3	Lokasi
4. Jumlah Pengungsi Yang Telah Kembali	n/a	1645	12	0	46420	Orang
5. Jumlah Korban bencana Alam	n/a	1645	146	0	0	Orang
1). Meninggal	96	31	47	0	0	Orang
2). Hilang	8	14	14	2	0	Orang
3). Luka-Luka	66	42	202	0	3304	Orang
6. Jumlah Lokasi Bencana	n/a	10	8	10	10	Lokasi
1). Jumlah Kabupaten Lokasi Bencana	n/a	7	7	7	7	Kabupaten
2). Jumlah Kota Lokasi Bencana	n/a	3	3	3	3	Kota
3). Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana	n/a	27	113	68	75	Kecamatan
7. Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Bencana	50,51	36,63	3,67	0	0	Rp (Milyar)
8. Persentase meningkatnya daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	n/a	0	0	0	0	%
9. Persentase Masyarakat Tanggap Darurat	0	0	0	0	0	%



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Bencana Kebakaran						
10. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	85	75	80	%
11. Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana	10	1	1	0	1	Desa/Kelurahan
12. Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0	0	0	20	35	%

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

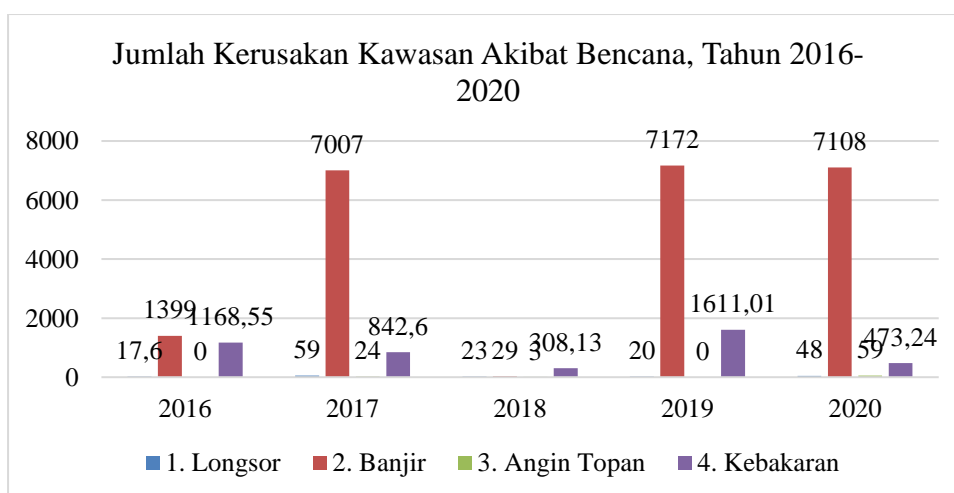
Tabel 8. Data Frekuensi dan Kerusakan Kawasan Akibat Terjadi Bencana di Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Frekuensi Terjadinya Bencana						
1). Longsor	35	38	23	24	46	Kali/Tahun
2). Banjir	46	32	29	79	135	Kali/Tahun
3). Angin Topan/Puting Beliung	9	5	3	2	6	Kali/Tahun
4). Kebakaran	611	165	192	238	124	Kali/Tahun
5). Gempa Bumi	1	1	1	0	1	Kali/Tahun
6). Gelombang Pasang	n/a	0	0	0	0	Kali/Tahun

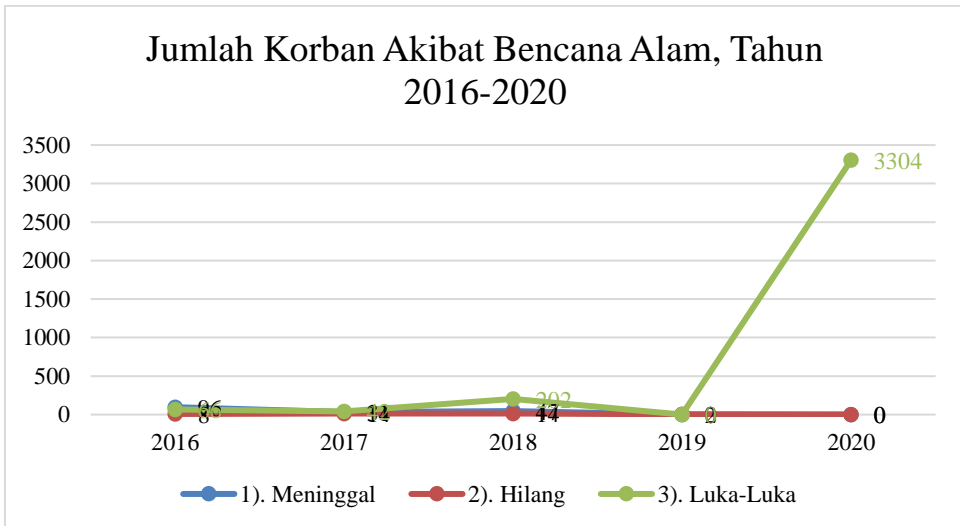


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7). Gagal Teknologi	n/a	0	1	0	0	Kali/Tahun
8). Konflik	n/a	0	0	1	0	Kali/Tahun
9). Tenggelam	2	7	43	12	18	Jiwa/tahun
10). Kebakaran Hutan dan Lahan	n/a	16	191	372	161	Kali
11). Lain-Lain	n/a	48	46	40	27	Kali
Kerusakan Kawasan Akibat Bencana						
1. Longsor	17,60	59	23	20	48	Unit
2. Banjir	1399	7007	29	7172	7108	Unit
3. Angin Topan	n/a	24	3	0	59	Unit
4. Kebakaran	1168,55	842,60	308,13	1611,01	473,24	Ha
a. Pemukiman	n/a	1150	315	855	587	Unit
5. Gempa Bumi	n/a	0	1	0	0	Unit
6. Gelombang Pasang	n/a	0	0	0	0	Ha
7. Gagal Teknologi	n/a	0	1	0	0	lokasi
8. Konflik	n/a	0	0	1	0	Lokasi
9. Tenggelam	n/a	7	55	13	18	Jiwa

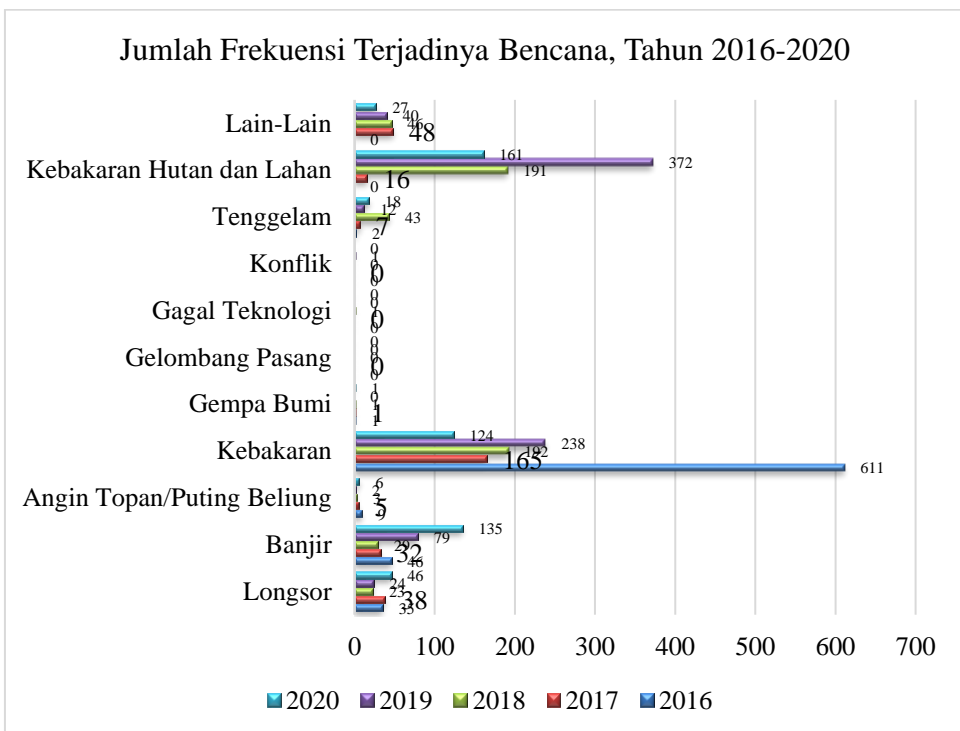
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 23. Grafik Jumlah Kerusakan Kawasan Akibat Bencana, Tahun 2016-2020



Gambar 24. Grafik Jumlah Korban Akibat Bencana Alam, Tahun 2016-2020



Gambar 25. Grafik Jumlah Frekuensi Terjadinya Bencana, Tahun 2016-2020



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH





Profil Perangkat Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau disingkat Dipenda. Dengan tugas pokok antara lain memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Semakin lama tugas pokok dan fungsi Dipenda semakin bertambah, hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No. 3 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, dipenda mempunyai 5 (lima) fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan;
- 2) Pelaksanaan Pelayanan umum lintas kabupaten/kota;
- 3) Pembinaan Teknis di bidang Pendapatan;
- 4) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dan
- 5) Pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

Setahap demi setahap, Dispenda Provinsi Kalimantan Timur, kini memiliki peran dan posisi yang sangat penting dan strategis, seiring dengan tuntutan jaman, fungsi dan tugasnya pun bertambah berat. Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan. Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Visi yakni “Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal”, dan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya manusia pegawai;
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
3. Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah.

Pajak Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah jumlah data pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

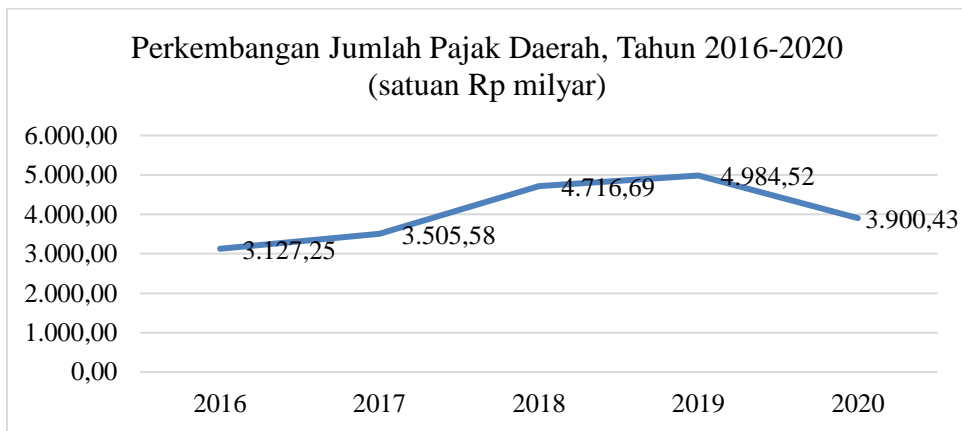
Tabel 9. Data Pajak Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Pajak Daerah	3.127,25	3.505,58	4.716,69	4.984,52	3.900,43	Rp (Milyar)
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	767,97	808,93	871,88	1.007,25	949,90	Rp (Milyar)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	580,02	622,88	875,29	993,61	722,35	Rp (Milyar)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.570,01	1.870,47	2.772,01	2.799,42	1.984,53	Rp (Milyar)
4. Pajak Air Permukaan	7,15	7,18	7,84	10,78	8,68	Rp (Milyar)
5. Pajak Rokok	202,10	196,13	189,67	173,46	234,98	Rp (Milyar)
Retribusi Daerah	19,44	16,66	21,13	26,49	10,12	Rp (Milyar)

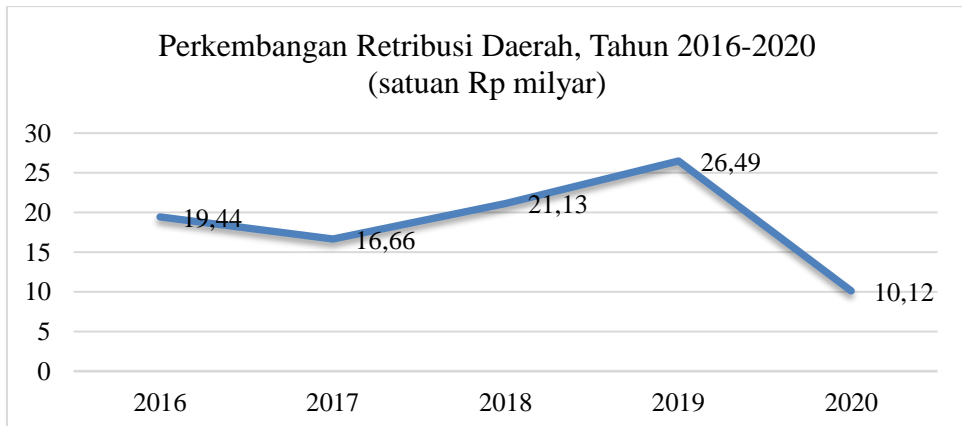


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Retribusi Jasa Umum	6,92	8	7,53	8,08	1,59	Rp (Milyar)
2. Retribusi Jasa Usaha	11,94	8,01	13,02	17,55	7,48	Rp (Milyar)
3. Retribusi Perizinan Tertentu	0,58	0,65	0,59	0,86	1,05	Rp (Milyar)

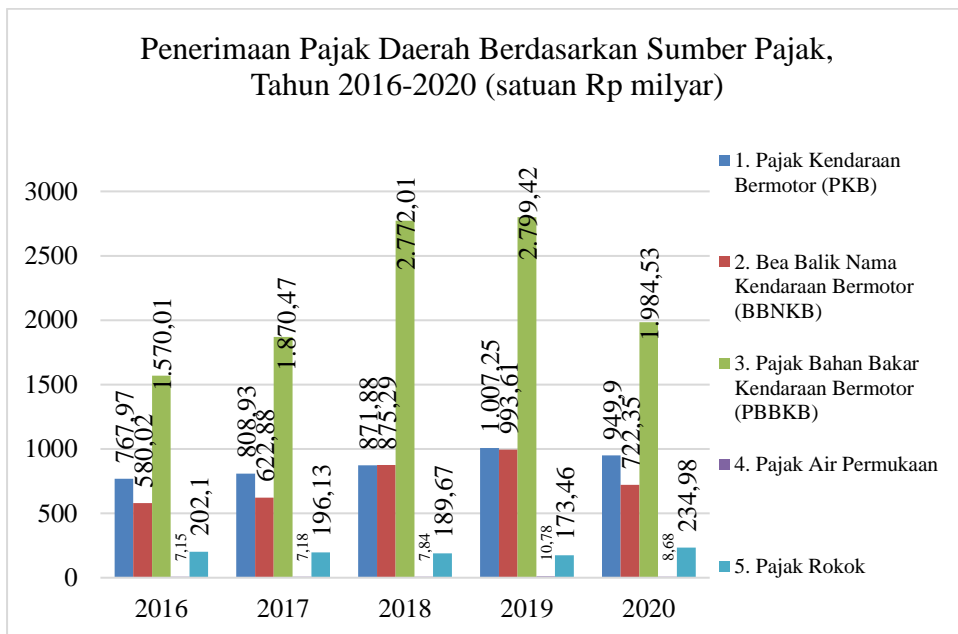
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



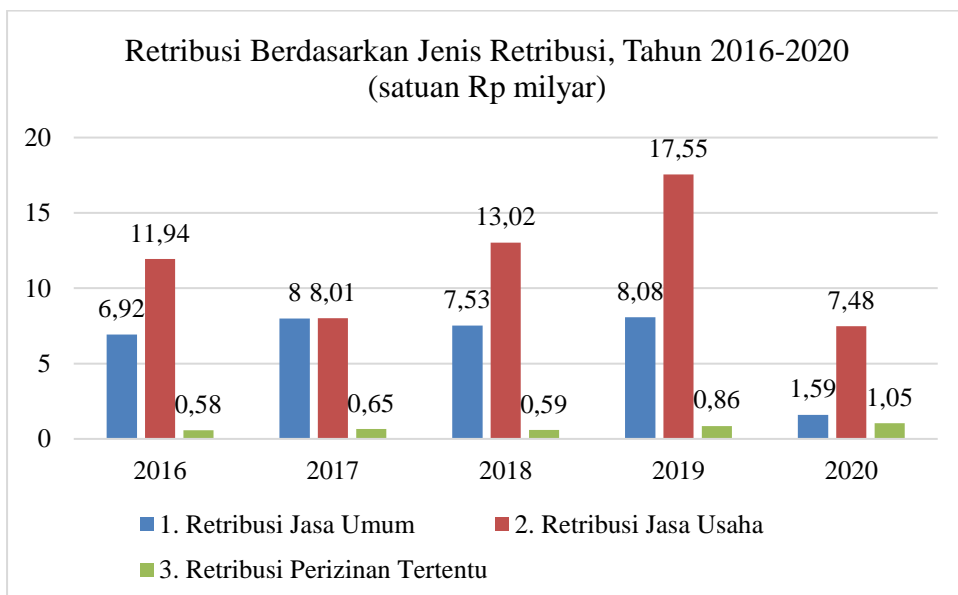
Gambar 26. Grafik Perkembangan Jumlah Pajak Daerah, Tahun 2016-2020 (satuan Rp milyar)



Gambar 27. Grafik Perkembangan Retribusi Daerah, Tahun 2016-2020 (satuan Rp milyar)



Gambar 28. Grafik Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Sumber Pajak, Tahun 2016-2020 (satuan Rp milyar)



Gambar 29. Grafik Jumlah Retribusi Berdasarkan Jenis Retribusi, Tahun 2016-2020 (satuan Rp milyar)



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Profil Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi yang tergolong masih muda, terbentuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Visi dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yakni:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel”.

Misi dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur:

1. Misi pertama adalah meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik, yang mempunyai tujuan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Misi kedua adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yang mempunyai tujuan meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
3. Misi ketiga adalah meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas, yang mempunyai tujuan mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel.



Tujuan BPKAD Prov. Kaltim:

1. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;
3. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel;

Sasaran BPKAD Prov. Kaltim:

1. Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas;
3. Terwujudnya tata kelola barang milik daerah yang berkualitas

Tugas Pokok BPKAD Prov. Kaltim yakni berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 6(3) Badan Daerah Provinsi antara lain terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Sedangkan fungsi BPKAD Prov. Kaltim yakni melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam pasal 6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keuangan, aset dan BUMD;
3. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
4. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kemudian Isu Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yakni:

- 1) Regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
- 2) Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;
- 3) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
- 4) Prasarana gedung terpisah antara bidang keuangan dan bidang aset sehingga sulit melakukan koordinasi lebih cepat;
- 5) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
- 6) Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selanjutnya Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a) Menyiapkan sistem dan informasi pengelolaan keuangan daerah;
- b) Melakukan koordinasi dan pembinaan, pengawasan yang efektif kepada setiap perangkat daerah;
- c) Menyiapkan sistem dan informasi pengelolaan barang milik daerah.

Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah data-data terkait jumlah belanja dan pembiayaan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 10 dan data terkait nilai aset sarana prasarana



Pemerintah Provinsi Kaltim dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 10. Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja dan Pembiayaan Daerah						
1. Belanja Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
1). Belanja Tidak Langsung	5809876	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
1. Belanja tidak langsung pegawai	991505,50	1698837,53	1672792,33	n/a	n/a	Rp Juta
- Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung	109,89	0	0	0	0	%
- Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah	580987600	0	0	0	0	%
- Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	0	0	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
- Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai	0	0	n/a	n/a	n/a	%
2. Belanja bunga	0	0	0	0	n/a	Rp Juta
3. Belanja subsidi	0	0	0	0	n/a	Rp Juta
4. Belanja hibah	849120,60	1035431,51	1055451,59	815124,18	n/a	Rp Juta
5. Belanja bantuan sosial	3870,10	5010	5500	9774,55	n/a	Rp Juta
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2098380	2104010,19	1890570,83	2892136,26	1086718,38	Rp Juta
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1460087	721120,60	551858,90	2007253,92	417776,02	Rp Juta
8. Belanja Tidak Terduga	200000	6300	17500	25000	n/a	Rp Juta
9. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	0	0	0	n/a	n/a	Rp Juta
- Belanja Gaji dan Tunjangan	116174,64	858931,29	396568,28	n/a	n/a	Rp
- Belanja Tambahan Penghasilan	380197,67	491814,72	222819,72	n/a	n/a	Rp



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
- Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH;	11795,04	14692,38	10349,81	n/a	n/a	Rp
- Belanja Pemungutan Pajak Daerah	67885,24	87453,16	45436,13	n/a	n/a	Rp Juta
10. Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
- Belanja Honorarium PNS	116174,64	58822,60	21932,33	n/a	n/a	Rp
- Belanja Uang Lembur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	17735,07	13807,01	1702,86	n/a	n/a	Rp
- Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	272667,98	250569,87	98805,56	n/a	n/a	Rp
- Belanja Sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	8590,12	4254,96	1585,92	n/a	n/a	Rp
- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yg telah ada kontrak jangka panjangnya)	13297,67	5375,97	1912,55	n/a	n/a	Rp
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8527,09	1291,54	714,71	n/a	n/a	Rp
- Belanja Premis Asuransi Kesehatan	0	0	0	n/a	n/a	Rp
- Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	79562,09	40774,01	16888,39	n/a	n/a	Rp
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2815,32	206,28	288,72	n/a	n/a	Rp
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6069,45	1277,72	574,96	n/a	n/a	Rp
- Belanja Perjalanan Dinas	256729,50	140591,04	70163,03	n/a	n/a	Rp
- Belanja Perjalanan Pindah Tugas	4,15	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp
- Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	n/a	n/a	Rp Juta
- Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain	1571814,62	938327,93	698955,94	n/a	n/a	Rp
2). Belanja Langsung	5287048	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Belanja langsung pegawai	454630,63	221633,74	87939,33	n/a	n/a	Rp Juta
- Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung	8,60	22163374	8793933	0	0	%
- Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah	45463063	22163374	8793933	0	0	%
- Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
- Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
2. Belanja barang dan jasa	1543518,53	1878259,91	406164,55	n/a	n/a	Rp Juta
- Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung	29,19	187825991	40616455	0	0	%
- Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah	154351853	187825991	40616455	0	0	%
- Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
3. Belanja modal	1571814,62	938327,93	698955,94	n/a	n/a	Rp Juta
- Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung	29,73	93832793	69895594	0	0	%
- Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah	157181462	93832793	69895594	0	0	%
- Persentase Pertumbuhan Belanja Modal	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
4. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
5. Persentase Pertumbuhan Total Belanja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
2. Pembiayaan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
1). Penerimaan pembiayaan	800000	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	226681,02	611118,12	200000	n/a	n/a	Rp Juta
2. Pencairan dana cadangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4. Penerimaan pinjaman daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
6. Penerimaan piutang daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
2). Pengeluaran pembiayaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
1. Pembentukan dana cadangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
3. Pembayaran pokok utang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
4. Pemberian pinjaman daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
5. Pembayaran Kegiatan Lanjutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
6. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
7. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp Juta
3). Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	611166,60	541264,81	n/a	n/a	n/a	Rp Juta

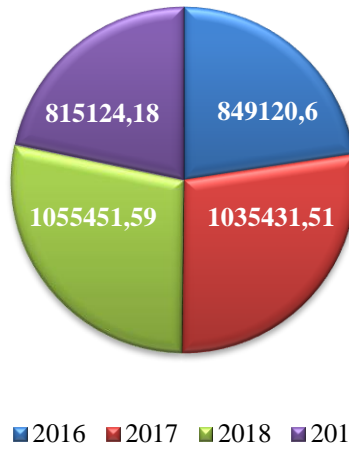
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

Tabel 11. Data Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintahan						
1. Nilai Aset Kantor Setda	1	1	1	1	1	Unit
2. Nilai Aset Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	3	3	3	3	3	Unit
3. Nilai Aset Kantor Inspektorat	1	1	1	1	1	Unit
4. Nilai Aset Kantor Bappeda	2	2	2	2	2	Unit
5. Nilai Aset Kantor Dinas Daerah	259	259	259	259	259	Unit
6. Nilai Aset Kantor Lembaga Teknis Daerah	57	59	59	59	59	Unit

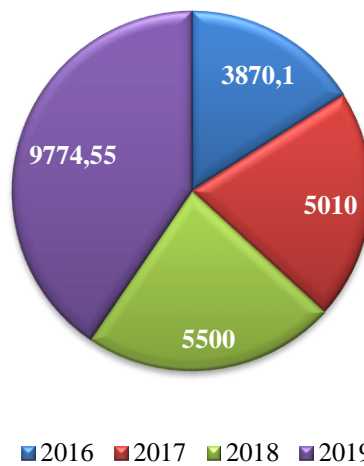
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

Jumlah Belanja Hibah, Tahun 2016-2019 (satuan Rp Juta)

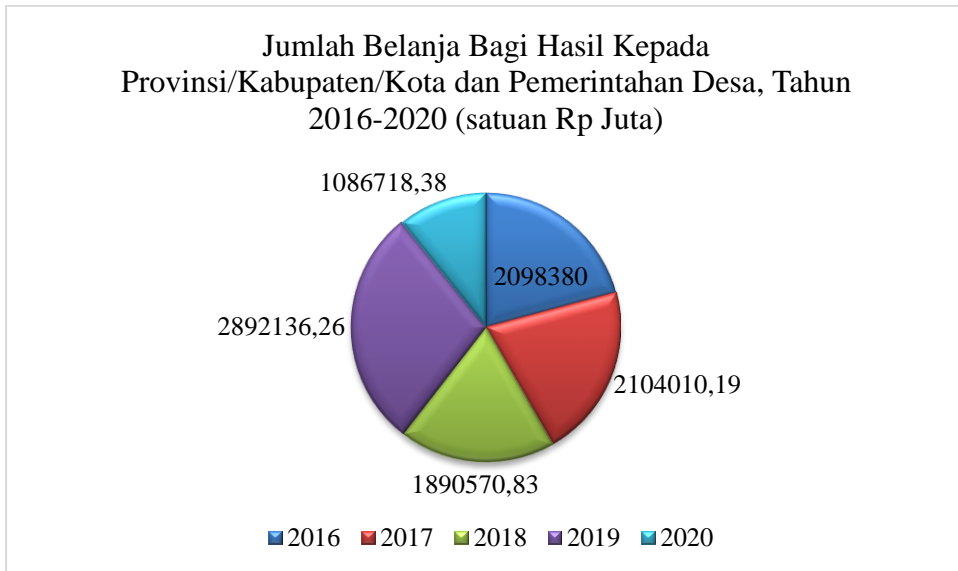


Gambar 30. Grafik Jumlah Belanja Hibah, Tahun 2016-2019 (satuan Rp Juta)

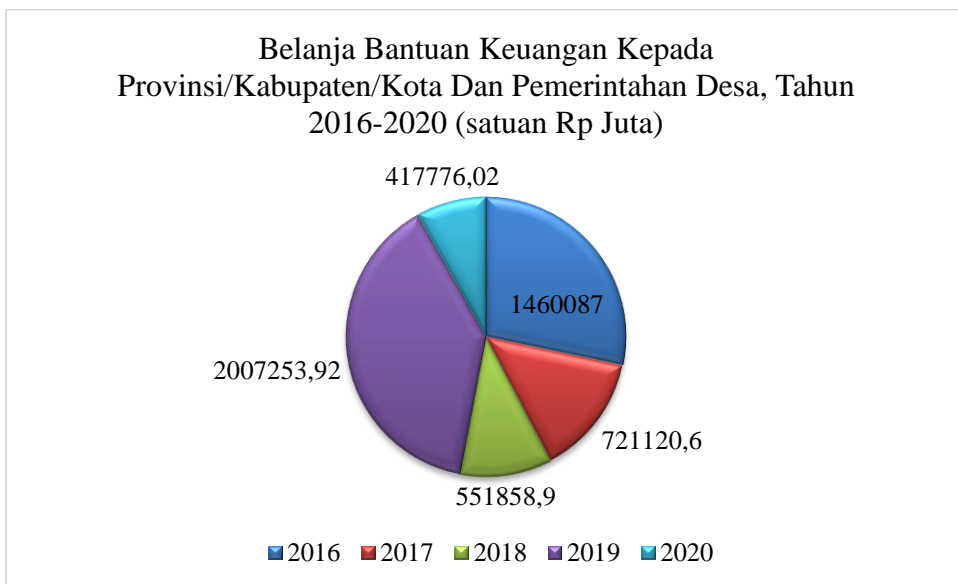
Jumlah Belanja Bantuan Sosial, Tahun 2016-2019 (satuan Rp Juta)



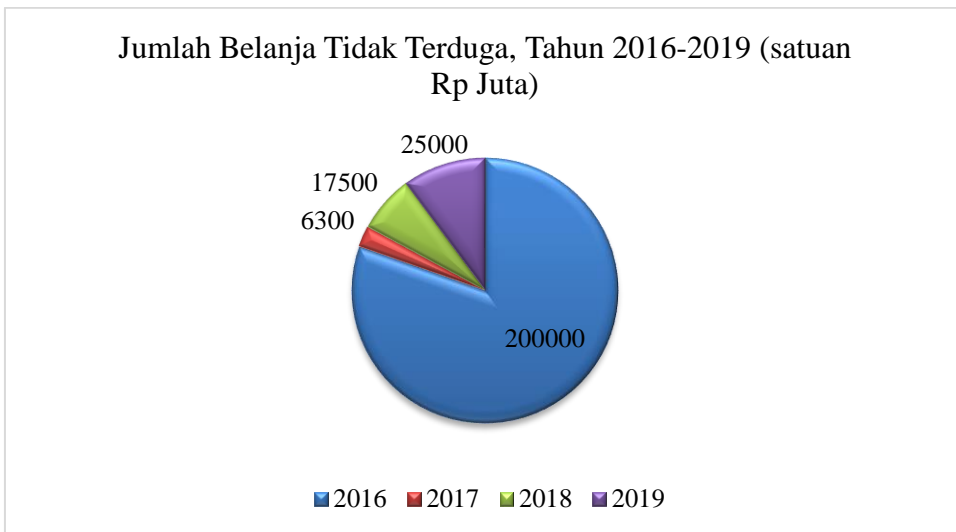
Gambar 31. Grafik Jumlah Belanja Bantuan Sosial, Tahun 2016-2019 (satuan Rp Juta)



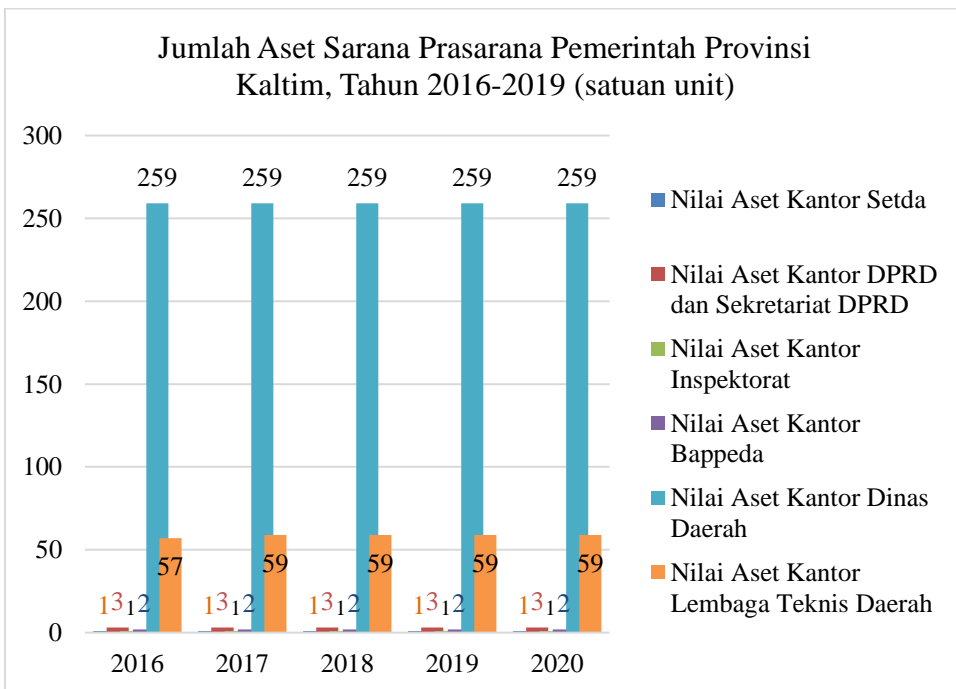
Gambar 32. Grafik Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Tahun 2016-2020
(satuan Rp Juta)



Gambar 33. Grafik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa, Tahun 2016-2020
(satuan Rp Juta)



Gambar 34. Grafik Jumlah Belanja Tidak Terduga, Tahun 2016-2019 (satuan Rp Juta)

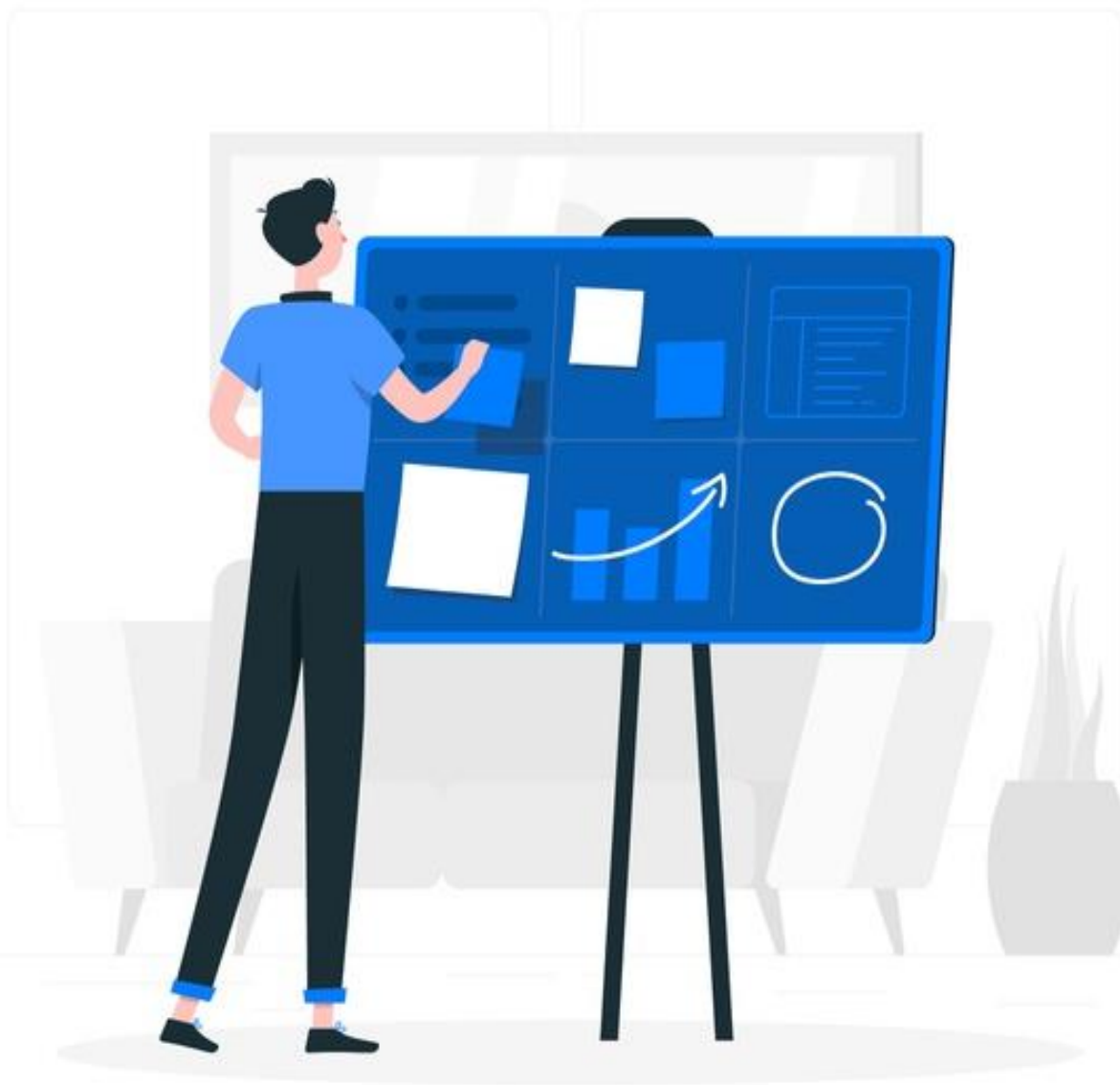


Gambar 35. Grafik Jumlah Aset Sarana Prasarana Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020 (satuan unit)



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





Profil Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tanggal 18 Maret 1974 yang diperbaharui melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Surat Keputusan Mendagri tanggal 7 Juli 1974 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah yang lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri diatur dalam Surat Keputusan Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sebelum ditetapkannya kedua ketentuan tersebut telah memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 161 Tahun 1974. Sesuai dengan maksud daripada pasal 107 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan Nomor 161 Tahun 1974.

Keberadaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, termuat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengacu Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian Sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Surat dari Kepala Bappeda Prov. Kaltim Nomor 060/95/B.Um-Bapp/2019 Tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan SOTK Bappeda Prov. Kaltim, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. Pada tanggal 30 Maret 2020 ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang baru.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2008 maka Visi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yaitu "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka". Selanjutnya Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) Misi, yaitu:

- 1) Menyusun perencanaan pembangunan daerah tepat guna dan komperhensif sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan regional dan sectoral;
- 3) Mengoptimalkan evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- 4) Meningkatkan pegelolaan data statistik serta hasil kajian pembangunan guna penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan sejarah yang disampaikan diatas maka dibawah ini akan diuraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur



sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: dimana kedudukan (Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016) yaitu:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah ini dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok Bappeda Provinsi Kaltim:

- 1) Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan;
- 2) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perencanaan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perencanaan;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ekonomi;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Prasarana Wilayah;

- 7) Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Daerah;
- 8) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan unit pelaksana Teknis Daerah;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Luas Wilayah dan Topografi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data yang diolah oleh Bappeda Provinsi Kaltim, dan kemudian dikompilasi melalui aplikasi web Sistem Informasi Data Kalimantan Timur dan disajikan dalam bentuk tabel yakni tabel 12 berupa data terkait luas wilayah Provinsi Kaltim dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dan kemudian tabel 13 berupa data terkait topografi wilayah Provinsi Kaltim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

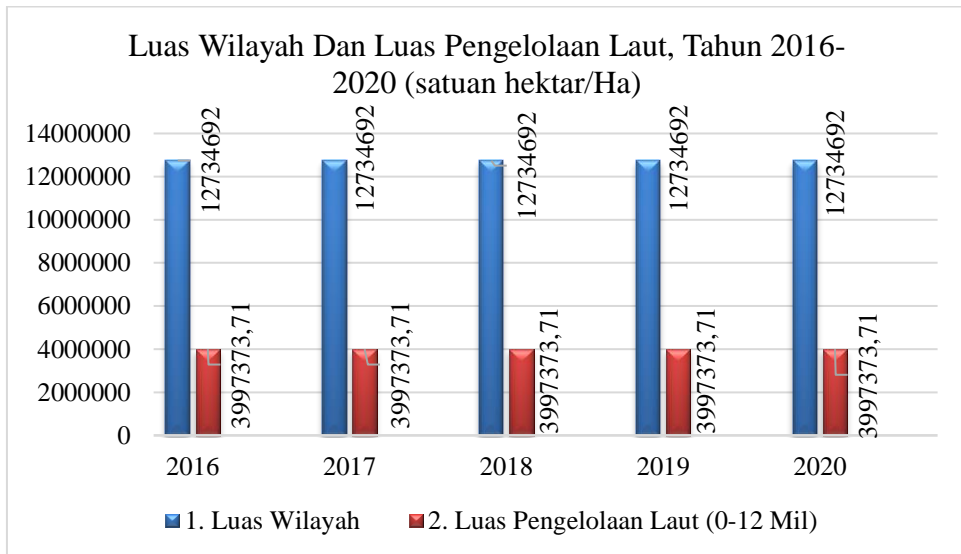
Tabel 12. Data Luas Wilayah dan Topografi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Luas Wilayah						
1. Luas Wilayah	12734692	12734692	12734692	12734692	12734692	Ha
- Luas Daratan	12638893	12638893	12638893	12638893	12638893	Ha
- Luas Perairan Darat	95799	95799	95799	95799	95799	Ha
2. Luas Pengelolaan Laut (0-12 Mil)	3997373,71	3997373,71	3997373,71	3997373,71	3997373,71	Ha
3. Jarak	1398	1398	1398	1398	1398	Ha

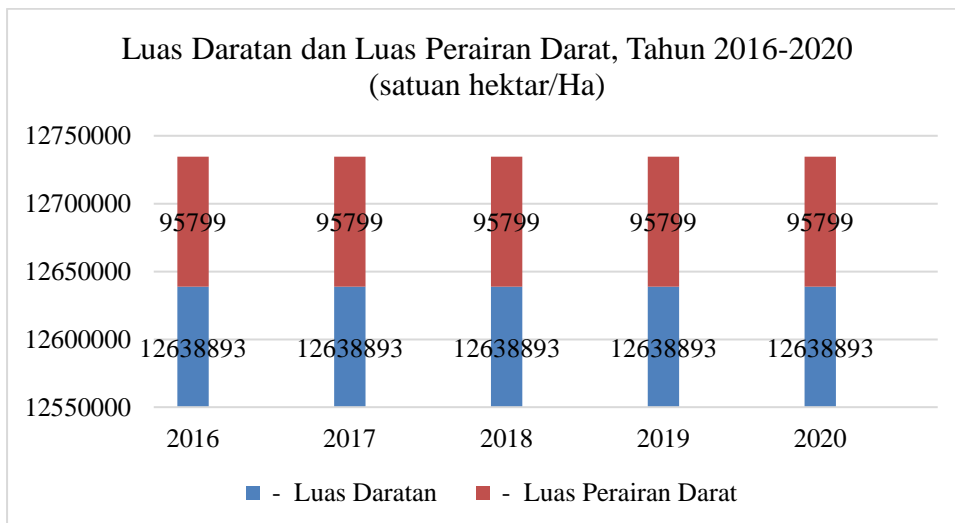


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng						
1). Datar (0-2 Derajat)	1341015	1341015	1341015	1341015	1341015	Ha
2). Bergelombang (2-15 Derajat)	2025952	2025952	2025952	2025952	2025952	Ha
3). Curam (15-40 Derajat)	3733152	3733152	3733152	3733152	3733152	Ha
4). Sangat Curam (>40 Derajat)	5433568	5433568	5433568	5433568	5433568	Ha
2. Ketinggian di atas Permukaan Laut						
1). 0 - 7 M	515655	515655	515655	515655	515655	Ha
2). 7 - 25 M	2224402	2224402	2224402	2224402	2224402	Ha
3). 25 - 100 M	2974648	2974648	2974648	2974648	2974648	Ha
4). 100 - 500 M	2988550	2988550	2988550	2988550	2988550	Ha
5). 500 - 1000 M	1806001	1806001	1806001	1806001	1806001	Ha
6). > 1000 M	585251	585251	585251	585251	585251	Ha

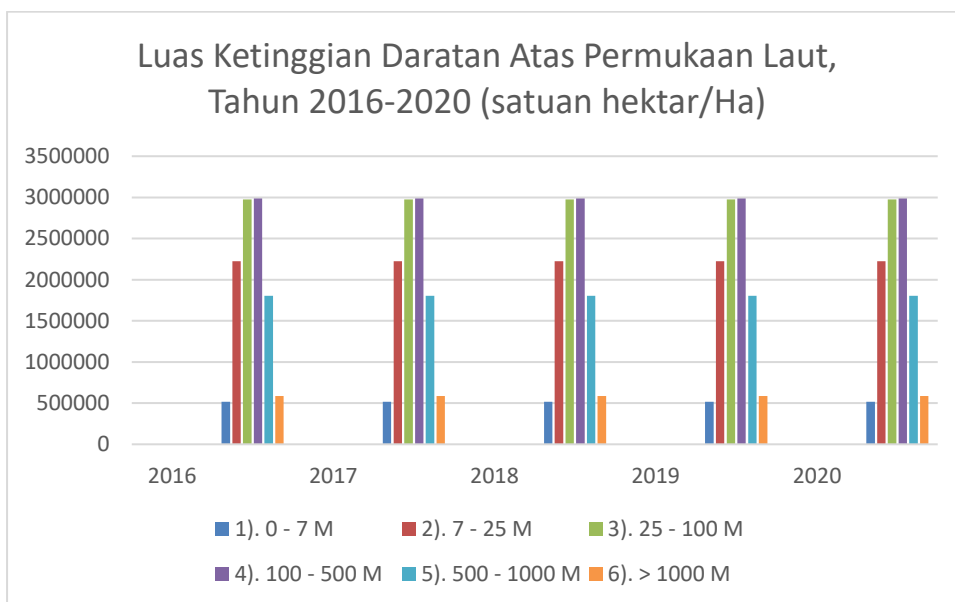
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 36. Grafik Luas Wilaya Dan Luas Pengelolaan Laut, Tahun 2016-2020 (satuan hektar/Ha)



Gambar 37. Grafik Luas Daratan dan Luas Perairan Darat, Tahun 2016-2020 (satuan hektar/Ha)



Gambar 38. Grafik Luas Ketinggian Daratan Atas Permukaan Laut, Tahun 2016-2020 (satuan hektar/Ha)



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH



Profil Perangkat Daerah

Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyebarluasan informasi, dokumentasi, dan produk hukum serta fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara. Bahwa berangkat dari penjabaran visi, misi dan tujuh belas misi Gubernur Kalimantan Timur, maka Visi Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Misi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- 1) Melaksanakan dengan konsisten tugas pokok dan fungsi Biro Hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memberikan pelayanan, fasilitasi dan konseling pembuatan produk hukum yang baik, benar, tepat dan memiliki legalitas kepada unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- 3) Memberikan advokasi, asistensi, pendampingan dan bimbingan aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- 4) Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) serta pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta kerjasama baik bersifat ke dalam maupun ke luar dalam rangka kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta bidang terkait;



2. Pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan advokasi hukum;
3. Koordinasi pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
4. Pelaksanaan penyebarluasan informasi, dokumentasi dan produk hukum;
5. Fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat menerbitkan layanan informasi hukum kepada publik melalui Aplikasi website internet dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai elemen masyarakat, terutama dalam memperoleh akses dan informasi mengenai produk-produk hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Di samping itu, kehadiran website ini dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mana menetapkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah, dengan adanya hal ini diharapkan akan tercipta suatu komunikasi dan layanan konsultasi hukum yang baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat luas serta adanya keterbukaan informasi kepada publik.

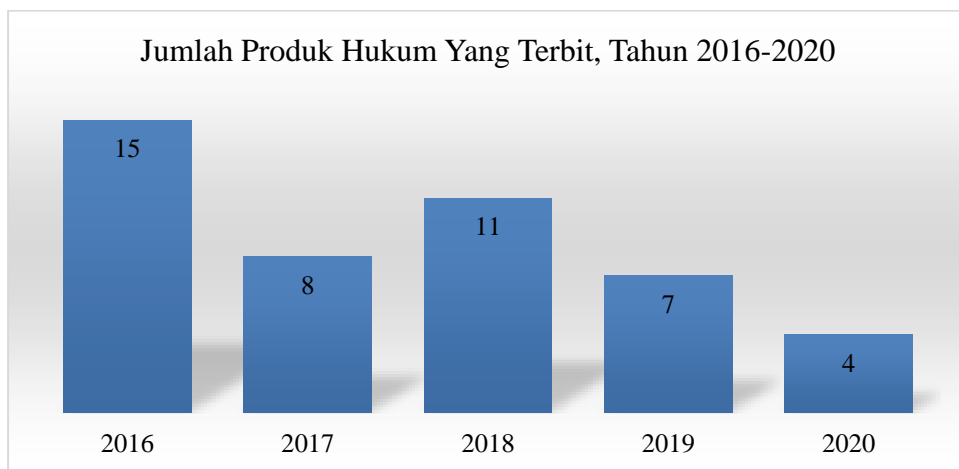
Produk Hukum Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data dan informasi pada tabel 13 terkait dengan jumlah data dokumen produk hukum yang diterbitkan baik Peraturan Daerah/Perda, Peraturan Gubernur/Pergub, Keputusan Gubernur/Kepgub serta produk hukum yang ada di tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

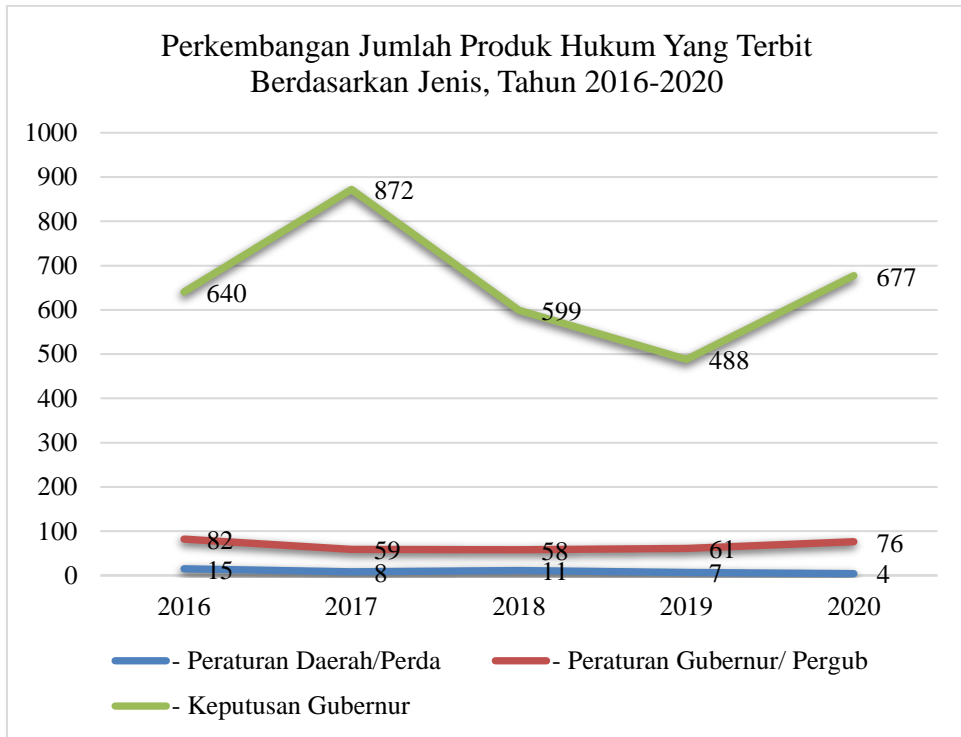
Tabel 13. Data Jumlah Produk Hukum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah Produk Hukum	737	939	668	556	757	Dokumen
- Peraturan Daerah/Perda	15	8	11	7	4	Peraturan Daerah
- Peraturan Gubernur/ Pergub	82	59	58	61	76	Peraturan Gubernur
- Keputusan Gubernur	640	872	599	488	677	Keputusan Gubernur
2. Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	n/a	n/a	n/a	311	99	Produk Hukum

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 39. Grafik Jumlah Produk Hukum Yang Terbit, Tahun 2016-2020



Gambar 40. Grafik Perkembangan Jumlah Produk Hukum Yang Terbit Berdasarkan Jenis, Tahun 2016-2020



Gambar 41. Grafik Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan, Tahun 2016-2020



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH





Profil Perangkat Daerah

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh tiga bagian yaitu Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Bagian Pengembangan Kinerja Instansi, serta Bagian Tata Laksana. Masing-masing bagian terdiri dari 3 sub bagian yang mendukung dalam kinerja di biro tersebut. Sebagai wujud transparansi informasi dalam menuju reformasi birokrasi, Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim menyajikan berbagai layanan informasi baik terkait dengan kegiatan sehari-hari maupun layanan lain yang terkait dengan informasi pelayanan publik. Tugas dan tanggungjawab sebagai penyebar informasi layanan publik, Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim secara bertahap akan melengkapi kebutuhan publik terkait informasi pelayanan. Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim juga sebagai koordinator unit Pelayanan Publik baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi, Tingkat Nasional Bahkan Internasional. Hal ini dimaksud agar masyarakat terlayani secara maksimal. Melakukan monitoring dan evaluasi dimasing-masing OPD/PD Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk membenahi OPD/PD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sempurna dan juga memotivasi OPD/PD Provinsi dan Kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan, membuat atau menemukan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik.

Organisasi Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data dan informasi pada tabel 14 terkait dengan data jumlah organisasi daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.



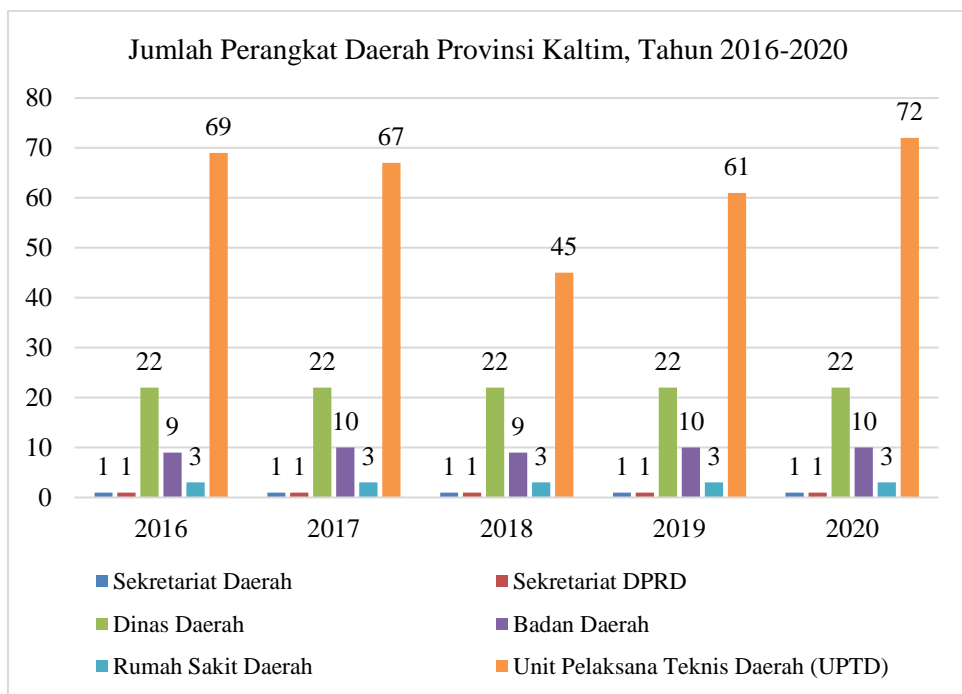
Tabel 14. Data Organisasi Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan	Ket.
	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Sekretariat Daerah	n/a	1	1	1	1	Lembaga	Sesuai PP 18 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2016 dan Pergub No. 51 Tahun 2016.
1) Jumlah Biro	11	9	9	9	9	Lembaga	Sesuai PP 18 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2016 dan Pergub No. 51 Tahun 2016.
2. Sekretariat DPRD	1	1	1	1	1	Lembaga	Sesuai PP 18 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2016 dan Pergub No. 52 Tahun 2016.
3. Dinas Daerah	n/a	22	22	22	22	Lembaga	Sesuai PP 18 Tahun 2016 dan Perda No. 9 Tahun 2016
1). Jumlah Dinas	17	21	21	21	21	Lembaga	Sesuai PP 18 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2016 dan Pergub No. 54 s/d 74 Tahun 2016.
2). Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	1	1	Lembaga	Sesuai PP 18 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2016 dan Pergub No. 75 Tahun 2016.
4. Badan Daerah	n/a	10	9	10	10	Lembaga	Sesuai PP 18 Tahun 2016 dan Perda No. 9 Tahun 2016
1). Jumlah Badan	13	9	9	9	9	Lembaga	Sesuai Perda No. 10 tahun 2014 dan Perda No. 9 tahun 2016, serta Pergub No. 76 s/d 83 tahun 2016
2). Inspektorat	1	1	1	1	1	Lembaga	Sesuai Perda No. 9 Tahun 2016 dan Pergub No. 53 tahun 2016, Inspektorat berdiri sendiri diluar dari Badan Daerah



Deskripsi Data	Tahun					Satuan	Ket.
	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
3). Sekretariat KORPRI	n/a	1	1	1	1	Lembaga	Perubahan Perda Perangkat Daerah masih dalam proses
5. Rumah Sakit Daerah	3	3	3	3	3	Lembaga	Perda No. 6 tahun 2011 dan Perda No. 8 tahun 2012
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	69	67	45	61	72	Lembaga	Adanya Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD baru
7. Jumlah Perangkat Daerah	41	38	38	38	38	Lembaga	

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 42. Grafik Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, Tahun 2016-2020



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BIRO PEMERINTAHAN, PERBATASAN, DAN OTONOMI DAERAH





Profil Perangkat Daerah

Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang perbatasan, penataan wilayah serta kerjasama dalam dan luar negeri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perbatasan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang penataan wilayah;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerjasama luar dan dalam negeri;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

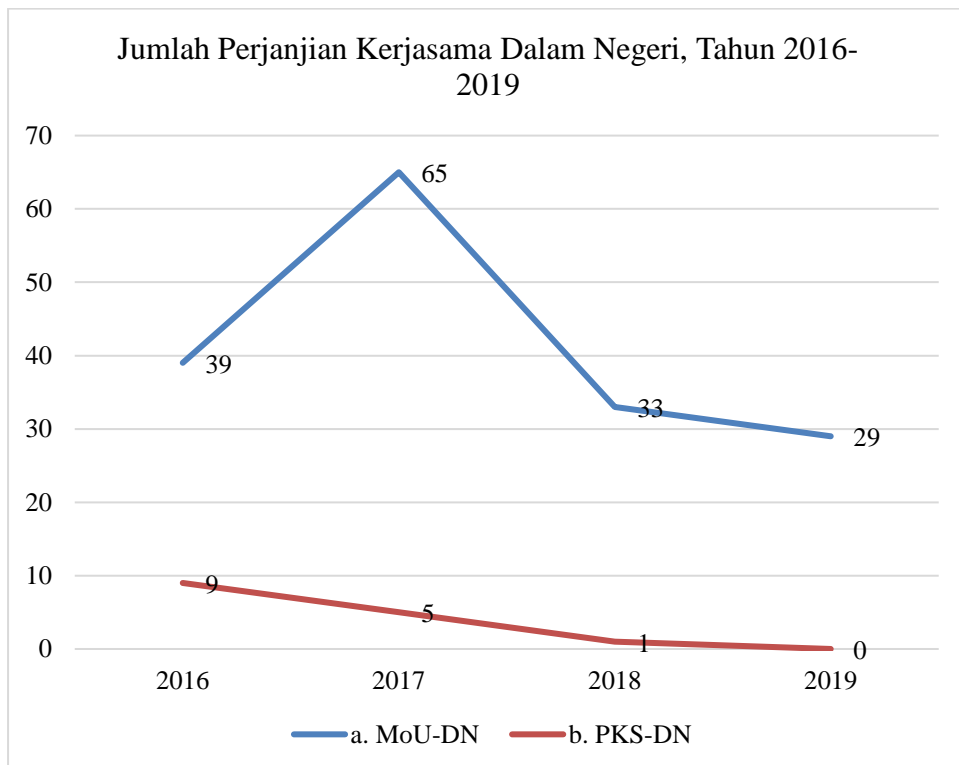
Perjanjian Kerjasama Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini tabel 15 menyajikan terkait data jumlah perjanjian kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku pada Pemerintah Prov. Kaltim dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

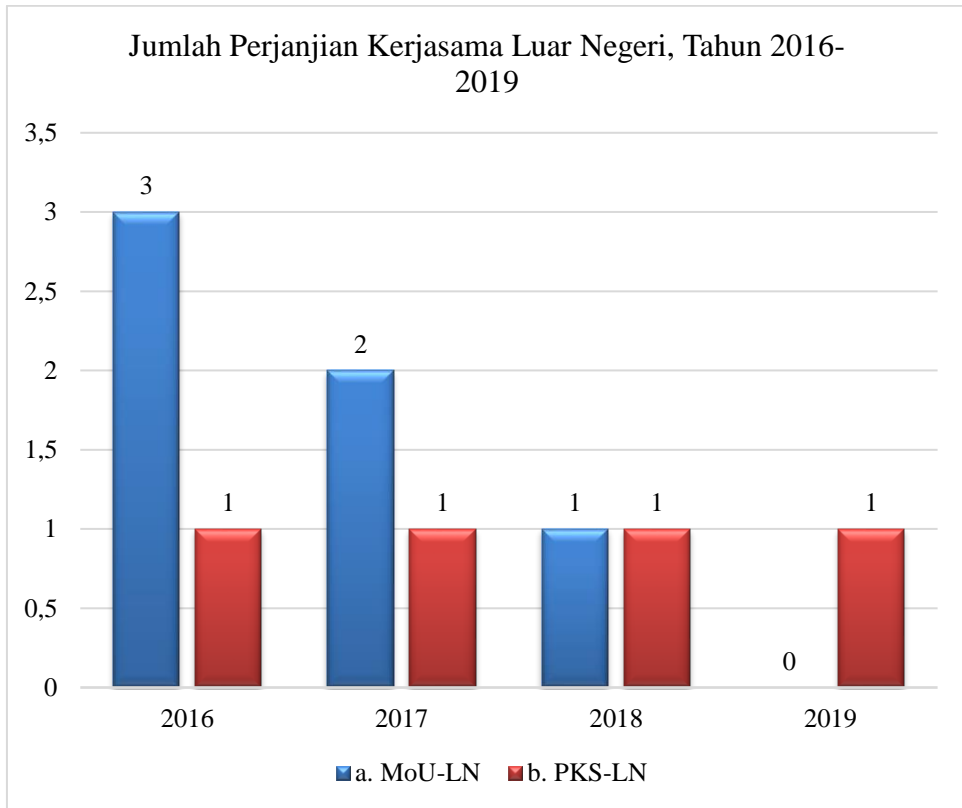
Tabel 15. Data Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Daerah lain yang masih berlaku Pada Pemerintah Prov. Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kerjasama Dalam Negeri	48	70	34	29	n/a	Perjanjian
a. MoU	39	65	33	29	n/a	Perjanjian
b. PKS	9	5	1	0	n/a	Perjanjian
2. Kerjasama Luar Negeri	4	3	2	1	n/a	MoU/Lol
a. MoU	3	2	1	0	n/a	MoU/Lol
b. PKS	1	1	1	1	n/a	MoU/Lol

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 43. Grafik Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri, Tahun 2016-2019



Gambar 44. Grafik Jumlah Perjanjian Kerjasama Luar Negeri, Tahun 2016-2019



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH





Profil Perangkat Daerah

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis sarana perekonomian, industri dan jasa, serta produksi daerah dan sumber daya alam. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang perekonomian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang sarana perekonomian;
3. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang industri dan jasa;
4. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang produksi daerah dan sumber daya alam;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

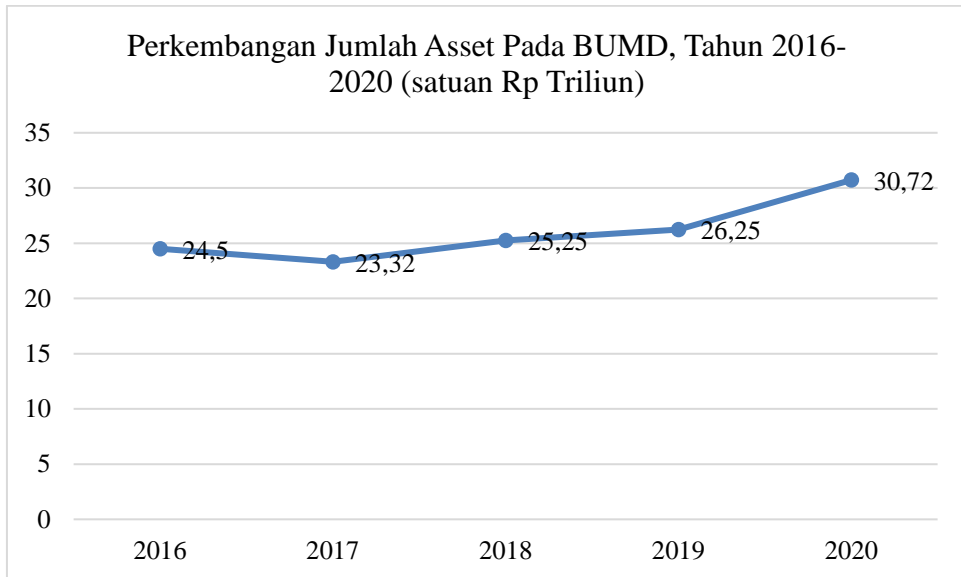
Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini pada tabel 16 yaitu berupa penyajian data-data aset dan modal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020.

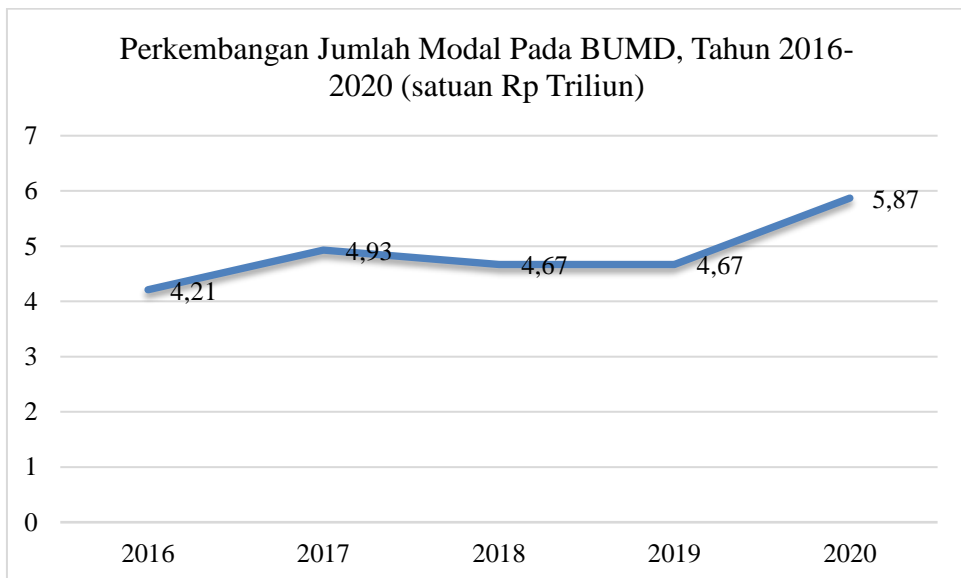
Tabel 16. Data Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah BUMD	8	8	8	8	8	unit
2. Jumlah Aset dan Modal BUMD	28,71	28,25	29,92	30,92	36,59	Triliun Rp
1. Asset	24,50	23,32	25,25	26,25	30,72	Triliun Rp
1). BPD Kaltim	22579213000000	22697062000000	25344194000000	28928925000000	28685000000000	Milyar Rp
2). Perusda Pertambangan (BKS)	140979889555	188127154742	190650341493	0	157513356083	Milyar Rp
3). Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)	191136530669	183625547861	1211657248949	0	1217402630526	Milyar Rp
4). Perusda Agro Kaltim Utama	0	0	0	0	0	Milyar Rp
5). Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)	3475652620	3486481951	3471257894	3471257894	3489368954	Milyar Rp
6). Perusda Ketenagalistrikan	136205786116	142687359975	144203025877	140539161648	141561623501	Milyar Rp
7). PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)	198073328308	185125657441	1141872052289	1116891886733	512043173699	Milyar Rp
8). PT. Jamkrida	52608227320	54264954563	52710667587	54484812461	5526932569	Milyar Rp
2. Modal	4,21	4,93	4,67	4,67	5,87	Triliun Rp
1). BPD Kaltim	1211715000000	1211715000000	1211715000000	1211715000000	3843	T Rp
2). Perusda Pertambangan (BKS)	22000000000	22000000000	22000000000	22000000000	157453881137	Milyar Rp
3). Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)	201267977199	201267977199	1225736308530	0	1217402630526	Milyar Rp
4). Perusda Agro Kaltim Utama	0	0	0	0	0	Milyar Rp
5). Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	3159393539	Milyar Rp
6). Perusda Ketenagalistrikan	126000000000	126000000000	126000000000	126000000000	131613771778	Milyar Rp
7). PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)	164,64	157,06	155,15	145,67	470348245985	Milyar Rp
8). PT. Jamkrida	50100000000	50100000000	50100000000	50100000000	50679465219	Milyar Rp

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 45. Grafik Perkembangan Jumlah Asset Pada BUMD, Tahun 2016-2020 (satuan Rp Triliun)



Gambar 46. Grafik Perkembangan Jumlah Modal Pada BUMD, Tahun 2016-2020 (satuan Rp Triliun)



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



TIDAL



WIND



SOLAR



NUCLEAR



BIOMASS



WAVE



HYDROELECTRIC



GEOTERMAL



COAL



Profil Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur), ditetapkan tanggal 22 November 2016 dan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan tanggal 21 Desember 2016. Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
4. Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

5. Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
6. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pertambangan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 17 yakni terkait data luas lahan energi dan sumber daya mineral yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 17. Data Luas Lahan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Luas Lahan Pertambangan dan Pengalihan	4163690372,21	4163689872,35	4163689872,35	4163689872,35	4161728667,35	Ha
a. Pertambangan Batubara	4153297886	4153297886	4153297886	4153297886	4153297886	Ha
b. Pertambangan Migas	9571843	9571843	9571843	9571843	7610638	Ha
c. Pertambangan Batuan Mineral Bukan Logam (sesuai pergub: tanah urug, pasir, batu gunung, batu gamping, batu padas, koral)	820643,21	820143,35	820143,35	820143,35	820143,35	Ha

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

Tabel 18. Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bahan Tambang						
1). Total Produksi Minyak Bumi	34323800	29754180	23720000	21038829	19296846,23	Barel



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2). Total Produksi Gas Alam	568588800	449579200	296830000	231067411	203955179,69	MMBTU
2. Batubara						
1). Produksi	218196784,74	247302813,65	244718585,87	243153868,94	206030322,65	Ton
a. PKP2B	145095068,28	161961153,28	142789002,09	147345965,01	121447164	Ton
b. KP/IUP	73101716,46	85341660,37	101929583,78	95807903,93	84583158,65	Ton
2). Jumlah Perusahaan	1172	1417	1404	1404	1404	Izin
3. Reklamasi Lahan Tambang						
1). Persentase Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	40,85	47,19	54,04	57,12	47,65	%
4. Reklamasi Batu Bara	44809,17	98702,47	101,07	98,18	3543,57	Ha
5. Pertambangan Tanpa Izin						
1). Luas Penambangan liar yang ditertibkan	0	30,20	13,40	2	1,02	Ha
2). Luas area penambangan yang liar	0	37,97	17,40	8	2,25	Ha

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

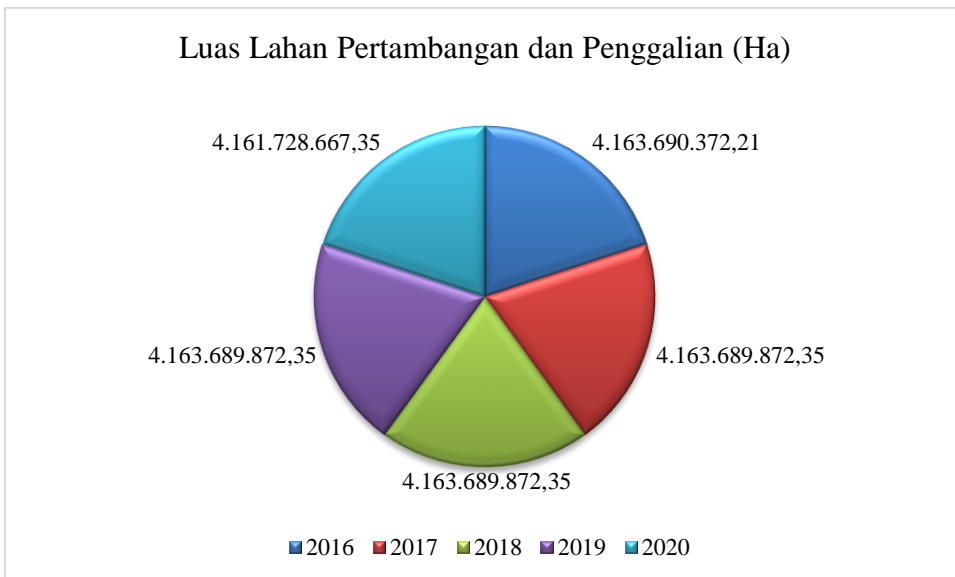
Tabel 19. Data Energi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Sumber Energi Listrik						
1). PLTG						
1. Jumlah	19	19	19	19	23	Unit
2. Kapasitas	94	94	94	94	388	MW
2). PLTU						
1. Jumlah	17	17	17	14	17	Unit
2. Kapasitas	544	544	544	544	483,50	MW
3). PLTD						
1. Jumlah	40	40	40	40	83	Unit
2. Kapasitas	1065	1065	1065	1065	187	MW
4). PLTS						
a. PLTS Terpusat (Komunal)						
1. Jumlah	3	5	3	0	3	Unit
1. Jumlah	3	5	3	0	3	Unit

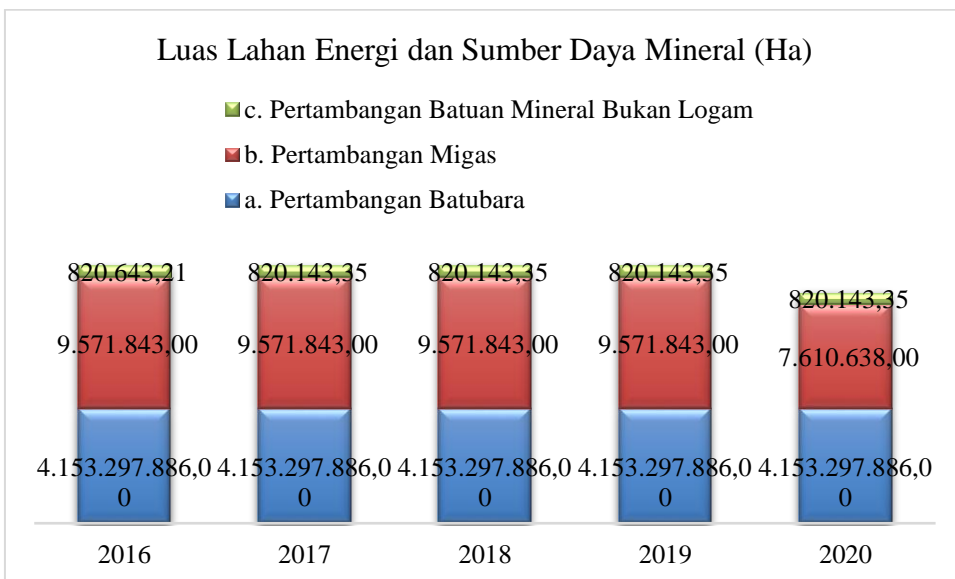


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2. Kapasitas	190	194,60	116,70	0	117,34	kWp
3. Cakupan Wilayah	3	5	3	0	3	Desa
4. Jumlah Sambungan Rumah	3	5	3	0	328	Desa
b. PLTS Tersebar	459	0	0	0	0	Unit
1. Jumlah	459	0	0	0	0	Unit
2. Kapasitas	45900	0	0	0	0	Wp
3. Cakupan Wilayah	2	0	0	0	0	Desa
4. Jumlah Sambungan Rumah	459	0	0	0	0	Rumah
2. Jangkauan Pelayanan Energi Listrik						
1). Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	734771	828635	887113	942593	1011636	KK
2). Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN	82573	77186	70159	68892	93591	KK
3). Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	208616	171595	159028	125899	119890	KK
4). Rasio ketersediaan daya listrik	169,04	202,87	60,80	58,02	13,70	%
5). Rasio Elektrifikasi	79,52	84,07	84,21	88,93	90,21	%
6). Persentase Desa/KOta Berlistrik	96,60	96,92	98,94	99,13	100	%
3. Sarana Pelayanan Bahan Bakar						
1). SPBU	24	27	27	29	37	Unit
2). UPPDN Pertamina	3	3	3	3	3	Unit
3). SPBE	5	5	5	5	7	Unit
4). Agen LPG	47	47	47	48	48	Unit
4. Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	1,95	1,38	3,81	4,48	4,80	%
5. Jumlah Instalasi Biogas	532	573	604	0	644	Unit

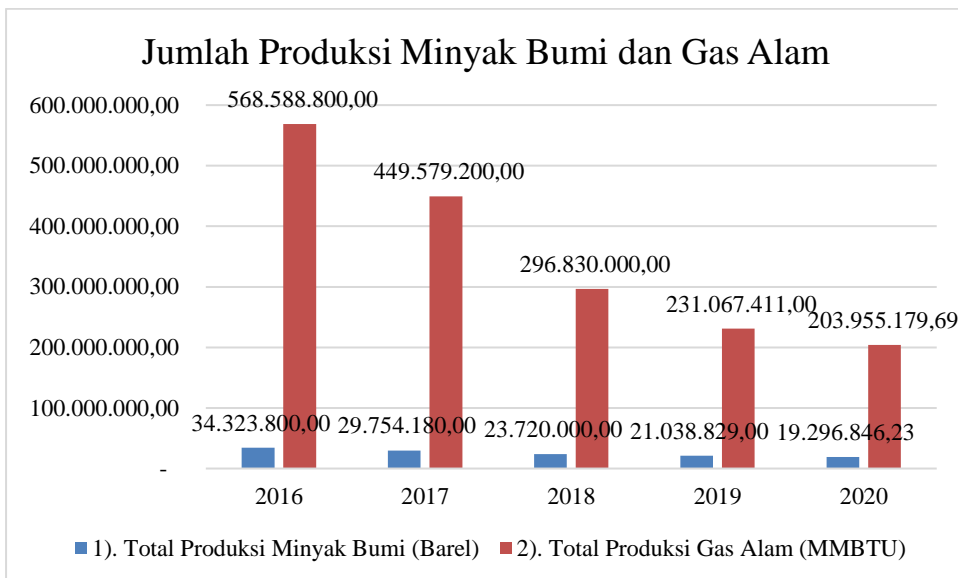
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



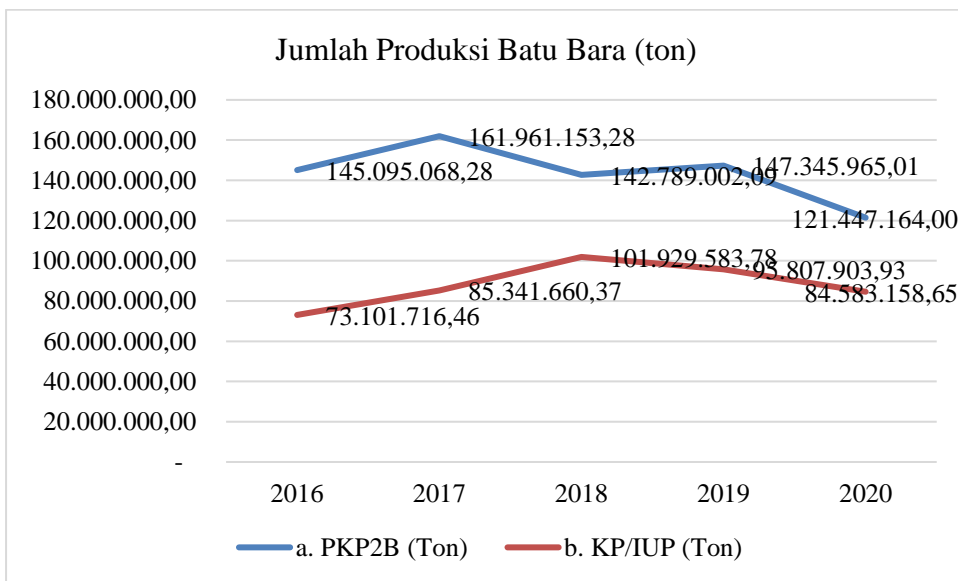
Gambar 47. Grafik Luas Lahan Pertambangan dan Penggalian (Ha)



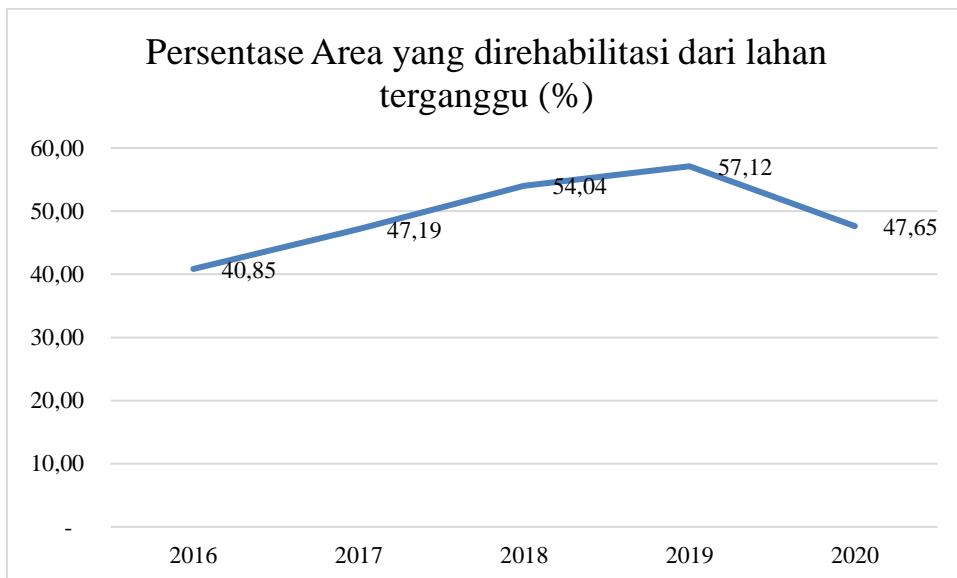
Gambar 48. Grafik Luas Lahan Energi dan Sumber Daya Mineral (Ha)



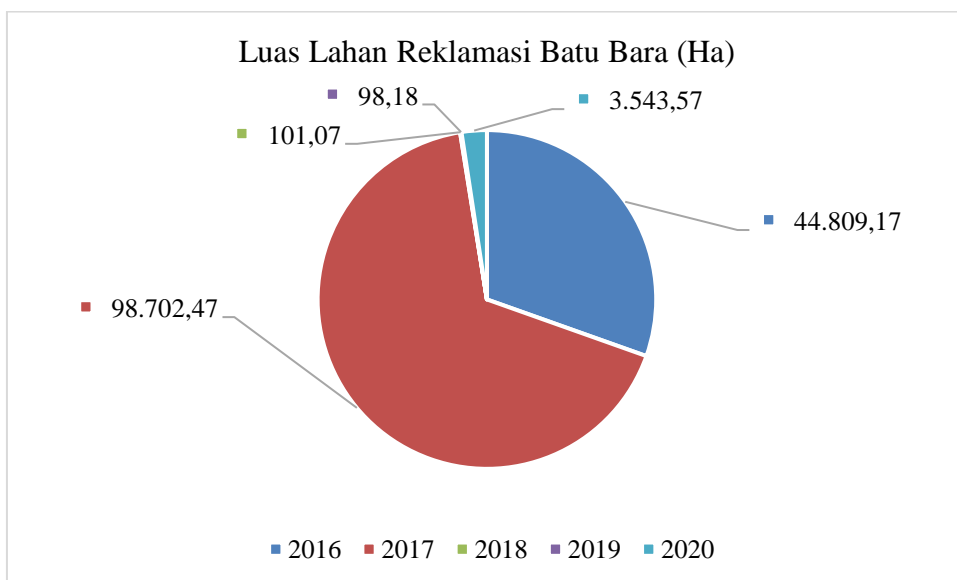
Gambar 49. Grafik Jumlah Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam



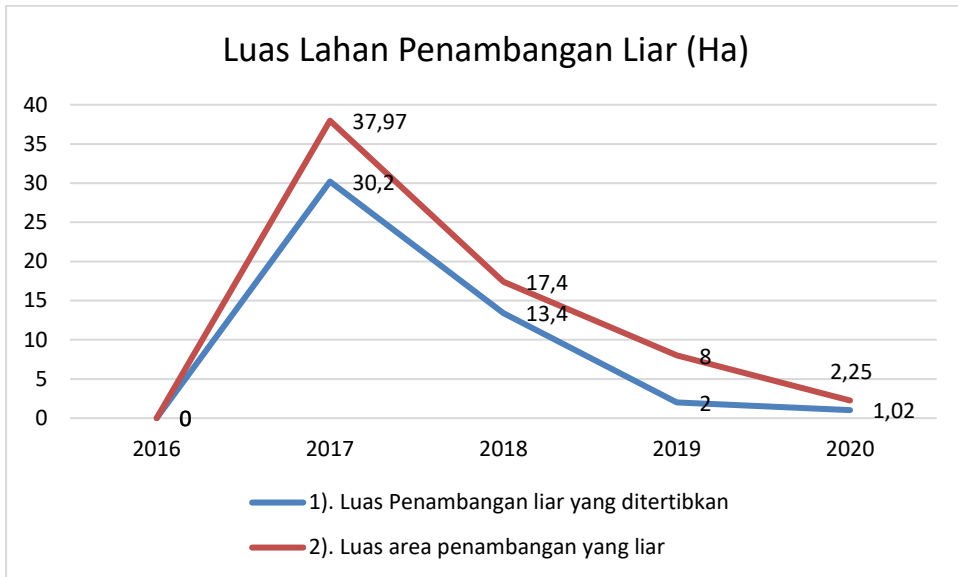
Gambar 50. Grafik Jumlah Produksi Batu Bara (ton)



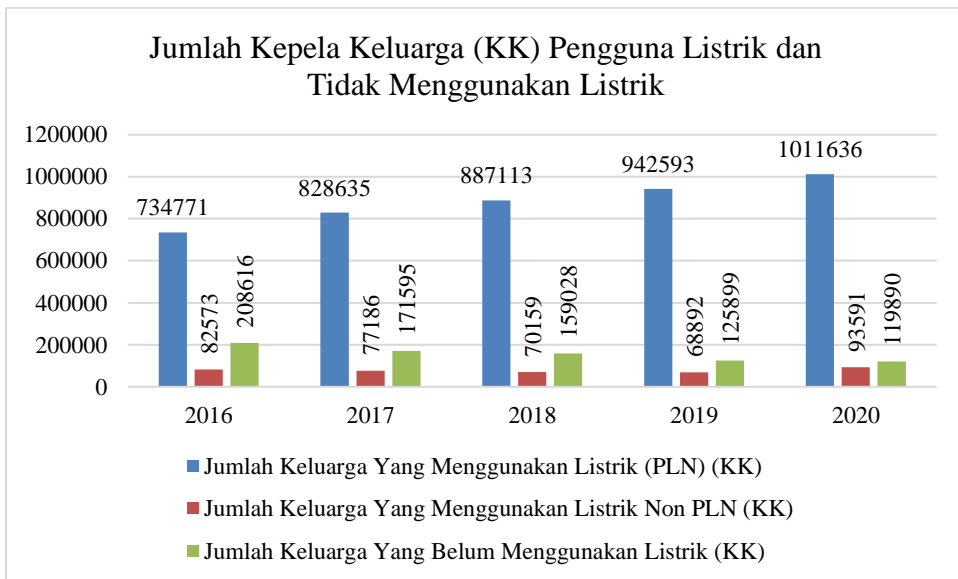
Gambar 51. Grafik Persentase Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu (%)



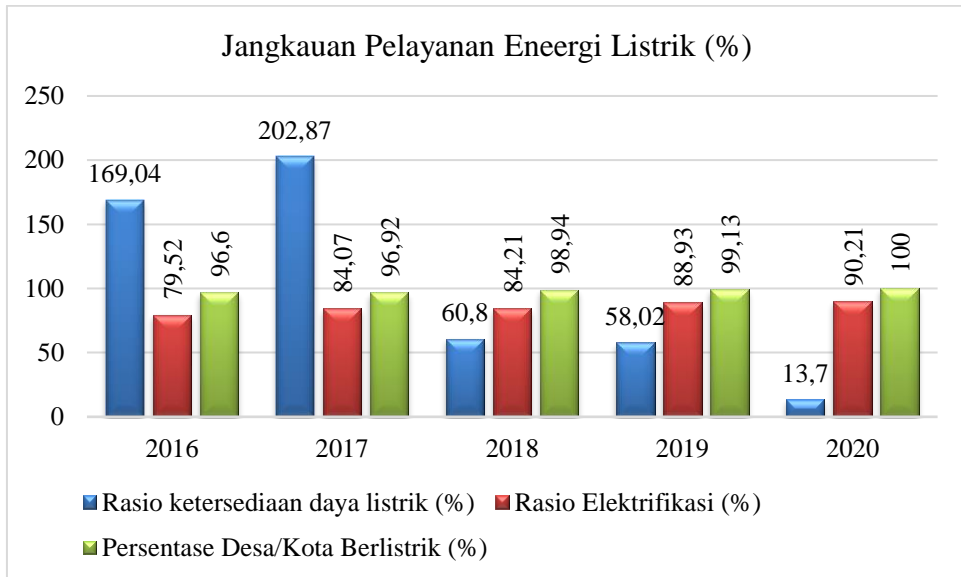
Gambar 52. Grafik Luas Lahan Reklamasi Batu Bara (Ha)



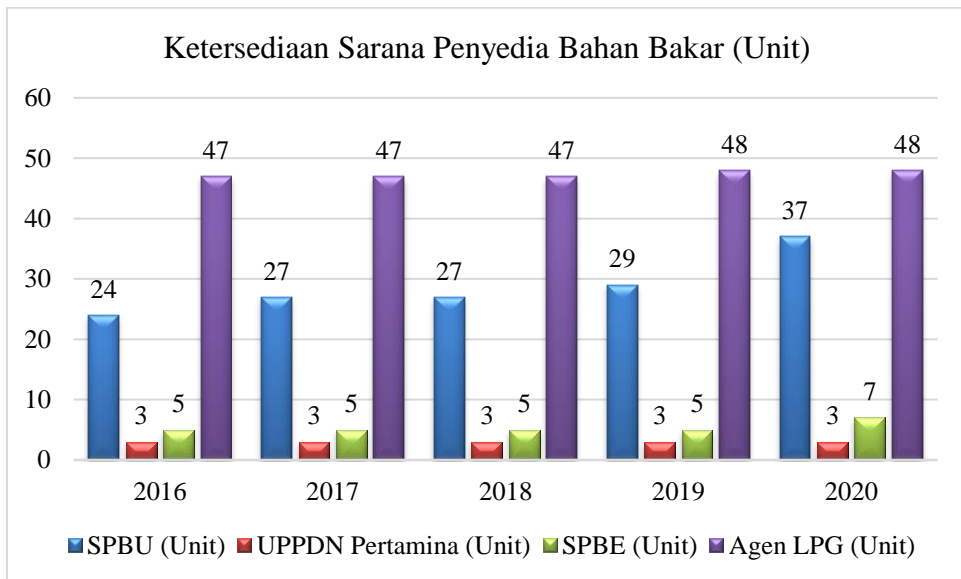
Gambar 53. Grafik Luas Lahan Penambangan Liar (Ha)



Gambar 54. Grafik Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pengguna Listrik dan Tidak Menggunakan Listrik



Gambar 55. Grafik Jangkauan Pelayanan Eneergi Listrik (%)



Gambar 56. Grafik Ketersediaan Sarana Penyedia Bahan Bakar (Unit)



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS KEHUTANAN





Profil Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara struktural dijalankan oleh 12 Seksi yang berada dalam 4 Bidang, serta operasionalisasinya juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Secara lebih detail, tugas pokok unit-unit kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016.

Visi

Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Terpadu dan Berkelanjutan Berperspektif Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur

Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kehutanan Kaltim tersebut di atas, maka Misi dan Tujuan masing-masing Misi, ditetapkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
2. Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
3. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dalam Rangka Meningkatkan Persediaan Karbon Hutan.
4. Meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Didalam dan Atau Sekitar Kawasan Hutan.

Pelestarian Lingkungan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 20 yakni terkait data jumlah pelestarian lingkungan hutan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian tabel 21 yakni terkait data lahan dan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tabel 22 yakni terkait data kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 20. Data Pelestarian Lingkungan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	42464,21	40901,85	13136,77	11170	3506	Ha
2. Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	42464,21	40901,85	13136,77	11170	3506	Ha
3. Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	7777136,84	7776706,84	7776706,84	8172319,08	8172319,08	Ha
4. Luas Lahan Hutan Rakyat	0	0	5299,98	8603,98	300	Ha
5. Luas Lahan Hutan Kota	0	1677,63	1677,63	1677,63	1113	Ha
6. Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Hutan	0	0	9	24	32	kegiatan
7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	100	100	100	100	100	%

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Tabel 21. Data Luas Lahan Dan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

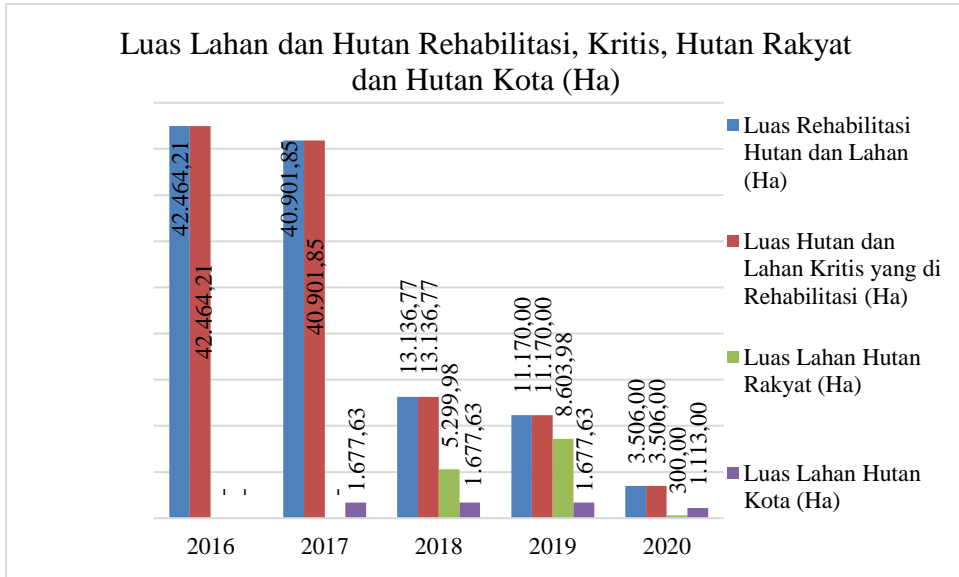
Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Luas Lahan Hutan	8434906	8434906	8434906	8256767	8256767	Ha
1). Hutan Lindung	1844969	1844969	1844969	1792031	1792031	Ha
2). Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	438390	438390	438390	437879	437879	Ha
3). Hutan Produksi Tetap	3027099	3027099	3027099	3024576	3024576	Ha
4). Hutan Produksi Terbatas	2908255	2908255	2908255	2881564	2881564	Ha
5). Tubuh Air	95755	95755	95755	95755	95755	Ha
6). Hutan Produksi yang Dapat di Konservasi (HPK)	120438	120438	120438	120712	120712	Ha
7). Areal Penggunaan Lain	4299785	4299785	4299785	4477924	4477924	Ha

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

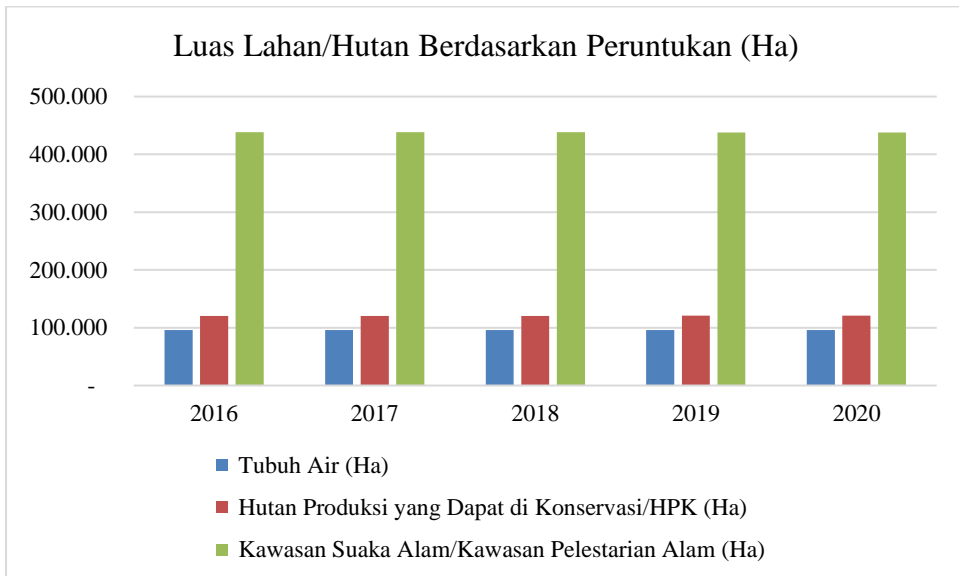
Tabel 22. Data Kawasan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kebakaran Hutan						
1). Luas Areal Hutan yang Terbakar	43136,78	676,38	27893,20	68524	5221	Ha
2). Jumlah Korban Jiwa	0	0	0	0	0	Jiwa
3). Jumlah Titik Hotspot Kebakaran	116	105	384	991	312	Lokasi
4). Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	1	25	120	Kasus
2. Kawasan Hutan (luasan)	8434906	8434906	8434906	8256767	8256767	Ha
3. Luasan Inventarisasi Kawasan	57211,43	0	0	0	n/a	Ha
4. Luas Penanaman Mangrove	40	55	0	131	170	Ha
5. Luas Kerusakan Kawasan Hutan	43136,78	676,38	27893,20	68524	5221	Ha
6. Jumlah HCV dikawasan hutan	11000	11000	7742	13625	75932,35	Ha
7. Jumlah Desa yang Mendapatkan Ijin Perhutanan Sosial	21	16	2	11	7	Desa
8. Rasio Kerusakan Kawasan Hutan	0,51	0,01	0,33	0,83	0,06	%
9. Jumlah Desa yang mendapatkan ijin Perhutanan Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	54	Desa

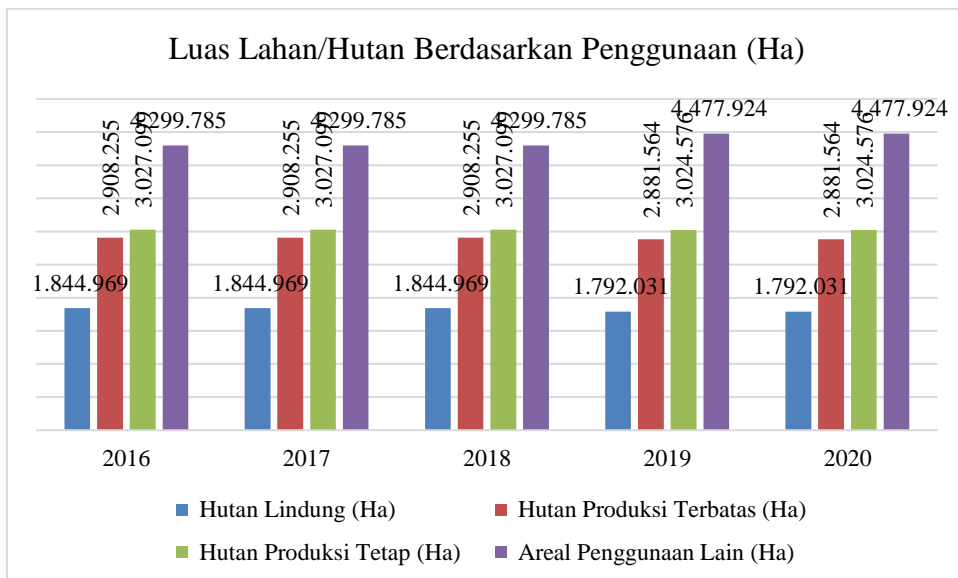
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 57. Grafik Luas Lahan dan Hutan Rehabilitasi, Kritis, Hutan Rakyat dan Hutan Kota (Ha)



Gambar 58. Grafik Luas Lahan/Hutan Berdasarkan Peruntukan (Ha)



Gambar 59. Grafik Luas Lahan/Hutan Berdasarkan Penggunaan (Ha)



Gambar 60. Grafik Luas dan Jumlah Lokasi Kebakaran Hutan



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





Profil Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilandasi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, dimana Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang sistem data gender dan anak;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kesetaraan gender;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Penyelenggaraan urusan sekretariat;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 23 yakni terkait data jumlah penduduk yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian tabel 23 merupakan data terkait jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kaltim tahun 2016-2020 dan tabel 24 merupakan data jumlah pemberdayaan perempuan dan perlindungan ibu dan anak dari tahun 2016-2020.

Tabel 23. Data Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah Penduduk	3501232	3575449	3648835	3721389	3769073	Orang
1). Laki-Laki	1836293	1874805	1912979	1950883	1955542	Orang
2). Perempuan	1664939	1700644	1735856	1770506	1813531	Orang



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3). Sex Ratio	110,29	110,24	110,20	110,19	107,83	Poin
2. Jumlah Penduduk menurut Komposisi Usia						
a. Laki - Laki						
1). 0-4	178282	178560	178714	178767	154848	Orang
2). 5-9	166453	168560	170637	172600	194908	Orang
3). 10-14	157495	158830	160087	161463	188691	Orang
4). 15-19	152648	154826	157128	159056	155933	Orang
5). 20-24	156097	156842	157724	159242	170460	Orang
6). 25-29	165878	166181	166580	166530	162765	Orang
7). 30-34	167378	169733	171259	172881	157115	Orang
8). 35-39	158513	161642	164754	167647	166121	Orang
9). 40-44	143284	147303	151483	155321	155732	Orang
10). 45-49	122377	127475	132074	136463	131815	Orang
11). 50-54	95129	100010	105068	110187	109017	Orang
12). 55-59	70190	74111	78114	82314	81267	Orang
13). 60-64	47583	50986	54375	57775	58056	Orang
14). 65-69	27476	30115	32990	35934	35733	Orang
15). 70-74	14754	16068	17528	19261	17650	Orang
16). 75+	12756	13563	14464	15442	15431	Orang
b. Perempuan						
1). 0-4	170756	170983	171078	171036	144420	Orang
2). 5-9	156510	159159	161923	164392	182254	Orang
3). 10-14	147805	148991	149852	150967	176372	Orang
4). 15-19	143804	145824	147985	149607	147092	Orang
5). 20-24	145408	145950	146517	147735	153622	Orang
6). 25-29	150396	150932	151570	151814	151581	Orang
7). 30-34	151503	153197	154140	155070	152314	Orang
8). 35-39	140959	144257	147529	150231	159314	Orang
9). 40-44	124998	128530	132253	136047	143932	Orang
10). 45-49	105785	110229	114189	117954	121254	Orang
11). 50-54	81234	85674	90170	94661	98102	Orang
12). 55-59	57880	62009	66102	70238	73300	Orang
13). 60-64	36465	39734	43262	46853	51150	Orang
14). 65-69	22760	24563	26559	28880	27567	Orang
15). 70-74	13870	14891	16075	17376	15697	Orang
16). 75+	14806	15721	16652	17645	15560	Orang
c. Jumlah Penduduk						
1). 0-4	349038	349543	349792	349803	299268	Orang
2). 5-9	322963	327719	332560	336992	377162	Orang
3). 10-14	305300	307821	309939	312430	365063	Orang
4). 15-19	296452	300650	305113	308663	303025	Orang
5). 20-24	301505	302792	304241	306977	324082	Orang
6). 25-29	316274	317113	318150	318344	314346	Orang
7). 30-34	318881	322930	325399	327951	309429	Orang
8). 35-39	299472	305899	312283	317878	325435	Orang
9). 40-44	268282	275833	283736	291368	299664	Orang
10). 45-49	228162	237704	246263	254417	253069	Orang
11). 50-54	176363	185684	195238	204848	207119	Orang
12). 55-59	128070	136120	144216	152552	154567	Orang
13). 60-64	84048	90720	97637	104628	109206	Orang



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
14). 65-69	50236	54678	59549	64814	63300	Orang
15). 70-74	28624	30959	33603	36637	33347	Orang
16). 75+	27562	29284	31116	33087	30991	Orang

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

Tabel 24. Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	3.441.731	3.505.159	3.552.191	3.630.765	3.769.073	Orang
1. Tidak Sekolah	775.034	785.404	837.273	892.085	974.980	Orang
2. Belum Tamat SD	434.116	444.567	435.338	424.646	453.600	Orang
3. SD	655.720	656.769	653.529	648.605	645.092	Orang
4. SMP	489.233	497.707	495.007	498.237	504.820	Orang
5. SMA	859.794	883.531	884.148	908.575	924.398	Orang
6. Perguruan Tinggi	227.834	237.181	246.896	3.630.765	266.183	Orang

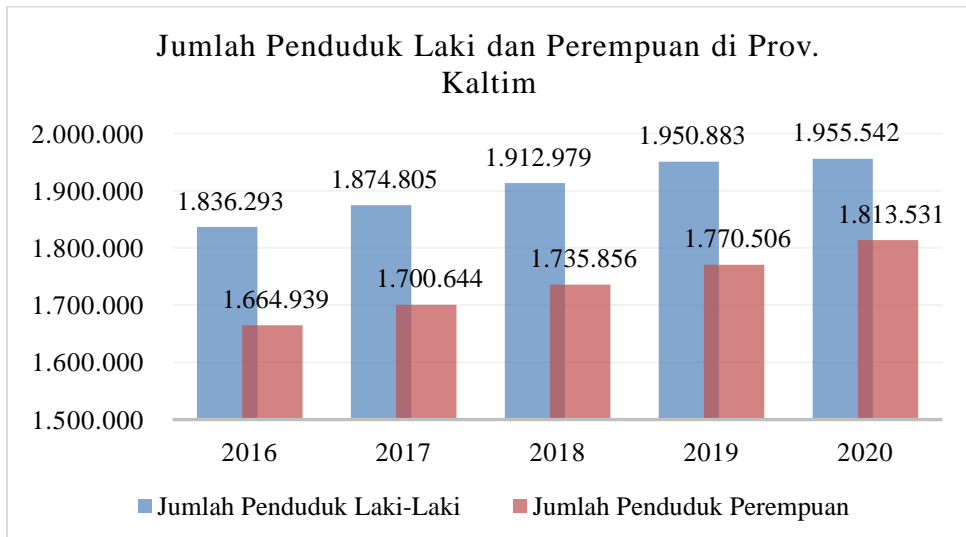
Tabel 25. Data Jumlah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah Pekerja Perempuan	429026	45209	38853	0	34567	orang
1). Jumlah Pekerja Perempuan yang Menempati Jabatan di Lembaga Pemerintah	339	354	343	n/a	2919	orang
a. Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon II	10	11	10	n/a	45	orang
b. Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon III	58	58	65	n/a	413	orang
c. Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon IV	271	285	268	n/a	2445	orang
2). Jumlah Pekerja Perempuan PNS	2569	6080	5103	n/a	31664	Orang
3). Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	426118	38775	33407	n/a	n/a	orang

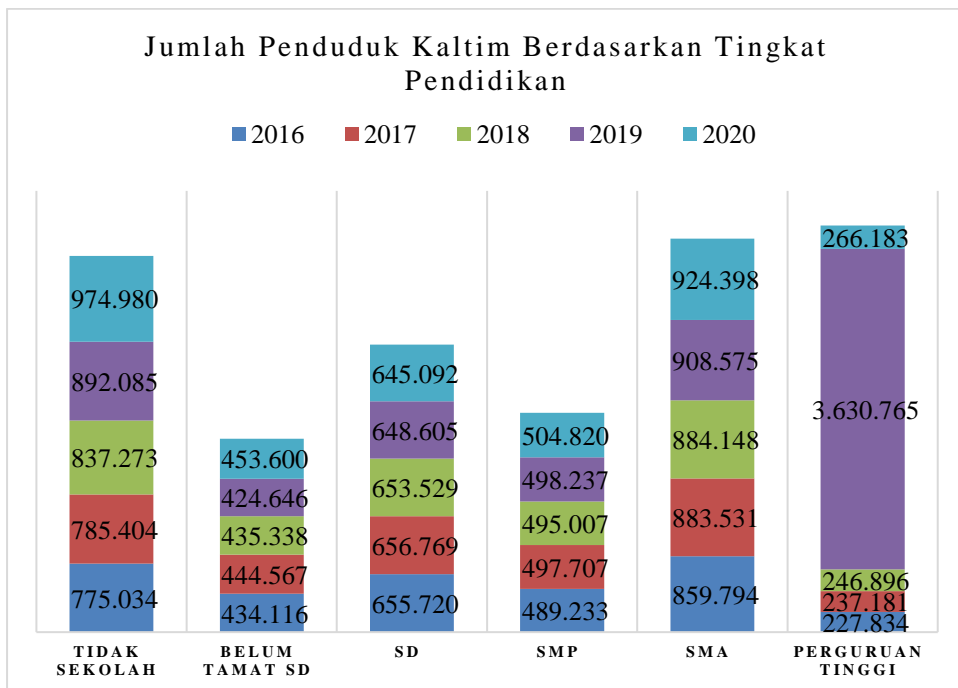


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	61	241	196	168	272	Korban
1). Rasio KDRT	7,01	27,11	21,60	18,16	27200	%
3. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	401	736	500	628	596	Kasus
4. Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	45	143	296	294	295	Pengaduan
6. Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislative	13	11	n/a	16	16	%
7. Jumlah Pekerja usia 15 tahun ke atas	14426	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang
8. Proporsi anak yang kembali bersekolah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
9. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	13,20	6,82	6,75	0	58,99	%
10. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	42611800	3877500	3340700	0	0	%
11. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0	0	0	0	0	%
12. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	92,82	92,59	92,73	94,12	93,83	%
13. Pekerja anak usia 5-14 tahun	0	0	0	n/a	n/a	Orang

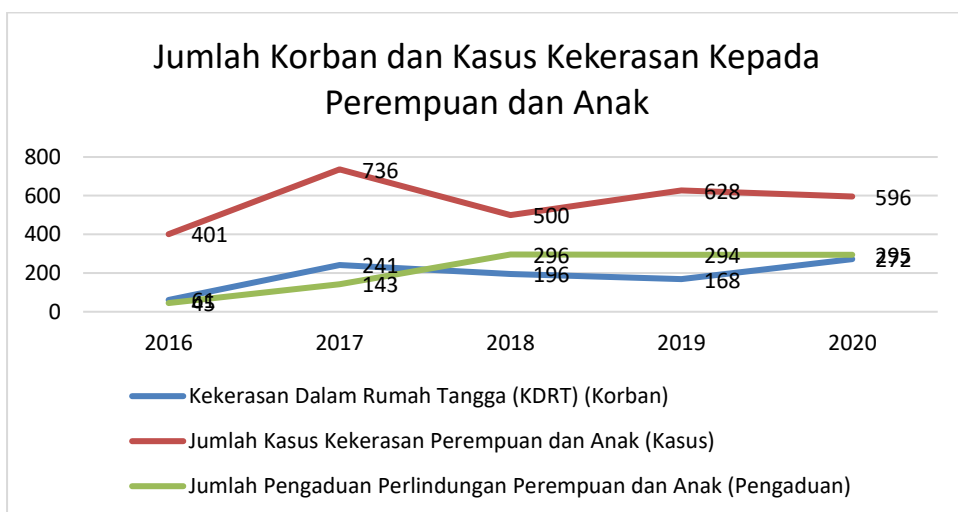
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 61. Grafik Jumlah Penduduk Laki dan Perempuan di Prov. Kaltim



Gambar 62. Grafik Jumlah Penduduk Kaltim Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 63. Grafik Jumlah Korban dan Kasus Kekerasan Kepada Perempuan dan Anak



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Profil Perangkat Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lainnya. Dukungan TIK bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

Dinas Kominfo Prov. Kaltim berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK serta melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penjelasan beberapa hal terkait SPBE. Sesuai penjabaran dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan



Informatika Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika (kominfo) sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informasi;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi telematika;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dokumentasi dan informasi;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

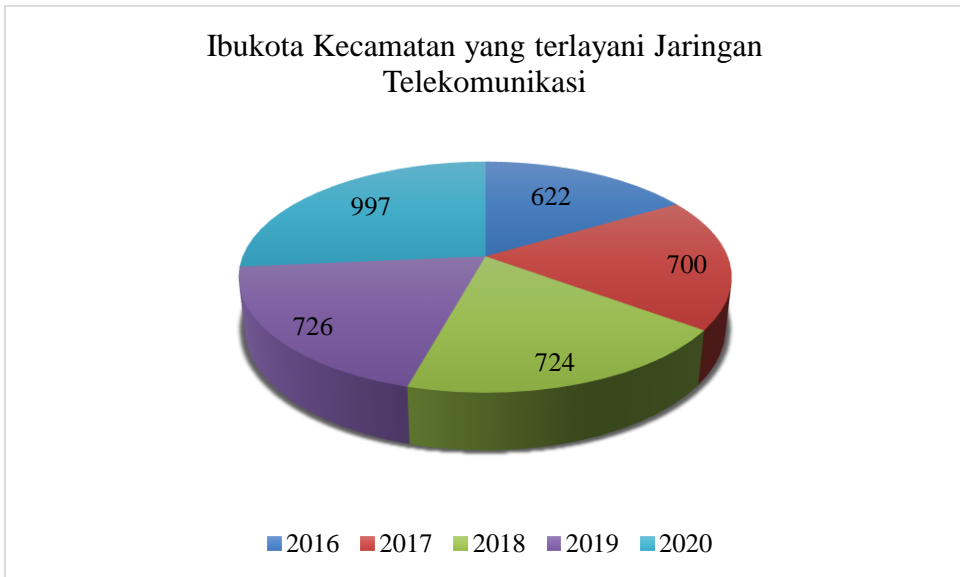
Data Pos dan Telekomunikasi, Penyiaran Media Elektronik serta Surat Kabar

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 27 yang berkaitan dengan data jumlah Pos dan Telekomunikasi pada wilayah Provinsi Kaltim tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020,

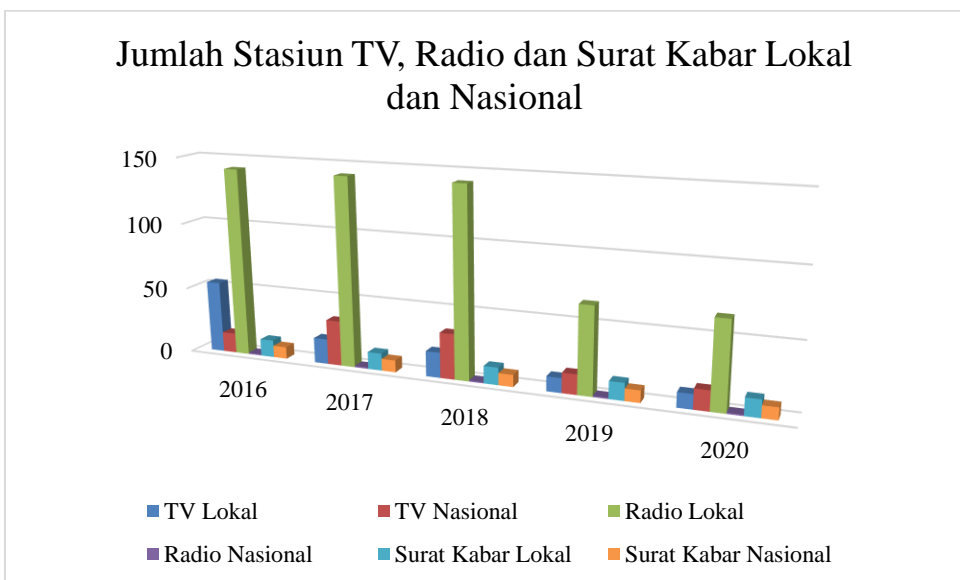
Tabel 26. Data Pos dan Telekomunikasi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Pos dan Telekomunikasi						
1. Jumlah Provider	6	5	5	5	5	Provider
2. Jumlah Pameran/EXPO	140	140	67	67	0	Pameran
3. Ibukota Kecamatan yang terlayani Jaringan Telekomunikasi	622	700	724	726	997	Desa
4. Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	199	199	215	8	10	aplikasi
5. Jumlah Jaringan Telepon Genggam	0	0	n/a	0	5	Unit
6. Jaringan Telepon (operator telp kabel)	0	0	n/a	n/a	1	Unit
7. Desa yang Terlayaninya Jaringan Telekomunikasi	11	11	11	11	11	Desa
8. Stasiun Radio	178	178	178	178	178	Stasiun
9. Website Daerah	73	73	73	30	30	Unit
Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk						
1. TV	69	53	53	26	26	Unit
a. Lokal	54	19	19	11	11	TV
b. Nasional	15	34	34	15	15	TV
2. Radio	143	143	143	66	66	Unit
a. Lokal	142	142	142	65	65	Radio
b. Nasional	1	1	1	1	1	Radio
Jenis Surat Kabar Yang Masuk ke Daerah						
1. Lokal	13	13	13	13	13	Surat Kabar
2. Nasional	9	9	9	9	9	Surat Kabar

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 64. Grafik Ibukota Kecamatan yang terlayani Jaringan Telekomunikasi



Gambar 65. Grafik Jumlah Stasiun TV, Radio dan Surat Kabar Lokal dan Nasional



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS KESEHATAN





Profil Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dimana Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencanastrategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kesehatan Masyarakat, Derajat Kesehatan dan Angka Kesakitan serta Sarana dan Tenaga Kesehatan Pada Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 27 yakni terkait Data Kesehatan Masyarakat, Derajat Kesehatan dan Angka Kesakitan di Provinsi Kaltim tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan tabel 28 merupakan data terkait Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Provinsi Kaltim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 27. Data Kesehatan Masyarakat, Derajat Kesehatan dan Angka Kesakitan di Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Kesehatan Masyarakat						
1. Jumlah penderita gangguan jiwa	3307	4264	8296	8410	4154	Orang
2. Jumlah penderita gizi Buruk	354	293	212	227	137	Balita
3. Jumlah Balita	349038	349543	349792	349803	349644	Balita
4. Jumlah Seluruh Balita Kurang Gizi	n/a	n/a	n/a	6702	10597	Balita
5. Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk	354	293	212	227	137	Balita
6. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	0	10100	0	0	0	%
7. Persentase Gizi Balita (Gizi Baik)	0,10	0,08	0,06	0,06	0,04	%
8. Persentase Balita Gizi Buruk	3	4	3	3	2	%
9. Jumlah Anak Balita (1-5 Tahun)	278289	278754	279056	279182	279144	Balita
10. Penyebaran HIV/Aids	n/a	567	n/a	n/a	n/a	Orang
11. Prevalensi HIV/Aids pada Populasi Dewasa	n/a	52	46	67,30	28,20	%
12. Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV Lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	72	57	n/a	n/a	n/a	%
13. Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0,35	n/a	n/a	n/a	n/a	per 1000 penduduk
14. Tingkat Kematian Akibat Malaria	0,16	n/a	n/a	0,24	0,18	%
15. Prevalensi Tuberkulosis terserap 100.000 penduduk	4,19	133	n/a	n/a	n/a	%
16. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	87,46	77	n/a	n/a	n/a	%
17. Proporsi Kasus TB yang terdeteksi diobati dan sembuh dalam program DOTS	31	70	n/a	n/a	n/a	%
18. Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	69641	68913	70351	69746	63890	Kali
19. Persentase cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	88,10	85,42	85,38	89,29	84,33	%
20. Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	37,75	56,17	93,94	97,58	95,97	%
21. Jumlah pelayanan kepada Ibu nifas	61220	62970	65649	64922	29686	orang
22. Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	7817	7264	7271	6781	6748	Orang



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
23. Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	54645	53138	95178	76408	65394	Orang
24. Jumlah Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan	44	44	54	53	57	Unit
25. Persentase Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
26. Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
27. Jumlah Penderita Sakit Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang
Derajat Kesehatan						
1. Jumlah Lahir Hidup	69372	70945	71176	53421	38200	Orang
2. Jumlah Kematian Neonatal	486	462	498	519	305	Orang
3. Jumlah Bayi Mati	644	565	671	688	662	Orang
4. Jumlah Balita Mati	761	73	74	74	43	Jiwa
5. Jumlah Kematian Ibu	95	103	74	79	92	Orang
Angka Kesakitan						
1. Jumlah Kasus Baru TB BTA+	2529	3237	3322	3495	1510	Kasus
2. Jumlah Seluruh Kasus TB	5040	6120	6850	7920	3893	Kasus
3. Kasus TB Anak 0-14 Tahun	479	546	760	1041	375	Kasus
4. Angka Kesembuhan BTA+	71	59	89	42	23	%
5. Angka Keberhasilan Pengobatan (Sukses Rate) BTA+	84	74	92	94	69	%
6. Angka Kematian Selama Pengobatan	2	1	3	4	n/a	
7. Pneumonia Balita Ditemukan dan Ditangani	6908	7039	5860	4512	2167	
8. Jumlah Kasus HIV	818	1202	1115	1369	1012	Kasus
9. Jumlah Kasus AIDS	51	358	171	319	177	Kasus
10. Jumlah Kematian Karena AIDS	85	17	32	32	22	Jiwa
11. Persentase Diare Ditemukan dan Ditangani	99	85,90	83,80	67,93	33,62	%
12. Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	164	160	181	202	115	Kasus
13. Angka Prevalensi Kusta	0,71	0,50	0,60	n/a	n/a	
14. AFP Rate (Non Polio) < 15 th	1,96	1,88	2	1,88	1,09	
15. Incidence Rate DBD	46,70	104	178,60	61,10	55,50	
16. Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasit Incidence)	0,05	0,60	0,63	0,61	0,41	
17. Angka Kesakitan Filariasis	5	4	4	4	n/a	
18. Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	13,75	84,73	56,86	53,10	31,20	%
19. Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun	1,17	1,83	1,30	1,30	n/a	%
20. Desa/Kelurahan Terkena KLB Ditangani < 24 Jam	56	56	56	15	223	Desa

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Tabel 28. Data Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Sarana Kesehatan						
1. Jumlah Puskesmas	1147	1153	1154	1155	1168	Unit
1). Jumlah Puskesmas Induk	180	186	186	187	187	Unit
2). Jumlah Puskesmas Pembantu	714	714	716	716	730	Unit
3). Jumlah Puskesmas Keliling	151	151	150	150	150	Unit
4). Jumlah Puskesmas Rawat Inap	102	102	102	102	101	Unit
5). Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	78	84	84	85	86	Unit
2. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	13	13	19	19	19	Unit
1). Jumlah RSUD Tipe A	1	1	1	0	0	Unit
2). Jumlah RSUD Tipe B	3	3	4	4	4	Unit
3). Jumlah RSUD Tipe C	9	9	7	8	8	Unit
4). Jumlah RSUD Tipe D	0	0	7	7	7	Unit
3. Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta	16	16	19	19	22	Unit
1). Rumah Sakit Umum Swasta Tipe A	0	0	0	0	0	Unit
2). Rumah Sakit Umum Swasta Tipe B	1	1	1	1	1	Unit
3). Rumah Sakit Umum Swasta Tipe C	6	6	9	11	11	Unit
4). Rumah Sakit Umum Swasta Tipe D	9	9	9	7	10	Unit
5). Rumah Sakit Umum Swasta yang belum ada penetapan kelas	0	0	0	0	0	Unit
4. Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus	11	11	12	11	12	Unit
1). Jumlah RS Bersalin	10	10	10	9	9	Unit
2). Jumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	1	1	1	1	1	Unit
3). Jumlah RS Ketergantungan Obat (RSKO)	0	0	0	0	0	Unit
4). Jumlah RS Kusta	0	0	0	0	0	Unit
5). Rumah Sakit Mata	0	0	1	1	2	Unit
5. Jumlah Rumah Sakit Umum AD/AU/AL/Polri	4	4	4	4	4	Unit
6. Jumlah Seluruh Rumah Sakit	44	44	54	53	57	Unit
7. Jumlah Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	Unit
8. Klinik Praktek/Dokter	775	775	412	412	285	Unit
9. Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gadar Level 1	44	44	54	53	57	Unit
10. Posyandu						
1). Jumlah Posyandu Aktif	2368	2283	2315	1974	1974	Unit
2). Jumlah Posyandu	4250	4389	4900	4660	4687	Unit
3). Rasio Posyandu per 100 Balita	1,22	1,26	1,40	1,33	1,34	
11. UKBM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
1. Jumlah Polindes	184	184	n/a	n/a	n/a	Unit
2). Jumlah Poskesdes	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit
3). Jumlah Posbindu	n/a	n/a	1894	1894	n/a	Unit
12. Jumlah Apotek	524	524	637	704	759	Unit
13. Desa Siaga						
1). Jumlah Desa Siaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Desa
2). Jumlah Desa Siaga Aktif	672	645	n/a	n/a	n/a	Desa
3). Persentase Desa Siaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
Tenaga Kesehatan						
1.) Jumlah Dokter	2112	2112	1784	1815	2032	Orang
1. Dokter Umum	1114	1114	1010	941	1106	Orang

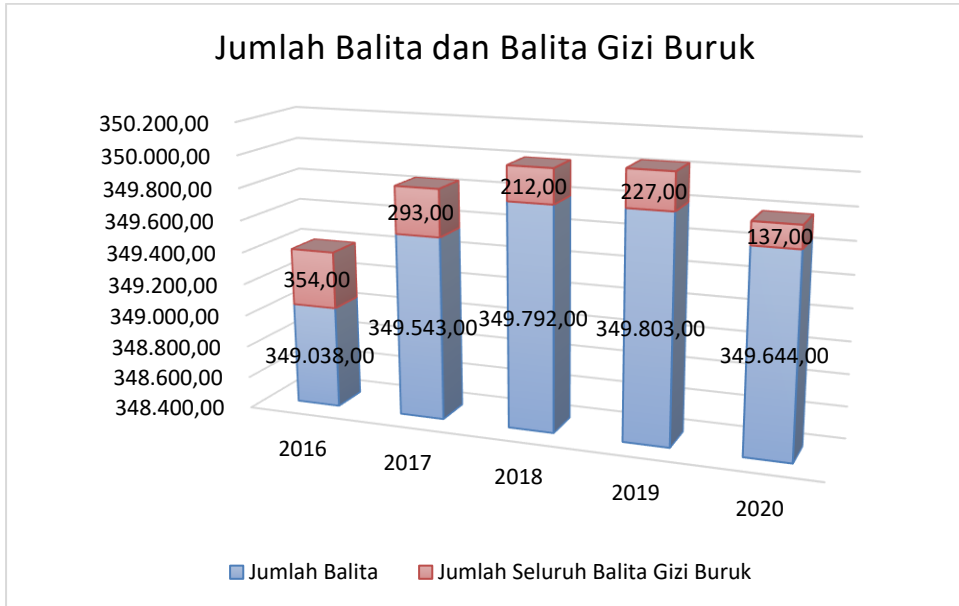


2. Dokter Spesialis	678	678	503	597	649	Orang
3. Dokter Gigi	320	320	271	277	277	Orang
4. Jumlah Dokter Gigi Spesialis	n/a	n/a	38	37	43	Orang
2). Perawat	6662	6662	7823	6524	7510	Orang
3). Bidan	2996	2996	3421	3105	3526	Orang
4). Ahli Penyehatan Lingkungan	298	298	269	299	340	Orang
5). Sarjana Farmasi	n/a	n/a	n/a	740	835	Orang
6). Ahli Kesehatan Masyarakat	190	190	354	454	519	Orang
7). Apoteker	294	294	312	368	419	Orang
8). Ahli Gizi	254	254	347	347	333	Orang
9). Analis Laboratorium	n/a	n/a	n/a	636	760	Orang
10). Ahli Rontgen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang
11). Tenaga Medis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang
12). Bidan Desa	970	970	n/a	253	250	Orang
13). Perawat Gigi	179	179	n/a	143	151	Orang
14). Nutrisionis	285	285	n/a	n/a	n/a	Orang
15). Radiografer	188	188	184	125	153	Orang
16). Perkam Medis	97	97	163	129	137	Orang
17). Teknisi Elektromedis	50	50	53	36	39	Orang

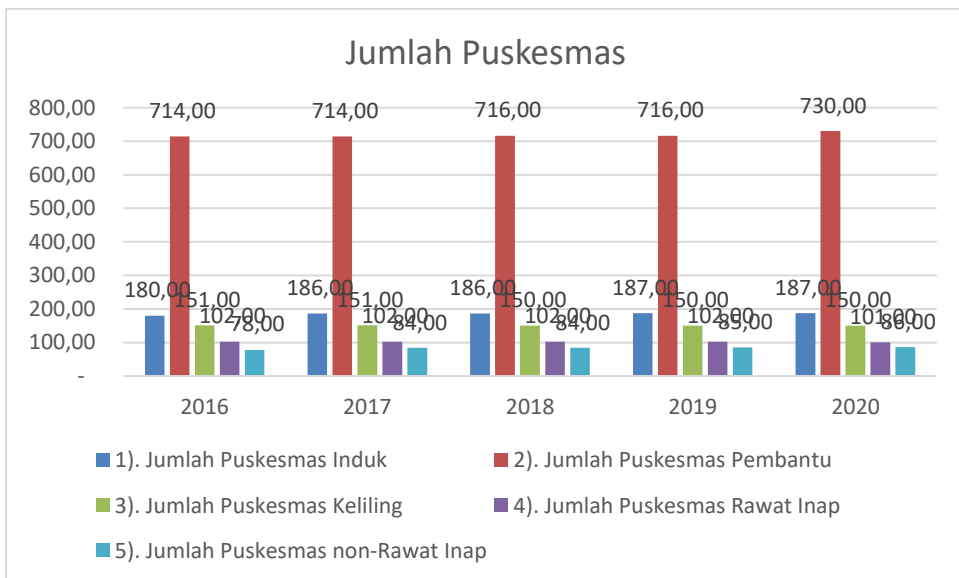
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



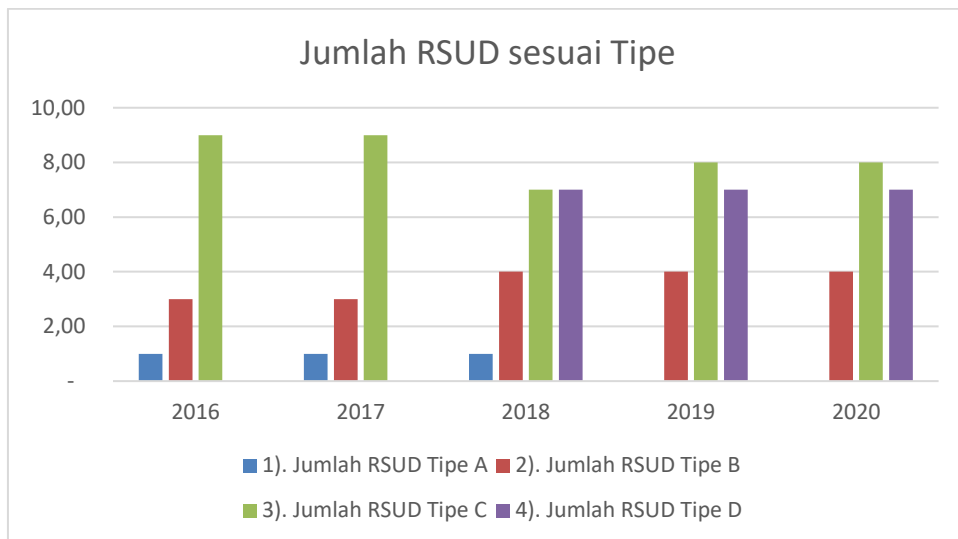
Gambar 66. Grafik Jumlah Penderita Gangguan Jiwa dan Gizi Buruk



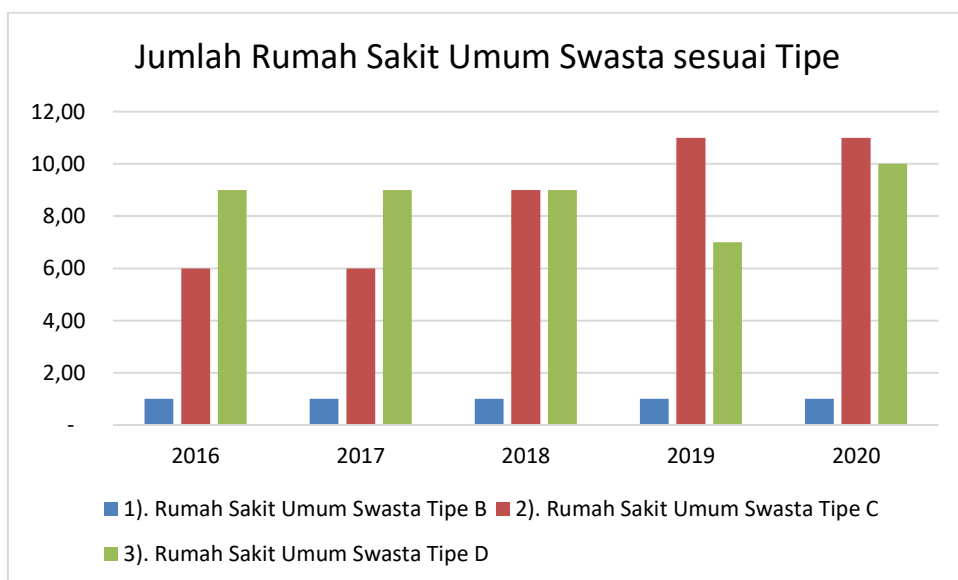
Gambar 67. Grafik Jumlah Balita dan Balita Gizi Buruk



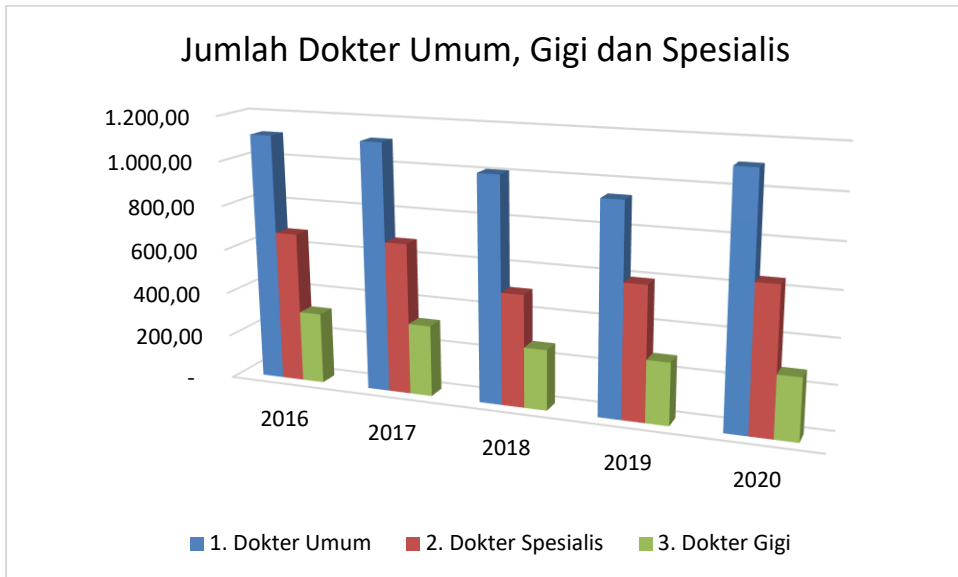
Gambar 68. Grafik Jumlah Puskesmas



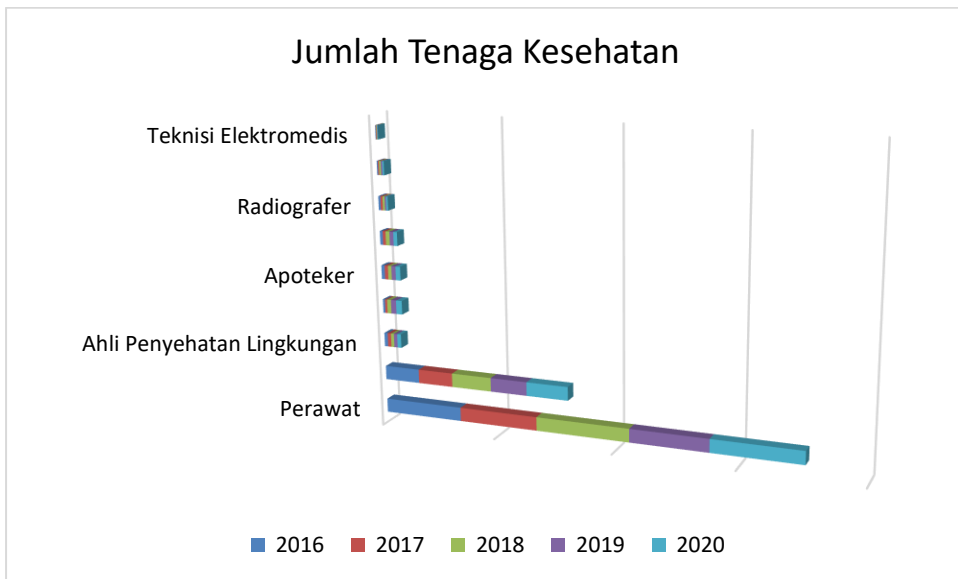
Gambar 69. Grafik Jumlah RSUD sesuai Tipe



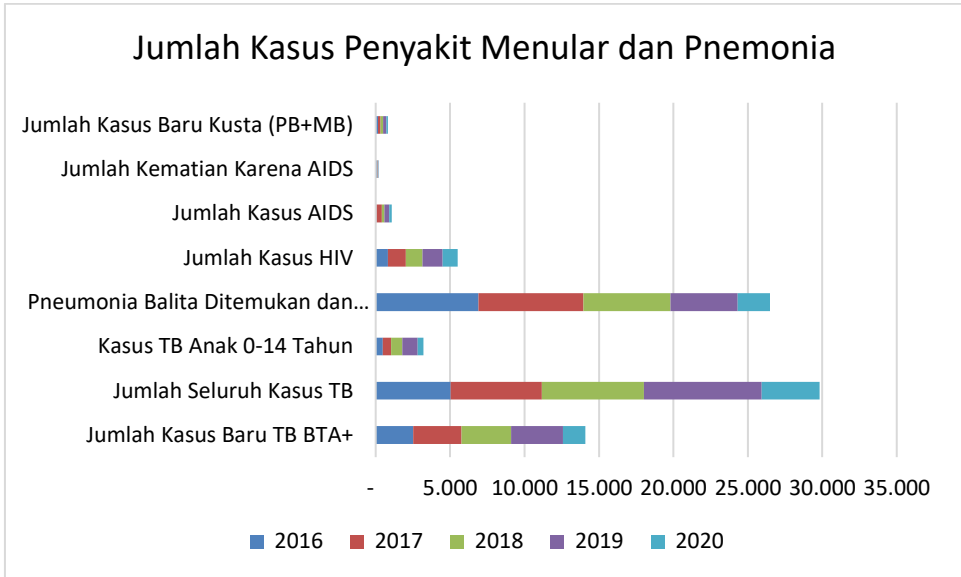
Gambar 70. Grafik Jumlah Rumah Sakit sesuai Tipe



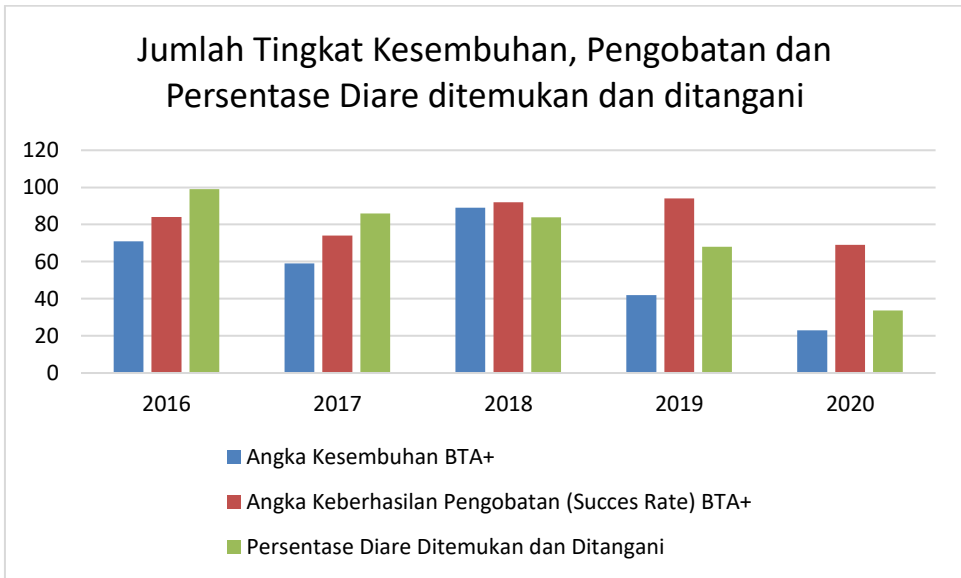
Gambar 71. Grafik Jumlah Dokter Umum, Gigi dan Spesialis



Gambar 72. Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan



Gambar 73. Grafik Jumlah Kasus Penyakit Menular dan Pnemonia



Gambar 74. Grafik Jumlah Tingkat Kesembuhan, Pengobatan dan Persentase Diare ditemukan dan ditangani



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN





Profil Perangkat Daerah

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu institusi yang berada di bawah naungan Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Memiliki tupoksi Utama melayani dan mengayomi, dan senantiasa Mencoba melakukan pembenahan dari waktu-kewaktu. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pentingnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja institusi. guna meminimalisir eksklusifitas serta jarak dalam dinamika komunikasi maka dilakukan berbagai langkah guna menjembatani hubungan baik secara internal kedalam maupun eksternal.

Walaupun hal ini dirasakan masih belum optimal namun proses pergerakan menuju perubahan terus berjalan. Secara garis besar pembangunan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan hal ini dapat dicapai melalui kerja keras seluruh elemen, baik instrumen pemerintahan dan masyarakat yang terus berperan aktif melalui program-program peningkatan kesejahteraan, hal ini terbukti dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan, perluasan lapangan kerja terutama di sektor perikanan serta perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, melalui pemberian dana bantuan serta program pelatihan kerja dan kebijakan lainnya.

Dengan demikian tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi guna meningkatkan kesejahteraan diantaranya masih rendahnya sumberdaya manusia terutama di sektor perikanan, kurangnya akses permodalan khususnya bagi para pembudidya ikan terhadap sumber-sumber finansial, bahkan di beberapa wilayah terjadi degradasi potensi alam yang diakibatkan karena kerusakan lingkungan, hal ini dapat dijadikan sebagai cambuk bagi pengembangan usaha sektor perikanan kedepan. Bagaimanapun juga pembangunan sebaiknya dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam melalui pemanfaatan secara efisien, dan produktif dengan tetap menjaga kelestariannya.

Sumberdaya yang dianggap potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal terus dikembangkan, serta sektor-sektoryang dianggap mampu mendokrak produktifitas harus melakukan pembenahan terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi asean dan globalisasi modern. Sektor perikanan telah terbukti resisten terhadap perubahan, ekonomi kerakyatan yang tangguh diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ditengah resesi dan krisis multi dimensi dimasa yang lalu. Secara geoGrafik Kalimantan Timur memiliki letak strategis dan melalui perhitungan matematis memiliki potensi dan nilai historis penting dalam pergerakan arah pembangunan nasional.

Target Daerah Produksi Ikan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020n

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 29 yaitu data terkait jumlah target daerah produksi ikan, perikanan darat, perikanan laut dan tingkat ketersediaan ikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 29. Data Target Daerah Produksi Ikan, Perikanan Darat, Perikanan Laut dan Tingkat Ketersediaan Ikan Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Target daerah produksi ikan						
1. Target daerah produksi ikan	397417	415515	300957	169983	263473	Ton
1). Perikanan Tangkap	152534	157743	149039	152027	235641	Ton
2). Perikanan Budidaya	244883	257772	151918	154956	154955	Ton
2. Jumlah Produksi Ikan	313314	332967	351715	408591	349204	Ton
3. Persentase Produksi Perikanan	78,84	80,13	116,87	240,37	132,54	%
Perikanan Darat						
1. Jumlah Nelayan	35745	35741	33930	34099	31692	Orang
1). Nelayan Penuh	26320	26316	25242	25368	14422	Orang
2). Nelayan Sambilan Utama	5230	5230	6428	6460	16025	Orang
3). Nelayan Sambilan Tambahan	4195	4195	2260	2271	1245	Orang
2. Rumah Tangga Perikanan	61334	58014	58353	57133	56568	RTP

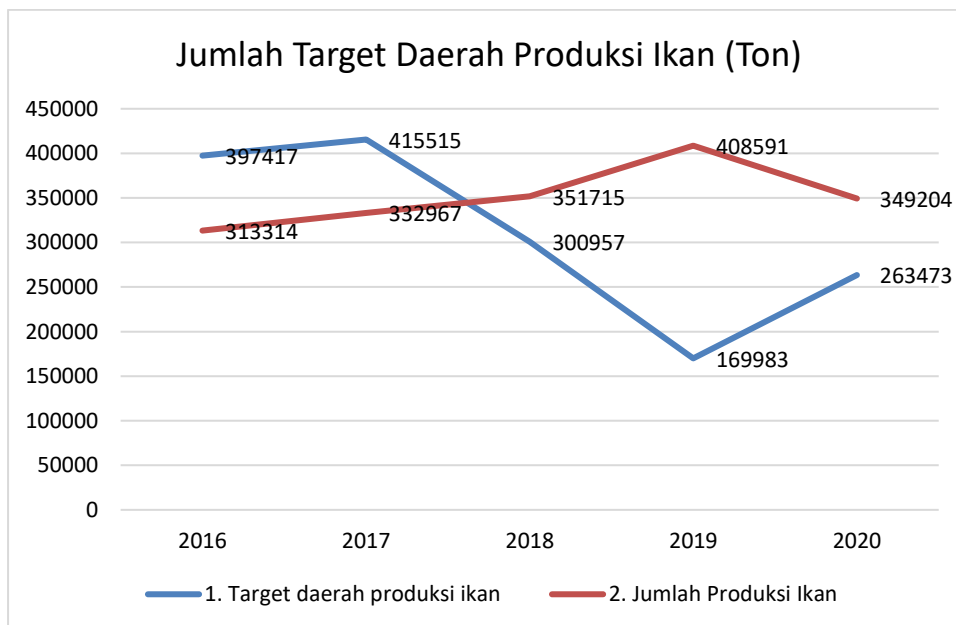


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1). Perairan Umum	22443	19519	22898	25080	22570	RTP
2). Tambak	14252	14609	14849	13507	14483	RTP
3). Kolam	8194	11750	8956	7633	7915	RTP
4). Keramba	14491	10953	10482	10453	11210	RTP
5). Budidaya Laut/Pantai	1934	1167	1152	1019	331	RTP
6). Budidaya Sawah	20	16	16	54	59	RTP
3. Armada/Kapal	6086	6178	26642	27240	26107	Unit
1). Jumlah Kapal Penangkap Ikan	6086	6178	26642	27240	26107	Unit
1. Perahu Tanpa Motor	4170	4233	2458	3106	3423	Unit
2. Perahu Motor Tempel	1916	1945	9023	11197	14532	Unit
3. Kapal Motor	n/a	n/a	15161	12937	8152	Unit
4. Produksi Perikanan Darat	170027	173622	199691	215925	190495	Ton
1). Perairan Umum	61422	66932	63479	65176	41898	Ton
2). Tambak	58547	49140	62757	75708	74237	Ton
3). Kolam	2932	4414	4862	4506	3909	Ton
4). Keramba	42050	44101	60518	64117	65817	Ton
5). Budidaya Laut/Pantai	5074	9031	8046	6386	4626	Ton
6). Budidaya Sawah	2	4	29	32	8	Ton
5. Nilai Produksi Perikanan Darat	12504250	24266174	27893693	28156840	6831621	Rb Rp
1). Perairan Umum	1453873	1411394	991955	1923519	1261121	Rb Rp
2). Tambak	2604846	2856775	2999884	3007197	2429041	Rb Rp
3). Kolam	1220367	1487690	1286481	1825668	1315003	Rb Rp
4). Keramba	1645566	3086095	2833212	2880592	2941184	Rb Rp
5). Budidaya Laut/Pantai	5573060	15416628	19682361	18409799	2996808	Rb Rp
6). Budidaya Sawah	6538	7592	99800	110065	224000	Rb Rp
Perikanan Laut						
1. Jumlah Nelayan	36376	33496	23350	23700	13214	Orang
1). Nelayan Penuh	25416	24138	16752	17003	11978	Orang
2). Nelayan Sambilan Utama	7784	6450	4340	4405	1118	Orang
3). Nelayan Sambilan Tambahan	3176	2908	2258	2292	118	Orang
2. Rumah Tangga Perikanan	45362	41619	46528	35241	28100	RTP
1). Perikanan Laut	22905	22100	23672	30389	15916	RTP

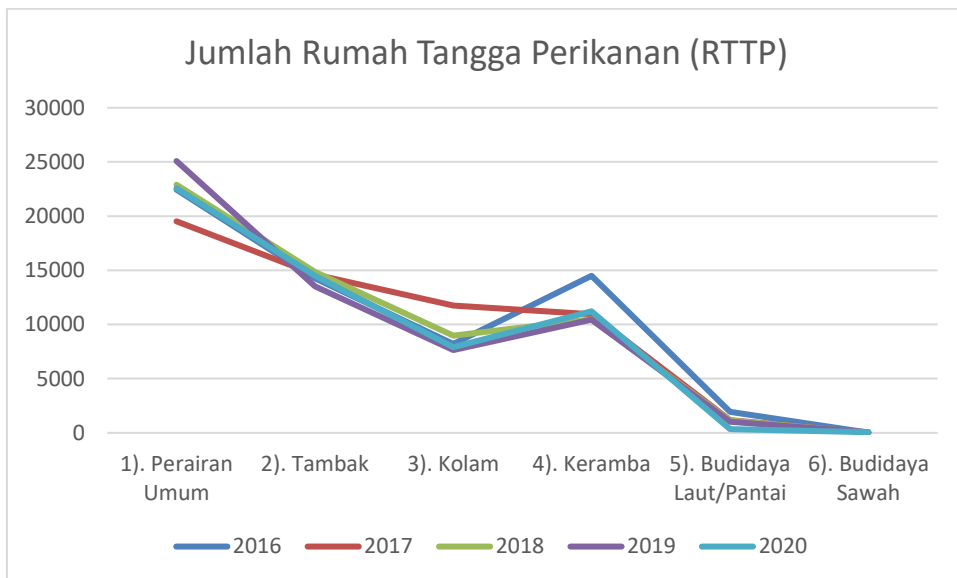


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2). Perairan Umum	22457	19519	22848	23249	12184	RTP
3. Armada/Kapal	22091	22763	22346	22311	22570	Unit
1). Jumlah Kapal Penangkap Ikan	22091	22763	22346	22311	19992	Unit
1. Perahu Tanpa Motor	1734	1670	1432	1439	3212	Unit
2. Perahu Motor Tempel	3367	3332	3268	3266	14584	Unit
3. Kapal Motor	16990	17761	17646	17606	2196	Unit
4. Produksi Perikanan Laut	101719	64538	108889	128783	116811	Ton
5. Produksi Perikanan Laut dan Sungai	143287	159345	152024	192666	158709	Ton
6. Nilai Produksi Perikanan Laut	2402799	1219420	2580532	3840432	3666276	Rb Rp.
Tingkat Ketersediaan Ikan						
1. Perikanan laut	154059	156370	158716	161096	163512	Ton
2. perikanan darat	186096	188888	191721	192680	195570	Ton
3. Tingkat Ketersediaan Ikan	340155	345258	350437	353776	359082	Ton

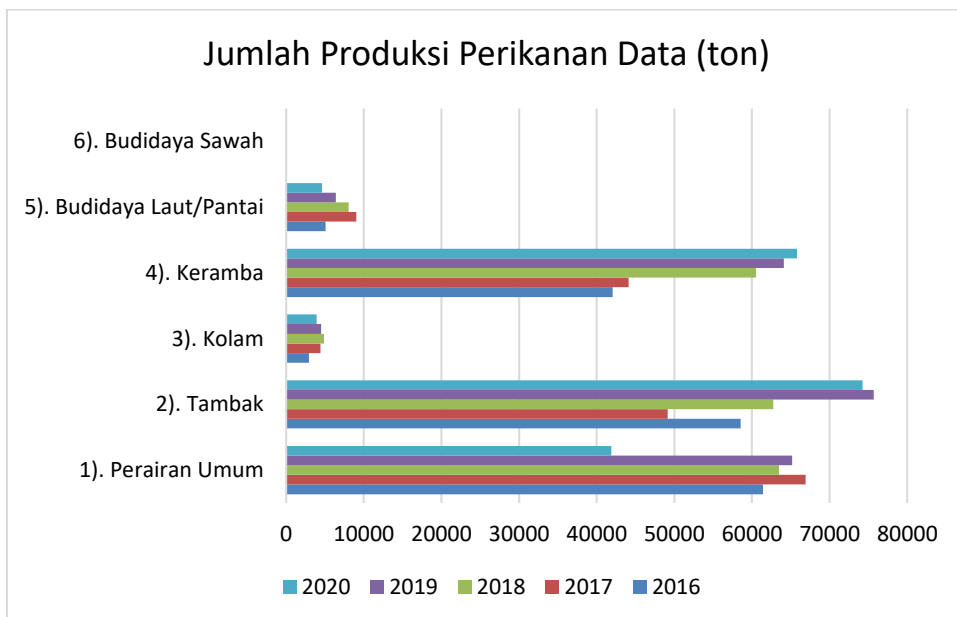
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



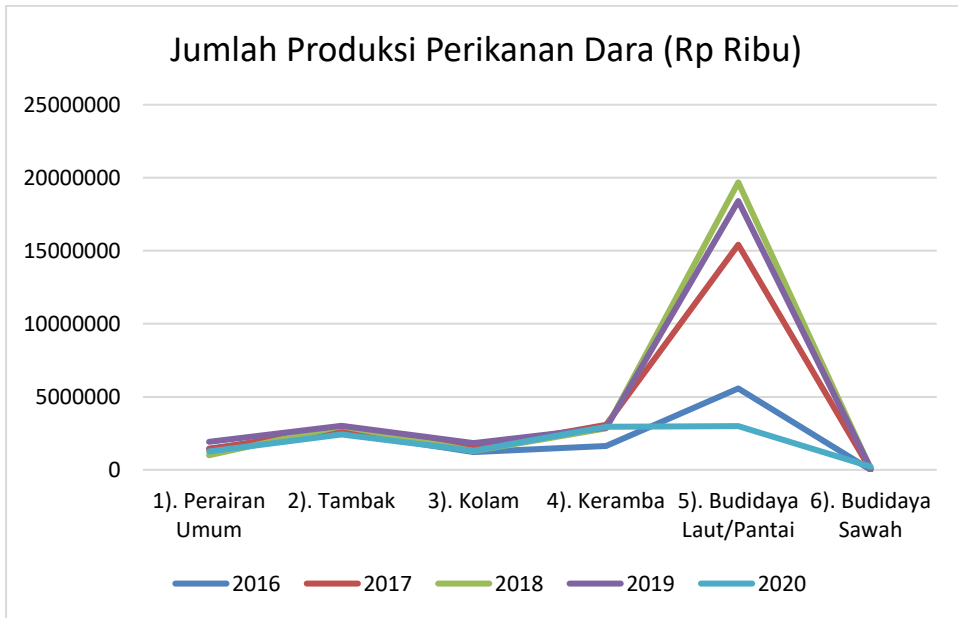
Gambar 75. Grafik Jumlah Target Daerah Produksi Ikan (Ton)



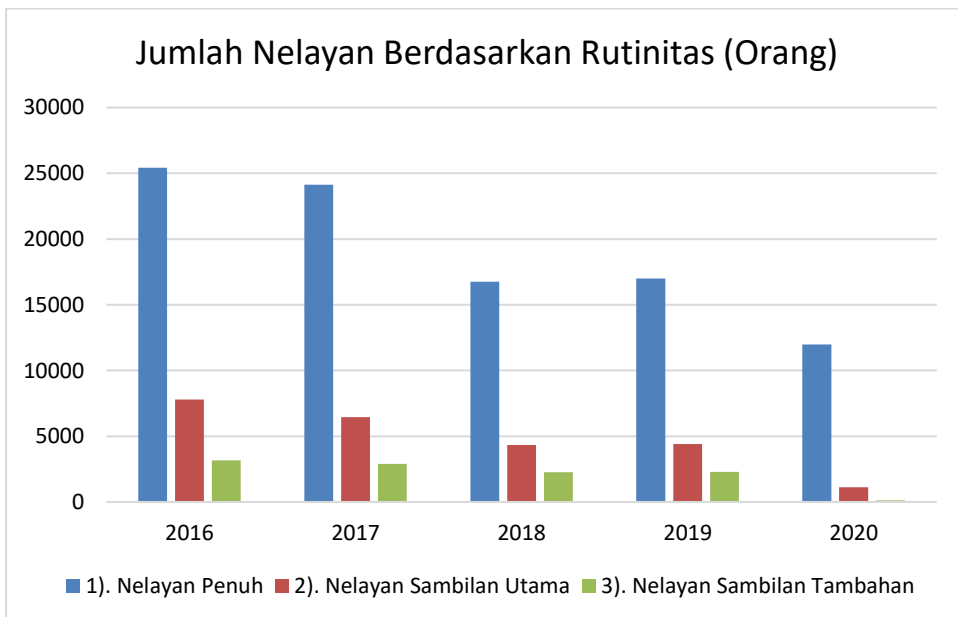
Gambar 76. Grafik Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTTP)



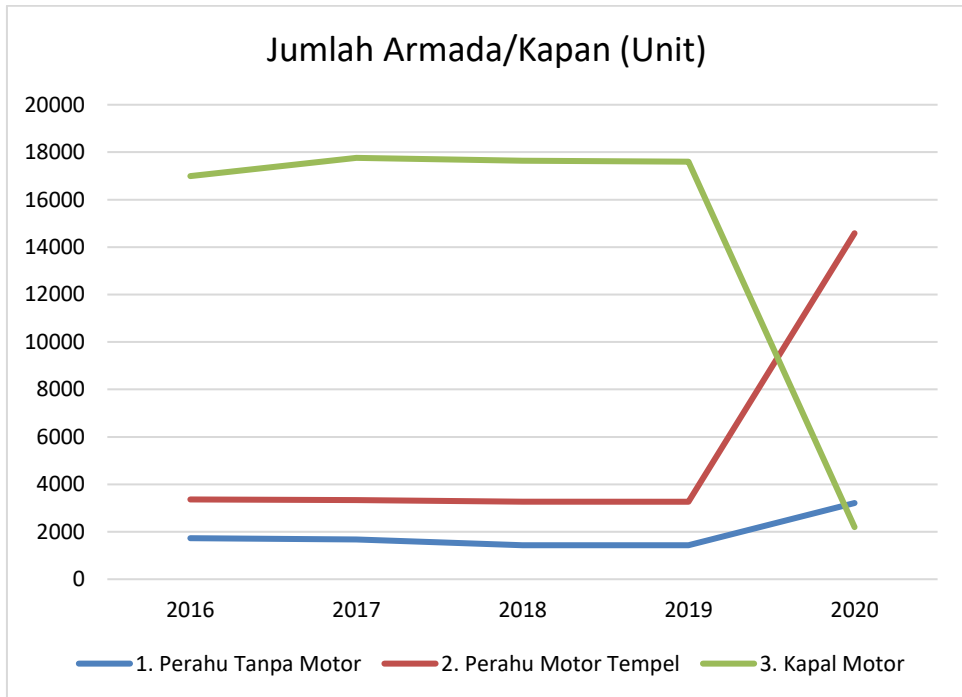
Gambar 77. Grafik Jumlah Produksi Perikanan Data (Ton)



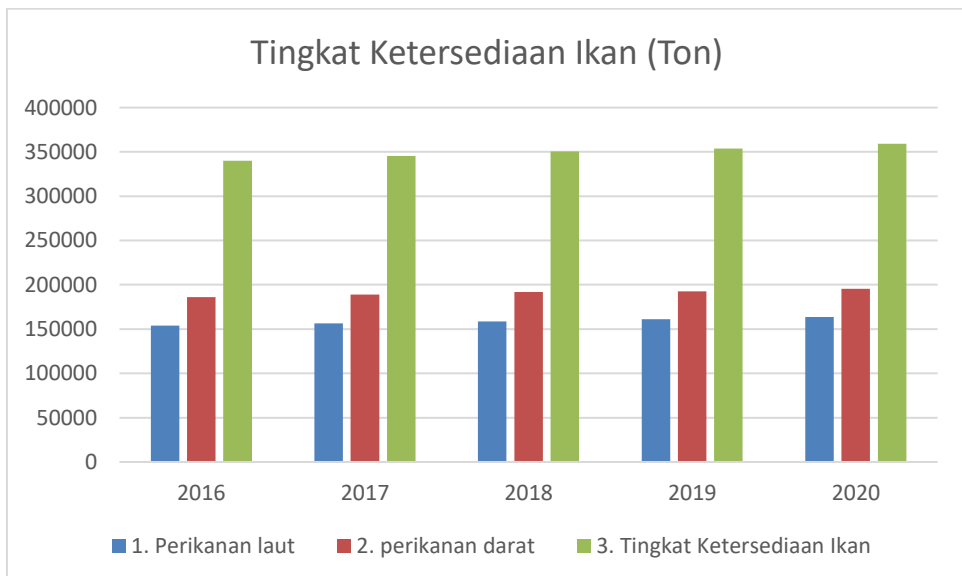
Gambar 78. Grafik Jumlah Produksi Perikanan Dara (Rp Ribu)



Gambar 79. Grafik Jumlah Nelayan Berdasarkan Rutinitas (Orang)



Gambar 80. Grafik Jumlah Armada/Kapan (Unit)



Gambar 81. Grafik Tingkat Ketersediaan Ikan (Ton)



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP





Profil Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dimana Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di lingkungan hidup sesuai dengan rencanastrategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
4. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
5. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
6. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 30 yakni terkait data Data Lingkungan Hidup, Kasus Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, serta Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020. Kemudian tabel 31 terkait data Pelestarian Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Tahun 2016-2020.

Tabel 30. Data Lingkungan Hidup, Kasus Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, serta Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Lingkungan Hidup						
1. Jumlah Kawasan Lindung	20	20	20	20	18	
1). Taman Nasional	1	1	1	1	1	Buah
2). Cagar Alam	4	4	4	7	5	Unit
3). Hutan Suaka Alam	1	1	1	1	1	Unit
4). Hutan Lindung	11	11	11	8	8	Unit
5). Taman Hutan Raya	1	1	1	2	2	Unit
6). Kebun Raya	2	2	2	1	1	Unit
2. Plasma Nutfah dilindungi						
1). Hewan	51	51	51	787	787	Jenis
2). Tumbuhan	8	8	8	116	116	Jenis
Kasus Lingkungan						
1. Jumlah kasus lingkungan	26	40	40	46	61	Kasus
2. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	26	40	40	46	61	Kasus
3. Penegakan Hukum Lingkungan	0	0	0	0	33	Jumlah perusahaan
Luas Ruang Terbuka Hijau						
Luas Ruang Terbuka Hijau	102505	102505	102505	102505	102505	Ha
Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup						
1. Laboratorium Penguji Lingkungan	39	39	25	25	25	Unit



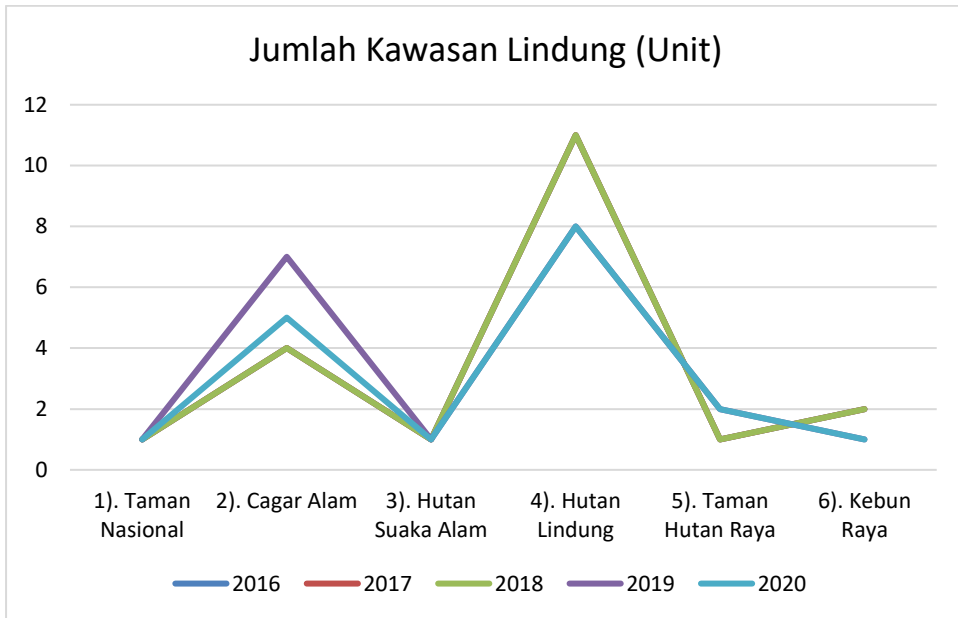
Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1). Milik Pemda	17	17	12	12	12	Unit
2). Milik Swasta	22	22	13	13	13	Unit
2. Sarana Monitoring Polusi Udara	4	4	4	4	4	Unit
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,19	82	81,68	78,81	75,50	Indeks
4. Indeks Kualitas Air Sungai	3	74	79,78	77,04	53,70	Indeks

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

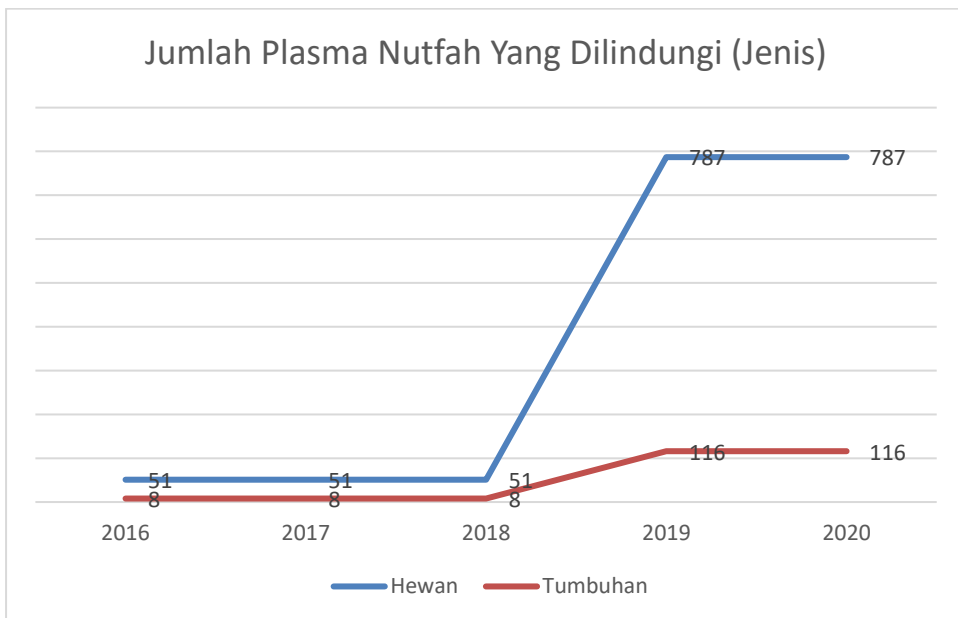
Tabel 31. Data Pelestarian Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah dan Prasaranan Pengelolaan Air Limbah Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Pelestarian Lingkungan Hidup						
1. Penanaman hutan bakau	4	55	0	145	224,44	Ha
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Adipura	3	2	4	2	0	Kab/Kota
3. Sekolah yang mendapat Adiwiyata	287	287	374	324	56	Sekolah
4. Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	4	16	33	33	34	Orang
5. Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	3	3	4	4	12	Orang
6. Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	0	0	0	0	perda
7. Pencemaran Status Mutu Air	n/a	n/a	0	9,30	2,13	Tercemar Ringan
8. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	0	0	0	0	0	%
Pengelolaan Sampah						
1. Jumlah TPS	6691	6667	5481	5371,38	6194	Unit
2. Daya tampung TPS	2163	2285,90	32470	31820,60	8667,70	M3
3. Jumlah TPA	10	10	10	10	11	unit
4. Volume sampah yang terangkut	4550	4724	5260	5502,62	5383,79	m3/hari
5. Volume produksi sampah	8189	8759	11955	8851,88	8520,29	m3/hari
6. Persentase Sampah terangkut per hari	55,56	53,93	44	62,16	63,19	%
7. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	0,62	0,64	8,90	8,55	2,30	
Prasarana Pengolahan Air Limbah						
1. Sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat	12	42	42	42	42	Unit
2. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga	4	9	9	9	9	Unit

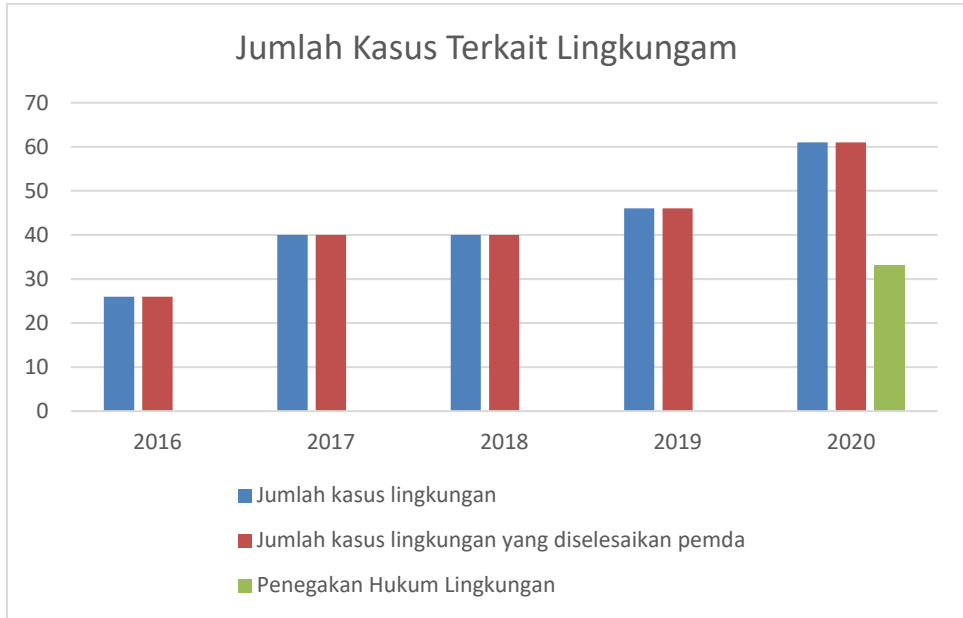
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



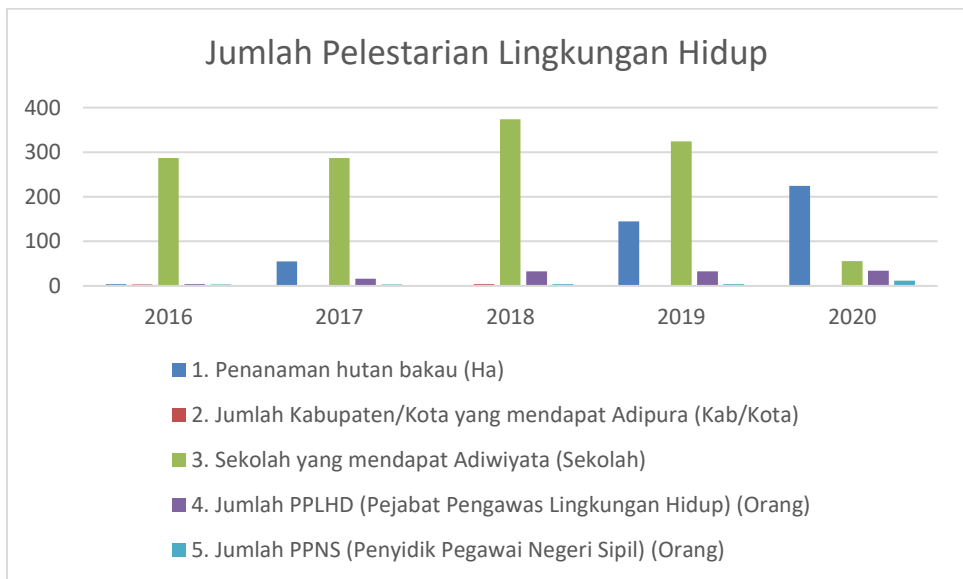
Gambar 82. Grafik Jumlah Kawasan Lindung (Unit)



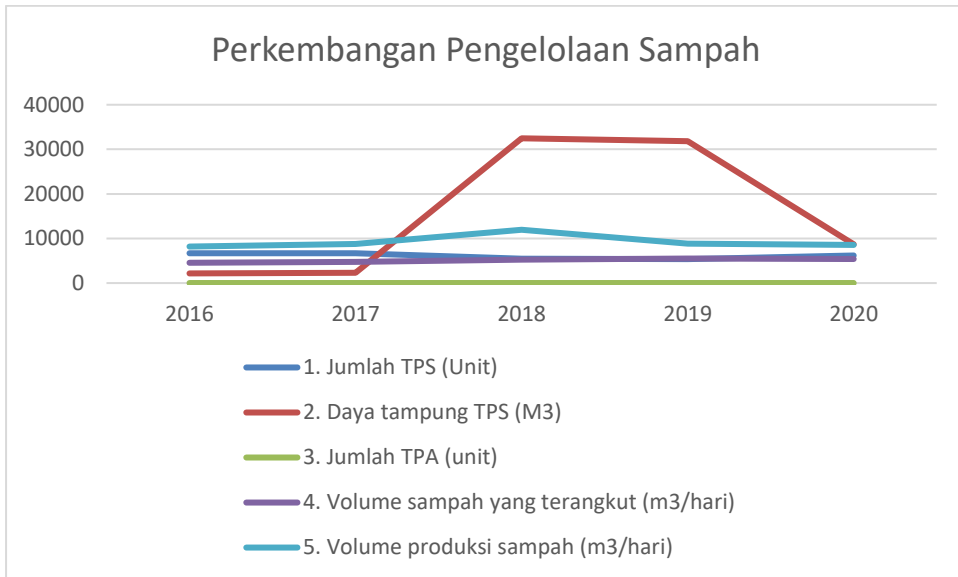
Gambar 83. Grafik Jumlah Plasma Nutfah Yang Dilindungi (Jenis)



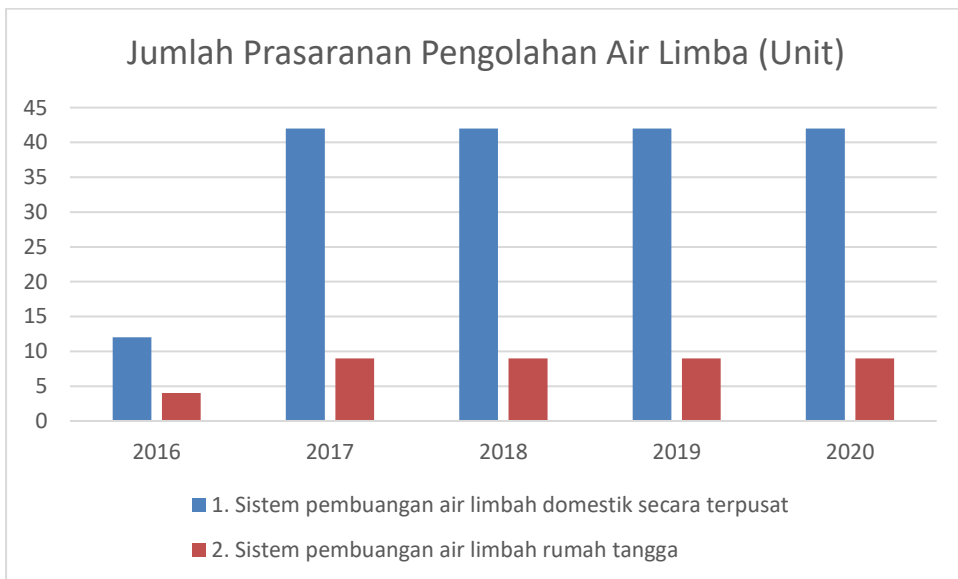
Gambar 84. Grafik Jumlah Kasus Terkait Lingkungan



Gambar 85. Grafik Jumlah Pelestarian Lingkungan Hidup



Gambar 86. Grafik Perkembangan Pengelolaan Sampah



Gambar 87. Grafik Jumlah Prasaranan Pengolahan Air Limba (Unit)



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT



Profil Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur No 09 Tahun 2014, maka nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kaltara adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Menjadi institusi yang handal dan profesional dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum kalimantan timur yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.;
3. Menyediakan pembangunan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran transportasi darat sebagai bagian sistem transportasi untuk menunjang lalu lintas ekonomi.;
4. Menyediakan pembangunan infrastruktur sumber daya air guna mendukung ketahanan penyediaan pangan dan pendayagunaan sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat.;
5. Menyediakan pembangunan sarana dan prasarana permukiman guna menciptakan permukiman yang layak, sehat dan terjangkau serta mendorong pembangunan wilayah/kawasan tertentu



Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun, tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan aktivitas lembaga dalam arah semua program dan melaksanakan misinya, oleh karena itu sekaligus dapat dijadikan dasar untuk menetapkan indikator kerja. Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pemerintah.
5. Melaksanakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan arah pembangunan untuk mendukung aktifitas ekonomi, ketahanan pangan, baik kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang.



Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triulanan, atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dicapai. Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan taat aturan;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa kendaraan operasional gedung perkantoran dan pusat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang terampil dan handal;
- 4) Mewujudkan tertib pelaporan fisik dan keuangan;
- 5) Mewujudkan perencanaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- 6) Mewujudkan perencanaan tata ruang;
- 7) Mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan sehat;
- 8) Peningkatan sistem informasi jalan dan jembatan;
- 9) Peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan;
- 10) Pengembangan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
- 11) Mewujudkan sistem pengelolaan air baku;
- 12) Mewujudkan Pengelolaan air minum dan air limbah;



- 13) Meningkatkan pengendalian banjir dan abrasi pantai;
- 14) Pemberdayaan jasa konstruksi;
- 15) Penyusunan harga satuan pokok kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tersebut dalam Peraturan Provinsi Kalimantan Timur No 55 Tahun 2008 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyeolenggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Pengairan serta tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Timur:

1. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Perumusan perencanaan teknis bidang operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakaryaan, dan pengairan.
3. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan pengairan.
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana permukiman, air bersih, sanitasi dan drainase.
5. Pengelolaan persampahan
6. Penataan bangunan
7. Pelaksanaan mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian B dan C.
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat.
10. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas
11. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 23 yakni terkait data panjang jalan berdasarkan kondisi Provinsi Kaltim Tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

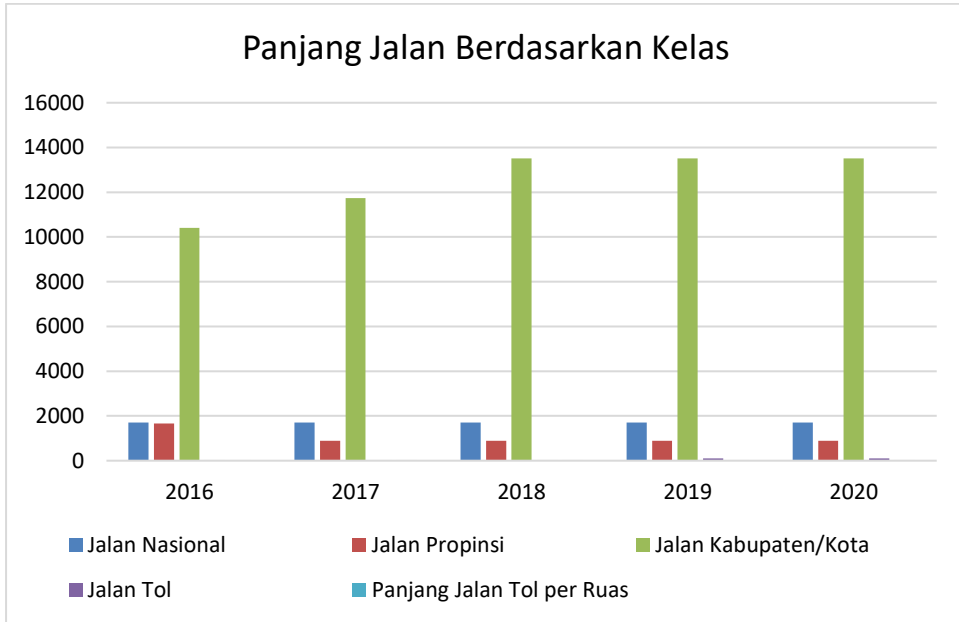
Tabel 32. Data Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Panjang Jalan Berdasarkan Kelas						
1. Total Panjang Jalan	13772,49	14330,05	16122,20	16122,20	16122,20	km
1. Jalan Nasional	1710,90	1710,90	1710,90	1710,90	1710,90	Km
2. Jalan Propinsi	1661,59	883,68	895,09	895,09	895,09	Km
3. Jalan Kabupaten/Kota	10400	11735,47	13516,21	13516,21	13516,21	Km
4. Jalan Tol	33,09	33,09	33,09	99,35	99,35	Km
1). Panjang Jalan Tol Per Ruas	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	Km
2. Rasio jumlah panjang jalan per jumlah penduduk	0,39	0,40	0,44	0,43	0,43	%
3. Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	0	0	0	0	0	%
4. Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 ton	10,35	10,73	10,73	20,15	20,15	%
5. Tingkat Kemantapan Jalan	66,24	68,24	52,85	61,45	69,77	%
6. Ketersediaan Infrastruktur Jalan	103,70	208,62	283,50	302,20	624,48	Km
7. Ketersediaan Jalan Tol	22,28	30,12	30,12	64,87	64,87	Km

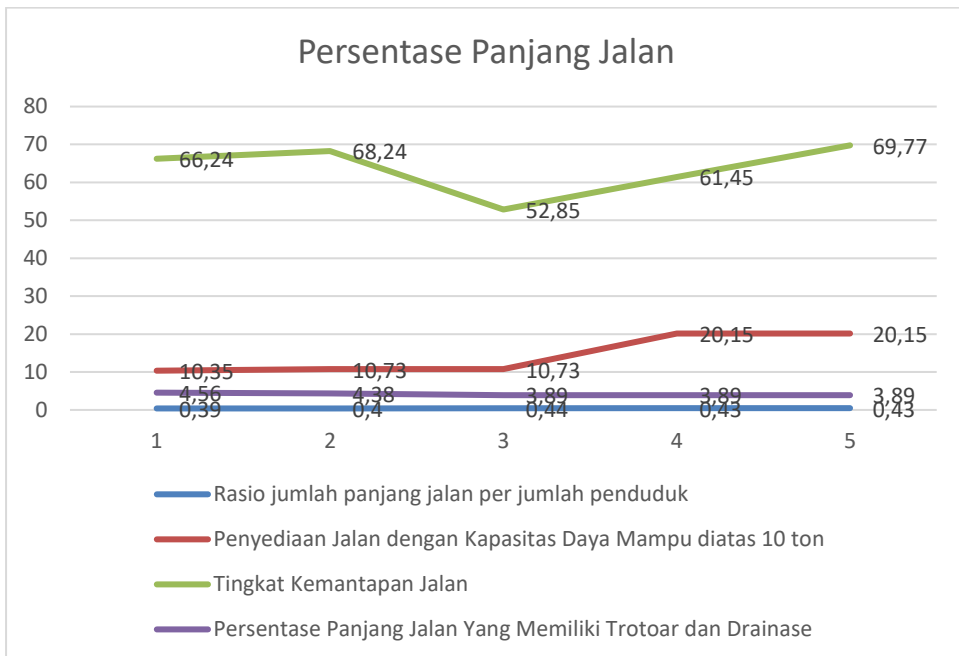


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
8. Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase	627,90	627,90	627,90	627,90	627,90	Km
9. Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase	4,56	4,38	3,89	3,89	3,89	%
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Negara + Prov + Kab/Kota)						
Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota	13067,55	14599,39	16122,59	16122,20	16122,20	Km
1. Jalan Baik	4928,40	6725,14	8170,24	7204,60	7395,47	Km
2. Jalan Sedang	3734,86	3410,17	3019,61	3866,23	3656,27	Km
3. Jalan Rusak Sedang	2385,13	2253,73	2409,42	2480,73	2406,13	Km
4. Jalan Rusak Berat	2019,16	2210,35	2523,32	2570,64	2664,33	Km
5. Rasio panjang jalan dalam kondisi baik	37,71	46,06	50,68	44,69	45,87	%
Panjang Jalan Nasional						
1. Jalan Baik	864,81	81,59	840,41	251,16	127,39	Km
2. Jalan Sedang	751,52	1529,65	751,52	1144,83	1175,04	Km
3. Jalan Rusak	79,37	65,41	79,77	249,72	268,76	Km
4. Jalan Rusak Berat	39,60	34,26	39,59	65,19	139,71	Km
Panjang Jalan Provinsi						
1. Jalan Baik	187,79	426,16	470,13	93,74	408,38	Km
2. Jalan Sedang	978,98	29,85	2,96	456,27	216,10	Km
3. Jalan Rusak	250,85	224,28	293,76	195,12	101,48	Km
4. Jalan Rusak Berat	173,97	203,39	128,24	149,96	169,13	Km
Panjang Jalan Kabupaten/Kota						
1. Jalan Baik	3875,80	6217,39	6859,70	6859,70	6859,70	Km
2. Jalan Sedang	2004,36	1850,67	2265,13	2265,13	2265,13	Km
3. Jalan Rusak	2054,91	1964,04	2035,89	2035,89	2035,89	Km
4. Jalan Rusak Berat	1805,59	1972,70	2355,49	2355,49	2355,49	Km
Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi						
1. Arteri	326,21	326,21	326,21	326,22	326,22	Km
2. Kolektor	1384,69	1384,69	3935,91	3935,91	3935,91	Km
3. Jalan Lokal	1712,75	1712,75	4061,59	4061,59	4061,59	Km
4. Jalan Lingkungan	93570,74	93570,74	1793,58	1793,58	1793,58	Km
Panjang jalan yang memiliki fasilitas						
1. Trotoar	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	Km
2. Drainase	609,57	609,57	609,57	609,57	609,57	Km
3. Trotoar dan Drainase	627,90	627,90	627,90	627,90	627,90	Km
4. Sempadan Jalan	870,82	870,82	870,82	870,82	870,82	Km

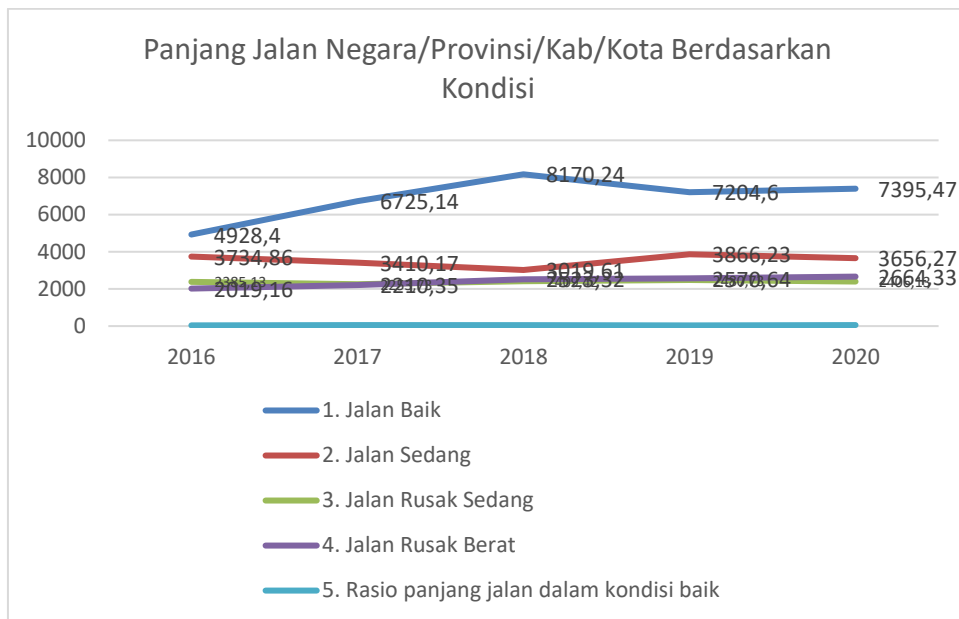
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



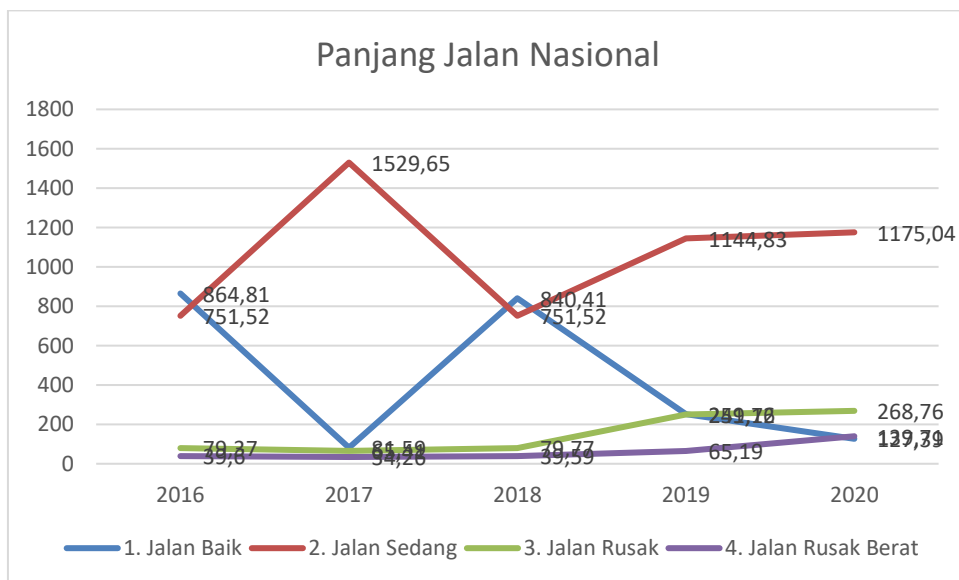
Gambar 88. Grafik Panjang Jalan Berdasarkan Kelas



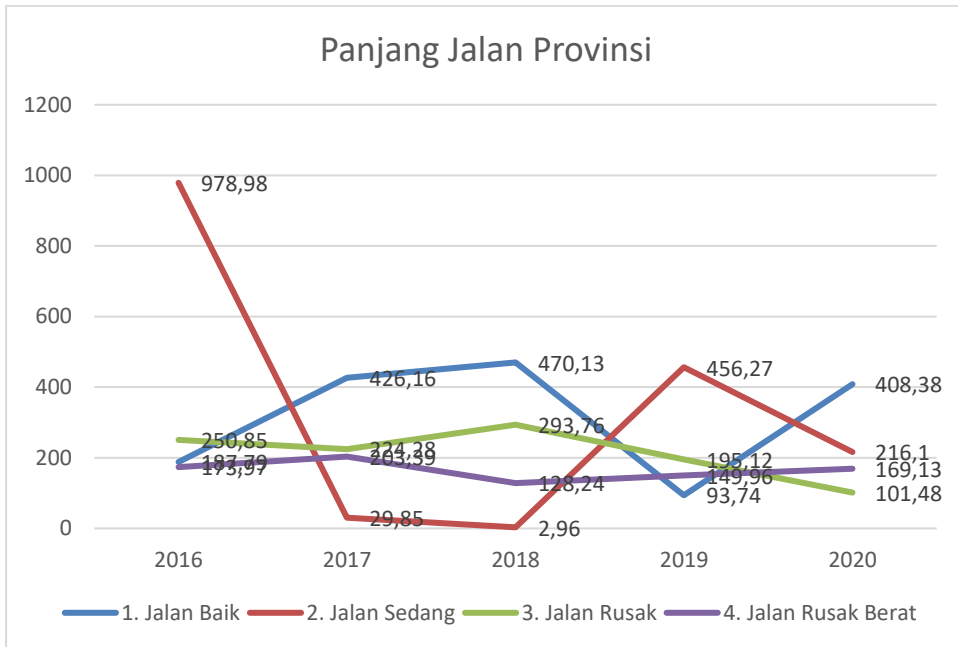
Gambar 89. Grafik Persentase Panjang Jalan



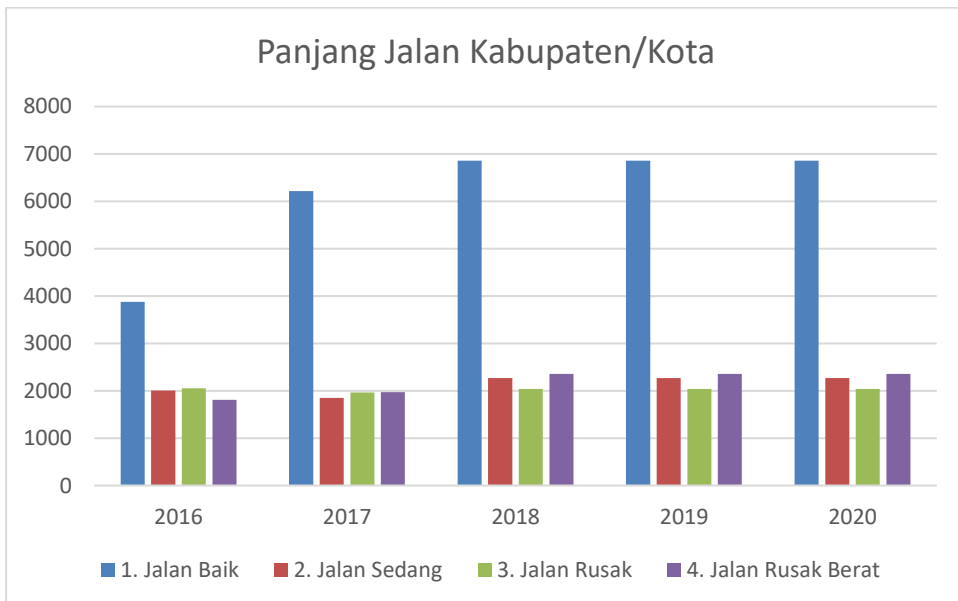
Gambar 90. Grafik Panjang Jalan Negara/Provinsi/Kab/Kota Berdasarkan Kondisi



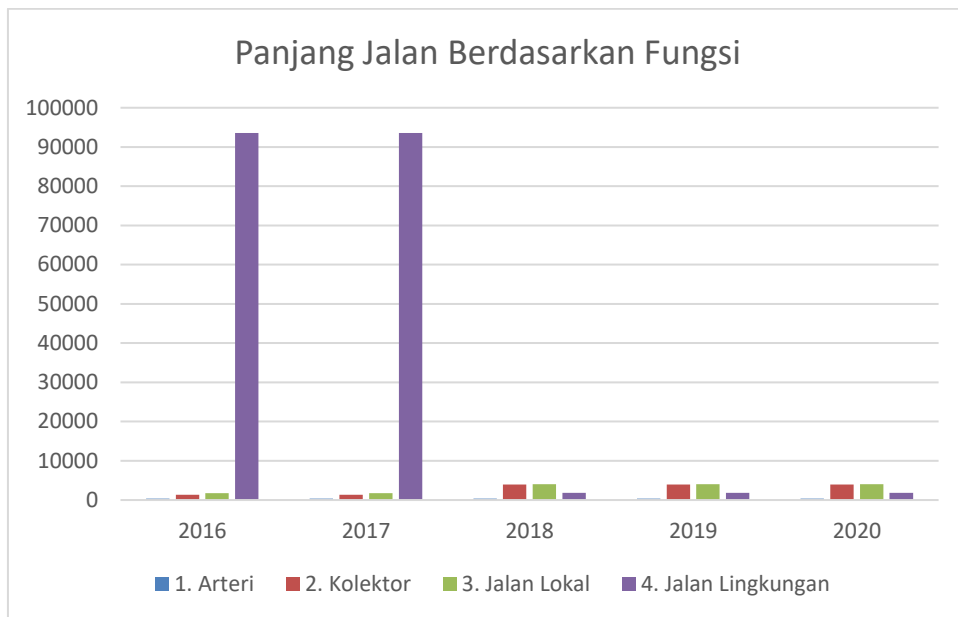
Gambar 91. Grafik Panjang Jalan Nasional



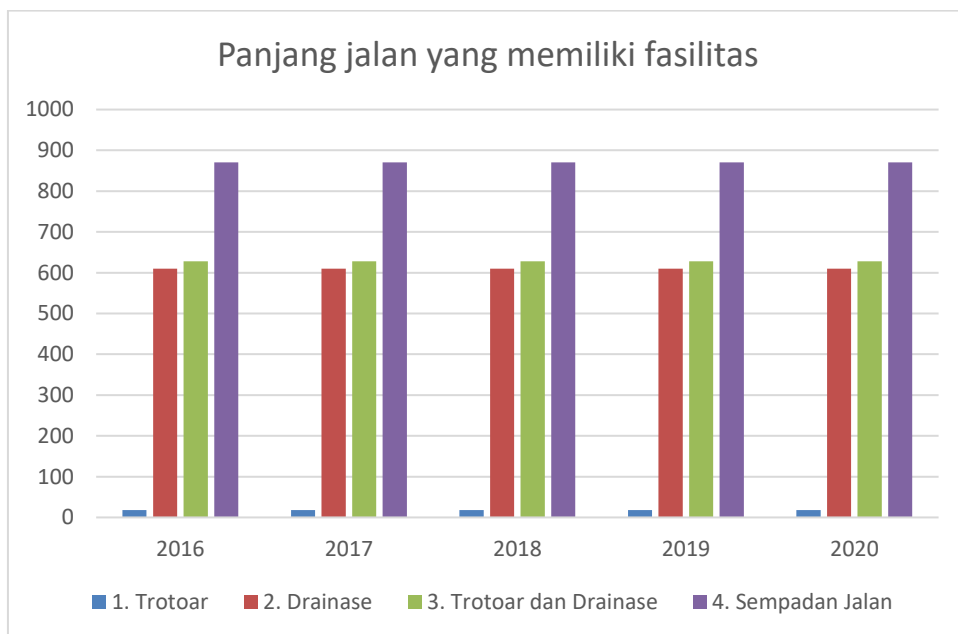
Gambar 92. Grafik Panjang Jalan Provinsi



Gambar 93. Grafik Panjang Jalan Kabupaten/Kota



Gambar 94. Grafik Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi



Gambar 95. Grafik Panjang jalan yang memiliki fasilitas



DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA





Profil Perangkat Daerah

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki Visi yang sama dengan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Sedangkan Misi seluruh OPD mengacu pada 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai tupoksi masing-masing. Adapun Misi dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mengacu pada Misi II Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Beberapa pertimbangan penting sebagai dasar penetapan visi di atas adalah :

1. Mendukung target Renstra Kementerian Pertanian, yaitu:
 - Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi surplus 10 juta ton);
 - Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
 - Diversifikasi Pangan;
 - Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2. Pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Timur mengedepankan prinsip – prinsip pelestarian lingkungan dan berkelanjutan (green growth), melalui kegiatan – kegiatan pertanian organik, konservasi lahan, low anorganic input, pengawasan peredaran pestisida, dan lain lain.
3. Mengutamakan pengembangan produk - produk unggulan lokal yang dikembangkan petani setempat dan dapat dipasarkan sehingga petani termotivasi untuk memproduksi.

4. Penguatan pada upaya meningkatkan nilai tambah melalui pasca panen dan pengolahan serta pemasaran hasil.
5. Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur serta dapat dicapai melalui kerangka program, kegiatan dan pendanaan

Tujuan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Peningkatan produksi dicapai dengan menerapkan metode pertanian berkelanjutan. Artinya pertanian yang sedapat mungkin menerapkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan (misalnya teknik irigasi yang mengurangi terbentunya gas metan, pembukaan lahan dengan tidak membakar, menggunakan pupuk kompos organik, bio-pestisida, pengendalian hama biologis, sekolah lapang iklim, kalender tanam). Tujuan jangka menengah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta ketahanannya terhadap perubahan iklim.
- 3) Meningkatkan mutu dan daya saing produk.
- 4) Meningkatkan sarana pasca panen dan pemasaran.
- 5) Meningkatkan kapasitas petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mendukung upaya-upaya pengurangan emisi di Sektor Pertanian

Sedangkan sasaran Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus,



bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi padi dan ubi kayu pada lahan fungsioanal dan lahan kritis;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
- 3) Pengembangan sentra padi;
- 4) Meningkatkan produksi durian/lai, jeruk, pisang dan pepaya terutama di lahan kritis;
- 5) Berkembangnya kawasan usaha agribisnis terpadu (KUAT);
- 6) Meningkatkan jumlah kebun yang di sertifikasi;
- 7) Meningkatkan jumlah sub terminal agribisnis (STA);
- 8) Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan adaptif dan praktek pertanian ramah lingkungan yang akan mengurangi emisi dari sector pertanian.

Ketersediaan Pangan Per Kapita Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 33 yakni terkait data ketersediaan Pangan per Kapita Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 33. Data Ketersediaan Pangan Per Kapita Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Ketersediaan pangan per kapita						
1. Ketersediaan pangan per kapita	113	114	89,79	89,79	89,79	Kg/Kapita/ Tahun
2. Tingkat Ketersediaan	2495	2533,13	2626,17	2551,39	2577,81	
1). Ketersediaan Energi	2400	2445	2537	2462	2492	Kkal/Kap/ Hari
2). Ketersediaan Protein	95	88,13	89,74	89,39	85,81	Gr/Kap/Ha ri
3. Tingkat Konsumsi	59,54	60,28	60,28	65,55	0	
1). Konsumsi Energi	1,94	1,98	1,98	2,02	0	Kkal/Kap/ Hari



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2). Konsumsi Protein	57,60	58,30	58,30	63,50	0	Gr/Kap/Hari
4. Persentase Ketersediaan Pangan Daerah	120	120	120	120	120	%
Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Petani						
1. Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Petani	305185	305185	305185	253818	253818	Ton
2. Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Tani	108359	108359	105355	95613	95613	Ha
3. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Petani	28,16	28,16	28,97	26,55	26,55	Kw/Ha
Hortikultura						
1. Mangga						
1). Luas Areal	47891	47341	48524	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	5181	5424	6385	5432	4310	Ton
3). Total Jumlah Pohon	30560	36839	49997	66734	48916	Pohon
4). Produktivitas perLuas	1,08	1,15	1,32	54320	43100	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	1,70	1,47	1,28	0,81	0,88	Kw/Pohon
2. Jeruk						
1). Luas Areal	476	494	507	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	16941	15327	21961	14050	12692	Ton
3). Total Jumlah Pohon	105839	109859	130114	331948	152783	Pohon
4). Produktivitas perLuas	355,90	310,26	433,16	140500	126920	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	1,60	1,40	1,69	0,42	0,83	Kw/Pohon
3. Pepaya						
1). Luas Areal	196	225	231	n/a	0	Ha
2). Jumlah Produksi	14619	16156	18317	24975	15113	Ton
3). Total Jumlah Pohon	151031	173168	161558	194660	216518	Pohon
4). Produktivitas perLuas	745,87	718,04	792,94	249750	n/a	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,97	0,93	1,13	1,28	0,70	Kw/Pohon
4. Pisang						
1). Luas Areal	3482	3578	3668	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	79343	97882	18317	103913	95149	Ton
3). Total Jumlah Pohon	1392685	1431284	161558	1626690	1476909	Rumpun
4). Produktivitas perLuas	227,87	273,57	49,94	1039130	951490	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,57	0,68	1,13	0,64	0,64	Kw/Pohon
5. Nanas						
1). Luas Areal	224	248	255	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	9373	30489	24931	20965	21948	Ton
3). Total Jumlah Pohon	4301050	4776200	3326446	3033620	3804672	Rumpun
4). Produktivitas perLuas	418,44	1229,40	977,69	209650	219480	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,02	0,06	0,07	0,07	0,06	Kw/Pohon
6. Durian						
1). Luas Areal	1555	819	840	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	9078	7166	9192	13999	11183	Ton
3). Total Jumlah Pohon	119617	63024	121120	167493	138601	Pohon
4). Produktivitas perLuas	58,38	87,50	109,43	139990	111830	Kw/Ha



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5). Produktivitas pepohonan	0,76	1,14	0,76	0,84	0,81	Kw/Pohon
7. Manggis						
1). Luas Areal	75	50	51	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	511	182	337	483	463	Ton
3). Total Jumlah Pohon	5785	3808	5106	6804	5371	Pohon
4). Produktivitas perLuas	68,13	36,40	66,08	4830	4630	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,88	0,48	0,66	0,71	0,86	Kw/Pohon
8. Melon						
1). Luas Areal	46	55	56	71	54	Ha
2). Jumlah Produksi	324	343	407	859	519	Ton
3). Total Jumlah Pohon	560000	672000	688800	n/a	n/a	Pohon
4). Produktivitas perLuas	70,43	62,36	72,68	120,99	96,11	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,01	0,01	0,01	8590	5190	Kw/Pohon
9. Alpukat						
1). Luas Areal	73	78,11	78,11	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	553	602,77	1016	1719	1158	Ton
3). Total Jumlah Pohon	5605	5941,30	10015	13229	8672	Pohon
4). Produktivitas perLuas	75,75	77,17	130,07	17190	11580	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,99	1,01	1,01	1,30	1,34	Kw/Pohon
10. Buah Naga						
1). Luas Areal	700	710	710	n/a	0	Ha
2). Jumlah Produksi	700	715	715	n/a	0	Ton
3). Total Jumlah Pohon	700000	714000	714000	n/a	0	Buah
4). Produktivitas perLuas	10	10,07	10,07	0	n/a	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,01	0,01	0,01	0	n/a	Kw/Pohon
11. Belimbing						
1). Luas Areal	50	52	52	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	1232	1244,32	1385	1001	1123	Ton
3). Total Jumlah Pohon	11515	11745,30	11023	12469	11697	Pohon
4). Produktivitas perLuas	246,40	239,29	266,35	10010	11230	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	1,07	1,06	1,26	0,80	0,96	Kw/Pohon
12. Dukuh/Langsak						
1). Luas Areal	437	454,48	454,48	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	2180	2354,40	2185	7486	9381	Ton
3). Total Jumlah Pohon	33610	36298,80	29118	65122	54413	Pohon
4). Produktivitas perLuas	49,89	51,80	48,08	74860	93810	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0	0	0	0	0	Kw/Pohon
13. Jambu Biji						
1). Luas Areal	115	126,50	126,50	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	1852	1907,56	2276	1398	2268	Ton
3). Total Jumlah Pohon	26488	27017,76	26170	24467	25611	Pohon
4). Produktivitas perLuas	161,04	150,80	179,92	13980	22680	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,07	0,07	0,09	0,06	0,09	Kw/Pohon
14. Jambu Air						
1). Luas Areal	78	85,80	85,80	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	910	937,30	922	1033	1840	Ton
3). Total Jumlah Pohon	6021	6141,42	12596	21805	15188	Pohon
4). Produktivitas perLuas	116,67	109,24	107,46	10330	18400	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	1,51	1,53	0,73	0,47	1,21	Kw/Pohon
15. Nangka/Cempedak						
1). Luas Areal	1326	1418,82	1418,82	n/a	n/a	Ha

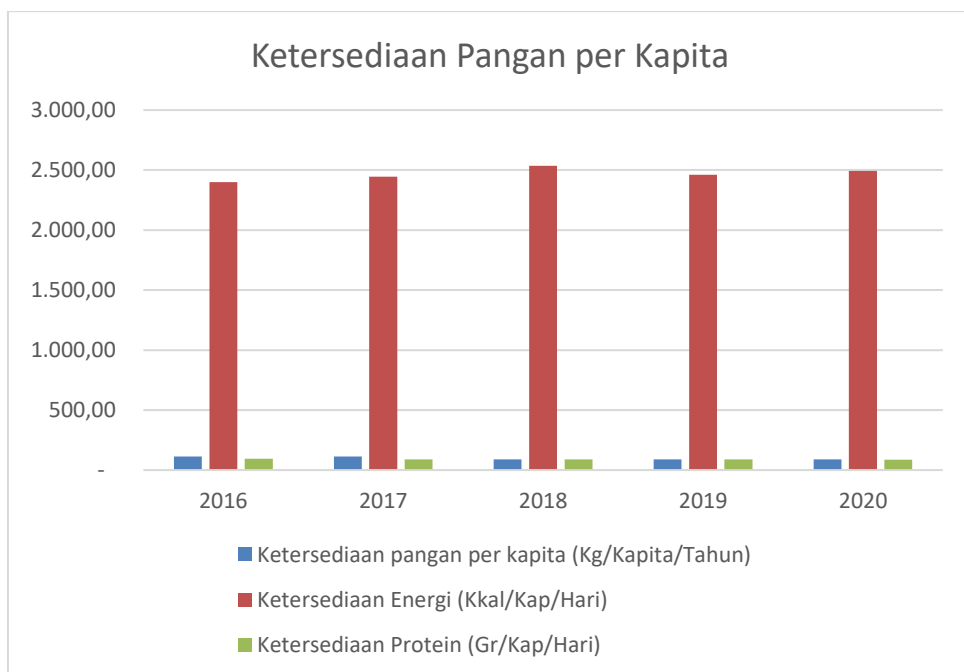


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2). Jumlah Produksi	15432	16512,24	21024	16340	13200	Ton
3). Total Jumlah Pohon	123965	132642,5 5	120608	136095	128835	Pohon
4). Produktivitas perLuas	116,38	116,38	148,18	163400	132000	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	1,24	1,24	1,74	1,20	1,02	Kw/Pohon
16. Salak						
1). Luas Areal	328	360,80	360,80	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	3838	3953,14	9930	12867	19850	Ton
3). Total Jumlah Pohon	504329	514415,5 8	512721	565391	499199	Rumpun
4). Produktivitas perLuas	117,01	109,57	275,22	128670	198500	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,08	0,08	0,19	0,23	0,40	Kw/Pohon
17. Rambutan						
1). Luas Areal	3302	3533,14	3533,14	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	14239	15520,51	10674	16392	14551	Ton
3). Total Jumlah Pohon	254009	269249,5 4	187096	264724	216719	Pohon
4). Produktivitas perLuas	43,12	43,93	30,21	163920	145510	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,56	0,58	0,57	0,62	0,67	Kw/Pohon
18. Sawo						
1). Luas Areal	189	207,90	207,90	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	1676	1726,28	2376	1772	3683	Ton
3). Total Jumlah Pohon	14535	14825,70	16545	16983	14658	Pohon
4). Produktivitas perLuas	88,68	83,03	114,29	17720	36830	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	1,15	1,16	1,44	1,04	2,51	Kw/Pohon
19. Sirsak						
1). Luas Areal	45	46,35	46,35	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	597	614,91	750	787	1146	Ton
3). Total Jumlah Pohon	12650	13029,50	12883	18861	18210	Pohon
4). Produktivitas perLuas	132,67	132,67	161,81	7870	11460	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,47	0,47	0,58	0,42	0,63	Kw/Pohon
20. Markisa						
1). Luas Areal	0,14	0,15	0,15	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	10	10,30	22	0,40	10	Ton
3). Total Jumlah Pohon	129	131,58	235	50	308	Pohon
4). Produktivitas perLuas	714,29	686,67	1466,67	4	100	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,78	0,78	0,94	0,08	0,32	Kw/Pohon
21. Sukun						
1). Luas Areal	159	174,90	174,90	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	1623	1671,69	1839	1578	2051	Ton
3). Total Jumlah Pohon	14875	15172,50	18145	21920	21004	Pohon
4). Produktivitas perLuas	102,08	95,58	105,15	15780	20510	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	1,09	1,10	1,01	0,72	0,98	Kw/Pohon
22. Melinjo						
1). Luas Areal	236	259,60	259,60	n/a	n/a	Ha
2). Jumlah Produksi	1181	1216,43	689,10	953	1966	Ton
3). Total Jumlah Pohon	22100	22542	15191	21409	18949	Pohon
4). Produktivitas perLuas	50,04	46,86	26,54	9530	19660	Kw/Ha
5). Produktivitas pepohonan	0,53	0,54	0,45	0,45	1,04	Kw/Pohon
23. Bawang Merah						
1). Luas Areal	92	103,04	149	40	78	Ha
2). Jumlah Produksi	622	696,64	828	173	267	Ton

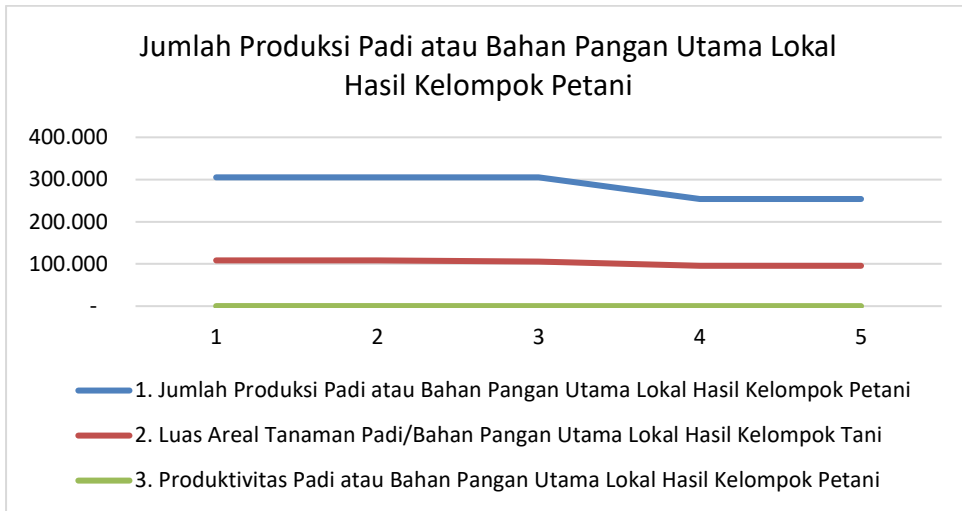


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3). Produktivitas Perluasan	67,61	67,61	55,57	43,25	34,23	Kw/Ha
25. Kubis						
1). Luas Areal	7	7,07	1	1	1	Ha
2). Jumlah Produksi	96	96,96	40	0	2	Ton
3). Produktivitas Perluasan	137,14	137,14	400	0	20	Kw/Ha
24. Cabai						
1). Luas Areal	2720	3128	3128	1177	1424	Ha
2). Jumlah Produksi	8539	9478,29	9478,29	8053	9079	Ton
3). Produktivitas Perluasan	31,39	30,30	30,30	68,42	63,76	Kw/Ha
25. Petsai/Sawi						
1). Luas Areal	1357	1370,57	1408	1326	1309	Ha
2). Jumlah Produksi	6110	6171,10	8285	6851	7694	Ton
3). Produktivitas Perluasan	45,03	45,03	58,84	51,67	58,78	Kw/Ha
26. Daun Bawang						
1). Luas Areal	153	90	117	135	151	Ha
2). Jumlah Produksi	402	212	161	210	319	Ton
3). Produktivitas Perluasan	26,27	23,56	13,76	15,56	21,13	Kw/Ha
27. Kembang Kol						
1). Luas Areal	29	31	26	34	42	Ha
2). Jumlah Produksi	11	37	121	200	207	Ton
3). Produktivitas Perluasan	3,79	11,94	46,54	58,82	49,29	Kw/Ha

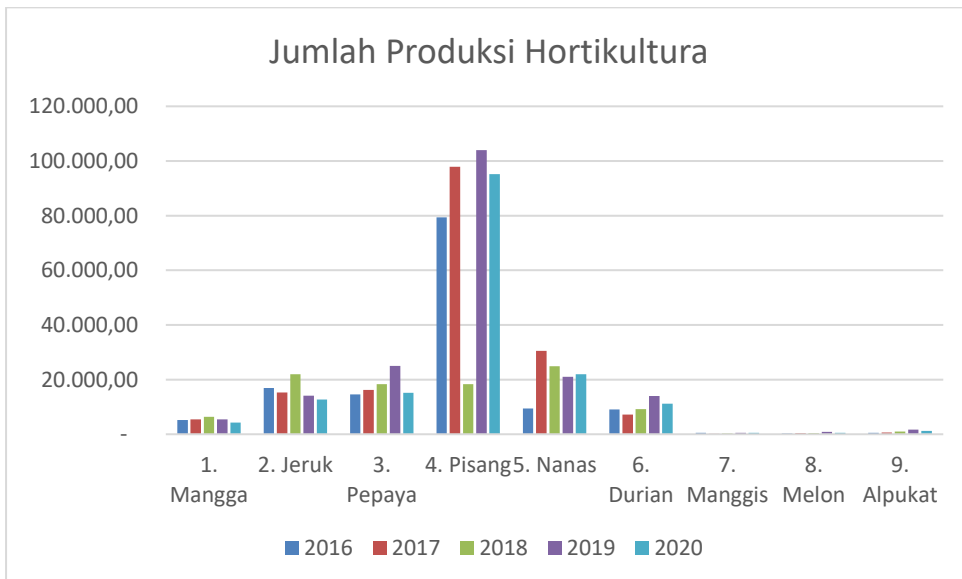
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



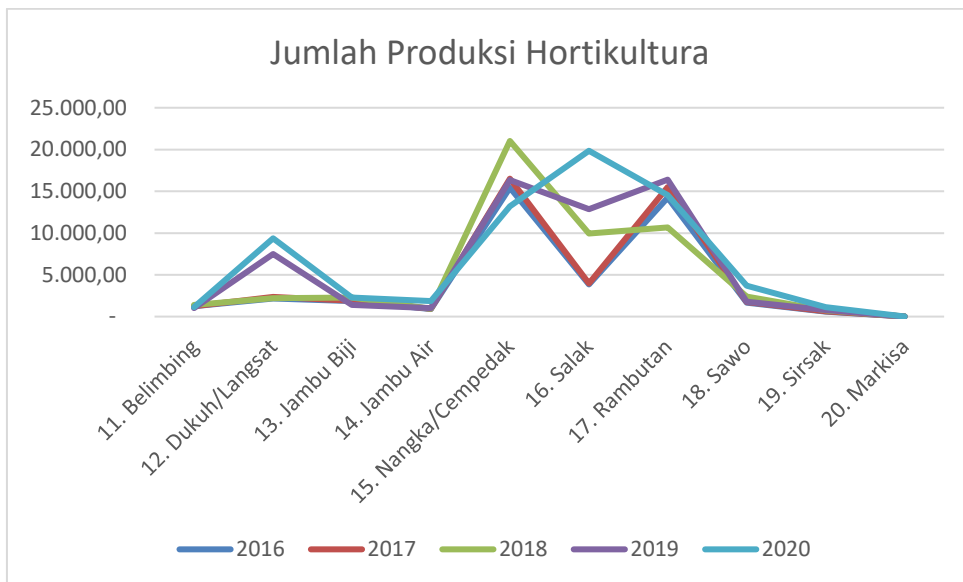
Gambar 96. Grafik Ketersediaan Pangan per Kapita



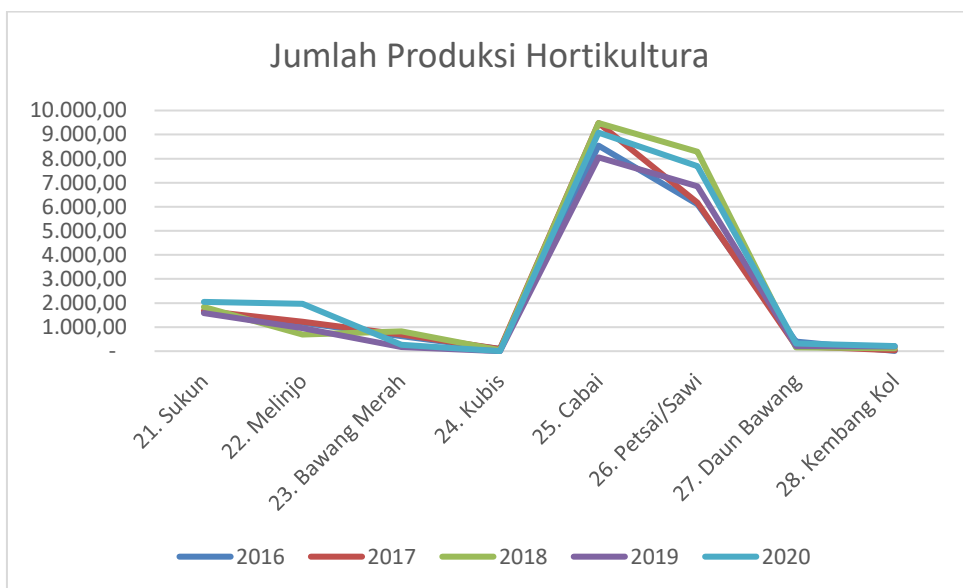
Gambar 97. Grafik Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Petani



Gambar 98. Grafik Jumlah Produksi Hortikultura



Gambar 99. Grafik Jumlah Produksi Hortikultura



Gambar 100. Grafik Jumlah Produksi Hortikultura



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA





Profil Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no 62 tahun 2016 terkait Susunan Organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pemantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dina Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim memiliki Visi yakni “Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kalimantan Timur Yang Mandiri dan sejahtera “. Kemudian untuk menjalankan Visi tersebut maka perlu ada Misi yang harus dilaksanakan yakni mengembangkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, sehingga secara berharap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri, melalui:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di desa dan kelurahan secara optimal;
2. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi perekonomian desa/kelurahan secara optimal;
4. Mewujudkan masyarakat desa dan kelurahan yg mampu mengelola potensi SDA lokal dengan memanfaatkan TTG berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan.

Tugas Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
4. perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
5. perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
6. perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. pembinaan kelompok jabatan fungsional



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PKK Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 34 yakni terkait data Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat serta Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PKK Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020. Kemudian Tabel 35 menampilkan data terkait Jumlah Desa/Kelurahan, Profil Desa/kelurahan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Posyantek Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020 wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 34. Data Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat serta Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PKK Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

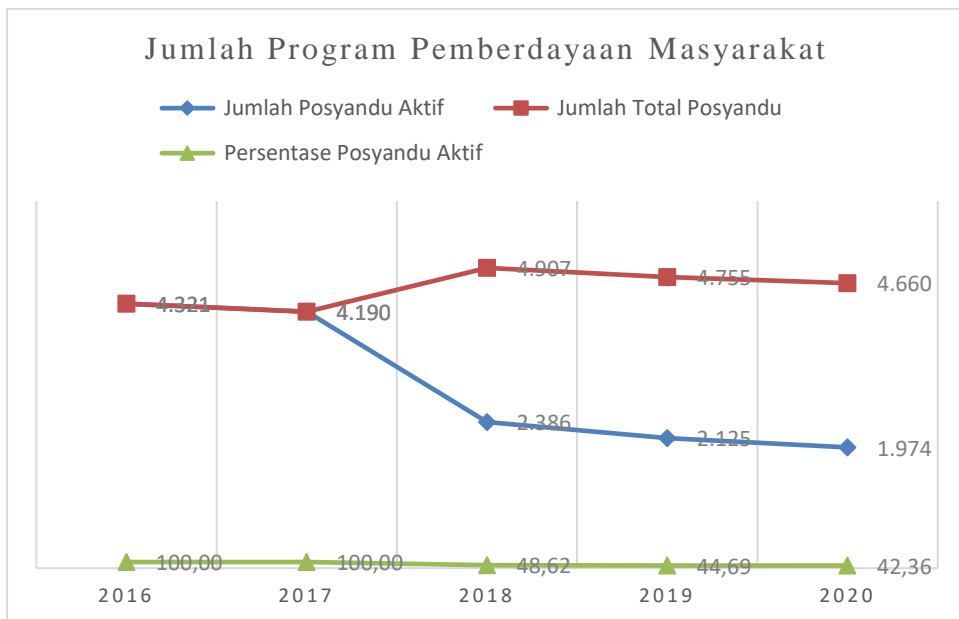
Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat						
1. Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	14	14	14	14	14	Program
2. Jumlah Posyandu Aktif	4321	4190	2386	2125	1974	Unit
3. Jumlah Total Posyandu	4321	4190	4907	4755	4660	Unit
4. Persentase Posyandu Aktif	100	100	48,62	44,69	42,36	%
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PKK						
Jumlah LPM						
1. Kelompok Binaan LPM	497	497	497	497	497	Unit
2. Jumlah LPM	1032	1152	1152	1152	1152	Unit
3. Jumlah LPM Berprestasi	6	6	6	6	6	Unit
4. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43	Unit
5. Persentase LPM Berprestasi	0,58	0,52	0,52	0,52	0,52	%
Jumlah PKK						
1. Jumlah PKK	1147	1152	1152	1152	1152	Unit
2. Kelompok Binaan PKK	28840	28840	28840	28840	28840	Unit
3. Jumlah PKK Aktif	1147	1152	1152	1152	1152	Unit
4. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	25,14	25,03	25,03	25,03	25,03	unit
5. Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	%

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>

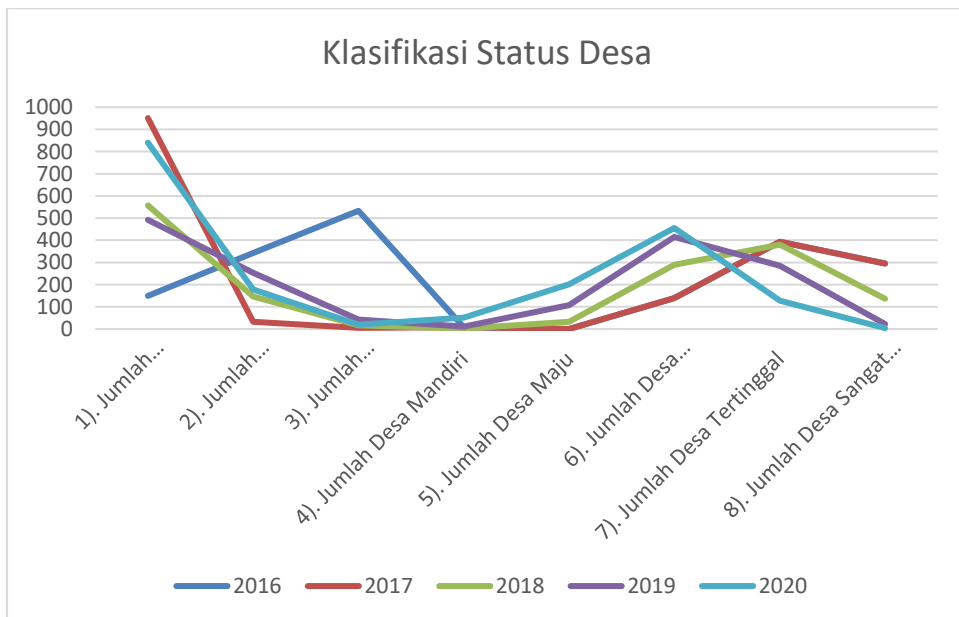
Tabel 35. Data Jumlah Desa/Kelurahan, Profil Desa/kelurahan, Usaha
Ekonomo Masyarakat dan Posyantek Provinsi Kaltim Tahun 2016-
2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Desa/Kelurahan						
1. Jumlah Desa/Kelurahan	1032	1038	1038	1038	1038	Desa/Kelurahan
a. Jumlah Desa	836	841	841	841	841	Desa
b. Jumlah Kelurahan	196	197	197	197	197	Kelurahan
2. Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Desa	1032	1038	1038	1038	1038	unit
3. Jumlah Kecamatan	103	103	103	103	103	Kecamatan
4. Klasifikasi Status Desa						
1). Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	150	951	557	492	840	Desa/Kelurahan
2). Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	343	32	147	253	178	Desa/Kelurahan
3). Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	533	5	16	43	20	Desa/Kelurahan
- Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	51,65	0,48	1,54	4,14	1,93	%
4). Jumlah Desa Mandiri	8	8	2	11	51	Desa
5). Jumlah Desa Maju	0	0	32	107	202	Desa
6). Jumlah Desa Berkembang	140	140	289	415	456	Desa
7). Jumlah Desa Tertinggal	393	393	381	285	128	Desa
8). Jumlah Desa Sangat Tertinggal	295	295	137	23	4	Desa
Profil Desa/Kelurahan						
1. Jumlah Profil Desa/Kelurahan	1038	1038	1038	1038	1038	Unit
2. Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina	641	674	698	782	782	Unit
3. Presentase Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina	61,75	64,93	67,24	75,34	75,34	%
Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat						
1. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	369	458	502	685	704	Unit
2. Jumlah Bumdes Yang Aktif	207	275	295	310	393	Unit
3. Bumdes Yang Dibina	16	16	8	15	25	Unit
4. Jumlah Pasar Desa	227	229	273	289	289	Unit
5. Pasar Desa Yang Dibina	15	15	8	16	16	Unit
Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)						
1. Jumlah Posyantek	53	68	53	95	68	Unit
2. Posyantek Yang Dibina	15	15	15	20	59	Unit

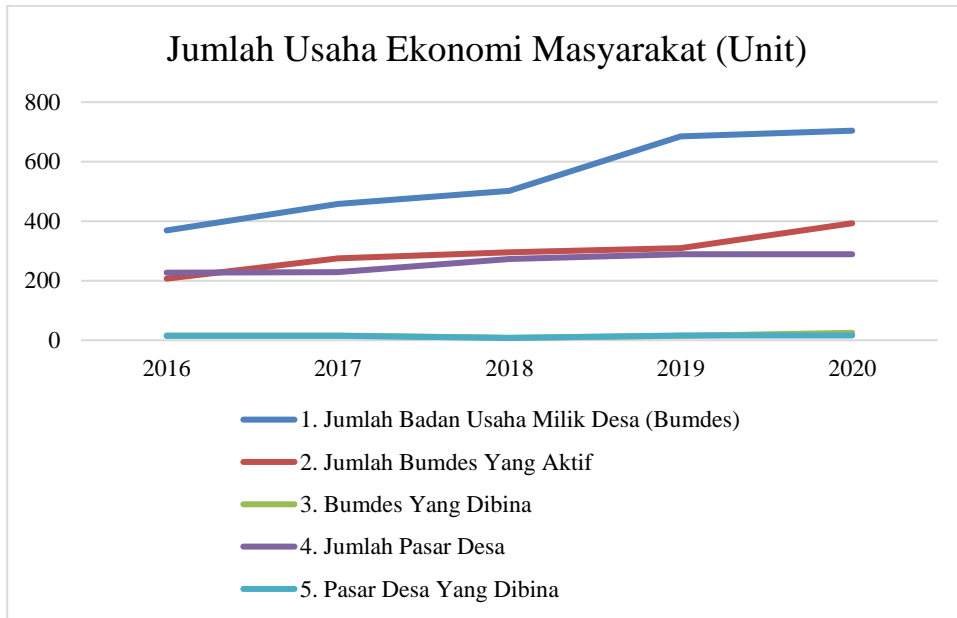
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



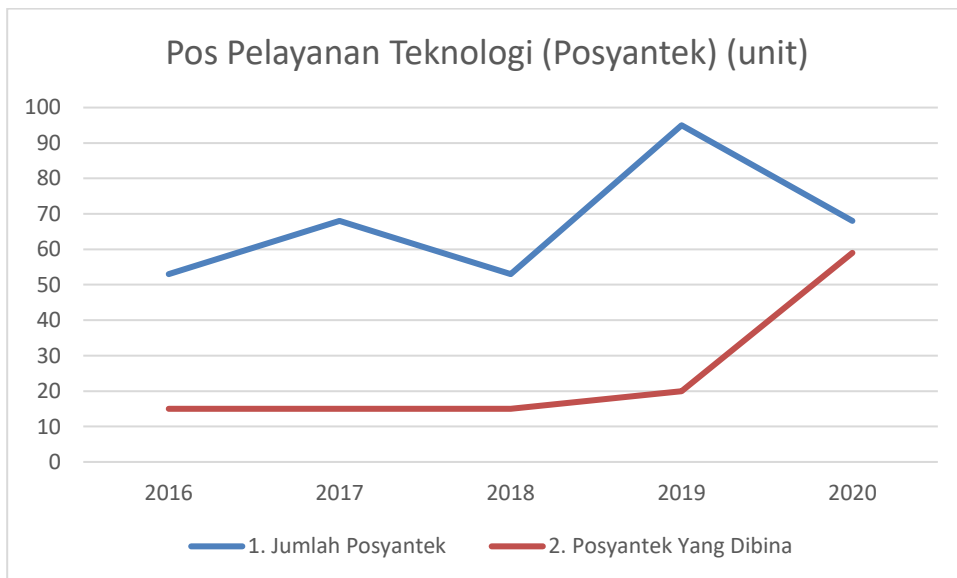
Gambar 101. Grafik Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 102. Grafik Klasifikasi Status Desa



Gambar 103. Grafik Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat (Unit)



Gambar 104. Grafik Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) (unit)



**SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Profil Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sejarah terbentuknya berawal dari di tahun 1974 dimana dibentuk Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM). Kemudian pada tahun 1989, dilakukan Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Selanjutnya pada Tahun 2004 dilaksanakan kembali Pembentukan suatu Badan sebagai pengganti BKPMMD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di Bidang Investasi, yang tugasnya pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMMD sebelumnya.

Kemudian pada tahun tahun 2008 dilaksanakan kembali Pembentukan organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Selanjutnya tahun 2014 dilakukan Pengalihan nama dari BPPMD menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) sebagai bentuk pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penertiban perizinan atau non perizinan dari SKPD sectoral/teknis kepada BPPMD. Pada tahun 2016 penggunaan secara resmi nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi yakni "Indonesia Kaya, Kaltim Tempat Investasi yang Kondusif", dan Misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi;
- 2) Meningkatkan Efektivitas Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- 3) Mengembangkan dan Mengintegrasikan Sistem Pelayanan Satu Pintu Terpadu secara Terpadu;
- 4) Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Meningkatkan Keterbukaan Informasi, Investasi dan Menyelesaikan Sengketa Investasi dengan Baik dan Benar;



- 6) Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara
- 7) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pengembangan investasi yang diupayakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui pelaksanaan sasaran strategis, yakni :

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur;
- 2) Penataan pola hubungan, koordinasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, lintas dinas dan pemkab/kota;
- 3) Peningkatan kapasitas, kinerja dan produktivitas aparatur;
- 4) Peningkatan Integritas instansi pemerintah;
- 5) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi;
- 6) Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur yang melayani;
- 7) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi;
- 8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pembinaan perusahaan;
- 9) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan kebijakan investasi di kawasan strategis daerah;
- 10) Mengembangkan kajian potensi investasi daerah;
- 11) Pengembangan media informasi pelayanan yang memadai;
- 12) Pengembangan standarisasi pelayanan investasi;
- 13) Peningkatan promosi efektif;

14) Peningkatan pendekatan bisnis dan penandatanganan kerjasama.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Mewujudkan Peningkatan Aparatur Sipil Negara dan sarana prasarana penunjang;
- 2) Mewujudkan percepatan dan kemudahan pelayanan perizinan;
- 3) Mewujudkan pengendalian pelaksanaan investasi;
- 4) Mewujudkan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal yang terintegrasi dan implementatif di kawasan strategis;
- 5) Mewujudkan pelayanan advokasi dan informasi perizinan yang prima Menyelenggarakan promosi dan kerjasama penanaman modal;

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Terlayannya Administrasi Perkantoran yang berkualitas dan prima;
- 2) Terpenuhinya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP;
- 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan;
- 4) Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah;
- 5) Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat;
- 6) Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 7) Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi Provinsi;
- 8) Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan;
- 9) Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Timur serta Terselenggaranya MoU



Penanaman Modal Asing Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 36 yakni terkait data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 36. Data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
PMA (Penanaman Modal Asing)						
1). Rencana Jumlah Proyek PMA	43	54	36	0	n/a	Proyek
2). Realisasi Jumlah Proyek PMA	471	397	513	903	n/a	Proyek
3). Rencana Nilai PMA	7876807300	2000726200	595318127	0	n/a	US\$
4). Realisasi Nilai investasi PMA	1181859200	970414700	587501600	863099400	n/a	US\$
5). Kenaikan nilai investasi PMA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
6). Realisasi Investasi PMA per Sektor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	US\$
1. Sektor Primer	803877200	775879400	253669700	495005800	0	
- Tanaman Pangan	0	0	0	n/a	n/a	US\$
-Perkebunan	344588200	139685200	63157800	185796300	n/a	US\$
-Peternakan	3900	1214000	956300	0	n/a	US\$
-Perikanan	0	0	135500	0	n/a	US\$
-Kehutanan	9304600	8261200	657100	2751700	n/a	US\$
-Pertambangan	449980500	626719000	188763000	306457800	n/a	US\$
2. Sektor Sekunder	329909900	106809400	120212500	34319800	0	
-Industri Makanan	207862100	67522800	118386600	14264600	n/a	US\$
-Industri Tekstil	0	0	0	0	n/a	US\$
-Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0	n/a	US\$
-Industri Kayu	7906900	0	6600	33300	n/a	US\$
-Industri Kertas dan Percetakan	0	0	0	0	n/a	US\$
-Industri Kimia dan Farmasi	10210300	9540300	760700	60000	n/a	US\$
-Industri Karet dan Plastik	39000	9494000	256700	561100	n/a	US\$
-Industri Mineral non Logam	27487300	16586100	0	15809600	n/a	US\$
-Industri Logam, Mesin dan Elektronika	75719600	3607700	22600	1879400	n/a	US\$

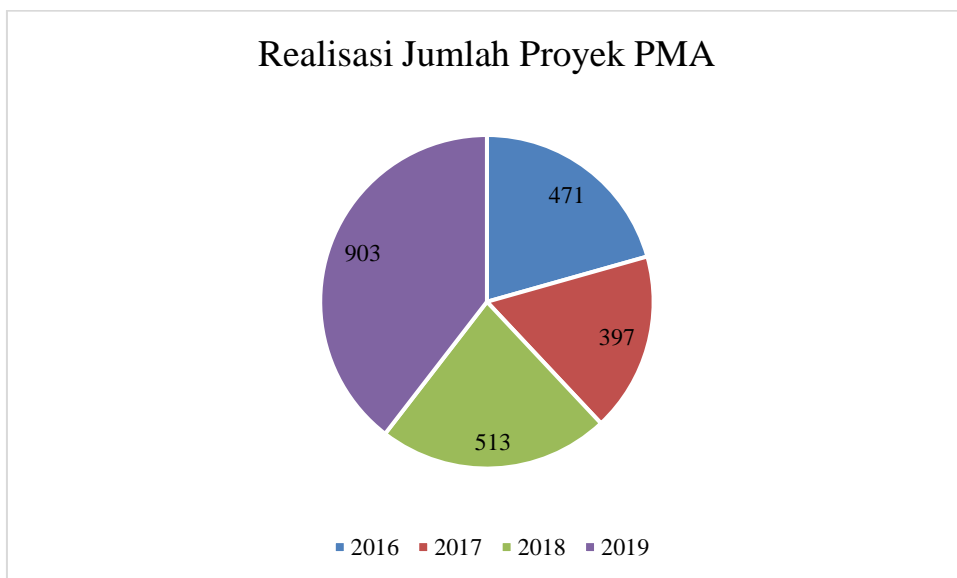


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
-Industri Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	0	0	253200	1533400	n/a	US\$
-Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain	128800	58500	0	43800	n/a	US\$
-Industri Lainnya	555900	0	526100	134600	n/a	US\$
3. Sektor Tersier	46421100	87725900	213619400	333773800	0	
- Listrik, Gas dan Air	26542700	16899200	53012000	280607900	n/a	US\$
- Konstruksi	0	0	5093100	0	n/a	US\$
- Perdagangan dan Reparasi	4625100	8115300	3738700	4258100	n/a	US\$
- Perhotelan dan Restoran	1592600	257600	2245800	1297000	n/a	US\$
- Transportasi, Gudang dan Komunikasi	10095400	60941300	86566000	14847700	n/a	US\$
- Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1653500	1008600	301200	146900	n/a	US\$
- Jasa Lainnya	1911800	503900	62662600	32616200	n/a	US\$
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)						
1). Persetujuan Jumlah Proyek PMDN	171	338	419	n/a	n/a	Proyek
2). Realisasi Jumlah Proyek PMDN	186	238	520	2227	n/a	Proyek
3). Rencana Nilai PMDN	56221706800000	39392689200000	25457095450429	0	n/a	Rp
4). Realisasi Nilai PMDN	6885124600000	9955629800000	25941962100000	22674053100000	n/a	Rp
5). Kenaikan nilai investasi PMDN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp
6). Realisasi Investasi PMDN Per Sektor	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
1. Sektor Primer	3103785700000	7274299200000	16909490500000	13273997600000	0	
1). Tanaman Pangan	0	0	0	n/a	n/a	Rp
2). Perkebunan	2496175000000	2649628000000	3747269700000	4278114900000	n/a	Rp
3). Peternakan	0	0	0	0	n/a	Rp
4). Perikanan	0	0	0	0	n/a	Rp
5). Kehutanan	8050100000	18641800000	602835400000	283625000000	n/a	Rp
6). Pertambangan	599560600000	4606029400000	12559385400000	8712257700000	n/a	Rp
2. Sektor Skunder	2749351200000	484363900000	820609200000	1417609300000	0	
1). Industri Makanan	1807061600000	446870800000	529930300000	569890600000	n/a	Rp
2). Industri Tekstil	0	0	0	0	n/a	Rp
3). Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0	n/a	Rp
4). Industri Kayu	382004200000	0	264104300000	350224000000	n/a	Rp
5). Industri Kertas dan Percetakan	0	0	0	0	n/a	Rp
6). Industri Kimia dan farmasi	466848700000	9178800000	1034700000	44145600000	n/a	Rp
7). Industri Karet dan Plastik	0	0	0	9000000000	n/a	Rp
8). Industri Mineral non Logam	8893300000	748300000	17919900000	292133100000	n/a	Rp

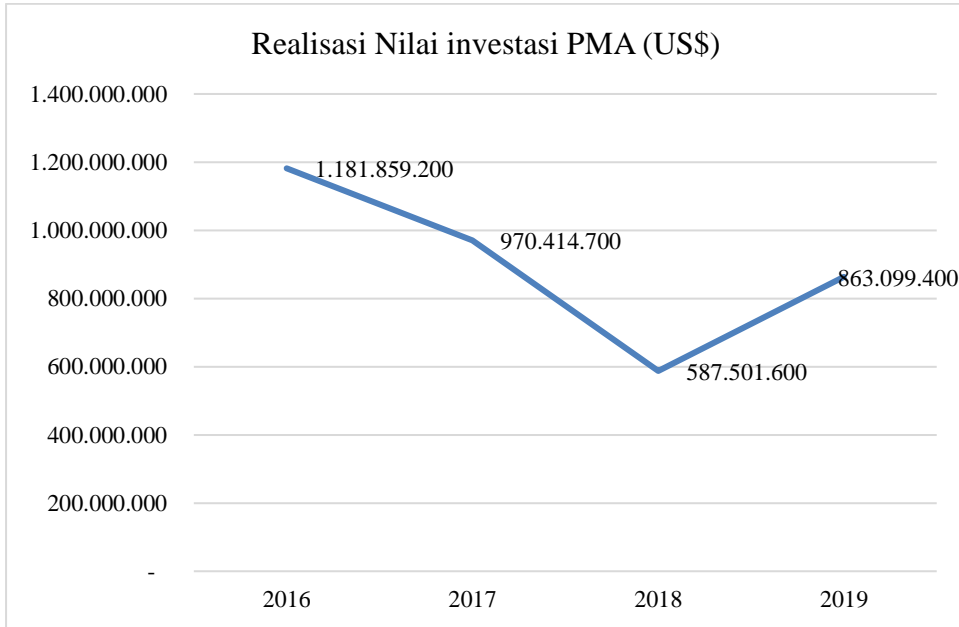


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
9). Industri Logam, Mesin dan Elektronika	0	27566000000	0	0	n/a	Rp
10). Industri Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	0	0	0	0	n/a	Rp
11). Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain	5900000000	0	7620000000	151706500000	n/a	Rp
12). Industri Barang dari Semen	0	0	0	0	n/a	Rp
13). Industri Lainnya	78643400000	0	0	509500000	n/a	Rp
3. Sektor Tersier	991913600000	1959192100000	7054297000000	7582412800000	0	
1). Listrik, Gas dan Air	324544200000	1944014300000	2559556900000	2021363600000	n/a	Rp
2). Konstruksi	0	375300000	3204289500000	1223384700000	n/a	Rp
3). Perdagangan dan Reparasi	69294600000	8630300000	82557400000	341327600000	n/a	Rp
4). Perhotelan dan Restoran	0	0	480000000	1086261800000	n/a	Rp
5). Transportasi, Gudang dan Komunikasi	183970500000	4322200000	165403800000	940606300000	n/a	Rp
6). Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	6560200000	1850000000	26874400000	345944100000	n/a	Rp
7). Jasa Lainnya	407544100000	0	1015135000000	1623524700000	n/a	Rp

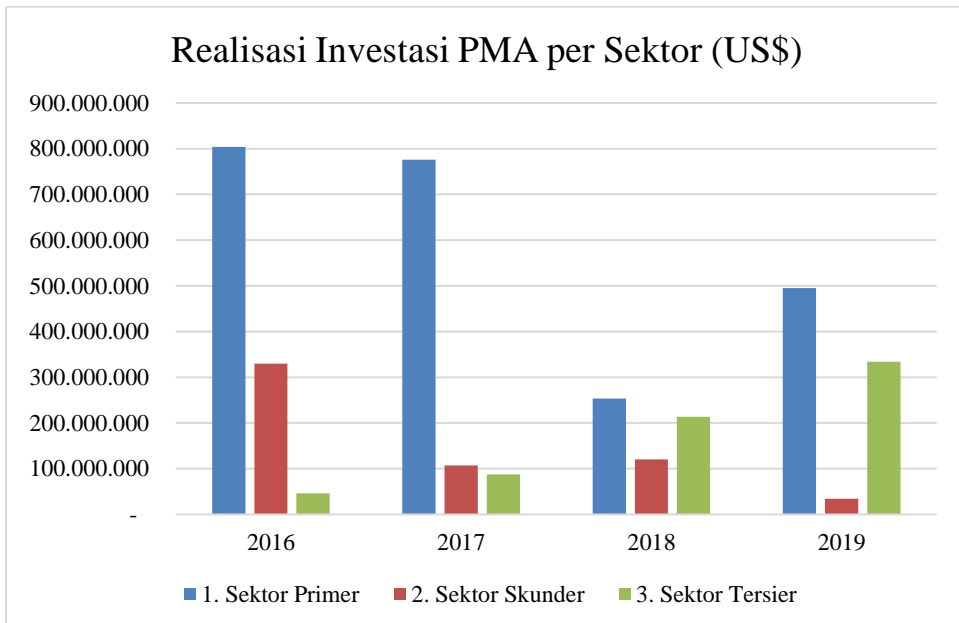
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



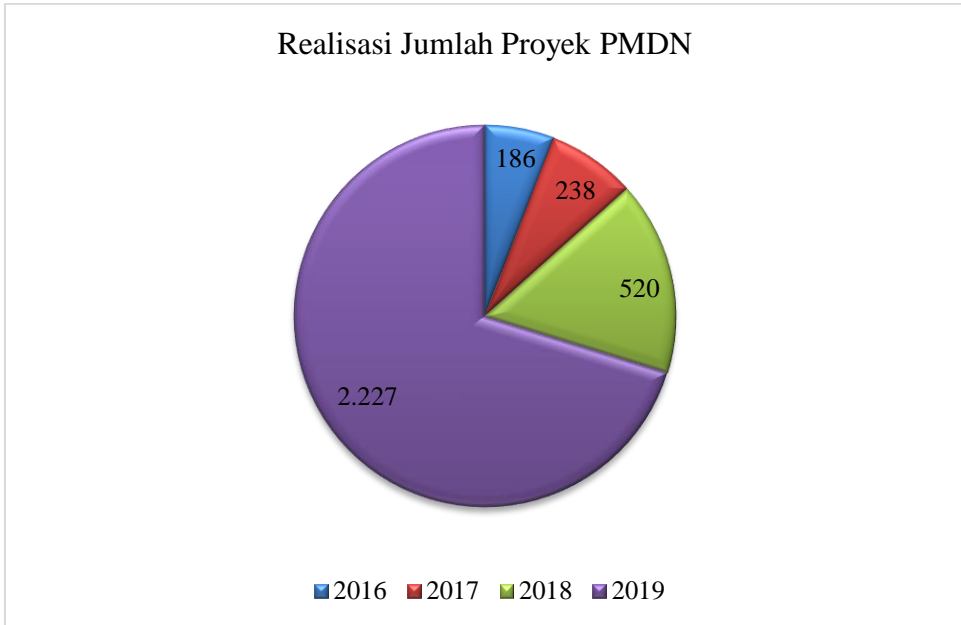
Gambar 105. Grafik Realisasi Jumlah Proyek PMA



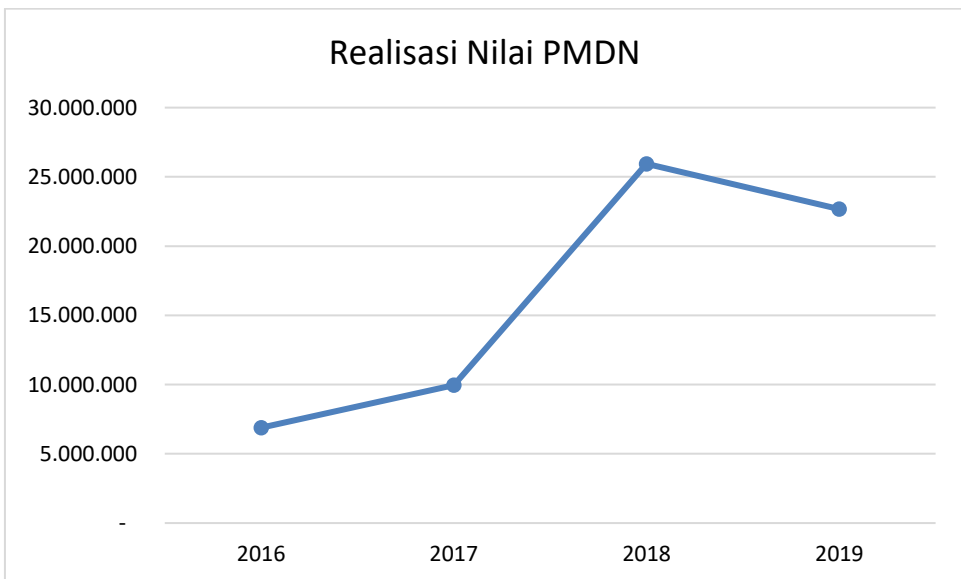
Gambar 106. Grafik Realisasi Nilai investasi PMA (US\$)



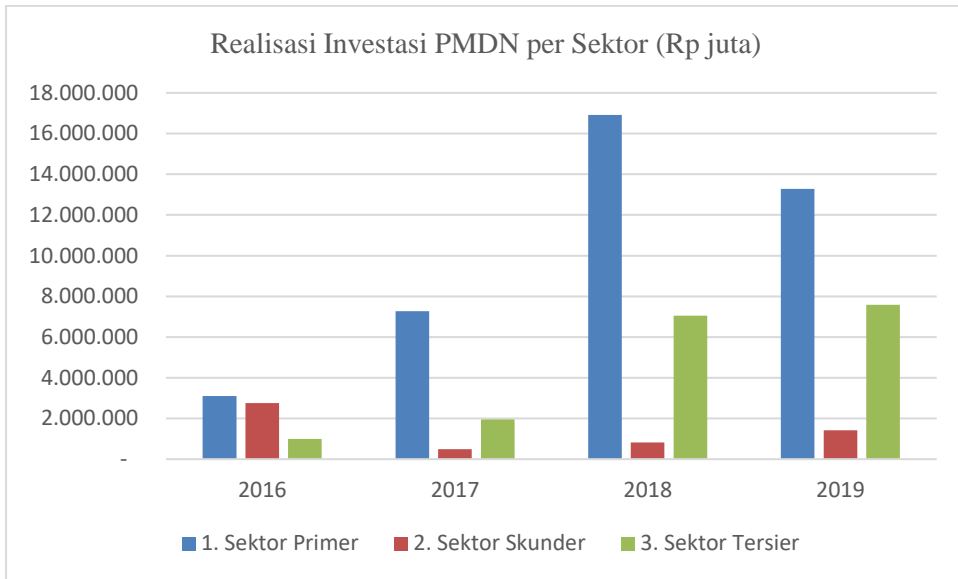
Gambar 107. Grafik Realisasi Investasi PMA per Sektor (US\$)



Gambar 108. Grafik



Gambar 109. Grafik Realisasi Jumlah Proyek PMDN

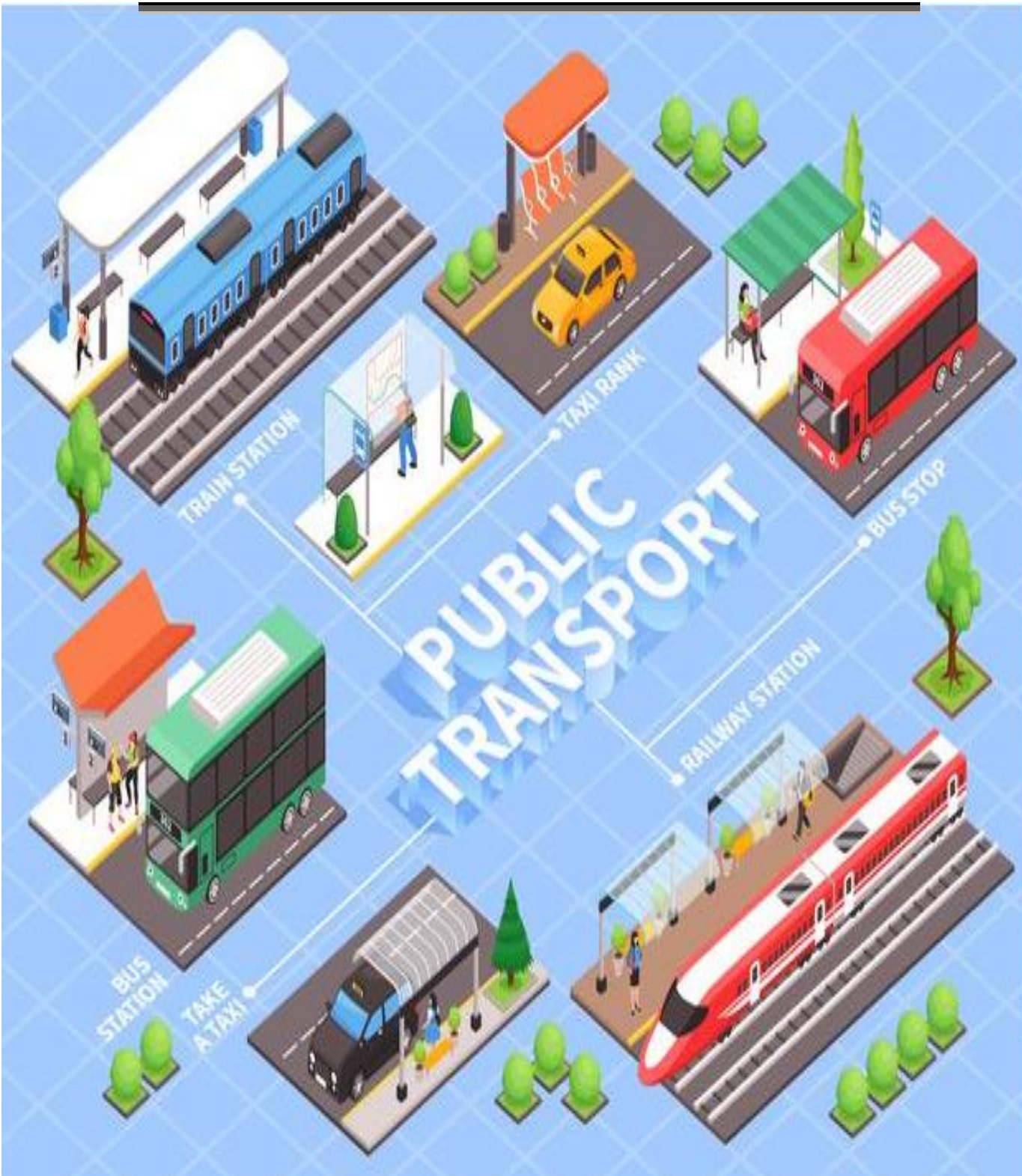


Gambar 110. Grafik Realisasi Investasi PMDN per Sektor (Rp juta)



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN



Profil Perangkat Daerah

Dasar pembentukan organisasi dari Dinas Perhubungan yakni pada tahun 2001 terbit Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2001 dibentuk dua komponen Dinas Perhubungan yaitu : Dinas Perhubungan Laut dan Udara; dan Dinas Perhubungan Darat dan ASDP. Kemudian pada tahun 2004 kedua komponen tersebut di atas digabung menjadi satu dengan nama “DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALTIM”. Pada tahun 2008 dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dimana Peraturan Daerah ini lahir sebagai impementasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yang membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dimana Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika tadinya adalah bagian dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi dan Misi dimana Visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Kalimantan Timur Secara Handal dan Profesional”. Sedangkan Misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional;
2. Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
3. Melengkapi dan Meningkatkan Sarana Prasarana Transportasi;
4. Memantapkan Konsolidasi melalui Koordinasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor Transportasi;
5. Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi



Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan Tugas pokok Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah daerah;
2. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
3. Perumusan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan darat;
4. Perumusan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perhubungan Laut.
5. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis Perhubungan Udara
6. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atas an sesuai dengan bidang tugasnya.



Transportasi Darat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 37 yakni terkait data Transportasi Darat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 37. Data Transportasi Darat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Perhubungan						
1. Transportasi Darat						
1). Jumlah Terminal Bis	23,00	23,00	23,00	21,00	21,00	Unit
2). Jumlah penumpang Bis Tiba	9859962,00	9227136,00	274578,00	233334,00	110262,00	orang
3). Jumlah penumpang Bis Berangkat	9845714,00	8966784,00	327594,00	272028,00	112304,00	orang
4). Terminal	23,00	23,00	23,00	21,00	21,00	Unit
1. Kelas A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Unit
2. Kelas B	11,00	11,00	9,00	7,00	7,00	Unit
3. Kelas C	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	Unit
4. Jumlah Orang Melalui Terminal	1970567,00	1849432,00	602172,00	505362,00	222566,00	orang
5. Jumlah Barang Melalui Terminal	4889523,00	4852836,00	0,00	0,00	0,00	Ton
5). Angkutan Penyeberangan						
- Kapal Ferry	16,00	16,00	16,00	16,00	18,00	Unit
- Kendaraan Roda Empat	250116,00	425334,00	529893,00	530326,00	211066,00	Unit/tahun
- Jumlah Orang Melalui Dermaga	94578,00	144665,00	163379,00	158815,00	43451,00	orang/tahun
- Jumlah Barang Melalui Dermaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ton
6). Jumlah Jembatan Timbang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Unit
7). Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	1239,00	350,00	150,00	35,00	1333,00	Unit
8). Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia	10677,00	11262,00	11262,00	11262,00	11262,00	Unit
9). Jumlah Kendaraan Bermotor	2770919,00	2709695,00	2489529,00	2994255,00	2997255,00	Unit

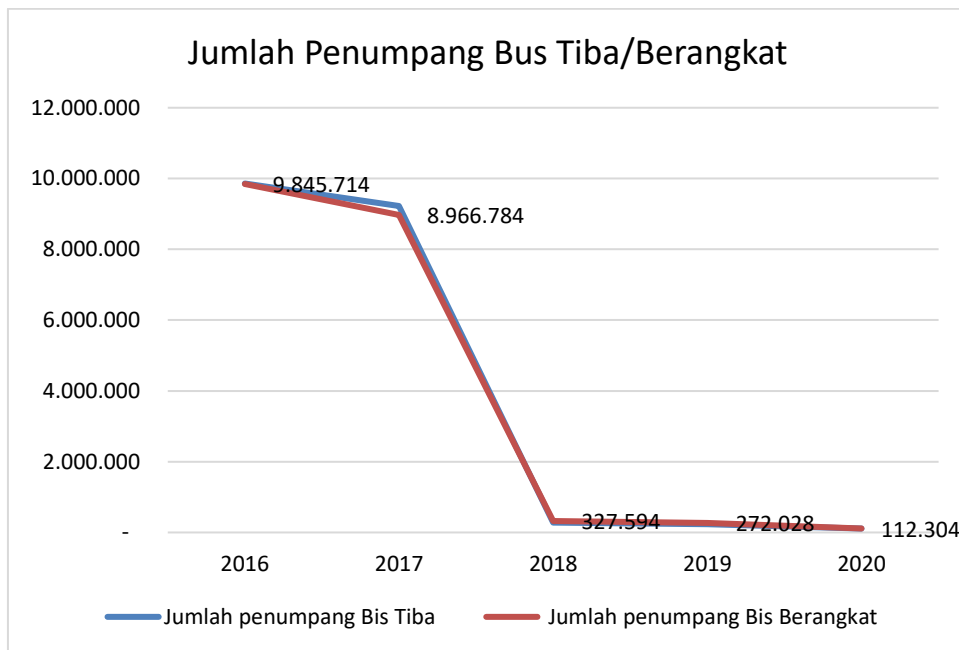


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
10). Jumlah Kecamatan yang belum terakses Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Sungai, Danau dan Penyebrangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan
11). Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
12). Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	11,60	3,11	1,33	0,31	11,84	%
2. Transportasi Laut						
1). Jumlah Pelabuhan Laut	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Unit
1. Pelabuhan yang Diusahakan						
- Peti Kemas	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Unit
- Semi Peti Kemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
- Non Peti Kemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2. Yang Tidak Diusahakan						
- Kapal	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Unit
- Penumpang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Unit
- Pelni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
- Jumlah	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	Unit
- Kapasitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
- Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2). Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Tiba	223305,00	256425,00	264237,00	258255,00	108443,00	orang
3). Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Berangkat	229755,00	249352,00	251356,00	249243,00	87575,00	orang
4). Jumlah Barang yang dibongkar	305323205,00	354236245,00	364456652,00	352154252,00	7939564,00	ton
5). Jumlah Barang yang dimuat	2127509901,00	1968235146,00	2035345235,00	1909708188,00	917902284,00	ton
3. Transportasi Udara						
1). Jumlah Pelabuhan Udara	11,00	13,00	13,00	11,00	11,00	Unit
- Internasional	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Unit
- Lokal	10,00	12,00	12,00	10,00	10,00	Unit
2). Jumlah penumpang Pesawat udara Tiba	4025784,00	4216892,00	4425468,00	3501800,00	1501345,00	orang
3). Jumlah Barang yang dibongkar Melalui Bandara	15859585,00	16283504,00	19293301,00	28693662,00	30001012,00	kg
4). Jumlah penumpang Pesawat udara Berangkat	3073369,00	3586214,00	3745678,00	2914118,00	1123610,00	orang
5). Jumlah Barang yang dimuat Melalui Bandara	10133164,00	10215361,00	15142005,00	15317598,00	15794907,00	kg
6). Jumlah Maskapai	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	Unit

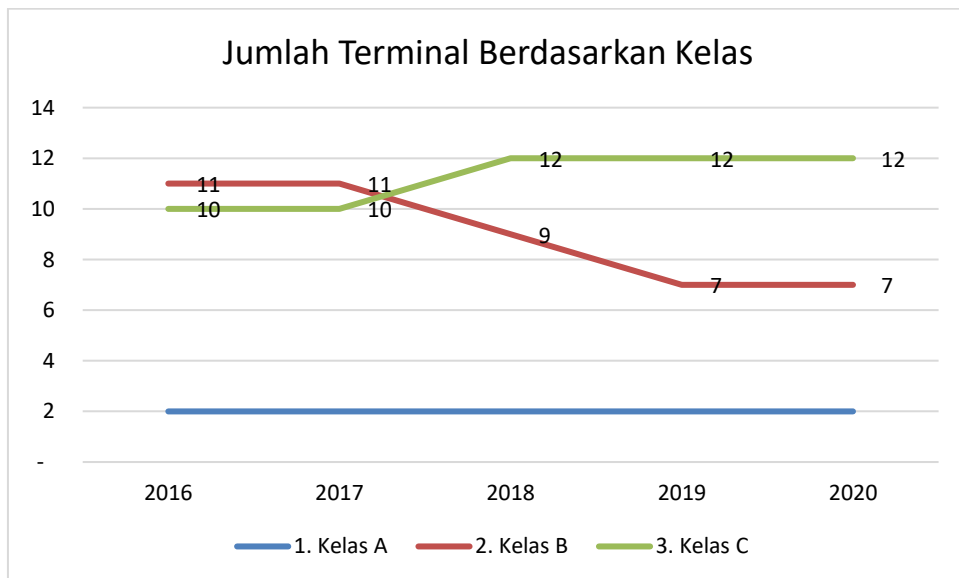


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7). Jumlah Kecamatan yang belum terakses Sarana dan Prasarana Transportasi Udara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Kecamatan
Angkutan Umum						
1. Jumlah Angkutan Umum	146006,00	146148,00	146348,00	146022,00	146556,00	Unit
1). Mobil penumpang umum	1329,00	1348,00	1548,00	1277,00	1824,00	Unit
2). Mobil bus	547,00	547,00	547,00	492,00	479,00	Unit
3). Mobil barang	144130,00	144253,00	144253,00	144253,00	144253,00	Unit
2. Jumlah Ijin Trayek	228,00	228,00	226,00	226,00	251,00	Unit
1). Izin Trayek antarkota antarprovinsi	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Unit
2). Izin Trayek antarkota dalam provinsi	130,00	130,00	128,00	128,00	153,00	Unit
3). Izin Trayek perkotaan	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	Unit
4). Izin Trayek perdesaan	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Unit
3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	152564,00	152788,00	152788,00	116976,00	116976,00	Unit
1). Mobil penumpang umum	7865,00	7865,00	7865,00	6660,00	6660,00	Unit
2). Mobil bus	569,00	569,00	569,00	904,00	904,00	Unit
3). Mobil barang	144130,00	144354,00	144354,00	109412,00	109412,00	Unit
4. Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum	1355,00	1426,00	1426,00	1609,00	1609,00	Unit
5. Jumlah Angkutan Umum yang Tidak Memiliki KIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
6. Lama Pengujian KIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Hari
7. Biaya Pengujian KIR	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	Rupiah
8. Jumlah Pengguna Angkutan Umum	12127125,00	10232985,00	10232985,00	10043896,00	10065421,00	Orang

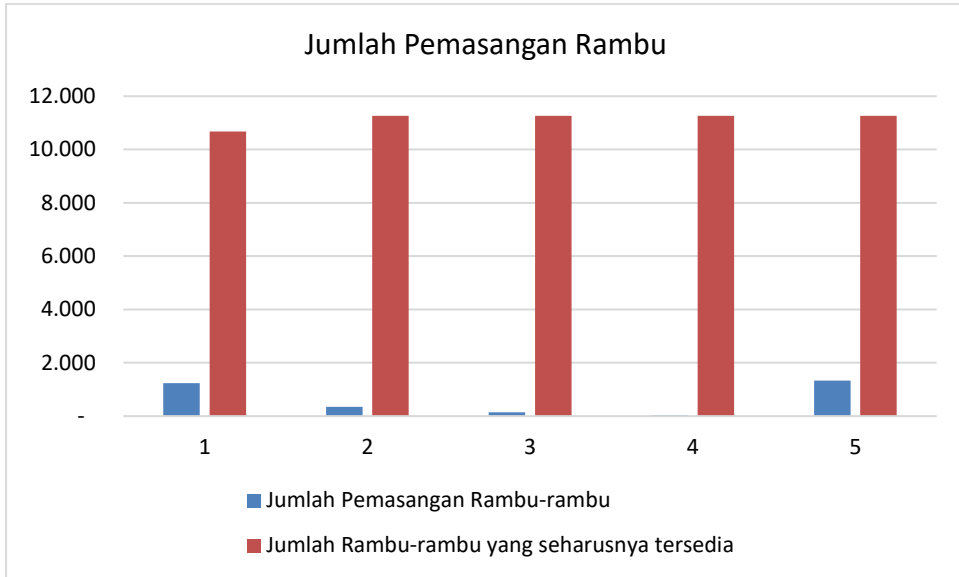
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



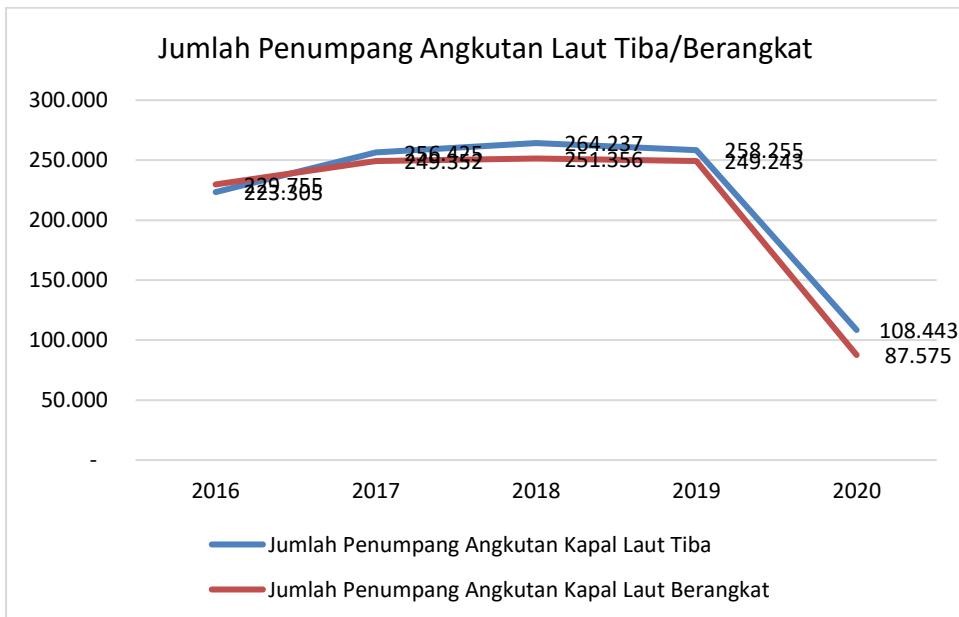
Gambar 111. Grafik Jumlah Penumpang Bus Tiba/Berangkat



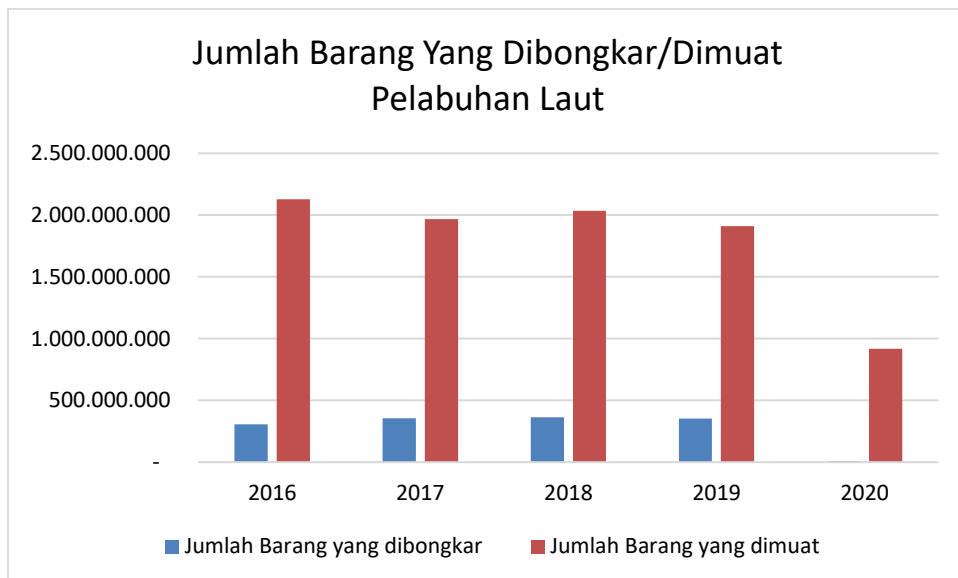
Gambar 112. Grafik Jumlah Terminal Berdasarkan Kelas



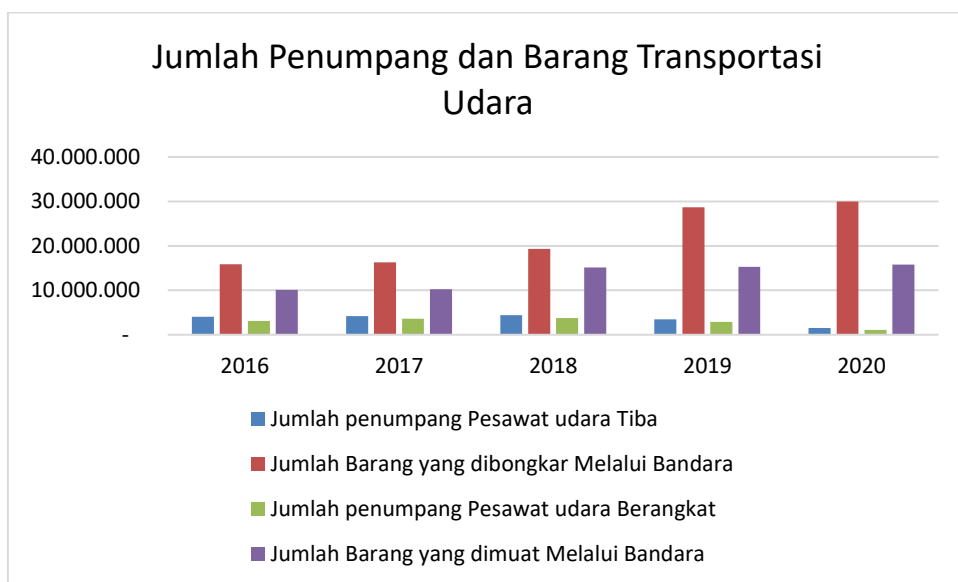
Gambar 113. Grafik Jumlah Pemasangan Rambu



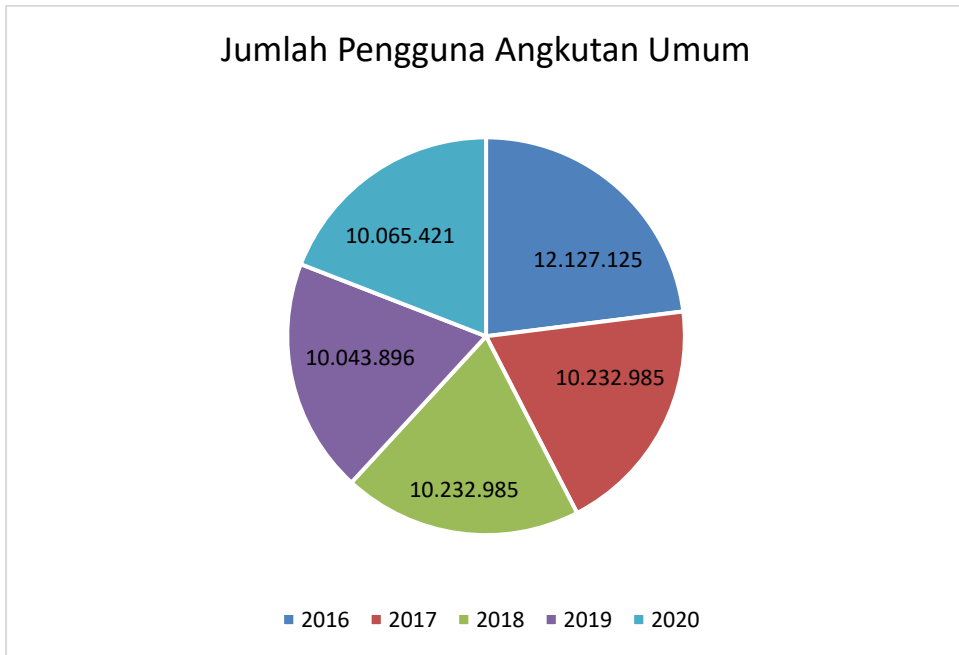
Gambar 114. Grafik Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tiba/Berangkat



Gambar 115. Grafik Jumlah Barang Yang Dibongkar/Dimuat Pelabuhan Laut



Gambar 116. Grafik Jumlah Penumpang dan Barang Transportasi Udara



Gambar 117. Grafik Jumlah Pengguna Angkutan Umum



DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



Profil Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dalam peningkatan prestasi olahraga dan potensi pemuda yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai katalisator dan dinamisator pelaksana pembangunan khususnya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan harus dapat menciptakan iklim masyarakat yang mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemuda dan olahraga. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna dengan keterlibatan semua komponen masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi di Bidang Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian di tetapkan kembali Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tepat pada tanggal 27 Januari 2009, lahir SK Gubernur Kalimantan Timur tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim No 821.2/III.1-546/TUUA/BKD-2009 yang dilanjutkan dengan Pelantikan Drs. H. Masri Hadi, SE. MM sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Februari 2009. Selanjutnya 15 Februari 2009 SK Gubernur Kalimantan Timur Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan SK Nomor 821.2/III.1-560/TUUA/BKD/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim, yang kemudian pelantikannya dilakukan pada tanggal 23 Februari 2009 dan malam harinya dilanjutkan rapat staf pertamakali yang dilaksanakan di Ruang rapat kantor Sekretariat Korpri Provinsi. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah



(SKPD) baru, Dispora belum memiliki kantor tetap, sehingga untuk sementara tepatnya selama kurang lebih 2 minggu (24 Februari-12 Maret) berkantor di eks Kantor Dinas Kesehatan Jl. Basuki Rahmat, Samarinda, kemudian tepat tanggal 13 Maret 2009, Kantor Dispora Pindah ke Pusdiklat Kompleks Stadion Sempaja hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, Tupoksi Dispora bertambah dengan dilantiknya pejabat eselon III dan IV untuk Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya Sempaja Samarinda (UPTD PKSUM) oleh Gubernur Kaltim pada tanggal 29 September 2009. Awal tahun 2011, tupoksi tersebut bertambah lagi dengan diresmikannya Sekolah Menengah Khusus Olahraga Negeri Terpadu Bertaraf Internasional (SKOI) dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Republik Indonesia, HR Agung Laksono yang ditandai dengan penandatanganan prasasti pada tanggal 31 Januari 2011. Warna Dispora Kaltim kembali mengalami perubahan Struktur Organisasi Pemerintah (OPD) berdasarkan Peraturan daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi yaitu "Terwujudnya Kammpuan Sumber Daya Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berprestasi", kemudian untuk Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yaiut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Data Kepemudaan dan Kepramukaan
- 2) Meningkatkan Kualitas Keolahragaan Menuju Prestasi dan Kesejahteraan Masyarakat.



Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
- 3) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
- 6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 38 berupa data terkait kepemudaan dan Keolahragaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

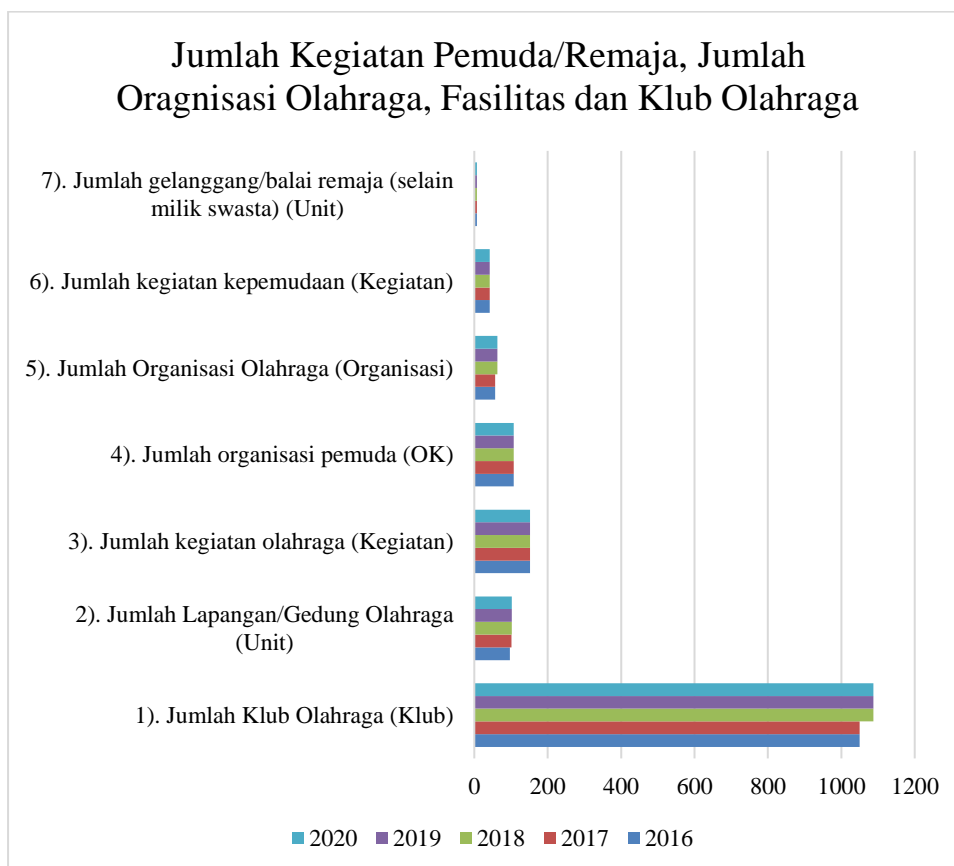
Tabel 38. Data Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Pemuda dan Olah raga						
1. Pemuda dan Olah raga	1512,00	1512,00	1523,00	1523,00	1523,00	
1). Jumlah Klub Olahraga	1050,00	1050,00	1087,00	1087,00	1087,00	Klub
2). Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97,00	101,00	102,00	102,00	102,00	Unit
3). Jumlah kegiatan olahraga	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	Kegiatan
4). Jumlah organisasi pemuda	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	OK
5). Jumlah Organisasi Olahraga	57,00	57,00	63,00	63,00	63,00	Organisasi
6). Jumlah kegiatan kepemudaan	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	Kegiatan
7). Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Unit
2. Rasio						
1). Rasio Jumlah Klub Olahraga	3,00	2,94	2,98	2,92	2,88	
2). Rasio Jumlah Gedung Olahraga	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	
3). Rasio Gelanggang/Balai Remaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Persentase Pemuda (usia 16 - 30 tahun) pengangguran yang berwirausaha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
a. Jumlah Pemuda (usia 16 - 30 tahun)	n/a	n/a	n/a	8927478,00	937456,00	Orang
b. Jumlah Pemuda (Usia 16-30 tahun) pengangguran yang berwirausaha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang
Cabang Olahraga						
1. Cabang Olahraga						
1). Bela Diri						
a. Jumlah Lembaga	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	Lembaga
b. Jenis Olahraga Unggulan	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Cabor
c. Jumlah Atlet	260,00	260,00	260,00	280,00	289,00	Atlet
d. Sarana Prasarana Olahraga	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Unit
2). Terukur						
a. Jumlah Lembaga	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	Lembaga
b. Jenis Olahraga Unggulan	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	Cabor
c. Jumlah Atlet	397,00	397,00	397,00	397,00	401,00	Atlet
d. Sarana Prasarana Olahraga	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	Unit
3). Permainan						
a. Jumlah Lembaga	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	Lembaga
b. Jenis Olahraga Unggulan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Cabor

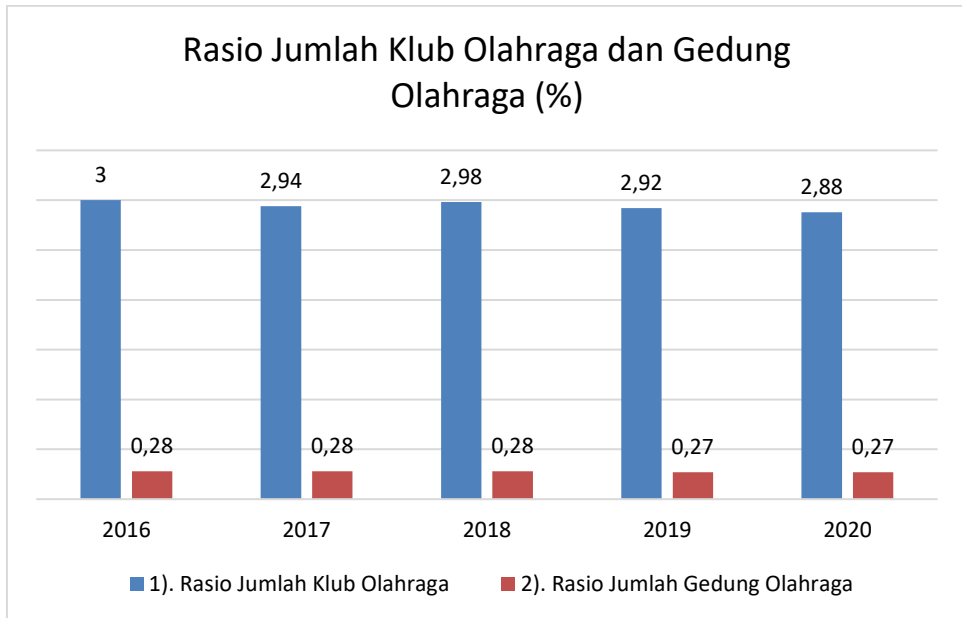


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
c. Jumlah Atlet	156,00	156,00	156,00	156,00	215,00	Atlet
d. Sarana Prasarana Olahraga	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Unit
4). Beregu						
a. Jumlah Lembaga	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	Lembaga
b. Jenis Olahraga Unggulan	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Cabor
c. Jumlah Atlet	250,00	260,00	260,00	260,00	315,00	Atlet
d. Sarana Prasarana Olahraga	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Unit

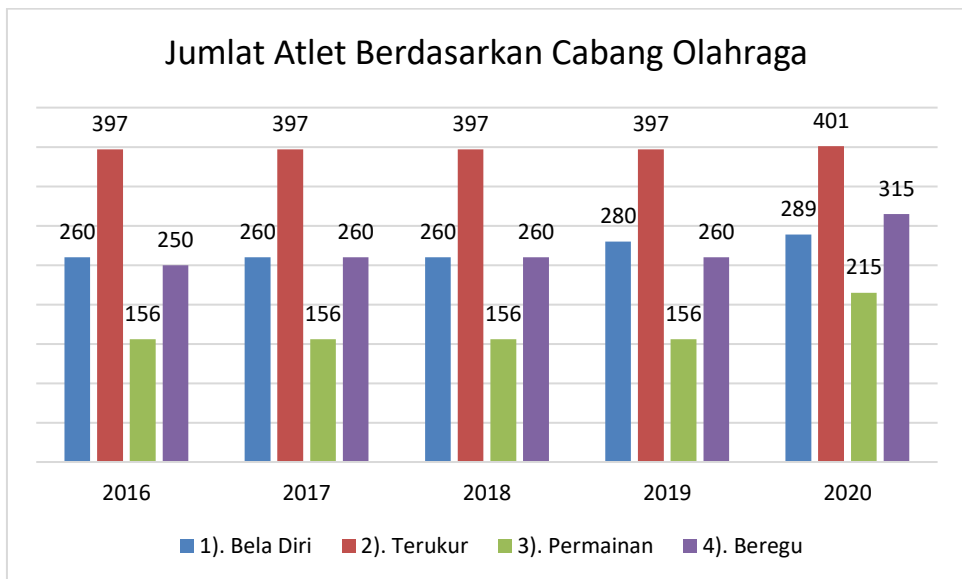
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 118. Grafik Jumlah Kegiatan Pemuda/Remaja, Jumlah Organisasi Olahraga, Fasilitas dan Klub Olahraga



Gambar 119. Grafik Rasio Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga



Gambar 120. Grafik Jumlah Atlet Berdasarkan Cabang Olahraga



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Profil Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pendidikan menjadi penting dan strategis dalam menentukan arah masa depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu sejalan dengan paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah atas prakarsa sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan disegala bidang satu diantaranya adalah bidang pendidikan, dan terkoordinasi melalui Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi dan Misi, dimana Visi yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur Yang Cerdas, Berkualitas dan Punya Daya Saing”. Sedangkan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan melalui tersedianya akses memperoleh pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia sekolah hingga jenjang pendidikan;
- 2) Mewujudkan keluaran satuan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing melalui sistem pendidikan yang bermutu dan searah dengan kebutuhan;
- 3) Mewujudkan system pendidikan, tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas yang baik bagi penyelenggaran pendidikan.



Jumlah Siswa Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 39 yakni terkait data Jumlah Siswa, Rasio Guru dan Murid serta Angka Kelulusan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 39. Data Jumlah Siswa, Rasio Guru dan Murid serta Angka Kelulusan Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Siswa						
1. Jumlah Siswa	851271,00	861917,00	857795,00	749305,00	786494,00	orang
1). Jumlah Siswa PAUD	92502,00	91502,00	91902,00	11103,00	4052,00	orang
2). Jumlah Siswa Taman Kanak-Kanak (TK)	54812,00	56012,00	56152,00	18805,00	53062,00	orang
1. Jumlah Siswa TK Negeri	2741,00	2941,00	2981,00	1333,00	53062,00	orang
2. Jumlah Siswa TK Swasta	52071,00	53071,00	53171,00	17472,00	n/a	orang
3). Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB)	2234,00	2184,00	2234,00	2353,00	n/a	orang
1. Jumlah Siswa SLB Negeri	1349,00	1309,00	1339,00	1320,00	1446,00	orang
2. Jumlah Siswa SLB Swasta	885,00	875,00	895,00	1033,00	1061,00	orang
4). Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD)	413136,00	412623,00	409413,00	410902,00	410724,00	orang
1. Jumlah Siswa SD Negeri	363590,00	358727,00	357110,00	354825,00	349239,00	orang
2. Jumlah Siswa SD Swasta	49546,00	53896,00	52303,00	56077,00	61485,00	orang
5). Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	152490,00	156366,00	155435,00	156675,00	159607,00	orang
1. Jumlah Siswa SMP Negeri	123990,00	126158,00	125509,00	125347,00	127044,00	orang
2. Jumlah Siswa SMP Swasta	28500,00	30208,00	29926,00	31328,00	32563,00	orang
6). Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)	63129,00	72284,00	72131,00	74184,00	77017,00	orang
1. Jumlah Siswa SMA Negeri	53932,00	61404,00	61294,00	62628,00	64892,00	orang
2. Jumlah Siswa SMA Swasta	9197,00	10880,00	10837,00	11556,00	12125,00	orang
7). Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	69482,00	70946,00	70528,00	75283,00	79525,00	orang
1. Jumlah Siswa SMK Negeri	40963,00	43297,00	42998,00	47186,00	50763,00	orang
2. Jumlah Siswa SMK Swasta	28519,00	27649,00	27530,00	28097,00	28762,00	orang
Jumlah Sekolah						
1. Jumlah Sekolah	1431,00	4098,00	3955,00	4400,00	4302,00	Unit
1). Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	1345,00	1150,00	1040,00	1392,00	1348,00	Unit
1. Jumlah TK Negeri	68,00	72,00	67,00	70,00	85,00	Unit
- Bangunan Baik	68,00	72,00	67,00	70,00	85,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2. Jumlah TK Swasta	1277,00	1078,00	973,00	1322,00	1263,00	Unit
- Bangunan Baik	1277,00	1078,00	973,00	1322,00	1263,00	Unit



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
- Bangunan Tidak Baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2). Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)	94,00	41,00	29,00	34,00	36,00	Unit
1. Jumlah SLB Negeri (SLBN)	67,00	13,00	9,00	9,00	10,00	Unit
- Bangunan Baik	67,00	13,00	9,00	9,00	10,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2. Jumlah SLB Swasta (SLBS)	27,00	28,00	20,00	25,00	26,00	Unit
- Bangunan Baik	27,00	28,00	20,00	25,00	26,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
3). Jumlah Sekolah Dasar (SD)	1834,00	1856,00	1847,00	1886,00	1898,00	Unit
1. Jumlah SD Negeri (SDN)	1648,00	1653,00	1646,00	1656,00	1662,00	Unit
- Bangunan Baik	1648,00	1653,00	1646,00	1656,00	1662,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2. Jumlah SD Swasta	186,00	203,00	201,00	230,00	236,00	Unit
- Bangunan Baik	186,00	203,00	201,00	230,00	236,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik (SD Swasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
4). Jumlah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP)	589,00	612,00	609,00	646,00	654,00	Unit
1. Jumlah SMP Negeri (SMPN)	408,00	426,00	422,00	434,00	439,00	Unit
- Bangunan Baik	408,00	426,00	422,00	434,00	439,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik (SMP Negeri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2. Jumlah SMP Swasta	181,00	186,00	187,00	212,00	215,00	Unit
- Bangunan Baik	181,00	186,00	187,00	212,00	215,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik (SMP Swasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
5). Jumlah Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA)	210,00	210,00	214,00	220,00	229,00	Unit
1. Jumlah SMA Negeri (SMA)	135,00	135,00	135,00	137,00	142,00	Unit
- Bangunan Baik	135,00	135,00	135,00	137,00	142,00	Unit

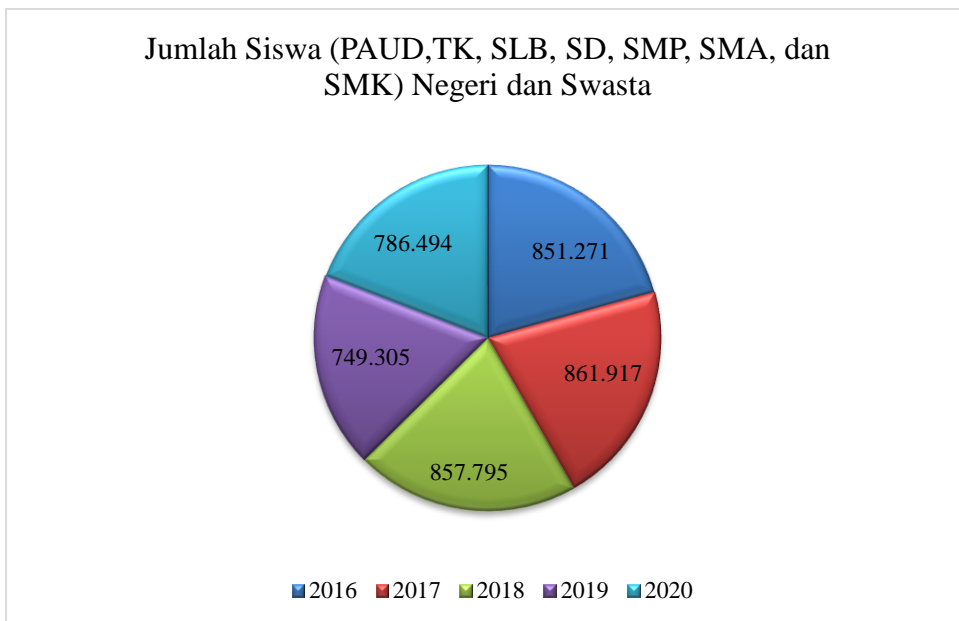


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
- Bangunan Tidak Baik (SMA Negeri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2. Jumlah SMA Swasta	75,00	75,00	79,00	83,00	87,00	Unit
- Bangunan Baik	75,00	75,00	79,00	83,00	87,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik (SMA Swasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
6). Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	207,00	216,00	216,00	222,00	224,00	Unit
1. Jumlah SMK Negeri	82,00	86,00	85,00	87,00	87,00	Unit
- Bangunan Baik	82,00	86,00	85,00	87,00	87,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik (SMK Negeri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
2. Jumlah SMK Swasta	125,00	130,00	131,00	135,00	137,00	Unit
- Bangunan Baik	125,00	130,00	131,00	135,00	137,00	Unit
- Bangunan Tidak Baik (SMK Swasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
a. Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
b. Rusak Sedang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
c. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
7). Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
8). Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Rasio Guru dengan Murid						
1. Rasio Murid Terhadap Guru						
1). Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD/MI	16,47	17,49	17,47	17,12	17,20	
a. Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD/MI Negeri	16,51	17,59	17,48	17,19	17,04	
b. Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD/MI Swasta	16,21	17,01	17,40	16,80	17,97	
2). Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP/MTs	14,98	15,94	16,17	15,59	15,52	
a. Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP/MTs Negeri	16,30	16,96	16,88	16,41	16,20	
b. Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP/MTs Swasta	12,24	13,68	14,51	13,76	13,99	
3). Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA/MA/SMK	13,79	15,46	15,55	15,71	16,24	
a. Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA/MA/SMK Negeri	14,57	16,12	16,21	16,58	17,00	
b. Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA/MA/SMK Swasta	12,23	14,00	14,09	13,82	14,48	

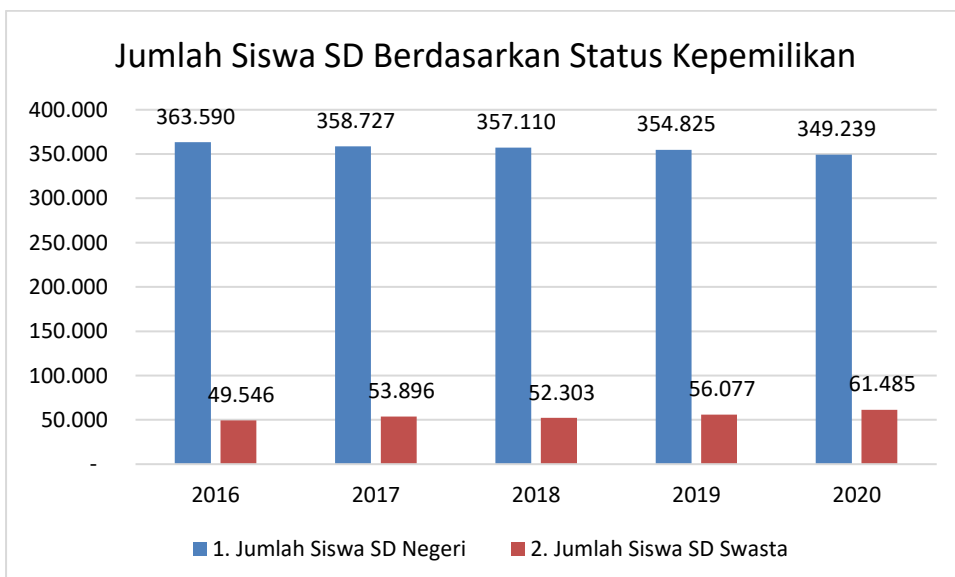


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4). Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	624,85	588,22	586,12	601,11	600,27	
5). Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6). Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	725,31	646,64	642,95	636,66	615,86	
7). Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah per kelas rata-rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan						
1. Persentase Angka Kelulusan SD/MI	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	%
1). Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	66033,00	0,00	0,00	66211,00	65878,00	orang
2). Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	66033,00	0,00	0,00	66211,00	65878,00	orang
3). Jumlah Siswa SD/MI Yang Mengikuti Ujian	66033,00	0,00	0,00	66211,00	65878,00	Siswa
2. Persentase Angka Kelulusan SMP/MTS	99,99	95,94	97,24	100,00	100,00	%
1). Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	55753,00	48460,00	49871,00	60223,00	51092,00	orang
2). Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	55758,00	50513,00	51285,00	60223,00	51092,00	orang
3). Jumlah Siswa SMP/MTs Yang Mengikuti Ujian	55758,00	48460,00	49871,00	60223,00	51092,00	Siswa
3. Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,93	n/a	n/a	100,00	100,00	%
1). Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	41307,00	0,00	0,00	50153,00	46703,00	orang
2). Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya	41338,00	0,00	0,00	50153,00	46703,00	orang
3). Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Yang Mengikuti Ujian	41338,00	0,00	0,00	50153,00	46703,00	Siswa

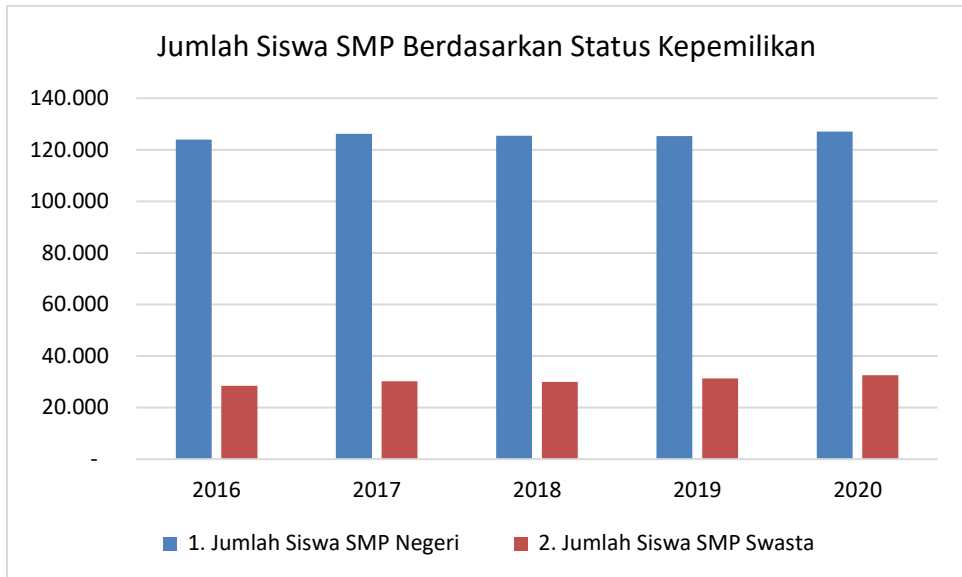
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



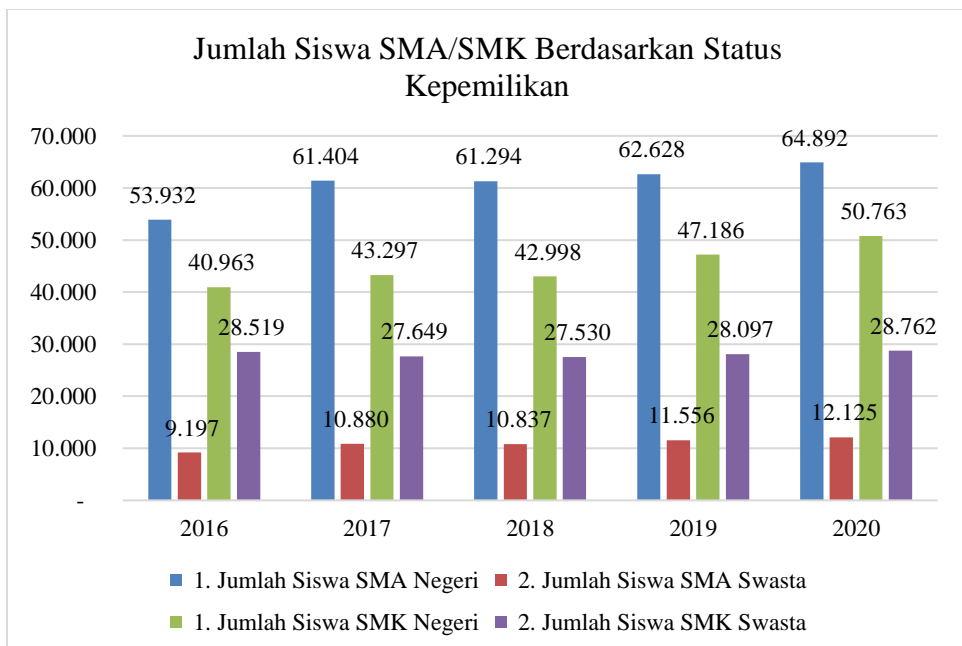
Gambar 121. Grafik Jumlah Siswa (PAUD,TK, SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK) Negeri dan Swasta



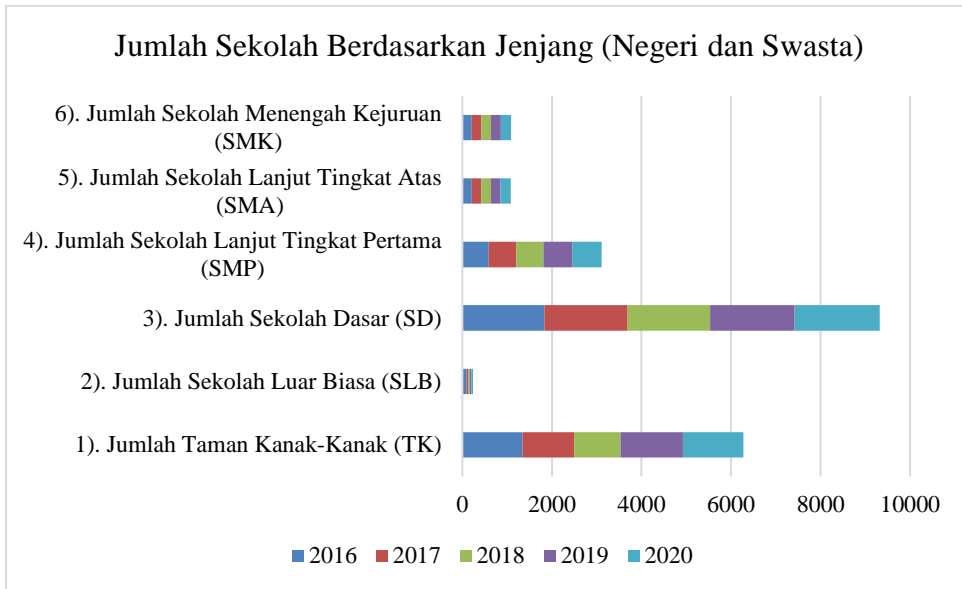
Gambar 122. Grafik Jumlah Siswa SD Berdasarkan Status Kepemilikan



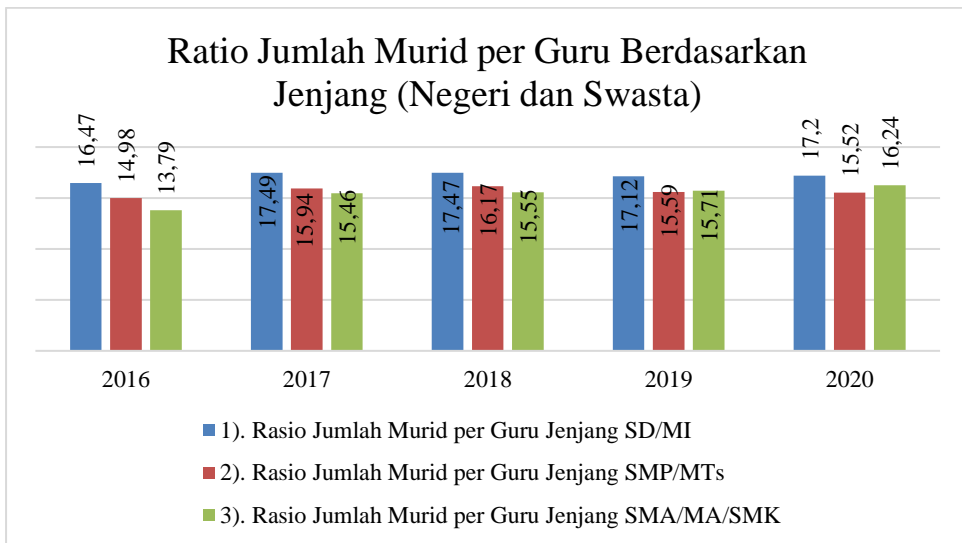
Gambar 123. Grafik Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Status Kepemilikan



Gambar 124. Grafik Jumlah Siswa SMA/SMK Berdasarkan Status Kepemilikan



Gambar 125. Grafik Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang (Negeri dan Swasta)



Gambar 126. Grafik Ratio Jumlah Murid per Guru Berdasarkan Jenjang (Negeri dan Swasta)



SATU DATA
KALIMANTAN-
TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Profil Perangkat Daerah

Dinas **Peternakan dan Kesehatan Hewan** Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selain hal tersebut, secara teknis berkoordinasi dibidang pembangunan peternakan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di bentuk sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bagian dari pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan juga mengacu dan menelaah Renstra kementerian pertanian. Disamping itu juga menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu Visi



“Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat” dan Misi kelima yaitu “Berdaulat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, perikanan dan kelautan, peternakan serta mewujudkan ketercukupan sandang dan papan”. Untuk itu maka ditetapkanlah Moto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut: “Mini Ranch Sapi Potong untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat”. Pembangunan peternakan di Kalimantan Timur dengan penetapan target 2 (Dua) Juta ekor sapi menjadi landasan penetapan kebijakan strategis pembangunan peternakan selanjutnya, upaya peningkatan populasi dengan sistem "Mini Ranch" sehingga tingkat kepemilikan ternak sapi pada setiap Rumah Tangga Peternak (RTP) meningkat, serta keunggulan lainnya. Pembangunan peternakan Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi:

1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak;
3. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
4. Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Peternakan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 40 yakni terkait data Peternakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 40. Data Peternakan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Peternakan						
1. Ternak Sapi Potong						
1). Jumlah Populasi	118712,00	119123,00	117504,00	119485,00	119974,00	Ekor
2). Jumlah Produksi Daging	8129,77	8015,81	7943,99	8125,40	8349,82	Ton
3). Jumlah Pematangan per Tahun	51462,00	50743,00	50288,00	51426,00	52857,00	Ekor



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4). Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun	1,06	0,35	-1,38	1,66	0,41	%
5). Rata-Rata Kepemilikan per KK	5,00	5,00	5,00	6,04	6,07	Ekor
6). Jumlah Konsumsi Daging	8804,18	9393,51	10961,24	12444,65	10694,27	Ton
2. Ternak Sapi Perah						
1). Jumlah Populasi	97,00	107,00	110,00	91,00	87,00	Ekor
2). Jumlah Produksi Susu per Tahun	148410,00	163710,00	168300,00	139230,00	122205,35	Kg
3). Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun	97,00	9,35	2,73	-20,88	-4,60	%
4). Rata-Rata Kepemilikan per KK	27,00	28,00	28,00	28,00	28,00	Ekor
5). Rata-Rata Produktivitas per Ekor per Hari	6,99	6,99	6,99	6,90	6,90	liter
3. Ternak Kecil						
1) Kambing						
a). Jumlah Populasi Kambing	57794,00	61526,00	66378,00	67892,00	69929,00	Ekor
b). Jumlah Produksi Daging	504,00	624,00	665,06	619,73	609,59	Ton
c). Jumlah Konsumsi Daging	529,20	637,90	745,89	693,59	826,10	Ton
2) Domba						
a). Jumlah Populasi Domba	320,00	281,00	439,00	590,00	635,00	Ekor
b). Jumlah Produksi Daging	1,10	1,00	0,10	2,55	6,17	Ton
c). Jumlah Konsumsi Daging	19,30	12,10	8,32	11,07	36,25	Ton
3). Babi						
a). Jumlah Populasi Babi	75475,00	85749,00	78968,00	82546,00	83652,00	Ekor
b). Jumlah Produksi Daging	934,06	929,08	1473,73	1898,15	1926,49	Ton



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
c). Jumlah Konsumsi Daging	888,00	883,20	1400,19	1803,70	1830,40	Ton
4). Kerbau						
a). Jumlah Populasi Kerbau	7144,00	7055,00	6157,00	6194,00	6552,00	Ekor
b). Jumlah Produksi Daging	45,00	58,00	47,00	74,72	58,11	Ton
c). Jumlah Konsumsi Daging	122,80	295,20	1360,47	1667,58	2391,78	Ton
5). Kuda						
a). Jumlah Populasi Kuda	101,00	91,00	97,00	102,00	95,00	Ekor
b). Jumlah Produksi Daging	0,90	1,50	0,00	0,00	0,30	Ton
c). Jumlah Konsumsi Daging	1,00	1,50	0,18	0,63	1,81	Ton
6). Kelinci						
a). Jumlah Populasi Kelinci	13063,00	15005,00	14189,00	8859,00	10830,00	Ekor
b). Jumlah Produksi Daging	6,10	7,00	6,70	4,15	5,08	Ton
c). Jumlah Konsumsi Daging	5,80	6,70	6,32	3,95	4,82	Ton
4. Unggas						
1). Ayam Buras						
1. Jumlah Populasi	4768534,00	5418086,00	4569169,00	4372415,00	4435205,00	Ekor
2. Jumlah Produksi Daging	5271,61	5989,70	5051,22	4833,71	4903,12	Ton
3. Jumlah Produksi Telur	30542,00	34703,00	2926,00	2800,53	2840,75	Ton
4. Kelompok Peternak	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kelompok
5. Jumlah Peternak Perorangan	39365,00	44727,00	37719,00	36095,00	37900,00	Orang
6. Jumlah Konsumsi Daging	5008,03	5690,21	4798,66	4592,02	4657,96	Ton
2). Ayam Petelur						
1. Jumlah Populasi	842176,00	822533,00	1055432,00	853693,00	1218994,00	Ekor



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2. Jumlah Produksi Telur	64932,00	63417,00	8137,81	6581,97	9398,44	Ton
3. Jumlah Peternak	33,00	32,00	32,00	32,00	79,00	Orang
4. Jumlah Kelompok Peternak	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	Kelompok
a. Kelompok Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kelompok
b. Kelompok Mitra	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	Kelompok
3). Ayam Pedaging						
1. Jumlah Populasi	60747455,00	66268201,00	66672445,00	67886566,00	59402832,00	Ekor
2. Jumlah Produksi Daging	565316,00	61669,20	620454,00	63175,24	55280,28	Ton
3. Jumlah Kelompok Peternak	917,00	917,00	917,00	917,00	677,00	Orang
a. Kelompok Mandiri	95,00	95,00	95,00	95,00	92,00	Orang
b. Kelompok Mitra	822,00	822,00	822,00	822,00	353,00	Orang
4. Jumlah Konsumsi Daging	55925,75	61706,02	63028,77	69243,31	60372,41	Ton
4). Itik						
1. Jumlah Populasi	192505,00	219149,00	248978,00	254683,00	254749,00	Ekor
2. Jumlah Produksi Telur	79,40	90,40	1366,89	1398,21	1398,57	Ton
3. Jumlah Produksi Daging	79,40	90,40	102,70	105,06	105,09	Ton
4. Jumlah Kelompok Peternak	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	Kelompok
5. Jumlah Peternak Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang
6. Jumlah Konsumsi Daging	199,48	263,21	392,71	499,28	644,86	Ton
5). Itik Manila						
1. Jumlah populasi	252115,00	35934,00	42851,00	42890,00	52823,00	Ekor
2. Jumlah Produksi Telur	16,60	23,70	235,25	235,47	290,00	Ton
3. Jumlah Produksi Daging	16,60	23,70	28,28	28,31	34,86	Ton



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4. Jumlah Kelompok Peternak	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	Kelompok
5. Jumlah Peternak Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang
6. Jumlah Konsumsi Daging	15,81	22,53	26,87	26,89	33,12	Ton
6). Burung Puyuh						
1. Jumlah Populasi	68643,00	46693,00	66593,00	65808,00	79222,00	Ekor
2. Jumlah Produksi Telur	6,80	4,60	67,92	67,12	80,81	Ton
3. Jumlah Produksi Daging	6,80	4,60	6,59	6,51	7,84	Ton
4. Jumlah Kelompok Peternak	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	Kelompok
5. Jumlah Peternak Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang
6. Jumlah Konsumsi Daging	6,59	4,39	6,76	6,19	7,48	Ton
7). Burung Dara						
1. Jumlah Populasi	4182,00	4163,00	4027,00	4776,00	5015,00	Ekor
2. Jumlah Produksi Daging	1,20	1,15	1,17	1,30	1,38	Ton
3. Jumlah Kelompok Peternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kelompok
4. Jumlah Peternak Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang
5. Jumlah Konsumsi Daging	1,00	1,00	1,00	1,25	1,31	Ton
6. Industri Peternakan	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Unit
1). Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Unit
2). Jumlah Kelompok Penggemukan Sapi Potong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kelompok



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7. Jumlah Koperasi Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Unit
8. Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Unit
8. Komoditas Masuk						
1). Ternak						
1. Sapi Potong	47054,00	45055,00	47863,00	35715,00	49163,00	Ekor
2. Sapi Perah	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
3. Kerbau	79,00	239,00	79,00	17,00	0,00	Ekor
4. Kambing	35050,00	47631,00	54774,00	40568,00	45949,00	Ekor
5. Domba	28,00	0,00	0,00	154,00	167,00	Ekor
6. Babi	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	Ekor
7. Kuda	14,00	21,00	15,00	4,00	132,00	Ekor
8. Ayam Buras	202040,00	216500,00	331700,00	421949,00	226778,00	Ekor
9. Ayam Ras Petelur	344170,00	433790,00	644166,00	330651,00	960038,00	Ekor
10. Ayam Ras Pedaging	235020,00	1714242,00	192560,00	784673,00	1477891,00	Ekor
11. Itik	20390,00	26080,00	22760,00	8557,00	10881,00	Ekor
12. Kelinci	0,00	0,00	0,00	179,00	614,00	Ekor
13. Puyuh	28000,00	26900,00	51160,00	45124,00	46550,00	Ekor
14. Merpati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
15. Itik Manila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
2). Hasil Ternak Daging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Sapi Potong	1576,01	1778,50	3414,45	4727,56	2761,94	Ton
2. Sapi Perah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ton
3. Kerbau	79,86	239,89	1315,83	1596,60	2336,21	Ton
4. Kambing	50,21	45,01	114,08	104,85	246,99	Ton
5. Domba	18,31	10,97	8,20	8,87	31,27	Ton
6. Babi	0,92	0,61	0,90	0,50	0,23	Ton
7. Kuda	0,19	0,05	0,20	0,60	1,52	Ton
8. Ayam Buras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ton
10. Ayam Ras Pedaging	4723,71	3120,29	4085,66	9226,87	7856,16	Ton
11. Itik	124,05	177,33	295,14	399,48	545,03	Ton
12. Kelinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ton
13. Puyuh	0,14	0,00	0,00	0,00	0,03	Ton
14. Merpati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ton
16. Jerohan	24,82	209,10	159,97	127,94	178,31	Ton
17. Kulit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Kg
3). Hasil Ternak Telur (Kg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Ayam Buras	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Ton
2. Ayam Ras Petelur	8735,26	12750,34	12509,11	12203,36	12170,73	Ton
3. Itik	26,35	1,50	0,00	0,00	8,60	Ton
4. Puyuh	1,00	3,20	0,00	0,00	2,50	Ton
4). Hasil Ternak Telur (Butir)						

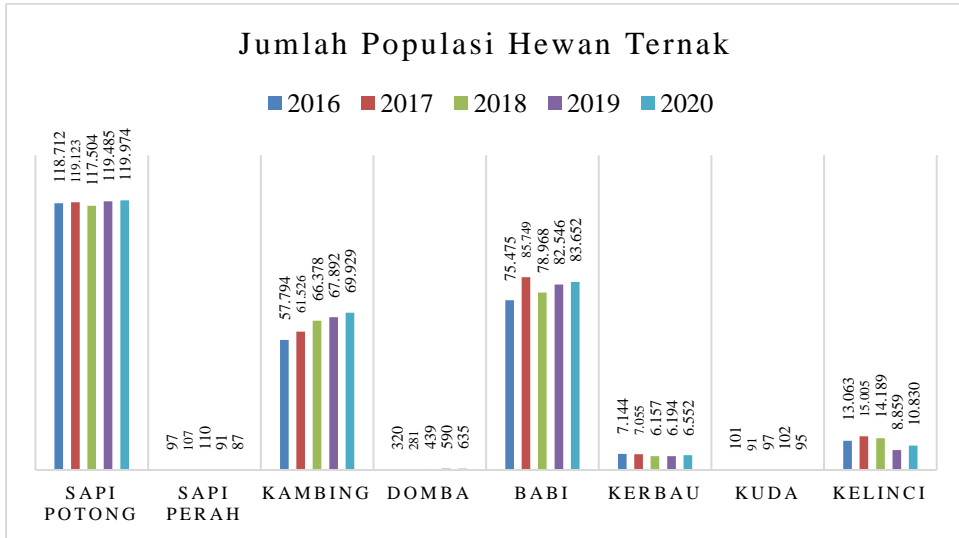


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Ayam Buras	4030000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Butir
2. Ayam Ras Petelur	139764128,00	204005424,00	200145760,00	195253824,00	194731685,00	Butir
3. Itik	3952500,00	22500,00	0,00	0,00	129000,00	Butir
4. Puyuh	75000,00	240000,00	0,00	0,00	187500,00	Butir
5). Susu	0,00	621266,00	2460229,00	664300,00	2454300,00	Kg
9. Komoditas Keluar						
1). Ternak						
1. Sapi Potong	5,00	12247,00	12291,00	3955,00	0,00	Ekor
2. Sapi Perah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
3. Kerbau	126,00	541,00	49,00	187,00	119,00	Ekor
4. Kambing	10,00	0,00	276,00	15313,00	46,00	Ekor
5. Domba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
6. Babi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
7. Kuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
8. Ayam Buras	157,00	0,00	0,00	0,00	647,00	Ekor
9. Ayam Ras Petelur	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Ekor
10. Ayam Ras Pedaging	5618160,00	2813050,00	2016080,00	1011396,00	453412,00	Ekor
11. Itik	13413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
12. Kelinci	8,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Ekor
13. Puyuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
14. Merpati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ekor
15. Itik Manila	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	Ekor
2). Hasil Ternak Daging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
1. Sapi Potong	389,00	408,00	0,00	783,00	1634,00	Kg
2. Sapi Perah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
3. Kerbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
4. Kambing	161,00	92,00	94,76	0,00	5,00	Kg
5. Domba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
6. Babi	20,00	0,00	0,00	8,00	1,00	Kg
7. Kuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
8. Ayam Buras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
10. Ayam Ras Pedaging	4325,00	296,00	0,00	1581,00	104,00	Kg
11. Itik	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	Kg
12. Kelinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
13. Puyuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
14. Merpati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
16. Jeroan	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	Kg
17. Kulit	33548,00	31485,00	10844,00	11263,00	158732,00	Kg
3). Hasil Ternak Telur (Kg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
1. Ayam Buras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
2. Ayam Ras Petelur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
3. Itik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
4. Puyuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
4). Hasil Ternak Telur (Butir)						

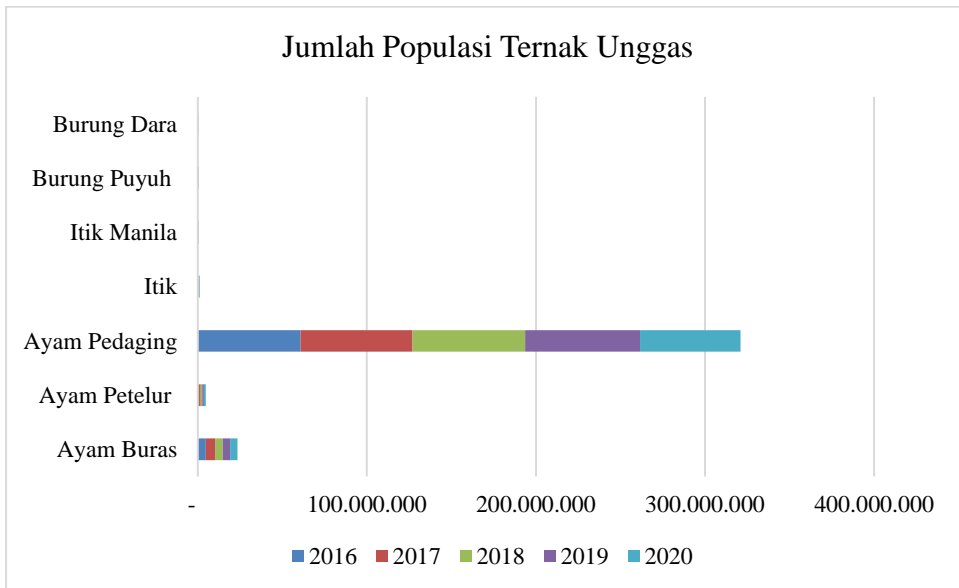


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Ayam Buras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Butir
2. Ayam Ras Petelur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Butir
3. Itik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Butir
4. Puyuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Butir
5). Susu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kg
Kelompok Sumber Daya Sosial						
1. Kelompok Usaha Ternak	1739,00	1747,00	1758,00	1772,00	1772,00	Kelompok
2. Jumlah Kelompok Tani yang dilatih budidaya peternakan	188,00	188,00	188,00	81,00	81,00	Kelompok
3. Jumlah Kawasan Peternakan	39,00	39,00	39,00	52,00	52,00	Kawasan
Rumah Potong Hewan dan Unggas						
1. Rumah Potong Hewan dan Unggas	12,00	12,00	17,00	12,00	12,00	Unit
2. Jumlah usaha pengolahan hasil	59,00	59,00	40,00	2,00	2,00	Unit
Jumlah Kasus Wabah / Endemi Pada Hewan						
1. Sapi Gila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasus
2. Flu Burung	10,00	3,00	0,00	0,00	10,00	Kasus
3. Flu Babi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasus
4. Penyakit Kuku dan Mulut pada hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasus
5. Jembrana	5,00	24,00	67,00	7,00	16,00	Kasus

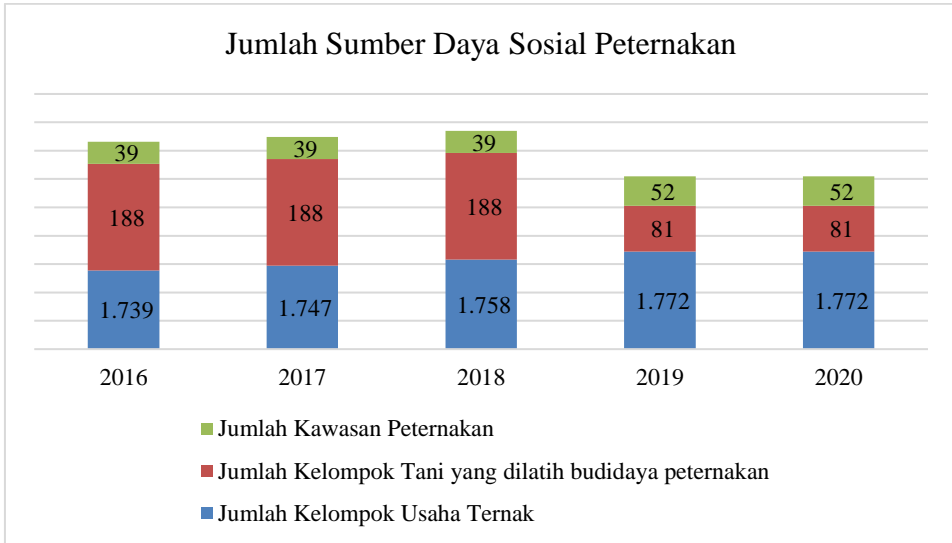
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



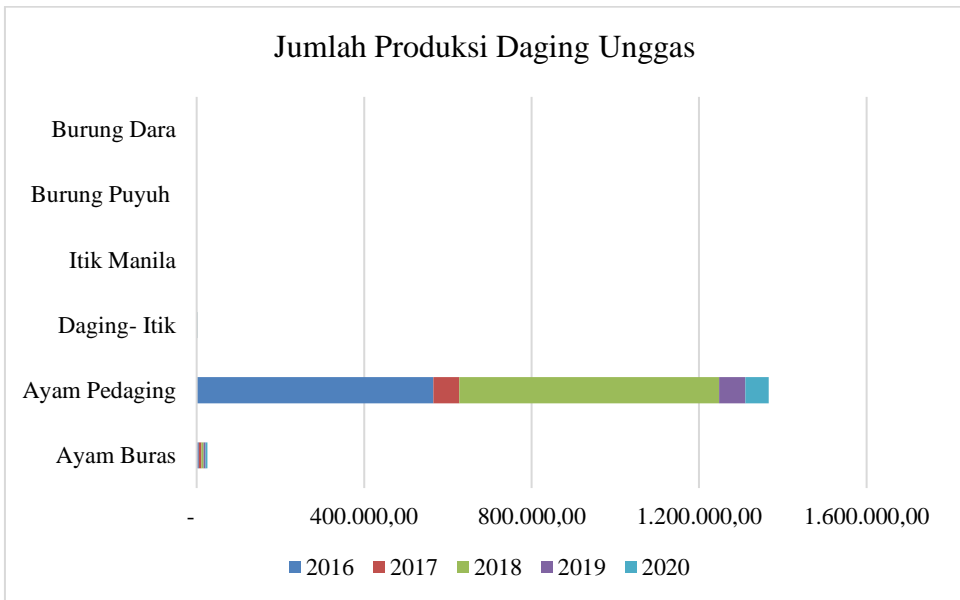
Gambar 127. Grafik Jumlah Populasi Hewan Ternak



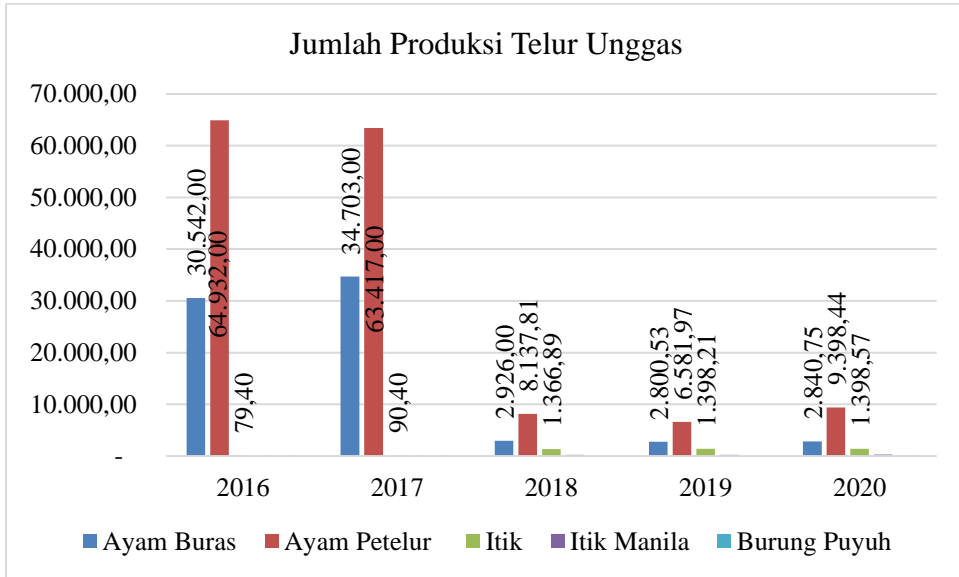
Gambar 128. Grafik Jumlah Populasi Ternak Unggas



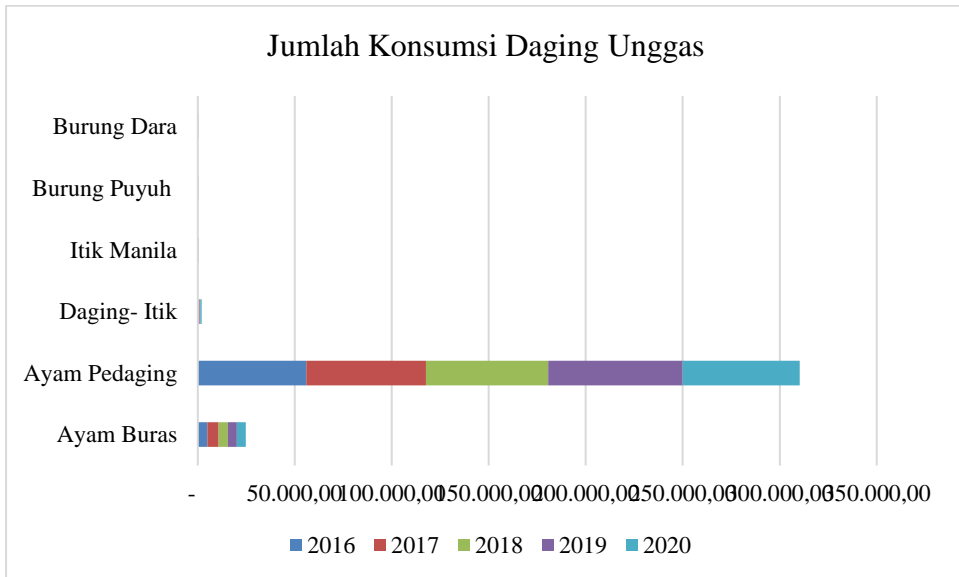
Gambar 129. Grafik Jumlah Sumber Daya Sosial Peternakan



Gambar 130. Grafik Jumlah Produksi Daging Unggas



Gambar 131. Grafik Jumlah Produksi Telur Unggas



Gambar 132. Grafik Jumlah Konsumsi Daging Unggas



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS PERKEBUNAN



Profil Perangkat Daerah

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 dan memasuki awal Pelita I (April 1969) Dinas Karet diubah namanya menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur. Pada perkembangan selanjutnya melalui Perda Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Perda Nomor 06 tahun 1984 menjadi Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Perda Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004. Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur memiliki Visi yaitu “Terwujudnya pembangunan perkebunan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat”. Kemudian Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur memiliki Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur juga memiliki tujuan yaitu Meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan berkelanjutan, sedangkan sasarannya yaitu:



- 1) Meningkatkan nilai produk sub sektor perkebunan;
- 2) Meningkatkan usaha perkebunan yang memenuhi kaidah berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Dalam menjalankan tugas Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok yaitu meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, dan memiliki fungsi sebagai:

1. Perumusan strategi dan kebijakan teknis dibidang perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perkebunan meliputi pengembangan dan peningkatan produksi komoditas perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, pembinaan dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Produk Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 41 yakni terkait data Produk Perkebunan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 41. Data Produk Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Perkebunan						
1. Perkebunan						
A. Karet						
1. Luas Areal	116869,00	115160,00	115082,00	118638,00	118773,00	Ha
2. Luas Tanam	116869,00	115160,00	115082,00	118638,00	118773,00	Ha
3. Jumlah Produksi	62106,00	63510,00	57389,00	52817,00	70682,00	Ton
4. Produktivitas	12,96	12,81	12,20	10,79	14,44	Kw/Ha
B. Kopi						
1. Luas Areal	3049,00	2725,00	2550,00	2529,00	1221,00	Ha
2. Luas Tanam	3049,00	2725,00	2550,00	2529,00	1221,00	Ha
3. Jumlah Produksi	392,00	325,00	297,00	223,00	225,00	Ton



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4. Produktivitas	2,43	2,56	2,44	2,08	2,09	Kw/Ha
C. Sawit						
1. Luas Areal	1150078,00	1192342,00	1199407,00	1228138,00	1228238,00	Ha
2. Luas Tanam	1150078,00	1192342,00	1199407,00	1228138,00	1228238,00	Ha
3. Jumlah Produksi	11418110,00	13164310,00	13371756,00	18343852,00	16717254,00	Ton
4. Produktivitas	149,47	166,99	165,71	207,79	189,33	Kw/Ha
D. Kakao						
1. Luas Areal	7931,00	7778,00	7298,00	7328,00	7508,00	Ha
2. Luas Tanam	7931,00	7778,00	7298,00	7328,00	7508,00	Ha
3. Jumlah Produksi	2751,00	2435,00	2393,00	2513,00	3307,00	Ton
4. Produktivitas	5,52	5,01	5,51	5,67	7,47	Kw/Ha
E. Lada						
1. Luas Areal	9382,00	9012,00	9019,00	8921,00	9146,00	Ha
2. Luas Tanam	9382,00	9012,00	9019,00	8921,00	9146,00	Ha
3. Jumlah Produksi	4727,00	6057,00	6484,00	5799,00	5849,00	Ton
4. Produktivitas	7,24	9,85	10,49	9,13	9,21	Kw/Ha
F. Kelapa Dalam						
1. Luas Areal	22897,00	22289,00	21840,00	21152,00	21489,00	Ha
2. Luas Tanam	22897,00	22289,00	21840,00	21152,00	21489,00	Ha
3. Jumlah Produksi	11078,00	13647,00	12746,00	11013,00	12468,00	Ton
4. Produktivitas	6,34	8,02	7,51	6,68	7,56	Kw/Ha
G. Cengkeh						
1. Luas Areal	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Ha
2. Luas Tanam	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Ha
3. Jumlah Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ton
4. Produktivitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kw/Ha
H. Aren						
1. Luas Areal	948,00	882,00	936,00	1220,00	787,00	Ha
2. Luas Tanam	948,00	882,00	936,00	1220,00	787,00	Ha
3. Jumlah Produksi	225,00	232,00	358,00	465,00	450,00	Ton
4. Produktivitas	5,68	6,12	8,99	6,60	11,51	Kw/Ha
I. Lain-Lainnya						
1. Luas Areal	1823,00	1873,00	1812,00	1918,00	1914,00	Ha
2. Luas Tanam	1823,00	1873,00	1812,00	1918,00	1914,00	Ha
3. Jumlah Produksi	205,00	262,00	233,00	242,00	221,00	Ton
4. Produktivitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kw/Ha
2. Luas Lahan Perkebunan						
1). Perkebunan Besar Pemerintah						
1) Karet						
1. Luas Tanam	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	Ha
2. Jumlah Produksi	543,00	539,00	345,00	385,00	540,00	Ton
3. Produktivitas	13,61	13,51	8,65	9,65	13,53	Kw/Ha
2). Sawit						
1. Luas Tanam	14402,00	14402,00	14402,00	14402,00	14402,00	Ha
2. Jumlah Produksi	230643,00	231792,00	195371,00	171042,00	155875,00	Ton
3. Produktivitas	175,00	176,11	148,44	129,95	118,43	Kw/Ha
2). Perkebunan Besar Swasta						
1). Karet						
1. Luas Tanam	22562,00	21952,00	22329,00	25600,00	25600,00	Ha
2. Jumlah Produksi	5354,00	4191,00	1773,00	1552,00	2176,00	Ton
3. Produktivitas	10,33	7,86	8,88	5,36	7,51	Kw/Ha
2). Sawit						

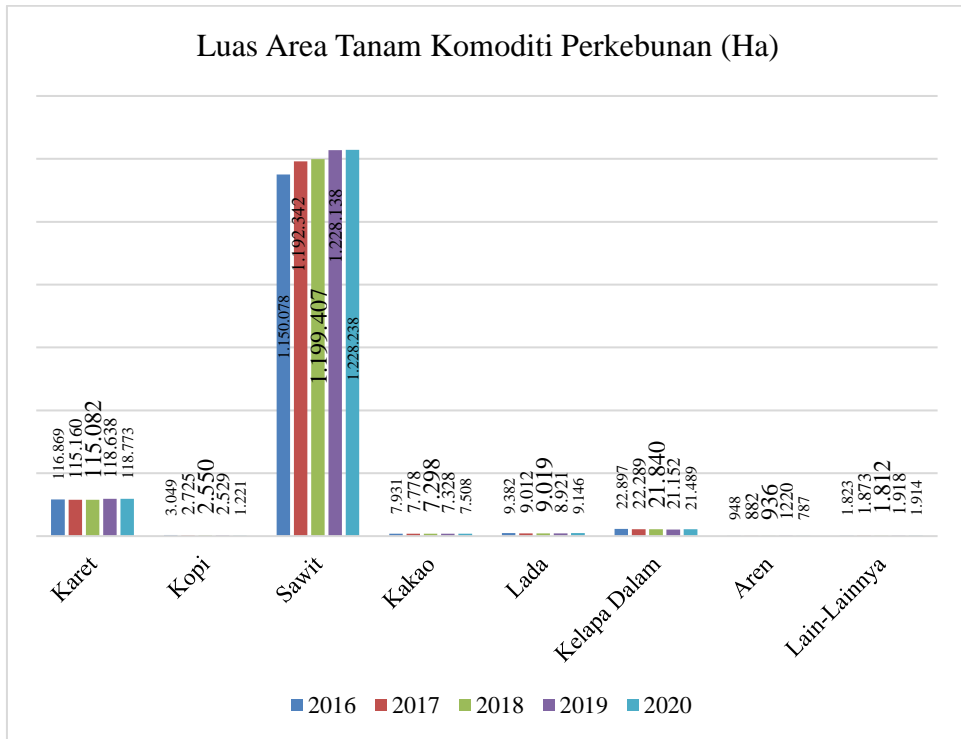


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1. Luas Tanam	858642,00	893417,00	898947,00	957817,00	957817,00	Ha
2. Jumlah Produksi	9028083,00	10566235,00	10797209,00	15885392,00	14474729,00	Ton
3. Produktivitas	150,00	169,16	168,74	223,43	203,60	Kw/Ha
2). Perkebunan Kecil/Rakyat						
1). Karet						
1. Luas Tanam	93908,00	92809,00	92354,00	92639,00	92780,00	Ha
2. Jumlah Produksi	56209,00	58780,00	55271,00	50880,00	67966,00	Ton
3. Produktivitas	13,28	13,41	12,38	11,14	14,89	Kw/Ha
2). Kopi						
1. Luas Tanam	3049,00	2725,00	2550,00	2529,00	1221,00	Ha
2. Jumlah Produksi	392,00	325,00	297,00	223,00	225,00	Ton
3. Produktivitas	2,43	2,56	2,44	2,08	2,09	Kw/Ha
3). Sawit						
1. Luas Tanam	277034,00	284523,00	286058,00	255446,00	256019,00	Ha
2. Jumlah Produksi	2159384,00	2366283,00	2379214,00	2287418,00	2086650,00	Ton
3. Produktivitas	145,00	157,22	154,62	144,16	131,40	Kw/Ha
4). Kakao						
1. Luas Tanam	7931,00	7778,00	7298,00	7328,00	7508,00	Ha
2. Jumlah Produksi	2751,00	2435,00	2393,00	2513,00	3307,00	Ton
3. Produktivitas	5,52	5,01	5,51	5,67	7,47	Kw/Ha
5). Lada						
1. Luas Tanam	9382,00	9012,00	9019,00	8921,00	9146,00	Ha
2. Jumlah Produksi	4727,00	6057,00	6484,00	5799,00	5849,00	Ton
3. Produktivitas	7,24	9,85	10,49	9,13	921,00	Kw/Ha
6). Kelapa Dalam						
1. Luas Tanam	22897,00	22289,00	21840,00	21152,00	21489,00	Ha
2. Jumlah Produksi	11078,00	13647,00	12746,00	11013,00	12468,00	Ton
3. Produktivitas	6,34	8,02	7,51	6,68	7,56	Kw/Ha
7). Cengkeh						
1. Luas Tanam	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Ha
2. Jumlah Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ton
3. Produktivitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kw/Ha
8). Aren						
1. Luas Tanam	948,00	882,00	936,00	1220,00	787,00	Ha
2. Jumlah Produksi	225,00	232,00	358,00	465,00	450,00	Ton
3. Produktivitas	5,68	6,12	8,99	6,60	11,51	Kw/Ha
9). Kemiri						
1. Luas Tanam	1499,00	1479,00	1447,00	1428,00	1178,00	Ha
2. Jumlah Produksi	238,00	231,00	208,00	216,00	200,00	Ton
3. Produktivitas	2,32	2,29	2,08	2,15	2,00	Kw/Ha
10). Sagu						
1. Luas Tanam	26,00	27,00	27,00	28,00	27,00	Ha
2. Jumlah Produksi	3,00	3,00	4,00	7,00	5,00	Ton
3. Produktivitas	3,00	3,00	4,00	6,50	5,00	Kw/Ha
11). Kayu Manis						
1. Luas Tanam	13,00	13,00	13,00	14,00	9,00	Ha
2. Jumlah Produksi	12,00	8,00	7,00	7,00	6,00	Ton
3. Produktivitas	9,23	8,89	7,78	7,30	6,67	Kw/Ha
12). Panili						
1. Luas Tanam	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	Ha
2. Jumlah Produksi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	Ton
3. Produktivitas	3,33	3,33	3,33	1,60	0,73	Kw/Ha

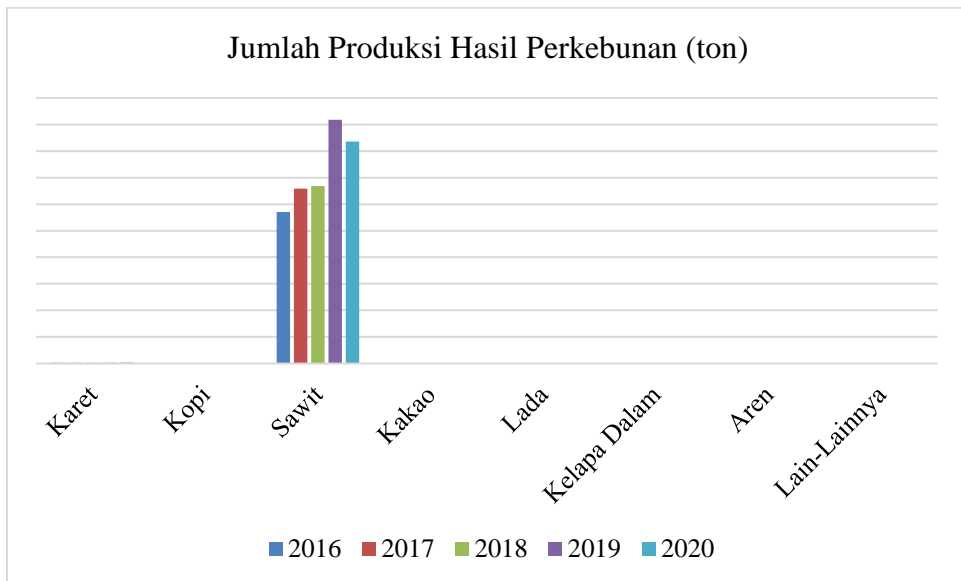


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
13). Pala						
1. Luas Tanam	133,00	155,00	151,00	305,00	305,00	Ha
2. Jumlah Produksi	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	Ton
3. Produktivitas	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	Kw/Ha
14). Kapok						
1. Luas Tanam	119,00	121,00	120,00	122,00	55,00	Ha
2. Jumlah Produksi	6,00	9,00	10,00	9,00	8,00	Ton
3. Produktivitas	1,28	1,80	2,00	1,91	1,36	Kw/Ha
15). Jambu Mete						
1. Luas Tanam	8,00	8,00	8,00	8,00	3,00	Ha
2. Jumlah Produksi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	Ton
3. Produktivitas	3,33	3,33	3,33	3,33	2,50	Kw/Ha
16). Pinang						
1. Luas Tanam	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Ha
2. Jumlah Produksi	1,00	1,00	0,00	0,20	0,10	Ton
3. Produktivitas	3,33	3,33	1,00	0,66	0,33	Kw/Ha
17). Nilam						
1. Luas Tanam	14,00	60,00	33,00	0,00	0,00	Ha
2. Jumlah Produksi	3,00	8,00	2,00	0,00	0,00	Ton
3. Produktivitas	3,00	1,91	0,80	0,00	0,00	Kw/Ha
18). Tebu						
1. Luas Tanam	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Ha
2. Jumlah Produksi	0,00	0,00	0,10	0,15	0,12	Ton
3. Produktivitas	0,00	0,00	1,00	1,00	1,25	Kw/Ha
Produk Perkebunan						
1. Jumlah Produk Turunan Perkebunan	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	Produk
2. Produksi CPO	2545788,00	2890212,00	2817539,00	4048064,00	3093581,00	Ton
3. Jumlah Nilai Ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Milyar
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan						
1. Jumlah Industri Pengolahan	76,00	78,00	81,00	89,00	91,00	Unit
2. Jumlah Nilai Ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Milyar
Jumlah Izin untuk Hak Pengusahaan Perkebunan						
1. Jumlah Izin untuk Hak Pengusahaan Perkebunan	316,00	329,00	329,00	345,00	345,00	Unit

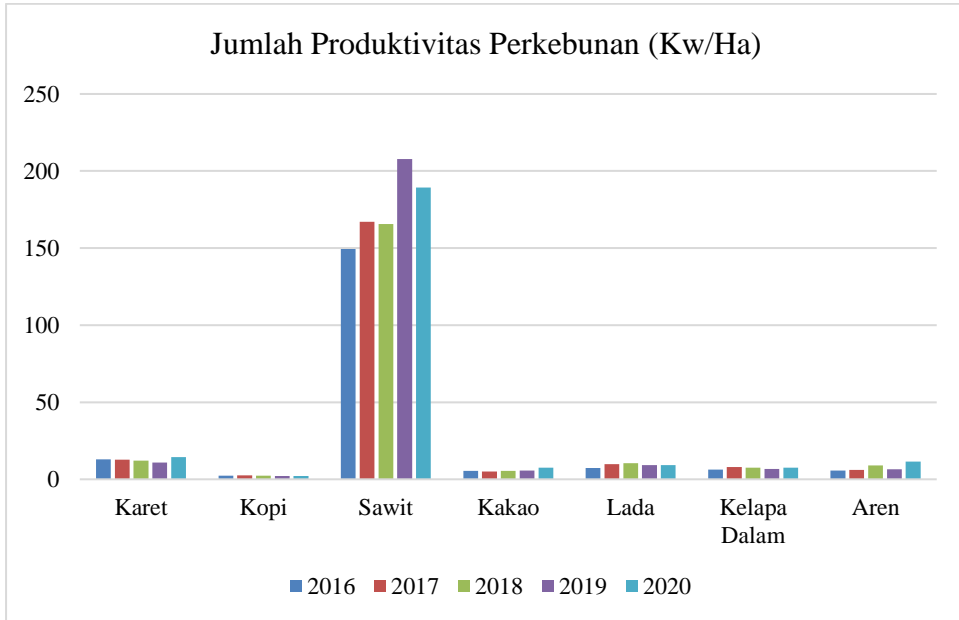
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



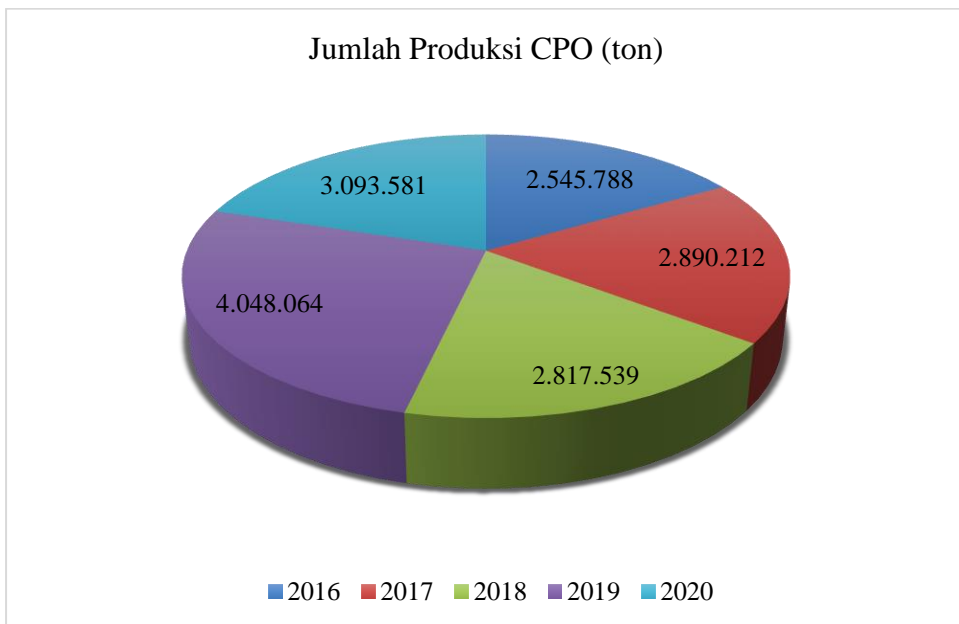
Gambar 133. Grafik Luas Area Tanam Komoditi Perkebunan (Ha)



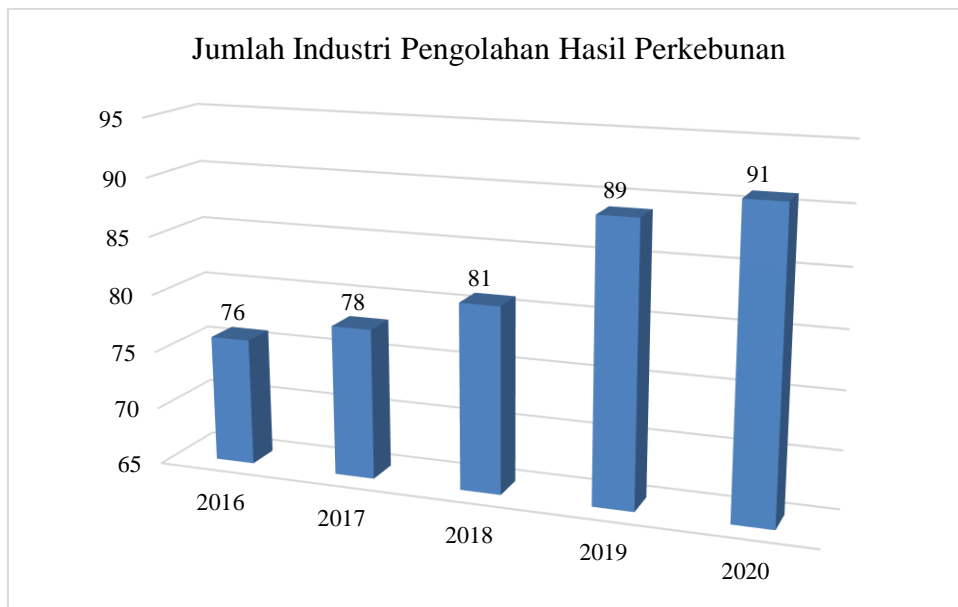
Gambar 134. Grafik Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton)



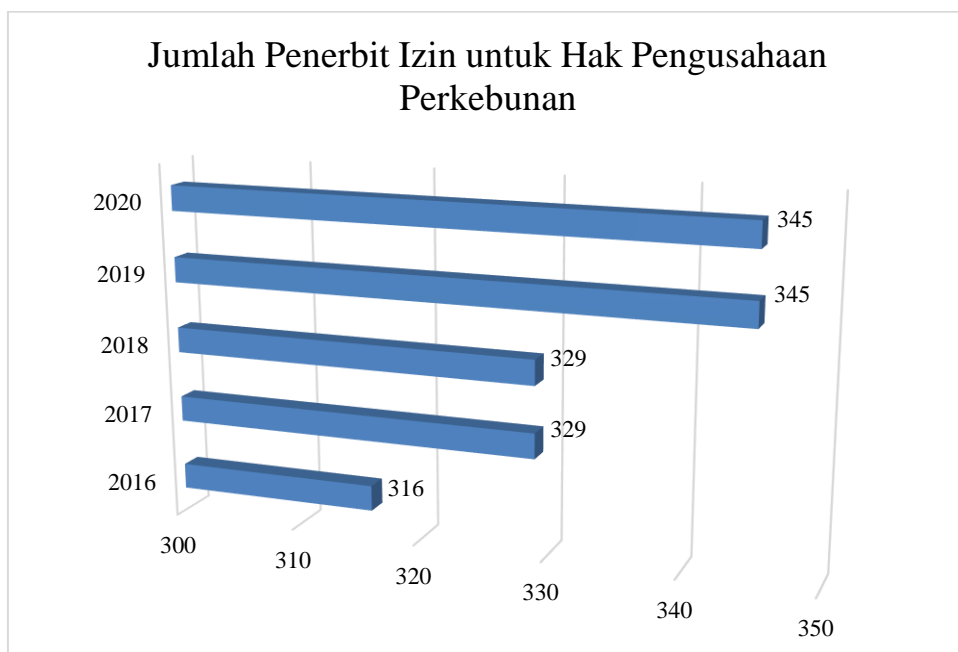
Gambar 135. Grafik Jumlah Produktivitas Perkebunan (Kw/Ha)



Gambar 136. Grafik Jumlah Produksi CPO (ton)



Gambar 137. Grafik Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan



Gambar 138. Grafik Jumlah Penerbitan Izin Hak Pengusahaan Perkebunan



**SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR**

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM





Profil Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM memiliki Visi Kaltim berdaulat 2023 yang mana Visi ini sama dengan Visi Gubernur Kaltim yakni “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Sedangkan Misi yaitu:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan;
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas membantu Gubernur, kemudian fungsi sebagai berikut:



- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- 7) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Koperasi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 42 yakni terkait data jumlah Koperasi yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

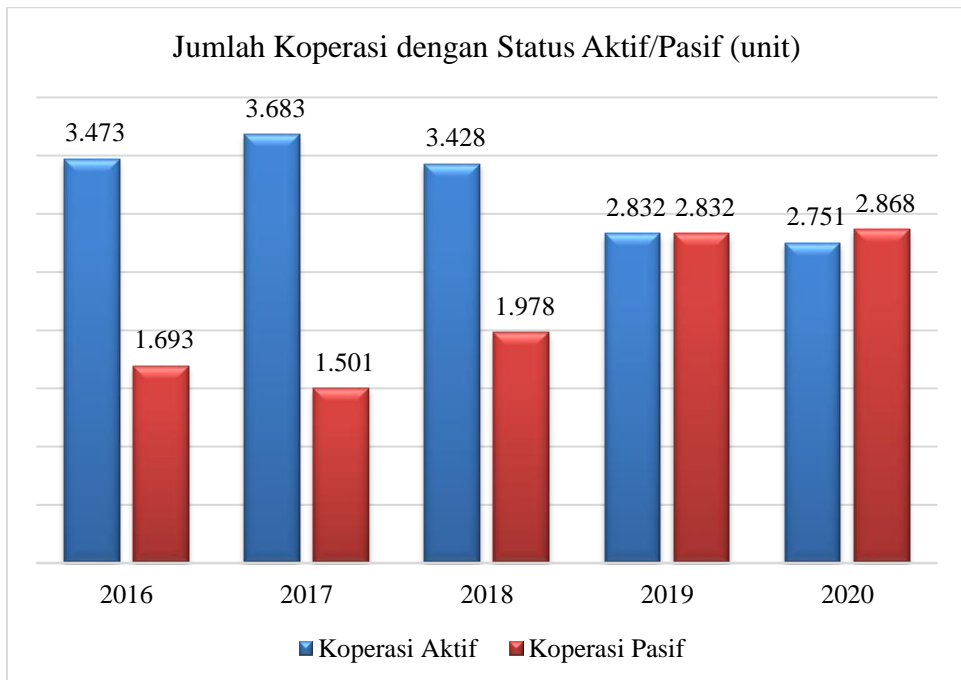
Tabel 42. Data Koperasi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Koperasi						
1. Jumlah Koperasi	5.546	5.184	5.406	5.525	5.619	Unit
1). Koperasi Aktif	3.473	3.683	3.428	2.832	2.751	Unit
2). Koperasi Pasif	1.693	1.501	1.978	2.832	2.868	Unit
2. Jumlah Anggota Koperasi	299.068	121.455	113.139	110.032	75.365	Orang

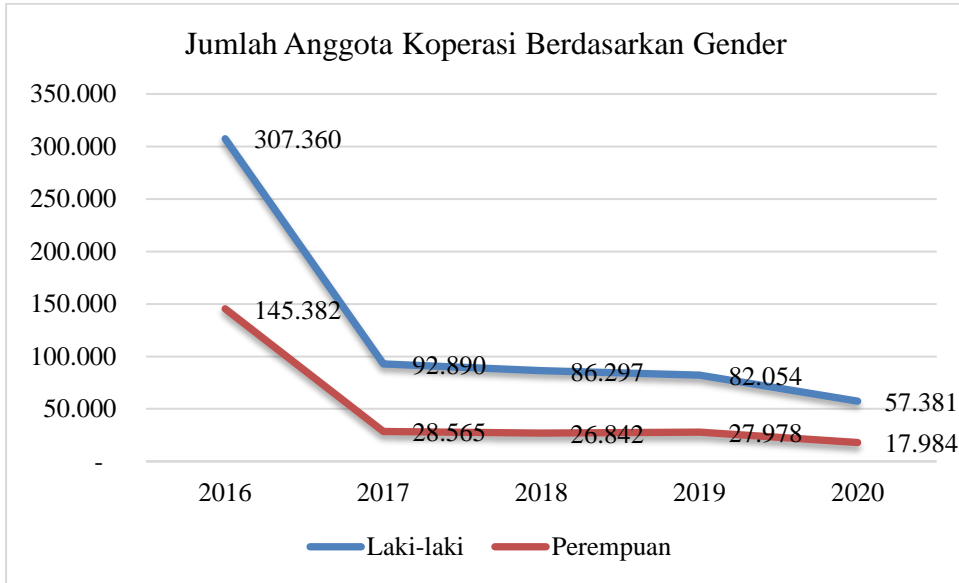


1). Laki-laki	307.360	92.890	86.297	82.054	57.381	Orang
2). Perempuan	145.382	28.565	26.842	27.978	17.984	Orang
3. Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	499	665	657	583	351	Unit
4. Volume Usaha Koperasi	1.977	1.042.484	1.309.258	751.576	816.914	Rp Juta
5. Jumlah KUD	214	209	212	205	204	Unit
6. Jumlah non KUD	4.799	4.975	5.194	5.320	5.415	Unit
7. Jumlah Koperasi Berkualitas	-	-	-	-	-	Unit
8. Persentase Koperasi Aktif	62,62	71,05	63,41	51,26	48,96	50,84%
9. Jumlah Koperasi Sehat	n/a	n/a	n/a	583,00	344,00	Koperasi
Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota						
1. Koperasi Primer	4.971	5.169	5.394	5.493	5.598	Unit
2. Koperasi Sekunder	15	15	12	21	21	Unit
Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha						
1. Koperasi Produsen	891	1021	1231	1268	1286	Unit
2. Koperasi Konsumen	3800	3741	3662	3702	3753	Unit
3. Koperasi Jasa	109	206	263	317	345	Unit
4. Koperasi Simpan Pinjam	135	168	180	147	149	Unit
Jumlah Koperasi Per Prinsip Keuangan						
1. Koperasi Konvensional	4997	5178	5396	5504	5610	Unit
2. Koperasi Syariah	7	6	10	10	9	Unit

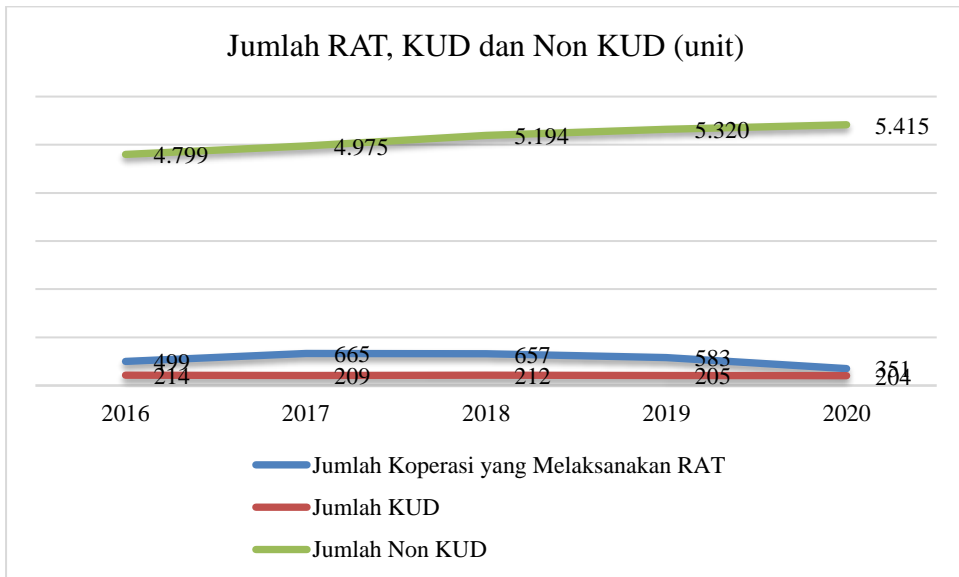
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



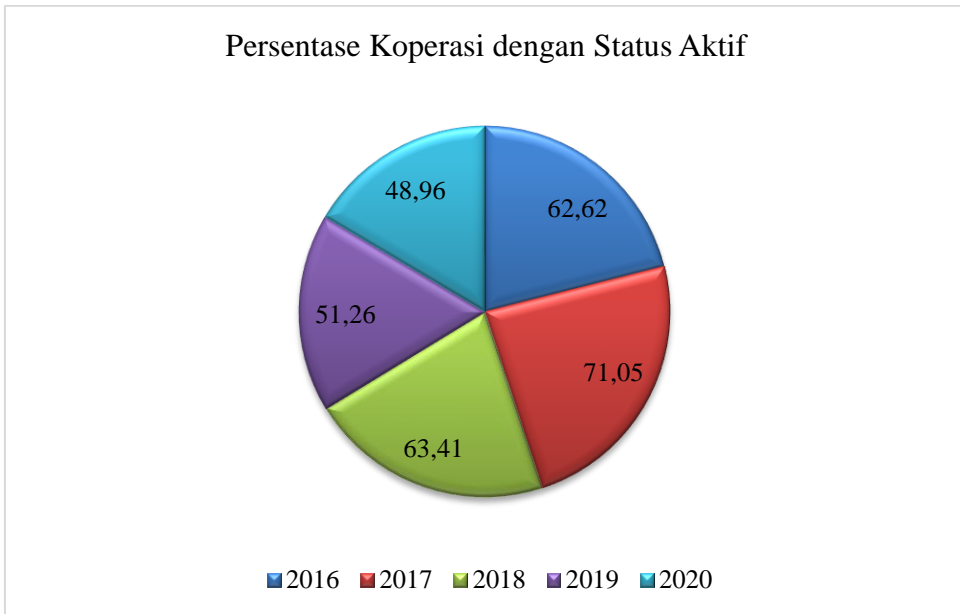
Gambar 139. Grafik Jumlah Koperasi dengan Status Aktif/Pasif (Unit)



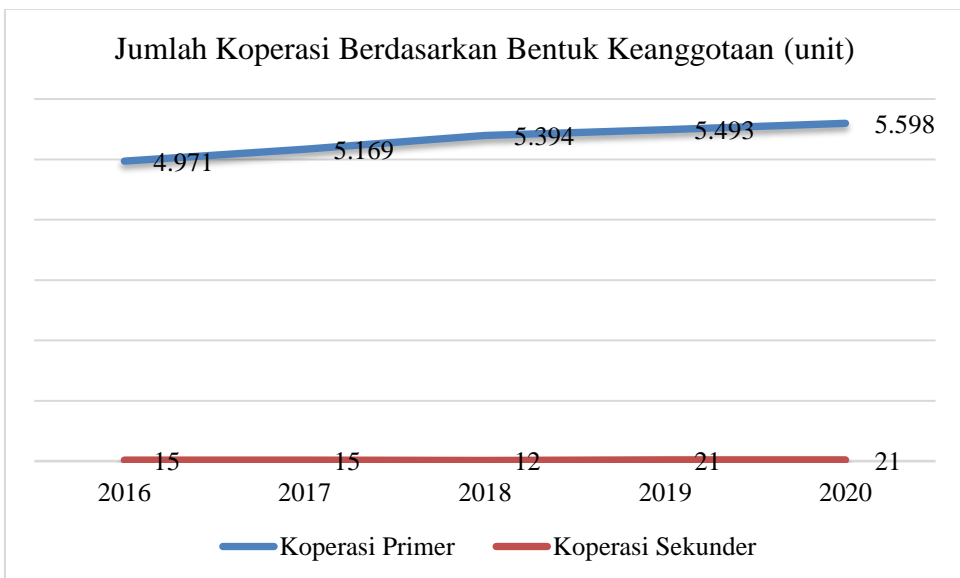
Gambar 140. Grafik Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin



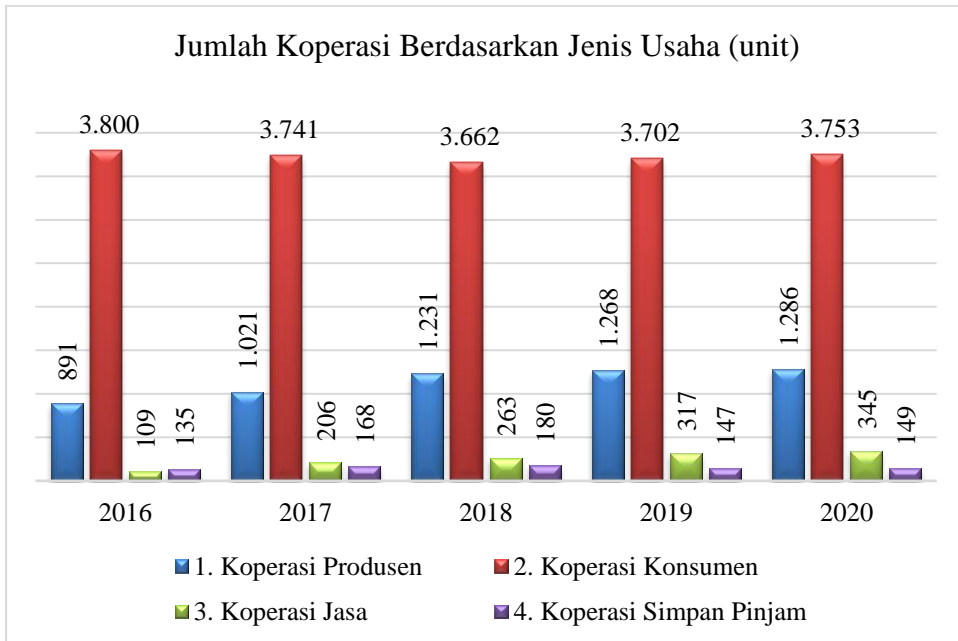
Gambar 141. Grafik Jumlah RAT, KUD dan Non KUD (unit)



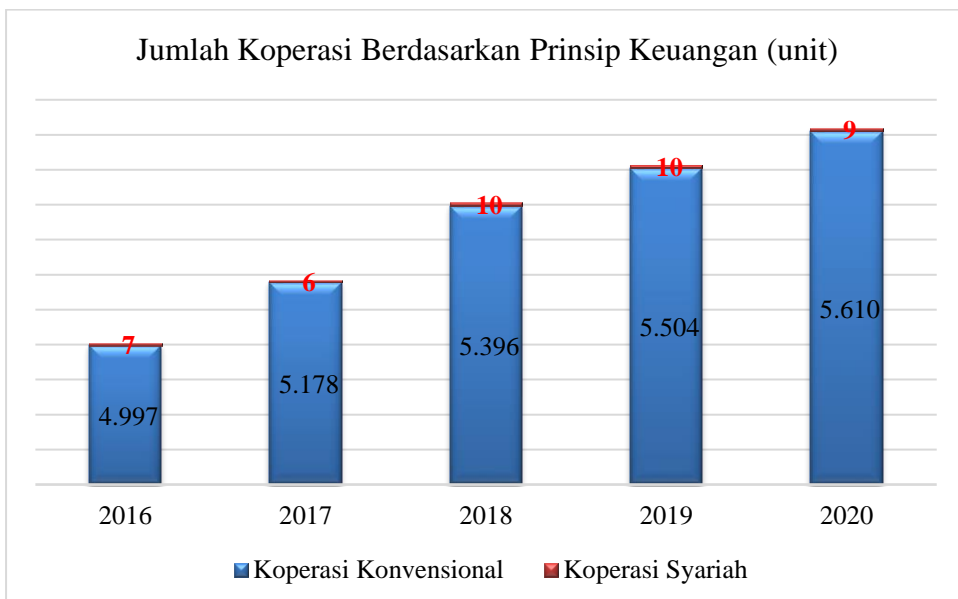
Gambar 142. Grafik Persentase Koperasi dengan Status Aktif



Gambar 143. Grafik Jumlah Koperasi Berdasarkan Bentuk Keanggotaan (unit)



Gambar 144. Grafik Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha (unit)



Gambar 145. Grafik Jumlah Koperasi Berdasarkan Prinsip Keuangan (unit)



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH



Profil Perangkat Daerah

Sejarah Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur diawali dengan dibentuknya Perpustakaan Negara Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI No. 116/1963 tanggal 19 Desember 1963. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0/1975 dibentuk Pusat Pembinaan Perpustakaan. Bersamaan dengan dibentuknya Pusat Pembinaan Perpustakaan tersebut, maka perpustakaan Negara yang ada di ibukota propinsi di seluruh Indonesia diubah menjadi Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tanggal 1 September 1980 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222/0/1980 Pusat Pembinaan Perpustakaan ditetapkan sebagai lembaga induk dari 27 Perpustakaan Wilayah Depdikbud di setiap propinsi. Dalam rangka penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu, maka pada tanggal 17 Mei 1980 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0164/1980 dibentuk Perpustakaan Nasional Depdikbud, dengan mengintegrasikan lembaga-lembaga:

1. Perpustakaan Sejarah, Politik & Sosial
2. Bidang Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan
3. Perpustakaan
4. Perpustakaan Museum Nasional
5. Perpustakaan Wilayah di 27 Propinsi seluruh Indonesia

Sejalan dengan itu, Presiden RI memandang perlu menetapkan suatu lembaga yang khusus menangani perpustakaan secara nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, maka diterbitkan Kepres RI No. 11 Tahun 1989 tanggal 6 Maret 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI. Dengan terbitnya Kepres tersebut, Perpustakaan Wilayah yang ada di 27 Propinsi berganti nama menjadi Perpustakaan Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, terbit Keppres RI No. 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional. Dengan terbitnya Keppres tersebut, Perpustakaan Daerah di seluruh Indonesia mengalami pergantian nama menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi.



Sejalan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan nama sekaligus perubahan status. Melalui Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2001 tentang Perangkat Daerah Prov. Kaltim , Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lembaga teknis provinsi dengan nama Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim.

Pada Awal tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya adalah penggabungan dari dua lembaga yaitu Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai Tugas Pokok Berbeda, sebagaimana diketahui pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi yaitu: “BERDAULAT MEWUJUDKAN BUDAYA MEMBACA DAN SADAR TERTIB ARSIP DI KALIMANTAN TIMUR”. Sedangkan Misi yaitu: “MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT DAN SADAR TERTIB ARSIP DI KALIMANTAN TIMUR”.

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yakni membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang deposit, pelestarian, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan, otomasi, dan kerjasama perpustakaan;



- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip;
- 8) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan kearsipan dan tenaga kearsipan;
- 9) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada visi dan misi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, tujuan yang ingin dicapai adalah Mengembangkan dan membudayakan minat baca masyarakat Kalimantan Timur, serta terwujudnya Pendayagunaan dan pelestarian arsip. Dan selanjutnya berangkat dari rumusan tujuan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2019-2023, yakni meningkatkan minat dan budaya baca serta terwujudnya sadar tertib arsip.

Perpustakaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 43 yakni terkait data Jumlah Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 43. Data Jumlah Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Perpustakaan						
1. Jumlah Perpustakaan	1907,00	2611,00	2611,00	3382,00	3382,00	Unit
1). Umum	438,00	589,00	593,00	1151,00	1151,00	Unit
a. Jumlah Perpustakaan Umum Tingkat Pemprov Kalimantan Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Unit
b. Jumlah Perpustakaan Umum Tingkat Kabupaten/Kota	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Unit
c. Jumlah Perpustakaan Umum Tingkat Kecamatan	34,00	56,00	60,00	90,00	90,00	Unit

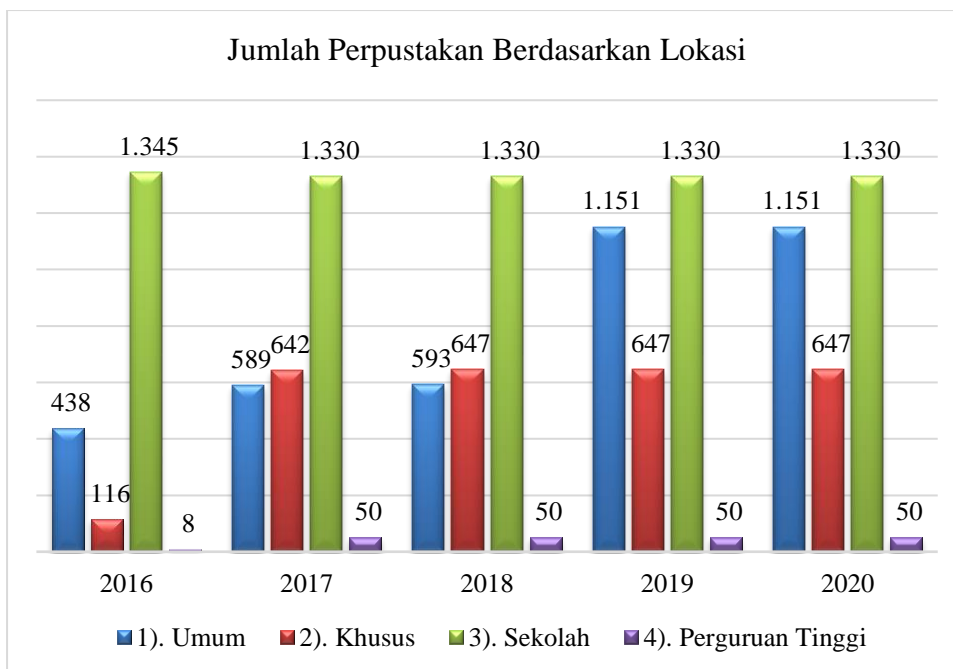


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
d. Jumlah Perpustakaan Umum Tingkat Desa/Kelurahan	393,00	523,00	523,00	648,00	648,00	Unit
2). Khusus	116,00	642,00	647,00	647,00	647,00	Unit
a. Jumlah Perpustakaan di Rumah Ibadah	65,00	99,00	101,00	101,00	101,00	Unit
b. Jumlah Perpustakaan di Rutan/LP	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	Unit
c. Jumlah Perpustakaan di Puskesmas	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Unit
d. Jumlah Perpustakaan di Instansi/OPD (Milik Pemda)	39,00	531,00	531,00	532,00	532,00	Unit
3). Sekolah	1345,00	1330,00	1330,00	1330,00	1330,00	Unit
a. Jumlah Perpustakaan di SD/Sederajat	915,00	670,00	670,00	670,00	670,00	Unit
b. Jumlah Perpustakaan di SMP/Sederajat	291,00	214,00	214,00	214,00	214,00	Unit
c. Jumlah Perpustakaan di SMA/Sederajat	139,00	446,00	446,00	446,00	446,00	Unit
4). Perguruan Tinggi	8,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Unit
a. Jumlah Perpustakaan di PT Negeri	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Unit
b. Jumlah Perpustakaan di PT Swasta	3,00	45,00	45,00	45,00	45,00	Unit
Jumlah Pengunjung Perpustakaan						
1. Jumlah pengunjung perpustakaan	147436,00	109939,00	112440,00	83329,00	n/a	Orang
1). Profesi Umum	8631,00	6938,00	6286,00	6103,00	n/a	Orang
2). Profesi Pegawai/Karyawan	7210,00	4853,00	4348,00	2474,00	n/a	Orang
3). Profesi Dosen/Guru	3302,00	2880,00	2622,00	3440,00	n/a	Orang
4). Mahasiswa	113841,00	84321,00	84900,00	62895,00	n/a	Orang
5). Murid SLTA	5111,00	2912,00	3373,00	3952,00	n/a	Orang
6). Murid SLTP	2323,00	1346,00	1232,00	1164,00	n/a	Orang
7). Murid TK/SD	7018,00	6689,00	9679,00	3302,00	n/a	Orang
2. Jumlah Peminjam Buku	124374,00	67477,00	68666,00	52819,00	n/a	Orang
3. Jumlah Buku Yang di Pinjam	119280,00	95599,00	88992,00	48329,00	n/a	eksemplar
4. Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani	2356155,00	2402160,00	2285852,00	2329997,00	n/a	Orang
5. Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	0,06	0,05	0,05	0,04	0,00	%
Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah						
1. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	71304,00	72579,00	89863,00	91885,00	91885,00	judul buku
2. Jumlah Buku yang tersedia	198616,00	183224,00	200273,00	202458,00	202458,00	eksemplar

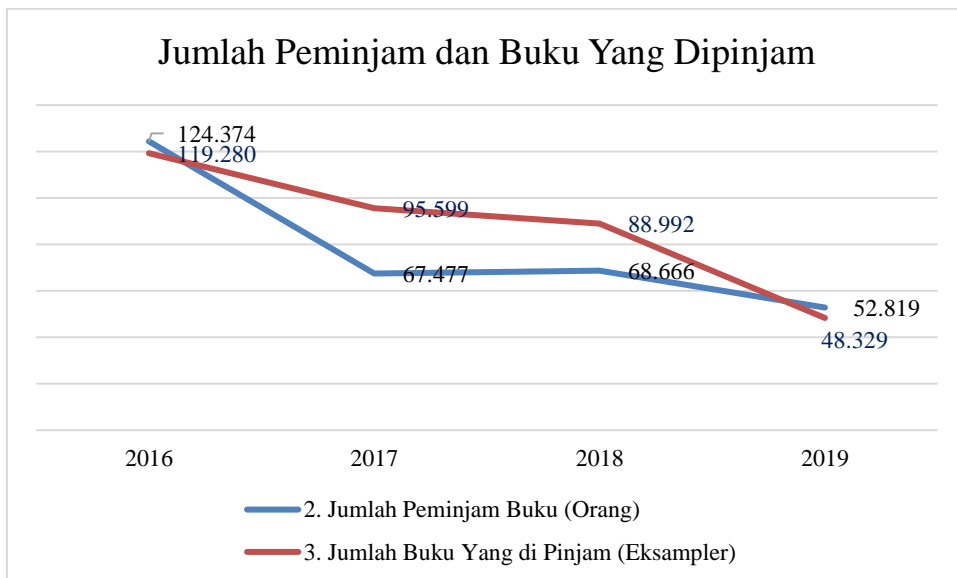


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3. Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	0,36	0,40	0,45	0,45	0,45	
4. Jumlah Koleksi Judul Buku Elektronik Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	15624,00	16076,00	16076,00	16331,00	16331,00	Judul Buku
5. Jumlah Buku Elektronik Yang Tersedia	131896,00	135101,00	135101,00	101990,00	101990,00	Eksemplar
Kearsipan						
1. Pengelolaan arsip secara baku	100,00	107,89	105,26	39,47	39,47	%
- Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	41,00	41,00	40,00	15,00	15,00	SKPD
2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	9,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Kegiatan
3. Jumlah Arsiparis	26,00	23,00	23,00	18,00	17,00	Orang
4. Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	20,00	n/a	n/a	n/a	n/a	Berkas

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



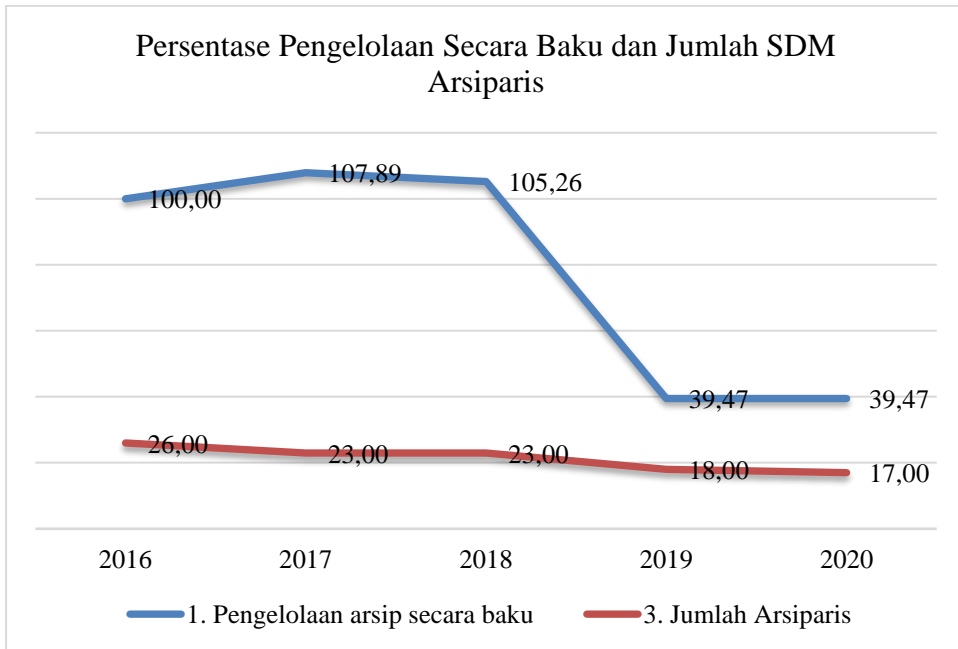
Gambar 146. Grafik Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Lokasi



Gambar 147. Grafik Jumlah Peminjam dan Buku Yang Dipinjam



Gambar 148. Grafik Jumlah Koleksi Judul Buku dan Ketersediaan Buku



Gambar 149. Grafik Persentase Pengelolaan Secara Baku dan Jumlah SDM Arsiparis



SATU DATA
KALIMANTAN-
TIMUR

DINAS SOSIAL



Profil Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak dibentuknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sosial yang ada di daerah. Dalam perjalanannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dasar hukum yaitu:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.
2. Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 75 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.



9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala UPTD Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi "TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL". Dan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas /sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan ketahanan sosial
- 2) Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.



Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Meningkatkan potensi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 3) Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Prov. Kaltim maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 3) Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok masyarakat dan dunia usaha
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di Prov. Kalimantan Timur maka disusunla suatu kebijakan yang terdiri dari :



- 1) Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya
- 2) Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 3) Mengembangkan dan menyetarakan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penanggulangan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga dalam penanggulangan bencana
- 6) Perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan mengembangkan komitmen dan aksi masyarakat sebagai pelaku usaha kesejahteraan sosial.
- 7) Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pemeriksaan secara berkala, monitoring dan evaluasi serta reviu.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 44 yakni terkait data jumlah penduduk yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Tabel 44. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah PMKS						
1. Jumlah PMKS	247.167	243.459	n/a	251.234	251.234	Orang
2. PMKS Yang Ditangani	26	26	n/a	26	26	JENIS
3. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	%
4. PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	78690,00	76000,00	78387,00	78387,00	81247,00	Orang
5. PMKS Yang Diberikan Bantuan	43018,00	75696,00	n/a	1052,00	1134,00	Orang

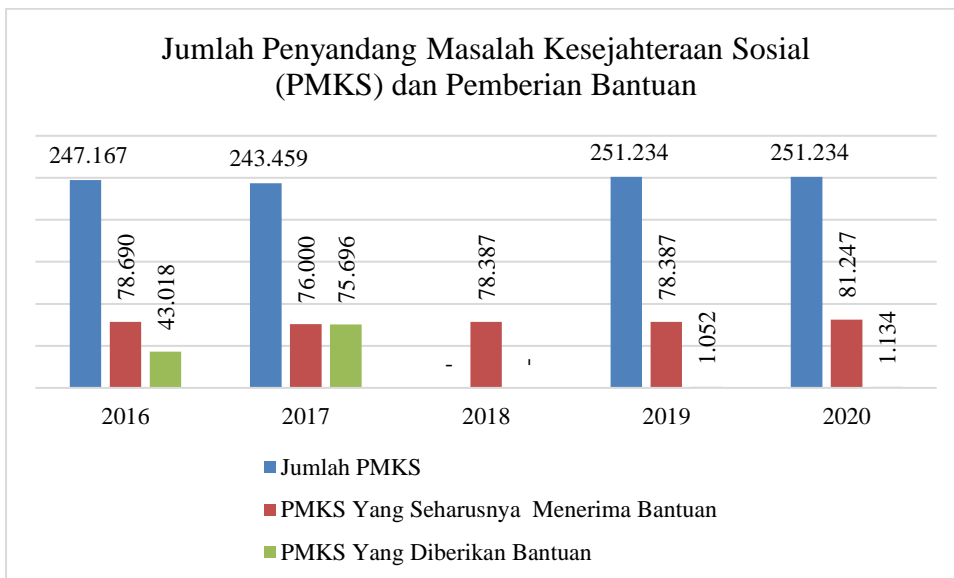


6. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	54,67	99,60	0,00	1,34	1,40	%
7. Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	51,00	n/a	n/a	n/a	n/a	%
1). Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	n/a	46510,00	n/a	46510,00	46510,00	KK
2). Jumlah Keluarga yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	28539,00	38187,00	n/a	100,00	100,00	KK
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial						
1. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	219.140	218.360	215.084	191.214	270.411	Orang
1). Anak Jalanan	1.022	1.007	992	517	517	Orang
2). Pengemis dan Gelandangan	735	724	713	-	289	Orang
4). Anak Balita Terlantar	2.562	2.529	2.491	2.529	2.529	Orang
5). Anak Terlantar	7.510	6.644	6.544	6.644	6.644	Orang
6). Korban Tindak kekerasan	729	170	167	180	1.012	Orang
7). Pemulung	691	681	671	-	97	Orang
8). Wanita Rawan Sosial Ekonomi	798	786	774	160	160	Orang
9). Lanjut Usia Terlantar	4.380	3.968	3.908	3.968	3.968	Orang
10). Penyanggah Cacat/Disabilitas	5.647	7.744	7.628	7.893	7.893	Orang
11). Tuna Susila	2.084	1.208	1.190	-	-	Orang
12). Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	404	398	392	1.407	1.408	Orang
13). Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.981	847	834	909	909	Orang
14). Fakir Miskin	166.990	163.793	161.336	114.400	114.400	Orang
15). Keluarga Fakir Miskin	-	-	-	28.600	25.000	KK
16). Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	978	963	949	963	963	Orang
17). Komunitas Adat Terpencil	5.779	5.311	5.231	5.311	5.311	Orang
18). Korban Bencana Alam Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	12.677	12.487	12.300	11.518	60.000	Orang
19). Korban Bencana Sosial Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	1.971	4.443	4.376	1.518	35.000	Orang
20). Pekerja Migran Bermasalah Sosial	596	626	617	626	626	Orang
21). Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.101	3.533	3.480	3.680	3.680	Orang
2. Jumlah Pantis Sosial	7	5	5	5	5	Unit
1). Pantis Sosial Asuhan Anak	2	2	2	2	2	Unit
2). Pantis Sosial Bina Remaja	1	1	1	1	1	Unit
3). Pantis Sosial Tresna Wirda	3	1	1	1	1	Unit
4). Pantis Sosial Karya Wanita	1	1	1	1	1	Unit
5). Sarana Rehabilitasi Sosial	5	5	5	5	5	Unit
3. Pantis Asuhan Menurut Status	124	125	125	125	125	Unit
1). Pemerintah	5	5	5	5	5	Unit
2). Non Pemerintah	119	120	120	120	120	Unit
4. Jumlah Anak yang diasuh	7.256	5.469	5.469	5.489	5.489	Orang
1). Pemerintah	160	160	160	180	180	Orang
2). Non Pemerintah	7.096	5.309	5.309	5.309	5.309	Orang
5. Pantis Werdha Menurut Status	3	4	4	3	9	Unit

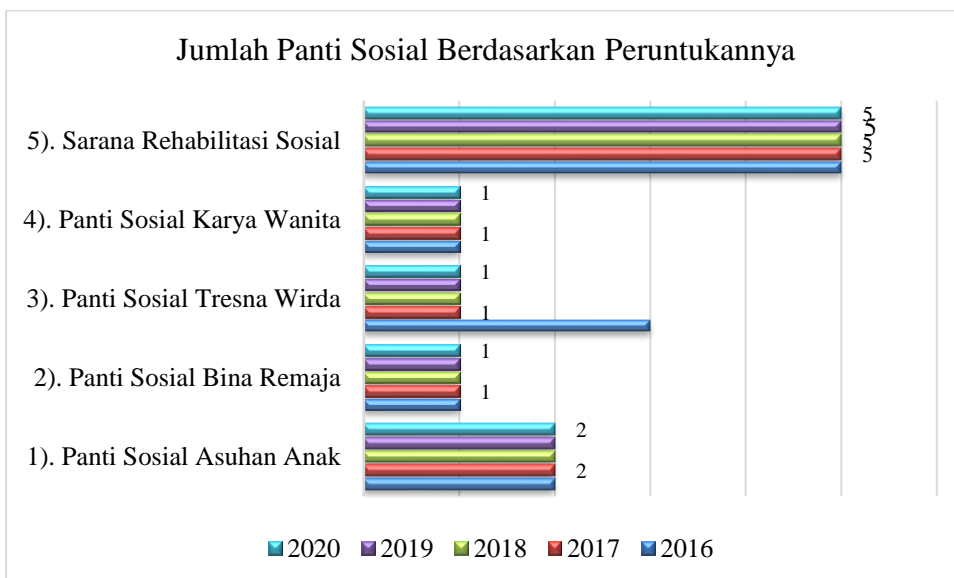


1. Pemerintah	2	2	2	1	1	Unit
2. Subsidi	-	-	-	-	-	Unit
3. Swasta	1	2	2	2	8	Unit
6. Jumlah Penghuni Panti Werda	210	210	210	210	210	Orang
1. Pemerintah	110	110	110	110	110	Orang
2. Subsidi	-	-	-	-	-	Orang
3. Swasta	100	100	100	100	100	Orang
7. Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang menerima bimbingan mental, pelatihan keterampilan, UEP melalui KUBE	155	180	120	170	20	KUBE
8. Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Yang Mendapat Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KK
9. Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat Bantuan Sosial	1971,00	1380,00	1010,00	1052,00	1052,00	KK
10. Jumlah Anak Terlantar Yang mendapatkan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	420,00	550,00	n/a	200,00	200,00	Anak
11. Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin Yang Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan	20,33	37880,00	n/a	65751,00	66750,00	RTSM
12. Jumlah Anak Balita Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	400,00	200,00	1010,00	0,00	0,00	Anak
13. Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan sosial	350	840	315	270	320	Orang
14. Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatkan bantuan sosial	1.940	246	385	330	215	Orang
15. Jumlah Warga KAT yang diberdayakan melalui pemukiman	250	57	162	194	2	MCK
16. Proporsi Anak Putus Sekolah Yang Berusaha Sendiri	20	20	20	20	-	%
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)						
1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	40	40	40	45	45	Orang
2. Taruna Siaga Bencana (Tagana)	668	687	660	783	783	Orang
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	741	217	12	12	12	Unit
4. Karang Taruna	55	53	55	55	55	Kelompok
5. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	9	10	10	20	20	Kelompok
6. Keluarga Pioner	50	50	50	50	50	Keluarga
7. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	10	38	10	20	20	Orang
8. Penyuluh Sosial	2	2	2	2	2	Orang
1). Penyuluh Sosial Fungsional	2	2	2	2	2	Orang
2). Penyuluh Sosial Masyarakat	-	-	-	-	2	Orang
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	103	103	103	103	103	Orang
10. Dunia Usaha	39	1	1	1	1	Organisasi

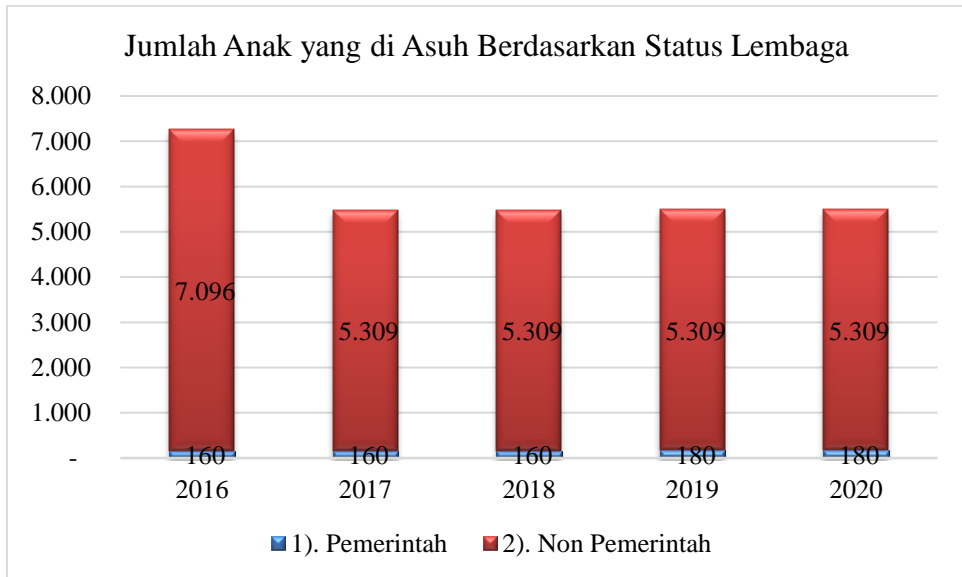
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



Gambar 150. Grafik Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberian Bantuan



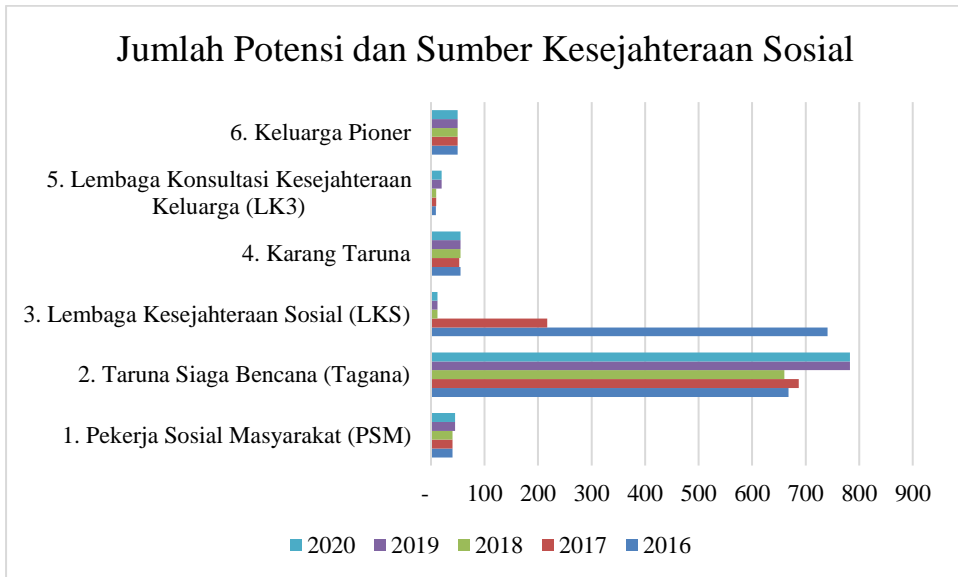
Gambar 151. Grafik Jumlah Panti Sosial Berdasarkan Peruntukannya



Gambar 152. Grafik Jumlah Anak Yang di Asuh berdasarkan Status Lembaga



Gambar 153. Grafik Jumlah Orang Penerima bantuan Sosial Berdasarkan Status Fisik/Usia



Gambar 154. Grafik Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Profil Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 58 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini adalah tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berfungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan tenaga kerja;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan kerja;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;



- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menerapkan Tata kerja:

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- d. Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- e. Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya



Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 23 yakni terkait data jumlah Ketenagakerjaan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

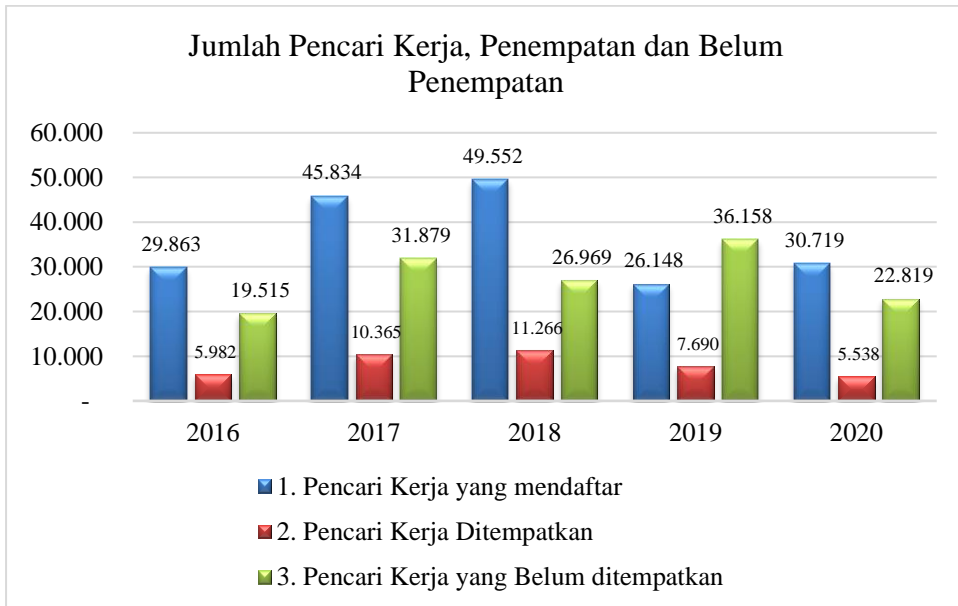
Tabel 45. Data Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Ketenagakerjaan						
1. Pencari Kerja yang mendaftar	29.863	45.834	49.552	26.148	30.719	Orang
2. Pencari Kerja Ditempatkan	5.982	10.365	11.266	7.690	5.538	Orang
1). Persentase Pencari Kerja Ditempatkan	20,03	22,61	22,74	29,41	18,03	%
3. Pencari Kerja yang Belum ditempatkan	19.515	31.879	26.969	36.158	22.819	Orang
1). Laki – Laki	13.396	22.133	19.022	26.258	15.658	Orang
2). Perempuan	6.119	10.746	7.947	9.900	7.161	Orang
4. Jumlah Perusahaan Terdaftar	6.485	6.144	6.292	6.292	8.074	Perusahaan
5. PHK						
1). Kasus PHK	510	525	520	173	28	Kasus
2). Orang Terkena PHK	3.605	2.264	2.269	1.702	181	Orang
6. Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota	2.161.253	2.339.556	2.543.331	2.747.561	0,00	Rp
7. Upah Minimum Provinsi	2.161.253	2.339.556	2.543.331	2.747.561	2.981.378	Rp
8. Rata-Rata Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota	2.161.253	2.339.556	2.543.331	2.747.561	2.981.378	Rp
9. Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS	6.485	6.144	6.292	13.445	13.337	Perusahaan
10. Angka Partisipasi Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	100,00	100,00	100,00	213,68	165,18	%
11. Jumlah Tenaga Kerja	438.621	465.895	478.172	478.172	130.462	Orang
12. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS	358.826	449.465	478.172	830.065	819.665	Orang
13. Angka Partisipasi Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	81,81	96,47	100,00	173,59	628,28	%
14. Jumlah Penduduk Miskin (yang dilatih) yang terserap di Dunia Kerja	20	-	-	n/a	-	Orang
15. Jumlah Perusahaan	5.625	6.144	6.292	6.292	8.074	Prsh
16. Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	5.625	6.144	6.292	6.292	8.074	Prsh
17. Produktivitas Tenaga Kerja	278	294	287	-	-	Rupiah



Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
18. Jumlah Pengangguran yang menjadi Wirausaha Baru	318	270	16	340	-	Orang
19. Jumlah tenaga terampil bidang Jasa Kontruksi yang terserap oleh pasar kerja	80	-	-	-	-	Orang
20. Jumlah Peserta Pelatihan BLK	n/a	240	896	896	672	Orang
21. Jumlah Peserta Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	n/a	152	594	896	403	Orang
22. Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	0,00	63,33	66,29	100,00	59,97	%
Pelayanan Ketenagakerjaan						
1. Pelayanan Ketenagakerjaan	4	4	4	4	4	Unit
2. Balai Pelatihan Kerja (BLK)	2	2	2	2	2	Unit
3. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	297	297	297	297	297	Unit
4. Perizinan Ketenagakerjaan	1	1	1	1	1	Unit
5. Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha	586	497	602	281	35	Kasus
6. Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	247	180	271	281	7	Kasus
7. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	42,15	36,22	45,02	100,00	20,00	%
8. Kasus Pemogokan Kerja/Unjuk Rasa	7	6	13	15	5	Kasus
9. Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berjalan	5.625	6.144	6.292	6.292	8.074	Prsh
10. Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten/Kota Pada Tahun Berjalan	5.625	6.144	6.292	6.292	8.074	Prsh
11. Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Transmigrasi						
1. Jumlah Transmigrasi	81.295	81.295	40	-	-	Kk
2. Transmigrasi Umum (TU)	71.145	71.145	40	-	-	Kk
3. Transmigrasi Swakarsa	10.150	10.150	-	-	-	Kk
4. Jumlah Kawasan Transmigrasi	6	6	8	-	-	Kw
5. Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi	203.393	330.369	330.369	-	-	Ha
6. Persentase Transmigrasi Swakarsa	12	12	-	n/a	n/a	%

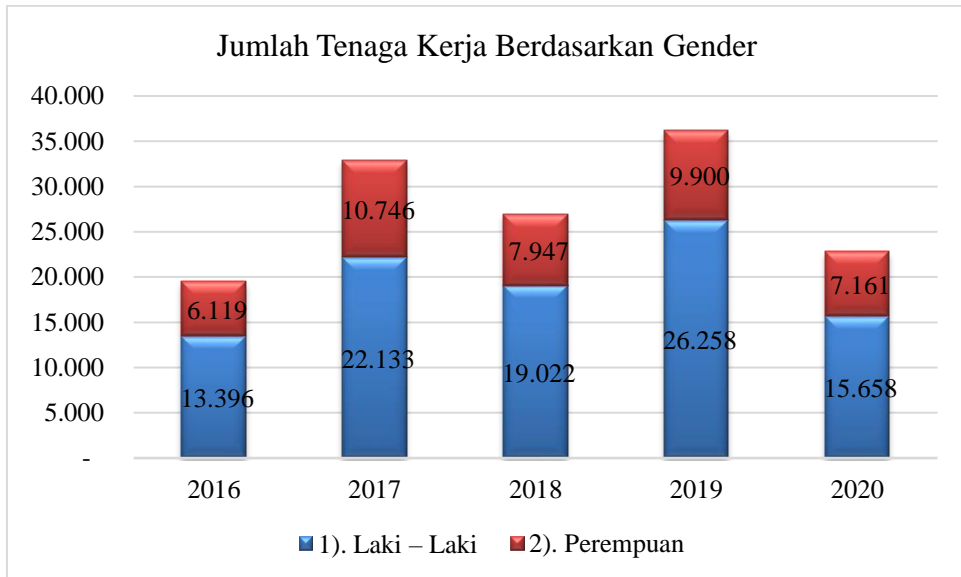
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



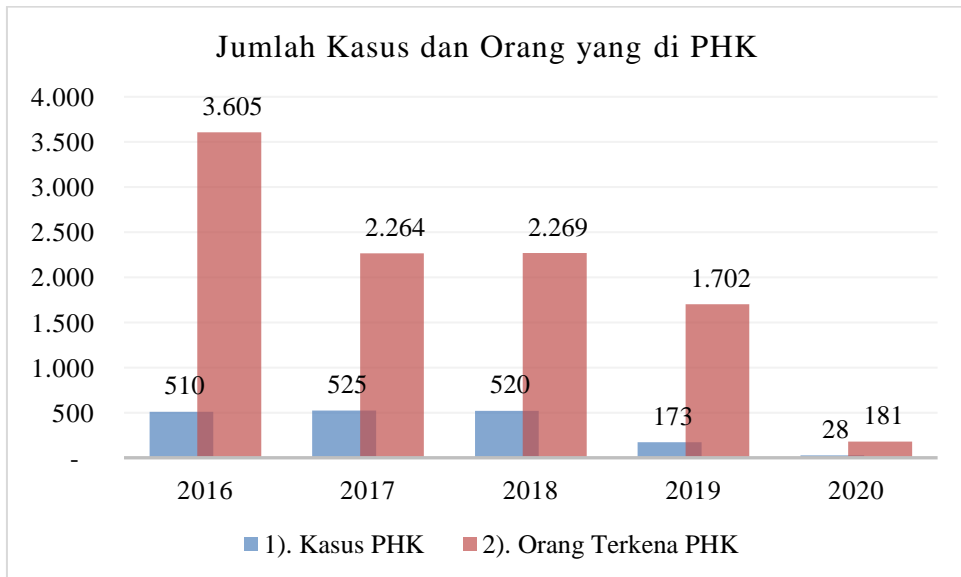
Gambar 155. Grafik Jumlah Pencari Kerja, Penempatan dan Belum Penempatan



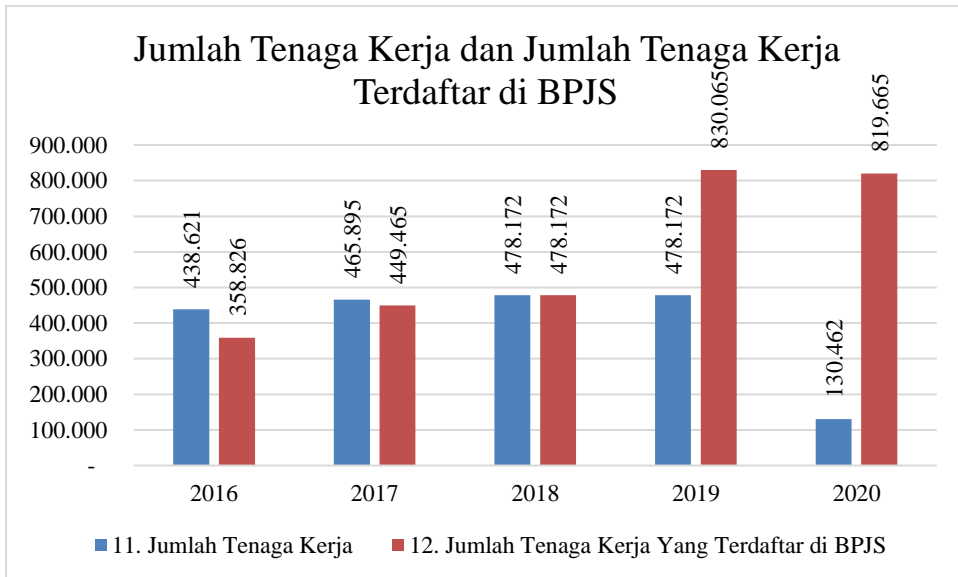
Gambar 156. Grafik Persentase Pencari Kerja Ditempatkan



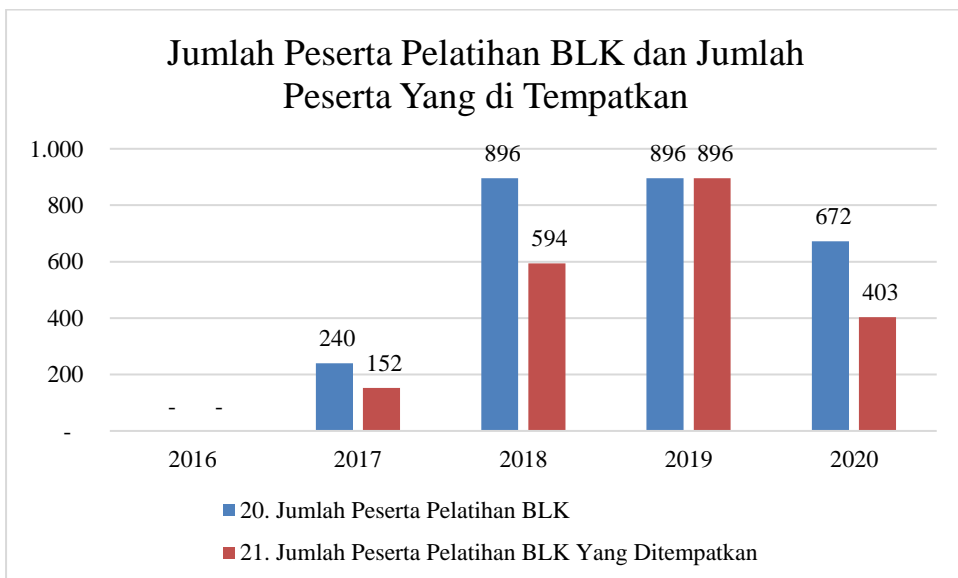
Gambar 157. Grafik Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Gender



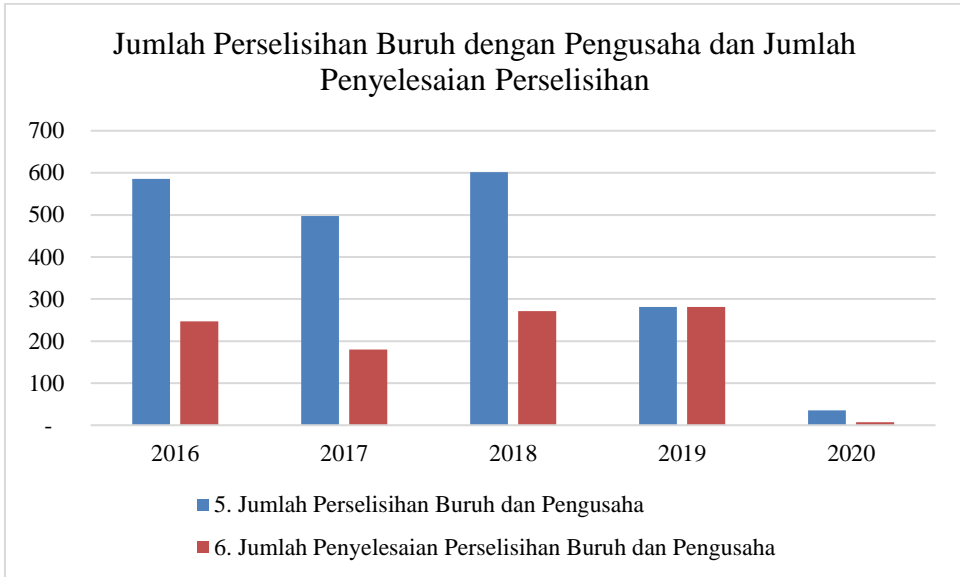
Gambar 158. Grafik Jumlah Kasus dan Orang yang di PHK



Gambar 159. Grafik Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar di BPJS



Gambar 160. Grafik Jumlah Peserta Pelatihan BLK dan Jumlah Peserta Yang di Tempatkan

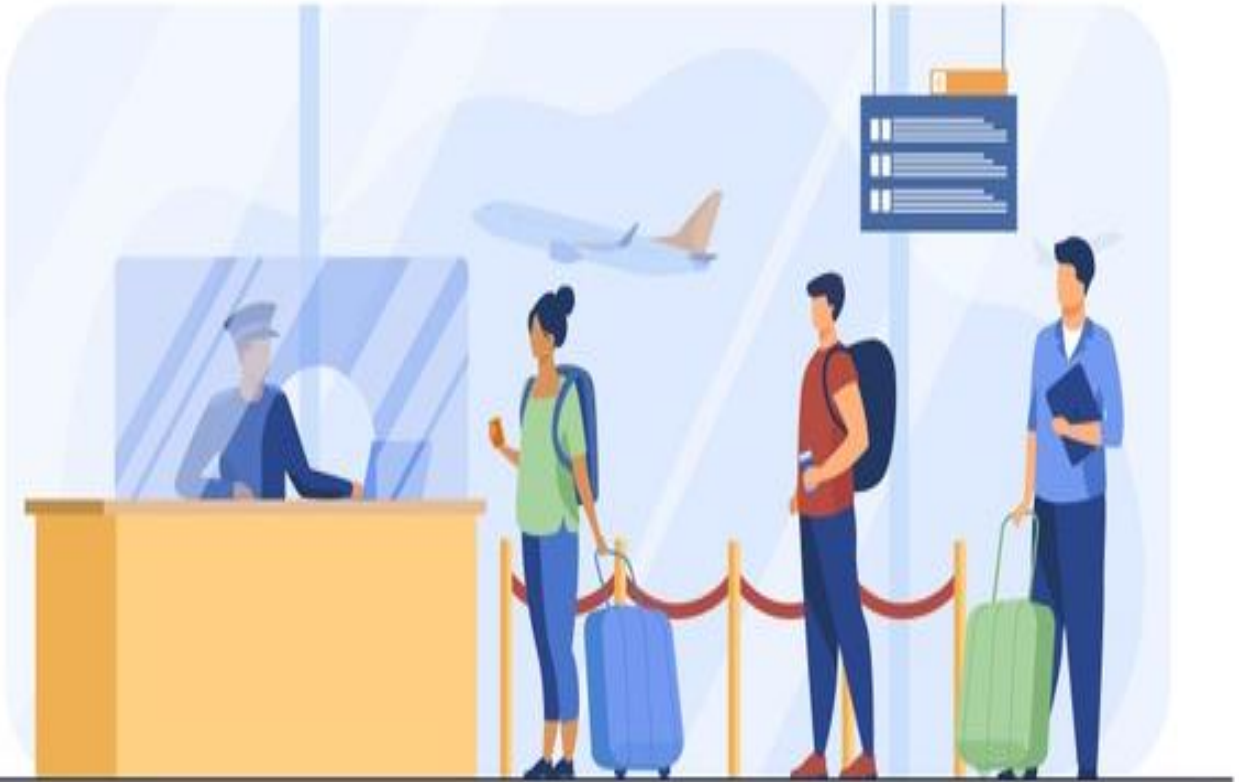


Gambar 161. Grafik Jumlah Perselisihan Buruh dengan Pengusaha dan Jumlah Penyelesaian Perselisihan



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS PARIWISATA





Profil Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, yang merupakan lini terdepan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan potensi pariwisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata. Dalam melaksanakan melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata, Bidang Pengembangan Karya Seni Budaya.
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Kesekretariatan, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata, dan Pengembangan Karya Seni Budaya.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata, dan Pengembangan Karya Seni Budaya.
4. Pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kalimantan Timur dan Pengembangan Daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing Pariwisata.
5. Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata, dan Pengembangan Karya Seni Budaya.
6. Pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata.

7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata.
8. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas di lingkungan Dinas Pariwisata.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada Gubernur.

Dan Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
- 2) Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja.
- 3) Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas.
- 5) Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
- 6) Menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.
- 7) Melaksanakan urusan Desentralisasi serta Dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Pariwisata
- 8) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pariwisata berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- 9) Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Pariwisata dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta



pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program.

- 10) Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
- 11) Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
- 12) Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Pariwisata di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat , Bidang-bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Visi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Terwujudnya Kalimantan menjadi kota tujuan wisata unggulan berbasis Ekonomi Kreatif”, kemudian Misi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata di Kalimantan Timur
2. Meningkatkan Kualitas Pemasaran Kepariwisataaan
3. Meningkatkan Pembinaan pengembangan ekonomi Kreatif di Provinsi Kalimantan Timur
4. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Pelayanan dan Kemitraan Kepariwisataaan
5. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya dan Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataaan.



Jumlah Wisatawan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 46 yakni terkait data jumlah Kegiatan Pariwisata yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

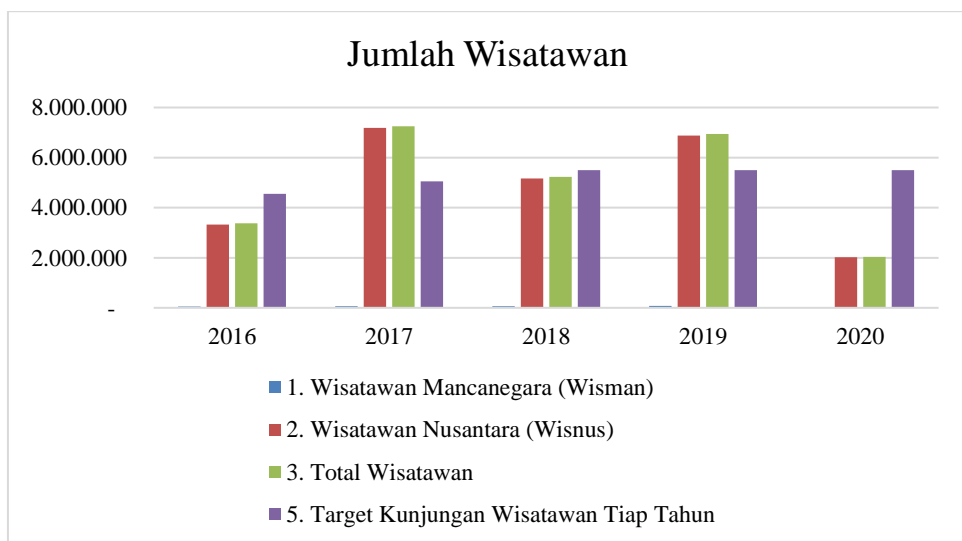
Tabel 46. Data Jumlah Kegiatan Pariwisata Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Wisatawan						
1. Wisatawan Mancanegara (Wisman)	45.211	58.869	61.398	72.301	15.639	Orang
2. Wisatawan Nusantara (Wisnus)	3.324.294	7.185.790	5.165.730	6.875.817	2.014.607	Orang
3. Total Wisatawan	3.369.505	7.244.659	5.227.128	6.948.118	2.030.246	Orang
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Derawan dan sekitarnya	262.322	11.923	n/a	n/a	n/a	Orang
5. Target Kunjungan Wisatawan Tiap Tahun	4.550.000	5.055.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	Orang
6. Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan	0	0	0	0	0	%
Jumlah Hotel						
Jumlah Hotel	695	942	485	492	0	Unit
1). Hotel Bintang Lima						
a. Jumlah Hotel	5	5	5	5	n/a	Unit
b. Jumlah Kamar	1.040	989	1.038	1.038	n/a	Unit
c. Jumlah Tempat Tidur	1.563	1.676	461	461	n/a	Unit
2). Hotel Bintang empat						
a. Jumlah Hotel	11	13	16	16	n/a	Unit
b. Jumlah Kamar	1.628	5.803	2.646	2.646	n/a	Unit
c. Jumlah Tempat Tidur	1.940	5.258	2.764	2.764	n/a	Unit
3). Hotel Bintang Tiga						
a. Jumlah Hotel	20	25	26	26	n/a	Unit
b. Jumlah Kamar	2.214	2.522	2.712	2.712	n/a	Unit
c. Jumlah Tempat Tidur	1.445	2.696	2.577	2.577	n/a	Unit
4). Hotel Bintang Dua						
a. Jumlah Hotel	12	12	16	16	n/a	Unit
b. Jumlah Kamar	698	844	1.177	1.177	n/a	Unit
c. Jumlah Tempat Tidur	970	1.372	613	613	n/a	Unit

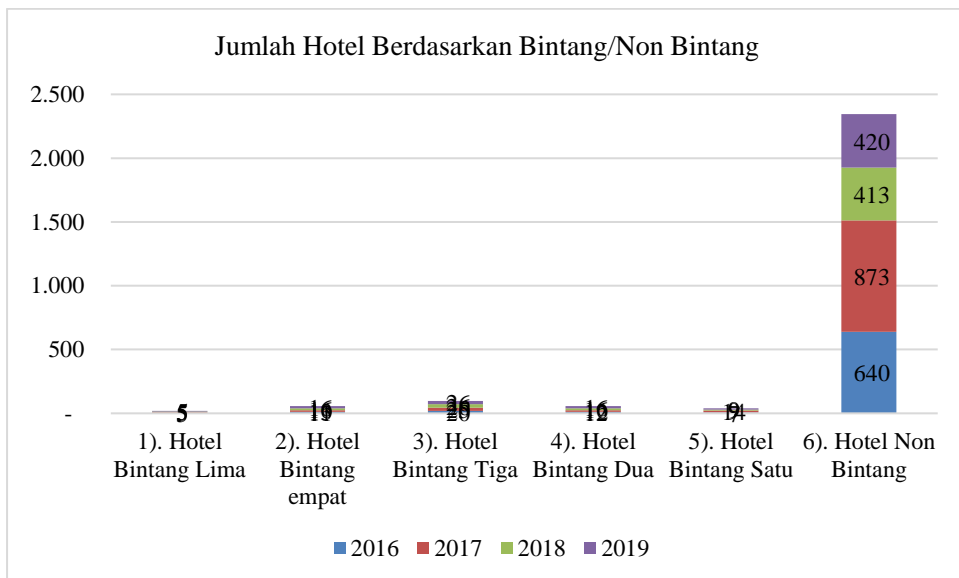


Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5). Hotel Bintang Satu						
a. Jumlah Hotel	7	14	9	9	n/a	Unit
b. Jumlah Kamar	373	1.866	627	627	n/a	Unit
c. Jumlah Tempat Tidur	539	535	461	461	n/a	Unit
6). Hotel Non Bintang						
a. Jumlah Hotel	640	873	413	420	n/a	Unit
b. Jumlah Kamar	1.245	9.918	5.050	5.050	n/a	Unit
c. Jumlah Tempat Tidur	1.425	11.540	1.449	1.449	n/a	Unit
Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan						
Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan	1.620	2.088	2.085	2.098	2098	Buah
Jumlah Perusahaan /Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata						
Jumlah Perusahaan/Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata	585	1.875	457	457	n/a	Unit
Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang						
Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang	2.752	15.874	6.250	-	0	Orang
1). Laki-Laki	1.560	4.762	4.637	n/a	n/a	Orang
2). Perempuan	1.192	11.112	1.613	n/a	n/a	Orang

Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



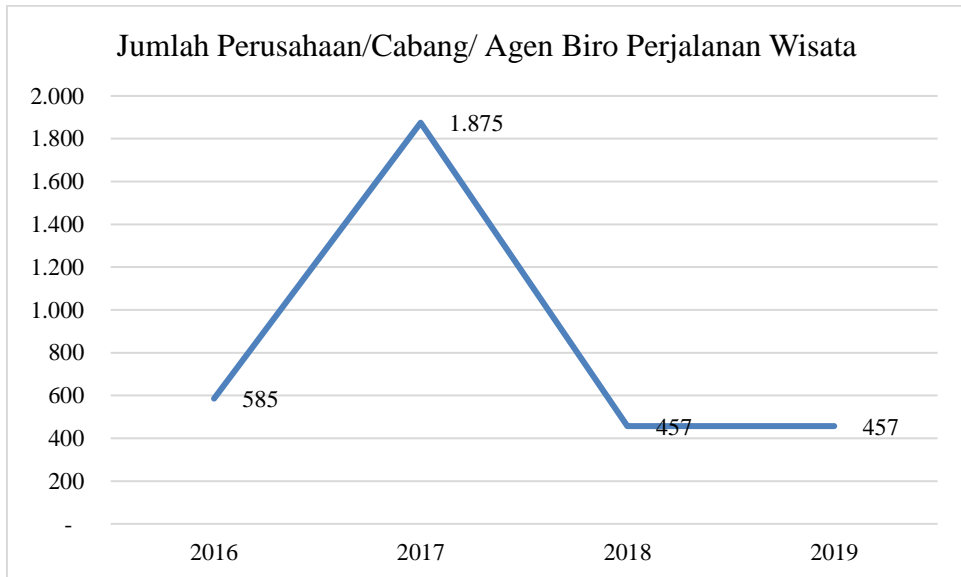
Gambar 162. Grafik Jumlah Wisatawan



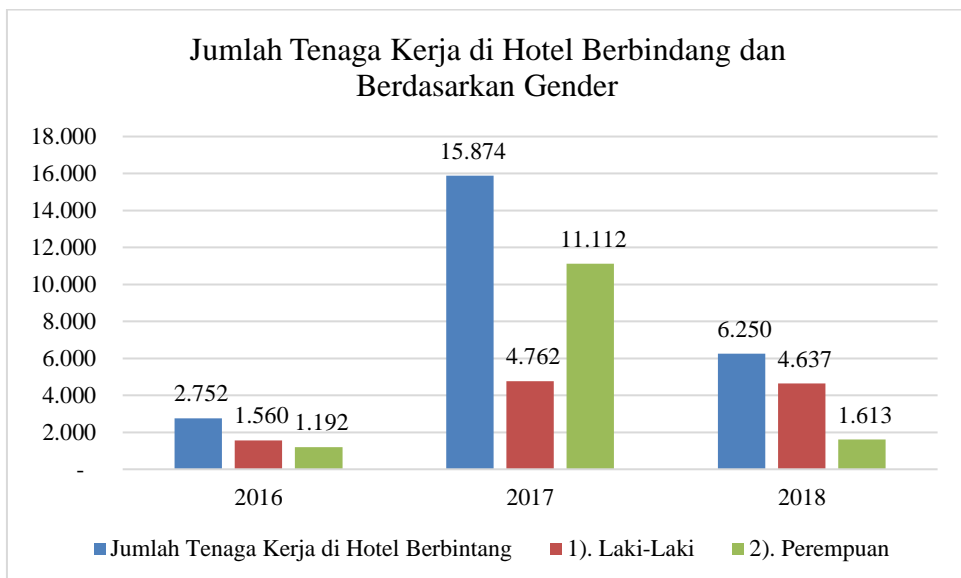
Gambar 163. Grafik Jumlah Hotel Berdasarkan Bintang/Non Bintang



Gambar 164. Grafik Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan



Gambar 165. Grafik Jumlah Perusahaan/Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata



Gambar 166. Grafik Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang dan Berdasarkan Gender



SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA





Profil Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai Tugas untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Fungsi sebagai berikut:



- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ;
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah ;
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah ;
- 4) Pelaksanaan Kebijakan Pelindungan Masyarakat ;
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya ;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perkada ;
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasil dalam jangka waktu 5 tahun. Oleh karena itu Tujuan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah Terwujudnya Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sasaran yaitu suatu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa Hasil pembangunan Daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Jadi Sasaran yang diinginkan selama 5 tahun atau jangka menengah Satuan Polsisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

- 1) Penegakan Produk Hukum Daerah ;
- 2) Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- 3) Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat ;
- 4) Penanganan Kebakaran.



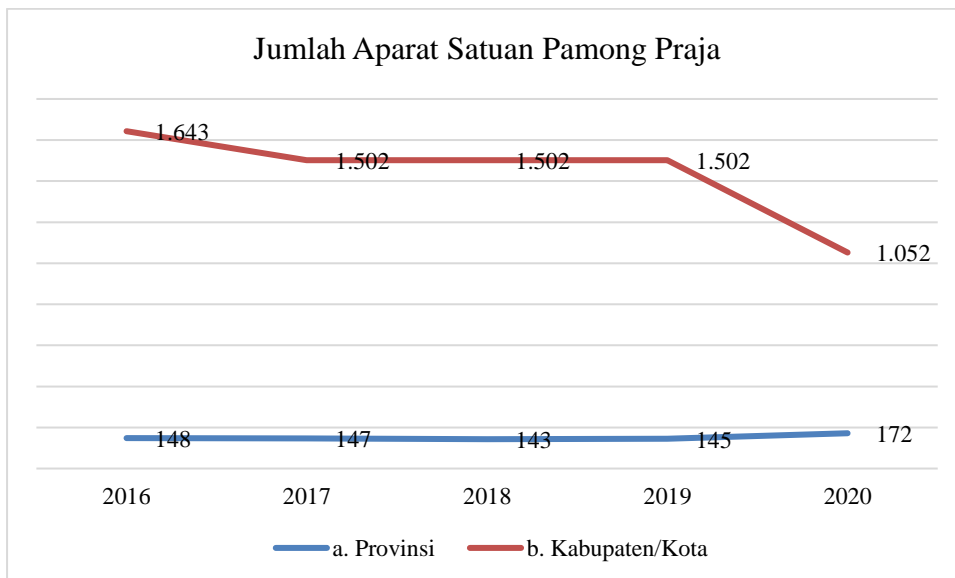
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah

Berikut ini adalah penyajian data melalui tabel 23 yakni terkait data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

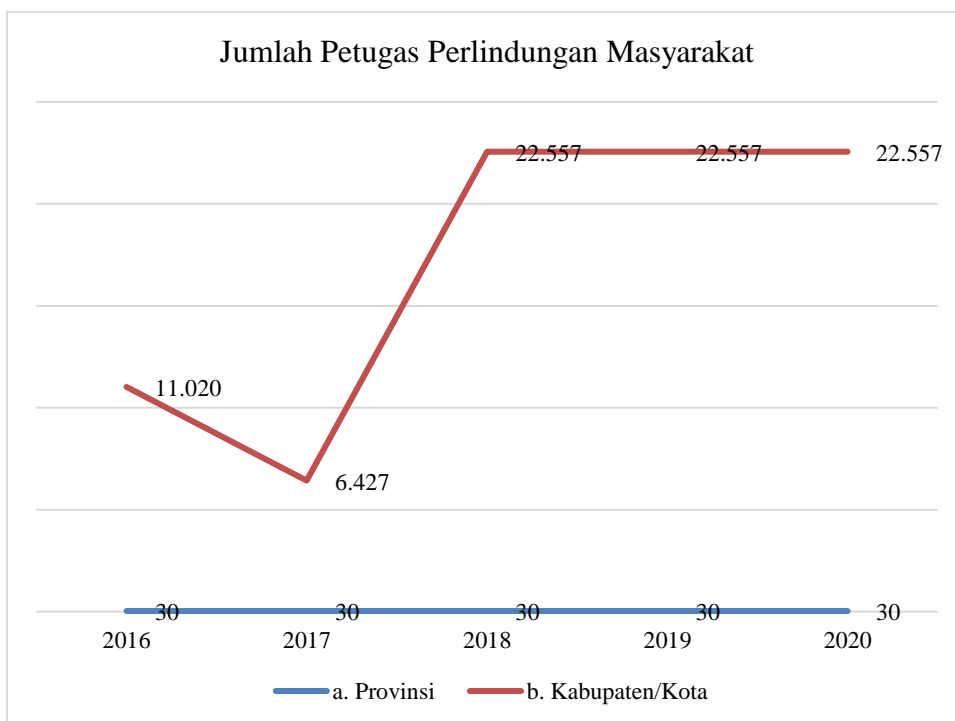
Tabel 47. Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Deskripsi Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Keamanan, Ketertiban Masyarakat						
1. Aparat dan Sarana Keamanan	12.875	8.106	23.026	23.028	23.811	Orang
1). Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja	1.825	1.649	439	441	1.224	orang
a. Provinsi	148	147	143	145	172	Orang
b. Kabupaten/Kota	1.643	1.502	1.502	1.502	1.052	Orang
2). Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	11.050	6.457	22.587	22.587	22.587	Orang
a. Provinsi	30	30	30	30	30	Orang
b. Kabupaten/Kota	11.020	6.427	22.557	22.557	22.557	Orang
3). Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	63	211	2.793	2.793	2.793	kali
4). Jumlah Pos Siskamling	2.242	3.111	1.927	1.927	1.927	Unit
- Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa	2	3	2	2	2	
2. Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	852	5.672	138	138	138	Kasus
3. Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	130	5.958	365	365	365	Kasus
4. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	15,26	105,04	264,49	264,49	264,49	%
5. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	4,69	4,2	4,12	4,04	2,79	
Penegakkan Perda						
1. Jumlah penyelesaian penegakkan perda	4	7	4	7	4	Kasus
2. Jumlah Pelanggaran Perda	5	7	4	7	4	Perda
- Jumlah Kasus	n/a	n/a	4	7	4	Kasus
3. Rasio Penegakkan Perda	80	100	100	100	100	%

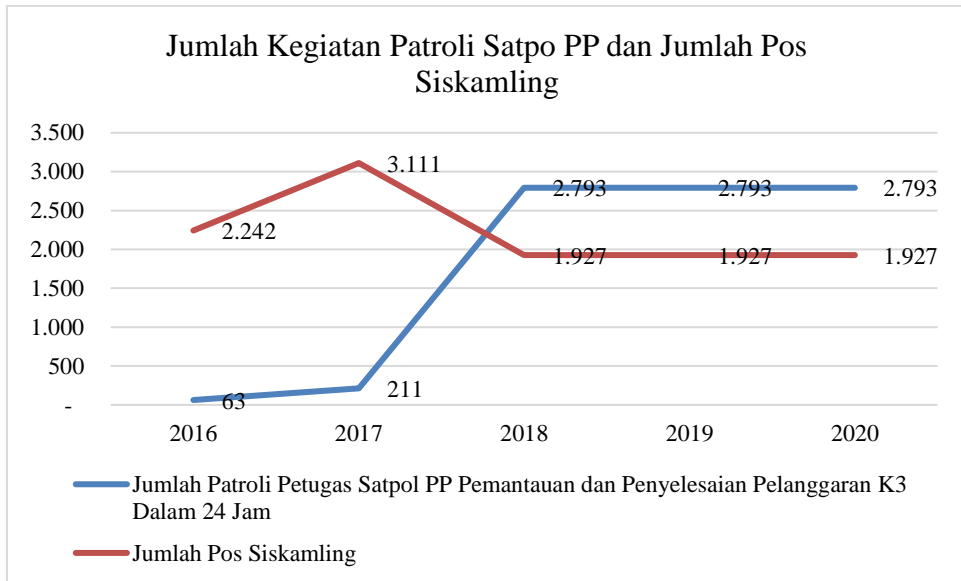
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id>



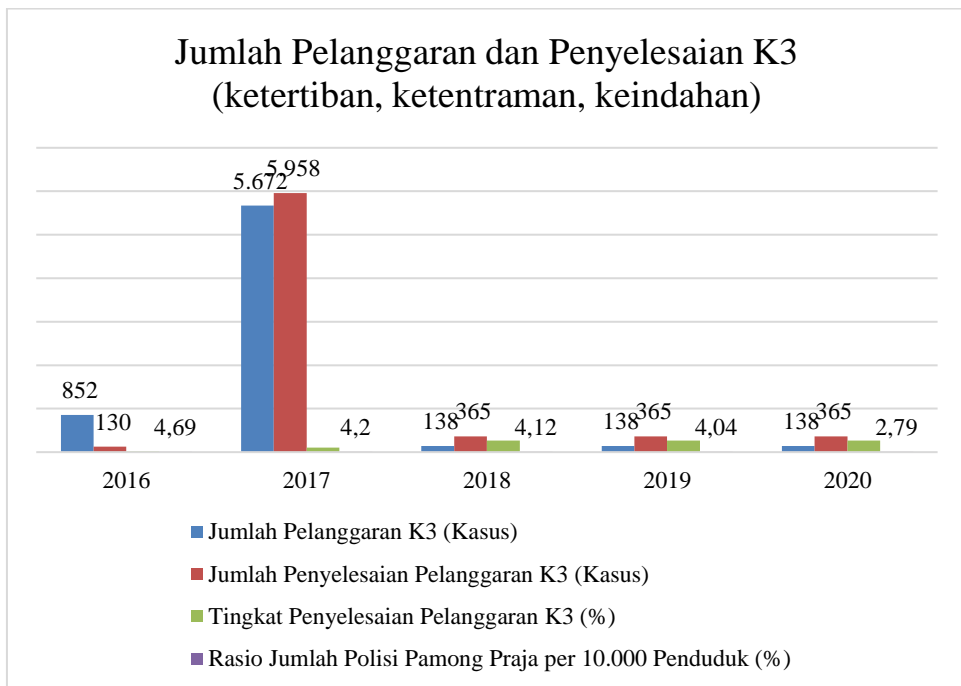
Gambar 167. Grafik Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja



Gambar 168. Grafik Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat



Gambar 169. Grafik Jumlah Kegiatan Patroli Satpo PP dan Jumlah Pos Siskamling



Gambar 170. Grafik Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

DAFTAR REFERENSI

Sistem Informasi Data Kalimantan Timur, Unit Pengentri

<https://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/skpdentri>

Data Zona Integritas Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-zona-integritas-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/74d451b3-268f-409d-9a9a-af6b287d0ace>

Data Aparatur Sipil Negara Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-aparatur-sipil-negara-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/612b4f23-0177-4520-b822-2f11861bca85>

Data Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-

2020 <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-jumlah-kegiatan-pembinaan-politik-daerah-provinsi-kaltim-tahun2016-2020/resource/c2da31d0-5d29-4247-9c32-fe77861d2f37>

Data Bencana Alam Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-bencana-alam-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/767fa95a-7f3d-4d57-b4a6-3993b24023d0>

Data Pajak Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-pajak-daerah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/5ec91947-a892-4682-9e98-2fd747746211>

Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-belanja-dan-pembiayaan-daerah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/26d14af2-58d2-49cf-bba8-728b773f4d2c>



Data Luas Wilayah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-luas-wilayah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/cf91d9a7-cb60-48d5-a97c-be02113834ed>

Data Jumlah Produk Hukum Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-jumlah-produk-hukum-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/b7c6f13f-6394-4873-9d01-73944f910bba>

Data Organisasi Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-organisasi-daerah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/d73e4a13-e4a0-461f-a0ee-aea6b029f263>

Data Jumlah Perjanjian Kerjasama Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-jumlah-perjanjian-kerjasama-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/ea51e0d3-ef81-45df-84fc-c0baf877cb4e>

Data Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-badan-usaha-milik-daerah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/1dc7ab6a-b7dd-4bfc-8be8-6120b0b9604d>

Data Pertambangan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-pertambangan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/b5521f92-fa17-4610-8d94-7bfbcb28d9f0d>

Data Pelestarian Lingkungan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-pelestarian-lingkungan-hutan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/78c0b2ee-4a0f-4373-9cc5-c1b047f597a3>

Data Jumlah Penduduk Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-jumlah-penduduk-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/8545613c-ec49-441f-aa75-1d6fb966bddd>

Data Penilaian Pemeringkatan e-Government Kabupaten Kota Provinsi Kaltim

Tahun 2015-2019 <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-penilaian-pemeringkatan-e-government-kabupaten-kota-provinsi-kaltim-tahun-2015-2019/resource/a6a317d3-b640-4973-85d5-f6e0166a0636>

Data Kesehatan Masyarakat Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-kesehatan-masyarakat-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/9bd5763e-50ad-41c5-8fad-59fddc5f6039>

Data Target Daerah Produksi Ikan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-target-daerah-produksi-ikan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020-csv/resource/c2a971a4-28e7-45f6-9d48-b004571fc98d>

Data Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-lingkungan-hidup-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/3bde4780-39e3-4c96-8ca9-82087f89b862>

Data Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-panjang-jalan-berdasarkan-kondisi-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/00998f5a-4a53-42d0-9b5a-84b5422317f8>

Data Ketersediaan Pangan Per Kapita Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-ketersediaan-pangan-per>



kapita-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020-csv/resource/9f69d832-ecbc-4f66-a32a-4e40be625898

Data Jumlah Wisatawan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-jumlah-wisatawan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/a964b744-81e9-4034-a615-f193f423bb63>

Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PKK Provinsi Kaltim Tahun

2016-2020 <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-dan-pkk-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/6c3e93e4-e3ba-403a-84a5-4312a6925c7a>

Data Penanaman Modal Asing Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-penanaman-modal-asing-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/a4099a4b-e592-4c34-8fc5-a93d7a03da6e>

Data Transportasi Darat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-perhubungan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/89e2ef94-d528-4ad7-b474-013fec270211>

Data Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-pemuda-dan-olahraga-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/8406456b-a1fd-4079-9618-cb917d707b2d>

Data Jumlah Siswa Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-jumlah-siswa-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/e548ed06-7420-4ea9-8461-be1ca0f2ab63>

Data Peternakan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-peternakan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/46cbefc8-b4dc-4abe-a730-0cf8b7436fc0>

Data Produk Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-produk-perkebunan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/8ddb7976-913a-4109-916f-d16433d9439f>

Data Koperasi Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-koperasi-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/9ba314fc-e5c6-4284-a788-e2e6990e9660>

Data Jumlah Perpustakaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-jumlah-perpustakaan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/a4391195-3332-4c1c-a920-eabe63985b7e>

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kaltim Tahun

2016-2020 <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-pmks-dan-sarana-kesejahteraan-sosial-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/f19f43ff-5873-40c2-80e9-be4243bbeed5>

Data Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-ketenagakerjaan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/4a818a7d-c844-495e-ba3a-4a75019e0793>

Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020/resource/800d3b1a-3b23-4a30-a229-0e900e2e3cf6>